BI INSTITUTE

Seri Buku Sejarah & Heritage

DARI KOTA TRADISIONAL MENUJU MODERN

BI INSTITUTE

GELIAT KOTA BANDUNG

DARI KOTA TRADISIONAL MENUJU MODERN

Geliat Kota Bandung
Dari Kota Tradisional Menuju Modern

Tim Penyusun:
Eko Yulianto, Wahyu Dewati, Reiza D. Dienaputra, Yuswadi Saliya,
Mirza Ardi Wibawa, Allan Akbar

Editor:
Andi Achdian

Kontributor:
Triatmo Doriyanto, Kahfi Zulkarnaen, Widodo Cahyono, Yiyok T. Herlambang, Haslim Hasanuddin, Ginisita Dofany, Sintya Aprina

Cetakan pertama, November 2020
xvii + 243 hlm, 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-979-8086-60-1

Bank Indonesia Institute
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Indonesia
http://www.bi.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

DARI KOTA TRADISIONAL MENUJU MODERN

TIM PENYUSUN:

Eko Yulianto, Wahyu Dewati, Reiza D. Dienaputra, Yuswadi Saliya,
Mirza Ardi Wibawa, Allan Akbar

EDITOR:

Andi Achdian

BANK INDONESIA INSTITUTE
2020

SAMBUTAN
GUBERNUR BANK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Isu mengenai dinamika perkotaan menjadi penting bagi pemerintah Indonesia pada dekade kedua abad ke-21. Pertumbuhan ekonomi mendorong kota-kota di Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur guna mengikuti arus global sehingga mampu bersaing dengan kota-kota besar lain di dunia. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan suatu kota, turut pula membawa masalah-masalah khas perkotaan seperti kemacetan, pemukiman kumuh, polusi dan lain sebagainya. Pembangunan kota modern harus memiliki perencanaan yang matang, terukur dan berkelanjutan. Buku ini mengulas sejarah Kota Bandung yang sukses bertransformasi dari sebuah kota tradisional menjadi modern sebagai hasil dari suatu proses perencanaan kota yang baik.

Sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, penataan suatu kota menjadi hal yang sangat diperhatikan. Beberapa kriteria yang menjadi ukuran perencanaan kota antara lain dilihat dari aspek keamanan, kenyamanan, keberlanjutan dan aksesibilitas. Kota-kota kolonial yang tumbuh berkat perdagangan seperti Batavia, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar umumnya berada di pesisir dan memiliki akses ke pelabuhan. Dinamika perkotaan yang pesat pada kota-kota pelabuhan tersebut, ternyata membawa

dampak yang menyulitkan dalam penataan kota akibat dari keterbatasan dan alih fungsi lahan, serta pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Sementara itu, Kota Bandung sejak awal didirikannya telah memiliki *masterplan* yang menjadi pedoman dalam pengembangan dan penataan kota. Kota Bandung yang secara geografis terletak di pedalaman, lebih unggul dibandingkan kota-kota pelabuhan, karena memiliki benteng alam berupa pegunungan dengan kondisi iklim yang sejuk. Bahkan kota ini pernah diusulkan menjadi Ibu kota Hindia Belanda.

Ide pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung pada periode kolonial tidak hanya berhenti pada tahap wacana. Sejak tahun 1920an, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun Gouvernements Bedrijven (sekarang Gedung Sate) yang rencananya digunakan untuk kantor Gubernur Jenderal. Kota Bandung juga memiliki taman-taman yang ditata dengan baik, deretan gedung bergaya Barat dengan pesona alam yang mengitarinya. Namun, pemindahan ibu kota yang sedang berlangsung tersebut harus kandas oleh krisis dan resesi ekonomi dunia pada tahun 1930. Krisis tersebut menurunkan pendapatan pemerintah kolonial, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan. Terlepas Kota Bandung batal menjadi Ibu kota Hindia Belanda, prestasi sesungguhnya dari Kota Bandung adalah transformasi yang cepat dan signifikan dari masa ke masa.

Melalui buku berjudul "Geliat Kota Bandung: Dari Kota Tradisional Menuju Modern" ini, dijelaskan mengenai sejarah kota Bandung dari mulai pembentukan hingga dinamika kontemporer. Titik awal pembentukan Kota Bandung yang bermula sebagai Ibu kota Kabupaten Bandung dengan perangkat pemerintah tradisional warisan Mataram, bergerak pesat memasuki abad ke-20. Tahun 1906, Kota Bandung resmi menjadi *gemeente* atau setingkat Kotapraja yang memiliki otonomi khusus untuk mempercepat pembangunan. Pada masa inilah Bandung terkenal sebagai Paris van Java. Istilah tersebut merupakan ekspresi kekaguman pada wujud Kota Bandung yang sangat maju di zamannya. Aspek modernitas melalui sudut pandang waktu itu, telah dimiliki Kota Bandung baik dari sisi infrastruktur maupun manusianya.

Titik balik dinamika Kota Bandung terjadi setelah runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda oleh Tentara Pendudukan Jepang. Pada masa itu, Bandung

menjadi tempat pemerintahan darurat karena pusat pemerintahan di Batavia sudah dikuasai oleh tentara Jepang. Begitu juga aset-aset De Javasche Bank yang turut diungsikan ke Bandung untuk kemudian dikirim ke luar negeri. Pada akhirnya, pendudukan Jepang mengubah wajah Bandung yang kental dengan pengaruh Eropa menjadi pusat interniran Belanda. Setelah rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan Jepang, situasi Kota Bandung belum bisa stabil kembali. Perang mempertahankan kemerdekaan tetap berkecamuk baik di dalam maupun di luar kota dari Belanda yang ingin kembali menguasai Kota Bandung.

Kota Bandung baru berbenah setelah pada tahun 1955 menjadi tuan rumah bagi Konferensi Asia Afrika. Presiden Soekarno sendiri yang memastikan agar Kota Bandung sanggup menyelenggarakan acara tersebut. Gedung-gedung perhelatan diperbaiki, beberapa ruas jalan dihias, serta hotel tempat para tamu dan delegasi menginap dipercantik. Pada saat ini, usaha membangun Kota Bandung tidak hanya infrastruktur saja, melainkan juga memadukan potensi budaya lokal dengan kemajuan teknologi untuk bisa menjadi *Smart City*.

Kehadiran buku ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan ide *Smart City* melalui pembelajaran sejarah kotanya. Bank Indonesia bersama pemerintah turut mengawal perkembangan Kota Bandung melalui program-program yang dijalankan, antara lain pengembangan UMKM, pengendalian inflasi, pengembangan informasi data yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Bank Indonesia diharapkan mampu membangun Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat sebagai kawasan yang unggul, baik di tingkat nasional maupun global.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Maret 2020

Perry Warjiyo

SAMBUTAN
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Peran kota di era globalisasi dipandang tidak hanya sebagai entitas politik tempat menampung segala aktivitas, melainkan menjadi ***space of flows*** atau tempat mengalirnya arus modal, teknologi dan informasi yang saling terkoneksi satu sama lain. Konektivitas melalui jaringan tersebut menuntut suatu kota juga memiliki spesialisasi yang bisa menjadi daya tarik dan mampu dikompetisikan pada skala regional maupun global. Spesialisasi yang dimaksud bergantung pada karakteristik sosio-kultural serta sosio-ekonomi. Berdasarkan laporan City Competitive Index, pada tahun 2012 tercatat ada tiga kota besar di Indonesia yang berpotensi menjadi kota global. Kota tersebut yaitu Jakarta, Surabaya dan Bandung. Kota Jakarta dan Surabaya dianggap berpotensi menjadi kota global dengan kekuatan ekonominya yang mampu menarik bisnis ke kota tersebut. Sementara Kota Bandung dipilih karena turisme dan kekuatan ekonomi kreatif yang menopang ekonomi kota.

Pencitraan sebuah kota atau ***city branding*** menjadi penting di tengah arena persaingan kota-kota global. Beberapa kota di Indonesia memiliki ***tagline*** untuk mengenalkan kota tersebut, seperti Enjoy Jakarta, Colourful Medan, Stunning Bandung, dan lain sebagainya. ***Tagline*** yang awalnya

ditujukan untuk meningkatkan turisme itu, bisa juga menjadi sebuah strategi politik untuk mengangkat posisi tawar kota tersebut dengan kota-kota lainnya. Dalam buku "Geliat Kota Bandung: Dari Tradisional Menuju Modern" menggambarkan perkembangan Kota Bandung, yang salah satunya dianggap sebagai kota pariwisata dengan julukan Paris van Java. Di masa lalu, Kota Bandung yang berada di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah banyak menunjukkan kemajuan dilihat dari fisik maupun kemapanan pengelolaan kotanya, sehingga menjadikan kota yang terletak di bumi Priangan tersebut menjadi destinasi para turis domestik dan mancanegara.

Secara historis tercatat pesona Kota Bandung sebagai kota internasional bisa dibuktikan dengan diselenggarakannya berbagai *event* besar di kota ini, dari mulai acara "Bursa Tahunan" atau Jaarbeurs hingga Konferensi Asia Afrika. Dipilihnya Bandung sebagai kota Meeting Insentive Convention and Exibhition (MICE) kolonial adalah karena tersedianya berbagai macam fasilitas yang memadai, antara lain tempat penginapan, tempat hiburan, dan tentunya iklim pegunungan yang sejuk. Kota Bandung pada masa kolonial juga mampu bersaing dengan kota-kota modern di Hindia Belanda seperti Batavia, Medan dan Surabaya yang didesain untuk melayani perdagangan internasional. Meski demikian, Bandung memiliki pesonanya sendiri berkat aspek strategis yang dimiliki.

Spesialisasi Kota Bandung juga berlanjut hingga masa sekarang. Kesan yang terbentuk pada Kota Bandung saat ini adalah sebagai pusat berbagai *factory outlet*, kota wisata kuliner dan berbagai macam bentuk usaha ekonomi kreatif. Kota Bandung sendiri menjadi *Creative City* setelah dinobatkan oleh British Council pada tahun 2009. Seperti yang telah disebutkan, kesuksesan sebuah kota menjadi kota global adalah dengan fokus pada pengembangan komoditas unggulannya sehingga memiliki daya saing pada kompetisi global. Dengan demikian, Kota Bandung yang memiliki industri kreatif sebagai penggerak ekonomi utama, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kota berkelas internasional. Tentunya pembangunan tersebut harus memperhatikan pola yang teratur dan terencana, termasuk penataan jaringan transportasi serta pengendalian arus urbanisasi.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menunjukkan perkembangan Kota Bandung dalam lintasan waktu. Dinamika Kota Bandung hingga menjadi

kota modern, telah melewati beragam peristiwa yang menjadikan kota ini kaya akan sejarah dan *heritage* untuk dipelajari serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui buku ini, Bank Indonesia ingin memberikan perspektif alternatif dengan menggunakan kacamata masa lalu, sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan di masa depan. Sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Bandung, Bank Indonesia akan terus mengawal pembangunan kota Bandung demi mewujudkan cita-cita sebagai kota bertaraf internasional.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Maret 2020

Dody Budi Waluyo

PENGANTAR
KEPALA BANK INDONESIA INSTITUTE

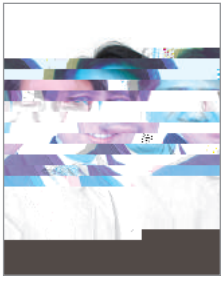

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Kota modern tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, melainkan diikuti pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, perangkat teknologi yang berkembang pesat dewasa ini, harus tersosialisasi kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan modernitas secara tepat guna. Buku berjudul "Geliat Kota Bandung: Dari Tradisional Menuju Modern" ini menggambarkan harmonisasi Kota Bandung dalam membangun fisik kota dan kultur manusia yang hidup di dalamnya.

Peran sebuah kota untuk tumbuh dengan harmoni tersebut, harus mampu mengangkat kekuatan sumber daya manusia dari budaya yang dimiliki untuk menjadi kekuatan membangun kota kreatif. Beberapa aspek prakondisi kota juga harus memperhatikan antara lain kualitas personal manusia, identitas lokal, serta tersedianya ruang dan fasilitas perkotaan. Sumber daya budaya atau ***cultural resources*** ini harus dimotori oleh kualitas manusia yang berorientasi pada kemampuan dalam mengembangkan kreativitasnya. Hal tersebut diwujudkan untuk menunjang munculnya masyarakat kelas kreatif, yakni masyarakat yang berpikir terbuka, fleksibel, berani mengambil risiko, dan mampu mengubah tantangan jadi peluang.

Aspek mengenai kota kreatif sudah tercermin pada dinamika Kota Bandung sejak periode kolonial hingga sekarang. Dalam buku ini menggambarkan kembali situasi kota dan penduduk di Kota Bandung yang mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 yang sudah bergeliat layaknya kota modern. Kota Bandung sebagai kota penyangga perkebunan di Priangan juga membawa dampak kemajuan arus bisnis ke kota ini. Pengusaha-pengusaha Eropa yang memiliki modal lebih besar membangun perusahaan dengan gedung-gedung megah bergaya Barat. Tidak hanya itu, masyarakat pribumi juga ikut menjadi pemain dalam menggerakan roda perekonomian. Bisa dilihat dari kehadiran Urang Pasar sebagai pedagang besar pada waktu itu yang mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha Timur Asing. Produk-produk olahan tekstil dan kerajinan merupakan warisan keterampilan tangan masyarakat Kota Bandung sejak berabad silam, seperti halnya daerah Cibaduyut yang terkenal dengan kerajinan alas kaki hingga saat ini.

Masyarakat Kota Bandung juga terkenal dengan semangat dan pengorbanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Terbukti saat peristiwa Bandung Lautan Api, sebagian besar warga kota mengungsi dan membumihanguskan rumah serta bangunan-bangunan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Belanda maupun Sekutu. Pemulihan ekonomi secara barangsur-angsur mulai membuahkan hasil. Setelah mengalami proses panjang, saat ini Kota Bandung bisa merasakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, diantaranya berusaha mengembangkan *creative city* dan *smart city*. Dua konsep kota ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa peran kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan mitra-mitranya.

Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga pemerintah turut mengawal transformasi dan pembangunan Kota Bandung. Hal tersebut tercermin sejak masa kolonial, bahwa peran perbankan khususnya De Javasche Bank Bandung sebagai bank sentral milik pemerintah ikut membantu pembangunan kota, bahkan di masa sekarang Bank Indonesia terus melanjutkan kontribusi dalam pembangunan kota yang dahulu pernah dilakukan. Pembangunan manusia melalui pembinaan UMKM adalah salah satu fokus Bank Indonesia untuk menggerakan ekonomi masyarakat Kota Bandung dengan industri kreatif sebagai tonggak utama ekonomi kota.

Melalui kehadiran buku ini, diharapkan mampu memberikan kesadaran masyarakat terhadap sejarah Kota Bandung untuk dapat dipahami secara lebih komprehensif. Semoga di masa mendatang akan muncul karya sejenis yang juga mengangkat potensi lokal dan kedaerahan sebagai referensi pembelajaran.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Maret 2020

Solikin M. Juhro

DAFTAR PETA

Peta 1.1. Keresidenan di Pulau Jawa dan Keresidenan Priangan tahun 1900 **4**
Peta 1.2. Negorij Bandong sekitar tahun 1850. Bandung pada waktu itu masih merupakan desa kecil **22**
Peta 3.1. Jalur Kedatangan Tentara Jepang ke Bandung tahun 1942 **86**
Peta 3.2. Peta Persebaran Kamp Tawanan Jepang **91**
Peta 3.3. Pelabuhan Cilacap tahun 1942 **100**
Peta 4.1. Peta Administratif Wilayah Jawa Barat 1945 – 1950 dan 1950 - 1960 **111**
Peta 6.1. Peta Kota Bandung tahun 1976. Belum ada perluasan ke arah Gedebage **168**
Peta 6.2. Peta Kota Bandung setelah Perluasan **169**
Peta 6.3. Perluasan Kota Bandung sampai Tahun 1987 **172**
Peta 6.4. Kawasan Bandung Utara **177**
Peta 6.5. *Grand Design* Teknopolis Kota Bandung **183**
Peta 6.6. Perencanaan Strategis Kota Bandung **184**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jalar Raya Pos di sekitar Sindangraja, Cianjur **9**
Gambar 1.2. Pedati yang ditarik hewan mengangkut Kina dari perkebunan ke pabrik di Bandung tahun 1924 **10**
Gambar 1.3. Pembuatan Jalur Kereta Api Cianjur – Bandung tahun 1890 **11**
Gambar 1.4. Petani Kopi di Priangan **13**
Gambar 1.5. Pabrik Kina Milik Pemerintah di Tjinjiruan (Selatan Bandung) 1915 **14**
Gambar 1.6. Rumah Residen di Bandung 1910 (sekarang menjadi Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat) **29**
Gambar 1.7. Presiden ke-11 De Javasche Bank, Mr. G. Vissering **34**
Gambar 2.1. Grand Preanger Hotel Bandung Tahun 1915 (kiri) dan Tahun 1930 (kanan) **40**
Gambar 2.2. Grand Hotel Homann tahun 1925 (kiri) dan 1940 (kanan) **41**
Gambar 2.3. Acara *Jaarbeurs* di Bandung tahun 1923 **44**
Gambar 2.4. Gedung Bioskop De Orion (Preanger Theater) di Bandung 1920 **46**
Gambar 2.5. Suasana Pasar Baru Bandung Tempo Dulu Tahun 1920 **50**
Gambar 2.6. Toko Kelontong J.R de Vries & Co. di Jalan Braga Bandoeng **51**
Gambar 2.7. Rumah Sakit Juliana tahun 1920 (sekarang menjadi Rumah Sakit Hasan Sadikin) **62**
Gambar 2.8. Pegawai Pemerintahan (*Binnenland Bestuur*) di Bandung tahun 1937 **63**
Gambar 2.9. Pembuatan Jalur Kereta Api antara Purwakarta – Bandung tahun 1900—1905 **66**
Gambar 2.10. Stasiun Bandung tahun 1910 **67**
Gambar 2.11. Gedung *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijs* tahun 1920 **70**

Gambar 2.12. Masjid Agung Bandung 1920 **71**
Gambar 2.13. *Theosofische Vereeniging* (Perkumpulan Teosofi) tahun 1920 **71**
Gambar 3.1.

Gambar 7.10. Rancangan tampak depan (menghadap ke Barat) **220**
Gambar 7.11. Denah *De Javasche Bank* Bandung tanggal 27 July 1943 (dirancang oleh biro Fermont-Cuypers di Jakarta) **221**
Gambar 7.12. Kantor *De Javasche Bank* di Bandung tahun 1915 **222**
Gambar 7.13. Kantor *De Javasche Bank* di Bandung tahun 2017 **222**
Gambar 7.14. Kantor *De Javasche Bank* di Bandung tahun 2017 (tampak depan) **223**
Gambar 7.15. Kantor *De Javasche Bank* di Bandung tahun 2017 (tampak samping) **223**
Gambar 7.16. Gedung *De Javasche Bank* tahun 1930-an **224**
Gambar 7.17. Gedung *De Javasche Bank* tahun 1980-an **224**
Gambar 7.18. Interior Langit-Langit Gedung De Javasche Bank Bandung **227**
Gambar 7.19. Interior Langit-Langit Gedung De Javasche Bank Bandung **228**
Gambar 7.20. Plakat Cagar Budaya Nasional **229**
Gambar 7.21. Peresmian Gedung *De Javasche Bank sebagai Cagar Budaya* **229**
Gambar 7.22. Proses Piagam Burra **230**

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung 1889 – 1905 **25**
Grafik 5.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung 1942-1967 **149**
Tabel 2.1. Persentase Luas Daerah Terbangun Kota Bandung 1906-1950 **72**
Tabel 2.2. Argumentasi pro dan kontra mengenai rencana Bandung sebagai Ibukota Hindia Belanda **74**
Tabel 3.1. Cadangan Emas De Javasche Bank 1939-1942 **102**
Tabel 6.1. Jumlah Penduduk dan Persentase Rata-rata Pertumbuhannya **170**
Tabel 6.2. Perbandingan Kepadatan Penduduk Kota Bandung tahun 1975 **171**
Tabel 6.3. Kluster UMKM Binaan Bank Indoensia **191**
Tabel 6.4. Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kantor Bank, di Wilayah Kerja Bank Indonesia Bandung **198**
Tabel 6.5. Perkembangan Kredit Bank Umum di Wilayah Kerja BI Bandung (dalam jutaan rupiah) **199**

DAFTAR ISI

Sambutan Gubernur Bank Indonesia... iv
Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia... vii
Pengantar Kepala Bank Indonesia Institute... x
Daftar Peta... xii
Daftar Gambar... xii
Daftar Grafik dan Tabel... xv
Daftar Isi... xvi

01 **Bab I Bandung dari Pembentukan Hingga Awal Abad ke-20 (1641 – 1909)**

Aspek Strategis Keresidenan Priangan... **2**
Terbentuknya Kota Bandung... **15**
Perkembangan Bandung Hingga Awal Abad ke-20... **19**
Pembentukan De Javasche Bank Agentschap Bandoeng... **30**

37 **Bab II Perkembangan Kota Bandung Hingga Akhir Kekuasaan Kolonial (1909 – 1942)**

Pembangunan Infrastruktur Bandung Menjadi Kota Kolonial Modern... **38**
Situasi Perdagangan dan Kontribusi Perbankan Dalam Membangun Kota Bandung... **47**
Perkembangan Kota Bandung dan Ide Pemindahan Ibukota Hindia Belanda... **59**

79 **Bab III Kota Bandung Masa Pendudukan Jepang 1942 – 1945**

Keruntuhan Hindia Belanda hingga Masa Pendudukan Jepang di Kota Bandung... **80**
Kondisi Sosial dan Ekonomi di Kota Bandung Masa Pendudukan Jepang 87
Nanpo Kaihatsu Ginko dan Kembalinya De Javasche Bank... **97**

107 **Bab IV Revolusi dan Pemulihan Ekonomi di Kota Bandung**

Transisi dan Konfrontasi... **107**
Peredaran Uang Masa Revolusi... **126**
Usaha Pemulihan Ekonomi... **134**

141 **Bab V Bandung Periode Awal Bank Indonesia (1953 – 1968)**

Konferensi Asia Afrika dan Lika-liku Pembangunan... **142**
Nasionalisasi De Javascehe Bank dan Dinamika Kelembagaan Bank Indonesia... **151**

165 **Bab VI Kota Bandung Era Kontemporer 1968 – 2015**

Dinamika Pembangunan Kota Bandung Hingga Era *Smart City...* **166**
Kontribusi Bank Indonesia dalam Membangun Kota Bandung... **187**

207 **Bab VII Kantor Eks-De Javasche Bank Bandung**

Bangunan Arsitektur Kolonial di Kota Bandung... **208**
Pendirian Gedung *Ex-De Javasche Bank* Bandung... **212**
Gaya Arsitektur Gedung De Javasche Bank Bandung... **217**
Upaya Pelestarian... **228**

BAB VIII Epilog 233

Daftar Acuan... 239

BAB I
BANDUNG DARI PEMBENTUKAN HINGGA AWAL ABAD KE-20 (1641 – 1909)

Kota Bandung pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan sebuah *gemeente* (setingkat kotapraja) yang berada di bawah keresidenan bernama "Preanger Regentschappen". Keresidenan ini terletak di sebelah barat Pulau Jawa, meliputi wilayah seluas 21.524 km^2, atau sekitar satu per enam luas Pulau Jawa (Mulyana, 2005: 41). Secara geografis Priangan terbagi menjadi wilayah barat, tengah dan timur. Wilayah Priangan Barat terdiri dari Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, kemudian Kabupaten Bandung dan Sumedang berada di Priangan Tengah, sementara Priangan Timur terdiri dari Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut. Keresidenan Priangan pernah beribukota di Cianjur, namun karena beberapa sebab, mulai tahun 1864 pemerintah kolonial memindahkan ibukota Priangan ke Bandung.

Pembahasan di bab ini diawali dengan pemaparan secara umum aspek geografis Priangan yang memiliki karakteristik sebagai daerah pegunungan yang subur. Sejak kedatangan perusahaan dagang *Vereniging Oost Indies Companij* (VOC), wilayah ini sudah dijadikan sebagai penghasil komoditi perkebunan, terutama kopi, teh dan kina yang tersebar di daerah-daerah dataran tinggi (Breman, 2010). Tidak mengherankan apabila pemerintah kolonial juga memerhatikan kehadiran infrastruktur seperti akses transportasi sebagai peyangga kantung-kantung perkebunan.

yang bukan pulang dari rantau) (Poesponegoro, 2010). Kutipan naskah tersebut menjelaskan bahwa istilah Parahyangan sebelum masa kolonial berhubungan dekat dengan istilah Sunda dan batasannya dapat dilihat melalui perbedaan budaya dengan wilayah di sekitarnya, khususnya budaya Jawa.

Peta berjudul "Ilha do Jaoa" yang dibuat Pero de Lavanha pada tahun 1524 memisahkan dengan tegas daerah yang disebut "Zunda" atau Sunda dengan "Jaoa" atau Jawa. Bukti lainnya juga berasal dari Barros, sejarawan Portugis yang menyebutkan daerah Sunda terbentang dari ujung pantai Barat Jawa hingga sungai Cimanuk (Poesponegoro, 2010). Sementara beradasarkan kisah Bujangga Manik, seorang penjelajah dari daerah Pakuan (sekarang Bogor), yang diperkirakan ditulis pada abad ke-16 masehi menyebutkan bahwa batas wilayah Sunda dan Jawa berada di Sungai Pamali atau Sungai Brebes. Dalam kutipan naskah tersebut tertulis *Sadatang ka tungtung Sunda meu(n)tasing di Cipamali, datang ka alas Jawa. Ku ngaing geus kaideran lurah-lerih Majapahit, palataran alas Demak. Sanepi ka Jatisari datang aing ka Pamalang.* (Ketika saya sampai di batas Sunda, saya menyeberangi Sungai Pamali, dan masuk ke wilayah Jawa. Saya berkelana ke beberapa desa Majapahit, dan wilayah Demak. Setelah mencapai Jatisari, saya datang ke Pamalang) (Noorduyn, 1982).

Sesuai namanya, Priangan merujuk pada *Parahyangan* yang berarti sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Kisah-kisah legenda banyak menyebutkan bahwa tempat tersebut berada di puncak-puncak gunung tertinggi. Hal ini selaras dengan gambaran keindahan bentang alam Priangan yang terdiri dari gugusan pegunungan serta dataran tinggi dengan iklim yang sejuk. Kisah Bujangga Manik juga menceritakan wilayah-wilayah pegunungan di Priangan dalam perjalanannya dari Pakuan (Bogor) ke daerah Puncak dan menyebutkan beberapa nama tempat seperti Tajur, Suka Birus dan Sungai Ciliwung: "*Panjang tanjakan ditedak, ku ngaing dipeding-peding. Sadatang aing ka Puncak deuuk di na mu(ng)kal datar teher ngahihidan awak. Teher sia ne(n)jo gunung: itu ta na Bukit Ageung, hulu wano na Pakuan…*" (melalui pendakian yang panjang, secara bertahap. Ketika aku sampai di Puncak, aku duduk di atas batu datar dan mengipasi badanku. Kemudian ia melihat ke arah gunung-gunung. Itu

adalah Gunung Besar, titik tertinggi di Kerajaan Pakuan.) Gunung Besar yang dimaksud dalam naskah tersebut adalah Gunung Gede. Hal itu juga didukung dengan perkataan Bujangga Manik berikutnya yang menyebut di Gunung Besar tersebut berhulu Sungai Ciliwung dari Telaga Warna: *Sadatang ka Bukit Ageung eta hulu Cihaliwung, kabuyutan ti Pakuan, sanghiang Talaga Warna.* (setiba di Gunung Gede, itulah sumber Sungai Ciliwung, tempat suci bagi orang-orang Pakuan, Telaga Warna yang dikeramatkan) (Noorduyn, 1982).

Baru setelah menjadi bagian wilayah administrasi Hindia Belanda, Keresidenan Priangan dibatasi dengan konsep garis teritorial. Batas tersebut antara lain sebelah utara berbatasan dengan Keresidenan Karawang, di sebelah barat dengan ***afdeeling*** Buitenzorg (Bogor), dan barat laut dengan Keresidenan Batavia. Sementara di sebelah timur, Sungai Cimanuk membatasi wilayah Priangan dengan Keresidenan Cirebon dan sebelah selatan langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Secara

Peta 1.1.
Keresidenan di Pulau Jawa dan Keresidenan Priangan tahun 1900

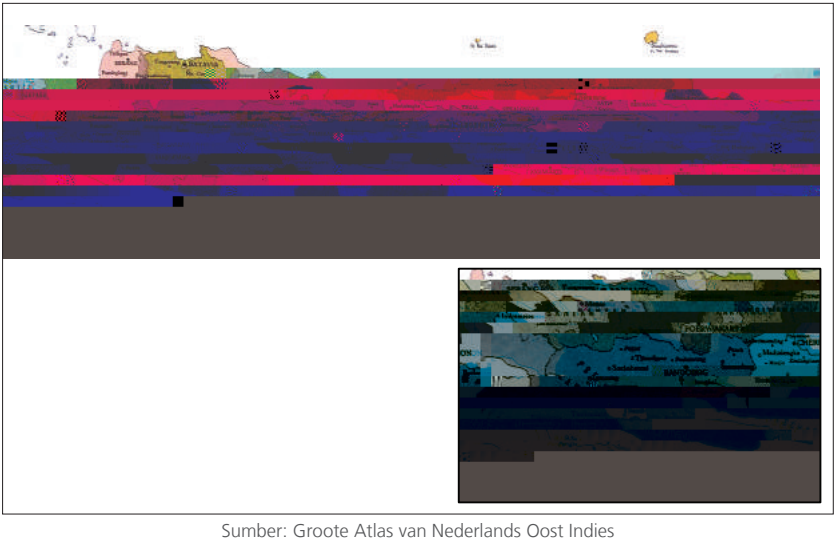

Sumber: Groote Atlas van Nederlands Oost Indies

garis besar, daerah Priangan dibatasi dengan rintangan alam berupa pegunungan dan sungai, sementara dari sisi kultural hal yang paling mudah untuk mengenali wilayah ini adalah keterikatan masyarakatnya yang berbahasa dan beradat-istiadat Sunda.

Kontur wilayah yang terdiri dari pegunungan serta dataran tinggi dengan kandungan tanah vulkanik menjadikan Keresidenan Priangan daerah yang subur. Gunung yang ada di Priangan memiliki ketinggian mulai dari 1.800 – 3.000 meter di atas permukaan laut. Beberapa nama gunung yang cukup dikenal antara lain Gunung Gede, Gunung Galunggung, Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, Gunung Guntur, dan Gunung Tangkubanperahu (Mulyana, 2005). Selain deretan gunung, Priangan juga memiliki tiga sungai utama, yakni Sungai Citarum, Sungai Cimanuk dan Sungai Citanduy. Sungai Citarum mengaliri daerah bagian barat *afdeeling-afdeeling* Priangan dan berhulu di Gunung Wayang. Kemudian Sungai Cimanuk berada di sebelah timur dan berbatasan dengan Keresidenan Cirebon, anak-anak sungai ini menyuplai irigasi ke areal pertanian di wilayah Indramayu dan bermuara ke pantai utara Jawa. Lalu Sungai Citanduy berhulu dari Keresidenan Cirebon, melewati Tasikmalaya, Ciamis, hingga bermuara di Samudera Hindia (Mulyana, 2005).

Memiliki alam yang subur, wilayah Priangan menjadi tempat yang cocok untuk mengembangkan kegiatan agraris. Masyarakat Priangan sendiri umumnya menggantungkan ekonomi dengan cara bertani dan berladang. Sebelum Mataram mengenalkan pertanian sawah, mereka menggunakan sistem berladang di tanah-tanah yang tidak dialiri sungai. Untuk melengkapi pertanian selain padi, penduduk Priangan menanam sayur-mayur, bunga, buah-buahan, umbi-umbian serta kacang-kacangan. Berbagai komoditas ini di samping untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, diekspor ke berbagai pasar di luar Priangan. Selain bertani, budidaya ikan air tawar juga menjadi usaha unggulan yang dikembangkan pada abad ke-19 mengingat pasokan daging sempat berkurang akibat wabah penyakit yang menyerang hewan ternak dan hewan angkut, khususnya kerbau. Penduduk memelihara ikan di kolam, situ (danau), dan sawah dengan beberapa jenis ikan air tawar seperti ikan mas, cakrang, tawes dan gurame (Mulyana, 2005).

Terkait dengan kegiatan pertanian di tanah Priangan, orang Sunda sejak lama mempraktikkan kegiatan ladang berpindah atau *ngahuma.* Selain ladang berpindah dengan cara huma, dikenal pula sistem pertanian *tipar,* yakni menanam padi di lahan kering secara semi permanen. Lalu juga ada *talun*, menanam jenis tanaman keras seperti buah-buahan dan kayu-kayuan (Iskandar, 2011: 37). Seperti disebutkan sebelumnya, pertanian sawah (pertanian basah) baru dikenal di Jawa Barat setelah masuknya pengaruh orang-orang Mataram yang datang dari Jawa Tengah kira-kira tahun 1750. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sistem sawah yang masuk pertama kali ke daerah Bandung berasal dari Sumedang. Sistem itu kemudian diperkenalkan ke daerah dataran rendah Bandung, seperti di Rancaekek. Pemetakan sawah juga dilakukan di daerah Sukapura (Tasikmalaya) yang dimulai dengan dibentuknya organisasi dan pengaturan sistem irigasi (Iskandar, 2011).

Pemerintah kolonial Belanda berupaya menjadikan orang Sunda sebagai masyarakat asli Priangan untuk mampu menjalankan kegiatan bertani sawah. Kepentingan Belanda antara lain untuk menjamin produksi padi, sehingga tersedia para pekerja yang mengisi perkebunan-perkebunan mereka. Di sisi lain, kebiasaan berhuma masyarakat Priangan dimanfaatkan VOC untuk menerapkan *Preangerstelsel* khusus di wilayah ini. Karena tidak adanya sawah, maka para bupati diberi tugas memungut pajak yang tidak berkaitan dengan sawah, melainkan hutan dan perkebunan. Selain itu, para bupati di Priangan juga mengharuskan rakyatnya membuka hutan dan menanam pohon kopi. Hasil panen kopi kemudian dijual ke pemerintah Belanda melalui para bupati. Di Priangan, sistem tanam paksa kopi baru benar-benar selesai pada tahun 1921. Ketika tanam paksa kopi sudah dihapuskan, rakyat merayakannya dengan membabat habis tanaman kopi yang mereka anggap sebagai simbol penindasan selama bertahun-tahun (Iskandar, 2011).

Di luar sektor agraris, penduduk Priangan juga bermata pencaharian sebagai penggiat kerajinan tangan (*craftmanship*). Masing-masing wilayah memiliki ciri khas tersendiri dalam mengolah dan menghasilkan barang-barang kerajinan. Jenis kerajinan yang dibuat antara lain seperti tenunan kain, pembuatan tembikar, genting, batu bata, perabot rumah tangga, alat-alat pertanian, anyam-anyaman dan lain-lain (Mulyana, 2005).

Keuntungan geografis Priangan yang memiliki lanskap keindahan alam perbukitan serta dataran tinggi yang hijau juga mendukung wilayah ini menjadi objek wisata sejak masa kolonial. Banyak daerah-daerah wisata yang sering dikunjungi oleh orang-orang Eropa pada abad ke-19, seperti kawasan Lembang, Malabar, Garut, Tangkuban Perahu dan sebagainya. Tidak hanya kondisi geografis, dalam *Memorie Van Antwoord* tahun 1899, gambaran tentang manusia dan masyarakat Priangan juga menjadi salah satu daya tarik bagi orang Eropa khususnya Belanda: "…orang-orang Priangan memiliki watak lembut dan mudah untuk diatur: jumlah polisi yang bekerja lebih sedikit ketimbang Jawa Timur dan Jawa Tengah,

kota yang dilaluinya. Pasar-pasar bermunculan di dekat stasiun atau jalan besar, sementara pasar yang tidak memiliki koneksi dengan titik-titik pemberhentian tidak lagi dianggap penting (Van Doorm, 1982).

Sebelum dibangun jalur kereta api, fasilitas jalan raya merupakan urat nadi transportasi dan perdagangan yang paling utama. Diperkirakan sudah ada jalan yang menghubungkan wilayah Priangan Barat, Tengah dan Timur pada abad ke-18. Umumnya jalan tersebut masih berupa setapak dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki maupun menunggang kuda. Meski begitu, jalan berliku melintasi pegunungan yang dibangun Daendels di Jawa Barat juga mengikuti jejak-jejak setapak dari jalan yang sudah ada. Informasi tentang keberadaan jalan tersebut dilaporkan Ram dan Coops pada tahun 1701 yang melakukan perjalanan dari Kampungbaru (Buitenzorg) menuju Puncak (Mulyana, 2005). Jalur dari Batavia menuju Priangan bisa dilalui menggunakan rute Kampungbaru-Cianjur-Bandung, atau dapat pula melalui Cikalong lalu ke Karawang-Padalarang-Bandung.

Kondisi medan yang berat dan hanya mampu dilalui dengan cara berjalan kaki atau menunggang kuda, menyebabkan pengiriman komoditas Priangan ke daerah-daerah di sekitarnya bergerak lamban. Sebelum abad ke-19, sebagian besar jalan di Priangan yang masih setapak dan belum dibangun dengan campuran batu alam tidak mampu dilintasi roda pedati. Umumnya masyarakat Priangan mengangkut hasil perkebunan seperti kopi dari tempat pemetikan ke tempat penimbunan menggunakan keranjang yang dipikul di atas kepala. Cara ini kurang efektif untuk kelancaran distribusi karena satu orang hanya mampu mengangkat 60 pon atau sekitar 27 kg (Mulyana, 2005). Pada masa Gubernur Jendral Mattheus de Hann (1725 - 1759) sempat digunakan kerbau sebagai ganti pengangkut beban, meskipun cara ini belum cukup efektif karena memiliki risiko yang tinggi dalam proses pengiriman. Kesadaran pemerintah kolonial untuk membuat akses transportasi yang baik muncul ketika mulai datang kepentingan lain di samping kebutuhan distribusi barang. Pembuatan jalan besar pun mulai dibangun pada masa Gubernur Jenderal H.W Deandels (1808—1811) dengan proyek *Grote Postweg* (Jalan Raya Pos) untuk kepentingan pertahanan, khususnya serangan dari Inggris.

Gambar 1.1. Jalar Raya Pos di sekitar Sindangraja, Cianjur

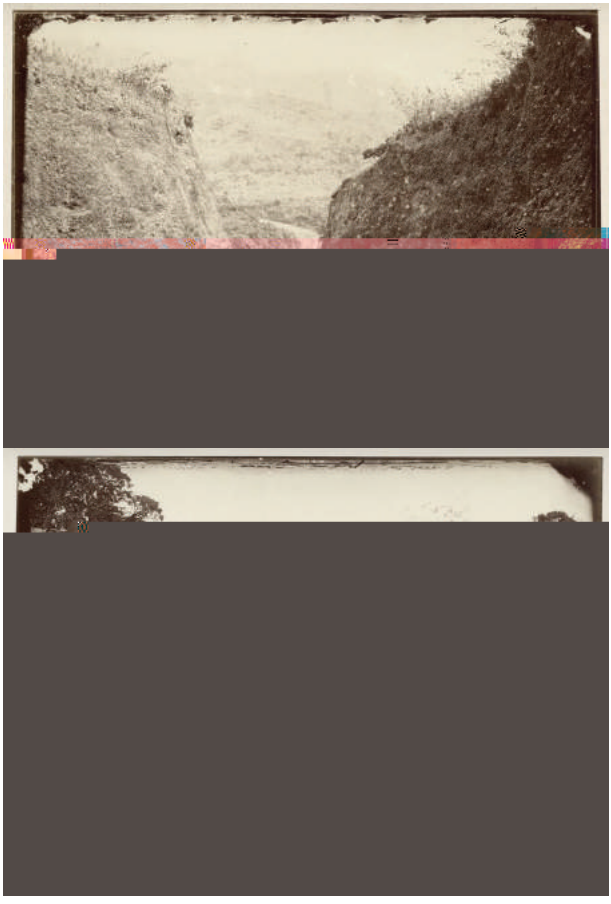

Sumber: woodburry.com

Keuntungan yang didapat pemerintah kolonial dari adanya jalan pos ini selain untuk membangun pertahanan dan memudahkan mobilisasi pasukan ke area pedalaman, juga untuk mengatasi permasalahan sebelumnya, yaitu menambah daya angkut pengiriman barang karena jalan-jalan ini bisa dilalui kereta beroda (pedati). *Grote Postweg* adalah pelebaran dari jalan setapak yang sebelumnya menghubungkan *Batavia-*

Buitenzorg-Nagorij Bandung. Jalan raya pos dari Cianjur-Bandung, Bandung-Sumedang dan Sumedang-Manonjaya siap dilalui pedati pada tahun 1820, kemudian Garut-Tasikmalaya pada 1838, Bogor-Cianjur 1860 dan Bogor-Purwakarta 1865 (Mulyana, 2005). Permasalahannya jalan-jalan besar ini belum banyak menghubungkan wilayah pedesaan ke daerah perkebunan. Dengan kata lain, kerja wajib untuk masyarakat desa bukan hanya dalam pembuatan jalan saja, namun juga harus melakukan pemeliharaan apabila kondisi jalan rusak akibat dilewati pedati yang melampaui kapasitas angkutnya (Mulyana, 2005).

Gambar 1.2. Pedati yang ditarik hewan mengangkut Kina dari perkebunan ke pabrik di Bandung tahun 1924

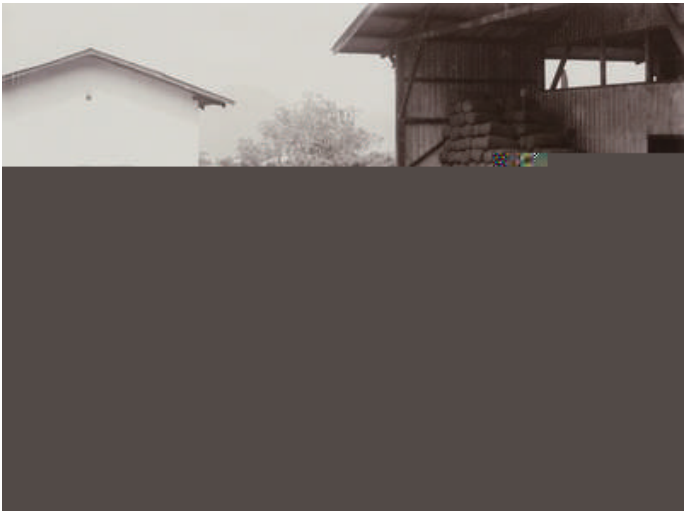

Sumber: KITLV

Pengiriman barang dengan bantuan hewan pun semakin kurang efektif karena menanggung risiko yang tinggi. Pada tahun 1840, terjadi musibah ketika banyak hewan angkut mati akibat dipaksa membawa beban yang terlalu berat dan menempuh perjalanan jauh. Pemerintah juga menganggap sulit memulihkan keadaan tersebut karena pembiakan hewan-hewan angkut pada waktu itu melalui proses alamiah. Kelangkaan

hewan pengangkut sempat menyebabkan terjadinya peningkatan harga. Di Buitenzorg pada tahun 1810 seekor sapi bisa dihargai *f*30, sementara pada 1840 naik menjadi *f*50 (Mulyana, 2005).

Menanggapi situasi tersebut, muncul usulan di parlemen Belanda untuk merancang pembangunan jalur kereta api oleh kalangan pemerintah maupun swasta. Khusus di Priangan, proyek tersebut dibangun perusahaan milik pemerintah atau *Statspoorwegen* (SS). Ada beberapa kepentingan yang melandasi pemerintah melakukan hal ini. Salah satunya adalah karena tujuan dari pembuatan rel kereta api di Priangan tidak hanya menyelesaikan persoalan ekonomi, melainkan juga isu pertahanan. Secara geografis Priangan merupakan daerah pedalaman, sehingga perlu dibuat fasilitas untuk memudahkan mobilisasi pasukan apabila terjadi serangan di daerah-daerah pesisir. Oleh karena itu, jalur kereta Priangan juga banyak yang terhubung ke pelabuhan seperti Batavia, Cirebon dan Cilacap. Jalur pertama yang selesai dibangun di Priangan adalah rute Buitenzorg-Cianjur-Bandung (1878—1884) (Mulyana, 2005).

Gambar 1.3.
Pembuatan Jalur Kereta Api Cianjur – Bandung tahun 1890

Sumber: KITLV

Dibangunnya jalur transportasi, ditambah masuknya modal swasta ke sektor perkebunan semakin meningkatkan laju ekonomi Priangan. Kota-kota besar tumbuh dan menjadi sentra produksi perkebunan. Pesona kota-kota ini tumbuh semakin srategis bagi orang-orang Eropa. Antara tahun 1880—1890 tanah-tanah partikelir orang Eropa mulai menjamur di Keresidenan ini. Pada tahun 1890 setidaknya ada seratus kawasan agrikultur di Priangan Barat. Sementara tahun 1895, ratusan permintaan untuk penyewaan tanah masuk ke laporan pemerintah kolonial (Van Doorm, 1982: 11).

Data demografis menunjukkan selama 35 tahun antara 1870—1905 populasi penduduk Priangan meningkat dua kali lipat. Pada saat yang sama jumlah orang-orang Eropa meningkat dua belas kali lipat, sementara orang Tionghoa hampir dua puluh kali lipat. Berdasarkan sensus yang dilakukan pemerintah kolonial pada tahun tersebut, memperlihatkan orang Eropa hanya berjumlah 438 jiwa pada tahun 1870, kemudian menjadi 5.231 jiwa pada 1905. Begitupun dengan orang-orang Tionghoa, yang meningkat dari 478 jiwa menjadi 9.369 jiwa pada 1905. Bagi orang-orang Priangan sendiri, pertumbuhan produksi hasil bumi juga meningkat. Dalam kurun waktu sepuluh tahun pada 1878—1887, panen padi meningkat dengan perkiraan 5,6 juta ***pikul*** menjadi 7,4 juta ***pikul***. Pembukaan lahan pertanian juga meningkat dari lebih 243.000 ***bahu*** menjadi 355.000 ***bahu***. Padi yang dihasilkan di Priangan lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi domestik, bahkan dalam jumlah besar juga diekspor keluar Priangan (Van Doorm, 1982: 13-15).

Pemerintah kolonial di Priangan bergantung pada komoditi perkebunan terutama kopi. Hampir seluruh wilayah ***afdeeling*** di Priangan ditanami kopi karena kebijakan penanaman wajib kopi bahkan dimulai sebelum masa tanam paksa. Dari seluruh kabupaten di bawah residensi Priangan, Kabupaten Bandung adalah penghasil kopi terbesar. Fakta tersebut dibuktikan salah satunya dari pendapatan Bupati Bandung yang mendapat persentasi penjualan kopi lebih besar dibandingkan bupati lain, yakni sekitar ***f***82.000 per tahun. Berbeda dengan Bupati Cianjur yang mendapat ***f***30.000 per tahun dan Bupati Sukapura yang hanya ***f***6.000 per tahun (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 2005: 45). Meski pada pertengahan abad ke-19 perkebunan kopi sangat menguntungkan bagi

wilayah Priangan, namun sempat terjadi wabah yang menyerang daun-daun tanaman ini yang berakibat pada menurunnya hasil panen. Tidak hanya itu, harga kopi mulai berangsur-angsur mengalami penurunan sejak tahun 1877 yang tadinya *f*60 per pikul menjadi *f*30— *f*35 per pikul pada 1883 (Claver, 2014: 90).

Gambar 1.4. Petani Kopi di Priangan

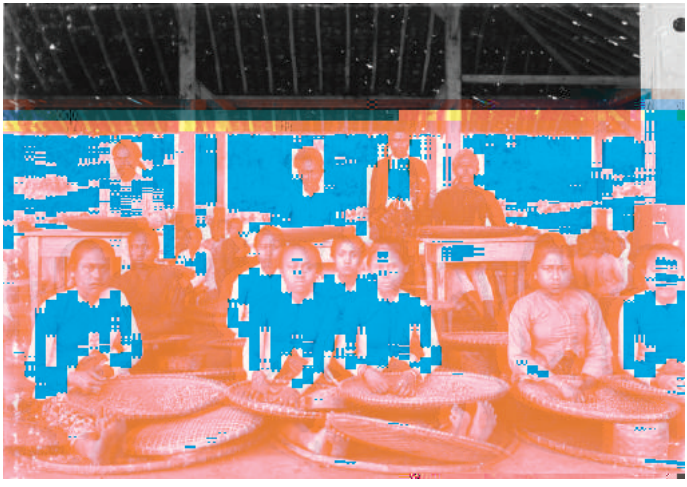

Sumber: tropenmuseum

Komoditas selain kopi yang menjadi andalan Priangan adalah teh dan kina. Perkebunan kina yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Bandung merupakan penghasil kina terbesar di dunia. Perkebunan yang terletak di wilayah Pasir Junghuhn pada tahun 1875 mampu menghasilkan sebanyak 25 ton, kemudian pada tahun 1885 sebanyak 500 ton dan tahun 1895 berlipat menjadi 6.000 ton (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten

gula dan kopi mengalami penurunan akibat perang, teh tetap mengalami peningkatan. Tanaman ini secara alamiah memiliki kecocokan dengan kondisi geografis Priangan yang berkontur pegunungan dan beriklim sejuk. Setidaknya, tanaman teh baru dapat tumbuh di ketinggian 250—2000 mdpl, dengan suhu 14—25 derajat celcius dengan curah hujan tinggi. Maka dari itu, beberapa perkebunan teh terbesar letaknya berada di Priangan, seperti Perkebunan Teh Waspada di Garut, Perkebunan Teh Parakan di Sukabumi, termasuk Perkebunan Teh Malabar di Bandung.

Gambar 1.5. Pabrik Kina Milik Pemerintah di Tjinjiruan (Selatan Bandung) 1915

Sumber: KITLV

Berkembangnya perekonomian Priangan dan banyaknya investasi yang masuk ke Keresidenan ini menggerakan pemerintah kolonial untuk membangun Bandung sebagai kota modern terencana pada waktu itu. Bandung menjadi basis politik, ekonomi dan pertahanan Hindia Belanda dikarenakan daerahnya yang beriklim sejuk, dan terletak di wilayah dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan sehingga terlindung dari serangan musuh. Bandung kemudian tumbuh pesat menjadi kota

yang memiliki gedung-gedung pemerintahan; gedung hiburan seperti bioskop, hotel dan restoran; gedung militer; gedung perkantoran dan perbankan. Berkembangnya Kota Bandung juga tidak lepas dari akses yang menghubungkan kota ini ke wilayah-wilayah perkebunan di sekitar Kabupaten Bandung serta kota-kota besar lainnya di luar keresidenan.

Keberadaan Kota Bandung tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Kabupaten Bandung karena secara geografis, wilayah kota Bandung pada mulanya merupakan bagian Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung terbentuk pada tahun 1641 ketika Priangan diduduki Mataram. Pembentukan Kabupaten Bandung ini tercantum dalam Piagam Sultan Agung bertanggal 9 Muharam Tahun Alip atau tanggal 20 April 1641. Piagam Sultan Agung tersebut juga mencatat terbentuknya dua kabupaten lain, yakni Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Sukapura. Di luar ketiga kabupaten tersebut, dalam kurun waktu tahun 1641 hingga tahun 1645, Mataram juga membentuk dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Parakanmuncang dan Kabupaten Karawang. Status wilayah administratif Bandung sebagai kabupaten, pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I (1645-1677) diubah menjadi ***ajeg***. Keberadaan Bandung sebagai wilayah administratif bernama ***ajeg*** mulai berlangsung antara tahun 1656 hingga tahun 1657, bersama delapan ***ajeg*** lainnya, yakni, Sumedang, Parakanmuncang, Sukapura, Karawang, Imbanagara, Kawasen, Wirabaja (Galuh), dan Sekace (Galunggung atau Sindangkasih) (de Haan, 1912: 59; Holle, 1868: 235, 341-343; Kern, 1898: 12).

Setelah lebih dari tiga dasawarsa Bandung berada di bawah pengaturan administratif Mataram, mulai dasawarsa kedelapan abad ke-17 atau tepatnya tahun 1677, Bandung beralih di bawah pengaturan administratif VOC. Hal ini terjadi ketika Mataram secara bertahap menyerahkan wilayah Priangan kepada VOC mulai tahun 1677. Priangan Barat, termasuk di dalamnya Kabupaten Bandung menjadi wilayah pertama yang diserahkan Mataram kepada VOC. Adapun penyerahan selanjutnya dari Mataram kepada VOC terjadi tahun 1705. Berdasarkan

perjanjian yang dibuat tanggal 5 Oktober 1705, Mataram menyerahkan wilayah Priangan Timur dan Cirebon. (de Haan, 1911: 261)

Peralihan kekuasaan dari Mataram ke VOC segera mengubah penataan wilayah administratif yang diatur sebelumnya. Di masa awal VOC berkuasa, wilayah Bandung termasuk dalam wilayah politik yang bernama Bataviasche Ommelanden. Di samping Bandung, wilayah lain di Priangan yang kemudian dimasukkan dalam Bataviasche Ommelanden adalah Tangerang dan Grending, Kampungbaru, Jampang, Cibalagung, Cikalong, Cianjur, Karawang, Wanayasa, Adiarsa, Ciasem, Pamanukan, Pagaden, Timbanganten, Batulayang dan Parakanmuncang. (Rees, 1880: 10).

Riwayat Bandung sebagai bagian wilayah administratif bernama Bataviasche Ommelanden bagaimanapun tidak berlangsung lama. Memasuki abad ke-19 atau semasa Daendels mulai berkuasa, sebagaimana beberapa wilayah lainnya di Priangan, Bandung kembali mengalami perubahan administratif. Sepanjang pemerintahaan Daendels yang tidak berlangsung lama, Bandung setidaknya mengalami tiga kali penataan wilayah. Pertama, pada 1808. Dalam penataan wilayah yang berlangsung pada masa-masa awal Daendels berkuasa ini, Bandung dimasukkan ke dalam Landdrostambt der Jacatrasche en Preanger Bovenlanden. Di samping Bandung, dalam ***landdrostambt*** ini dimasukkan pula daerah-daerah lain, seperti Tangerang, Karawang, Buitenzorg, Sumedang, Cianjur dan Parakanmuncang. Landdrostambt der Jacatrasche en Preanger Bovenlanden sendiri merupakan salah satu ***landdrostambt*** dari 12 ***landdrostambt*** yang dibentuk Daendels antara tahun 1808 hingga tahun 1809. Sebelas ***landdrostambt*** lainnya, adalah, Banten, de Ommelanden van Batavia, de Tjerebonsche Preanger-Regentschappen, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Juwana, Rembang, dan Pantai Timur (Pronk, 1929: 4-5).

Penataan wilayah kedua dialami Bandung pada 20 Juni 1810. Dalam penataan kali ini, bersamaan dengan dihapuskannya Karawang serta pengalihan Tanggerang dan Batavia ke dalam wilayah Bataviasche Ommelanden, Bandung bersama Sumedang, Cianjur, dan Parakanmuncang, digabung dengan Limbangan dan Sukapura. Wilayah baru itu dinamakan ***Jakatrasche en Cheribonsche Preanger Regentschappen***. Berbeda dengan penataan wilayah yang dilakukan

sebelumnya, penataan wilayah pada 1810 ini secara eksplisit lebih banyak didasarkan atas pertimbangan ekonomi. Hal ini ditandai dengan pembagian wilayah atas daerah produsen kopi dan daerah bukan produsen kopi. Dengan demikian, wilayah politik yang bernama Jakatrasche en Cheribonsche Preanger Regentschappen merupakan wilayah politik yang di dalamnya terdiri dari daerah-daerah produsen kopi.

Belum genap satu tahun menjalani penataan kedua, Bandung kembali mengalami penataan wilayah. Dalam penataan wilayah yang berlangsung tanggal 2 Maret 1811 ini, Bandung bersama Cianjur. Parakanmuncang dan sebagian Sumedang dimasukkan ke dalam wilayah yang bernama Bataviasche Regentschappen (Kern, 1898: 33-35; Rees,1880: 114). Penataan wilayah yang ketiga ini sekaligus menjadi penataan wilayah terakhir yang dialami Bandung di era Daendels. Seperti halnya Landdrostambt der Jacatrasche en Preanger Bovenlanden, Bataviasch Regentschappen merupakan salah satu *landdrostambt* yang dibentuk oleh Daendels. Bedanya, Landdrostambt Bataviasch Regentschappen dibentuk pada tahun 1811. Jadi, merupakan hasil pembaharuan dari *landdrostambten* yang dibentuk antara tahun 1808 hingga tahun 1809. Di luar Bataviasch Regentschappen, *landdrostambt* lain yang dibentuk pada tahun 1811, adalah, Banten, de Ommelanden van Batavia, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara dan Pantai Timur (Pronk, 1929: 4-5).

Dalam masa-masa perubahan wilayah administratif yang bergerak sangat dinamis hingga dasawarsa pertama abad ke-19, secara internal dapat dikatakan terjadi pula perubahan-perubahan yang cukup berarti dalam pemerintahan. Salah satunya adalah perubahan tersebut terjadi pada para bupati yang memerintah Kabupaten Bandung meskipun perubahan tersebut berlangsung secara turun-menurun. Setelah Tumenggung Wiraangunangun sebagai bupati pertama memerintah hingga tahun 1681, ia digantikan anaknya Tumenggung Adikusumah yang memerintah hingga tahun 1704. Adikusumah kemudian digantikan oleh Tumenggung Anggadiredja I yang memerintah hingga tahun 1747. Anggadiredja I kemudian digantikan oleh Tumenggung Anggadiredja II yang memerintah sampai tahun 1763. Pada tahun 1763 Raden Anggadiredja III menggantikan Tumenggung Anggadiredja II dan

diberi gelar R.A. Wiranatakusumah I. Ia memerintah selama 31 tahun, yaitu sampai tahun 1794. Pada tahun tersebut ia digantikan oleh R.A. Wiranatakusumah II yang memerintah sampai tahun 1829.

Berbeda dengan masa pemerintahan para bupati sebelumnya, masa pemerintahan Bupati ke-6 R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) ditandai oleh terjadinya perubahan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke Bandung. Pemindahan ibukota Kabupaten Bandung itu salah satunya disebabkan karena sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada di bagian utara Krapyak (Dayeuh Kolot). Hal itu mempersulit tugas-tugas Bupati R.A. Wiranatakusumah II. Selain itu, daerah Krapyak yang berada di bagian selatan Kabupaten Bandung sering dilanda banjir di musim hujan akibat meluapnya Sungai Citarum. Oleh karena itu, ia kemudian memindahkan ibukota Kabupaten Bandung ke daerah di sebelah utara. Mula-mula ia tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti) kemudian pindah ke Balubur Hilir. Kemudian kembali pindah ke Kampung Bogor (Kebon Kawung sekarang).

Keinginan Bupati R.A. Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung itu sejalan dengan kebijakan Gubernur Jenderal H.W. Daendels untuk memindahkan beberapa ibukota kabupaten yang terletak di daerah pedalaman yang jauh dari Jalan Raya Pos yang dibangunnya. Jauhnya letak ibukota kabupaten dari lokasi pembangunan Jalan Raya Pos telah mengganggu kelancaran pembuatan jalan raya tersebut. Akhirnya pada tanggal 25 Mei 1810 Gubernur Jenderal H.W. Daendels mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupatennya. (Hardjasaputra, 2000: 117-124)

Berdasarkan hal-hal tersebut, Bupati Bandung Wiranatakusumah II memindahkan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak, sekitar 11 km dari Jalan Raya Pos ke selatan di tepi Jalan Raya Pos. Bupati R.A. Wiranatakusumah II memilih lokasi di sebelah barat Sungai Cikapundung sebagai pusat pemerintahannya. Hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan Gubernur Jenderal H.W. Daendels yang menginginkan lokasinya di sebelah timur Sungai Cikapundung. Namun hal itu nampaknya tidak menjadi persoalan bagi Daendels. Pada tanggal 25 September 1810

ibukota Kabupaten Bandung secara resmi pindah ke lokasi di sebelah Barat Sungai Cikapundung. (Hardjasaputra, 2000: 117-124)

Pemindahan ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke lokasinya yang baru inilah yang kemudian menjadi tonggak kelahiran Kota Bandung. Di tempat yang baru itu Bupati Wiranatakusumah II mendirikan pendopo kabupaten, lengkap dengan alun-alun di sebelah utaranya dan pohon bringin di tengahnya (Kunto, 1986: 392-401). Alun-alun itu kemudian berfungsi menjadi pusat administratif dan sosial kultural bagi orang pribumi. Di sekitar alun-alun didirikan infrastruktur lainnya, seperti pasar dan masjid. Tidak lama setelah pendiriannya, unsur kolonial mulai mempengaruhi perkembangan kota Bandung. Hal itu nampak dari tata ruang kota Bandung selanjutnya.

Bandung sebagai sebuah wilayah administratif baru yang terletak di pedalaman Jawa bagian Barat, dalam perkembangannya kemudian mulai mendapat perhatian manakala timbul gagasan untuk memindahkan ibukota Keresidenan Priangan dari Cianjur. Cianjur yang menyandang ibukota keresidenan sejak tahun 1816 (Dienaputra, 2004: 56-57) dipandang pemerintah kolonial Belanda sudah tidak cocok lagi untuk menyandang status Ibukota Keresidenan Priangan. Banyak faktor yang melatarinya. Satu di antaranya karena kondisi geografisnya yang labil dan mudah terkena bencana alam. Saat gagasan pemindahan ibukota Keresidenan Priangan muncul, Bandung segera tampil menjadi pilihan pertama dan utama untuk menyandang status baru sebagai ibukota Keresidenan Priangan. Gagasan untuk memindahkan ibukota Keresidenan Priangan dari Cianjur sebenarnya muncul pertama kali tahun 1819 atau kurang lebih tiga tahun sejak Cianjur pertama kali menyandang status ibukota Keresidenan Priangan. Gagasan pemindahan ibukota Keresidenan Priangan pada tahun 1819 ini diungkapkan Andreas de Wilde. Dasar usulan ini adalah agar daerah pedalaman Priangan

bisa lebih cepat berkembang sehingga tidak ketinggalan oleh daerah-daerah lain yang ada di sekitar Batavia (Kunto, 1984: 15). Usulan pemindahan Andreas de Wilde tampaknya tidak mendapat persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda sehingga Cianjur tetap dipertahankan sebagai pusat pemerintahan kolonial di Keresidenan Priangan. Gagasan pemindahan ibukota Keresidenan Priangan selanjutnya kembali muncul dalam dasawarsa kelima abad ke-19. Inti usulan kali ini adalah usulan untuk membagi Keresidenan Priangan menjadi dua. Pertama, sebuah keresidenan yang berada di sebelah Barat, yang terdiri dari Cianjur, Sukabumi, dan Bandung, dengan Cianjur sebagai ibukota. Kedua, sebuah keresidenan di sebelah Timur, yang terdiri dari Limbangan, Sukapura, dan Sumedang, dengan ibukota Singaparna atau Tasikmalaya. Sebagaimana usulan pertama, meskipun usulan kali ini mendapat dukungan dari Residen Priangan P. J. Overhand lewat secarik nota yang dikirimkannya kepada pemerintah kolonial pada tahun 1849 (Kern, 1898: 52-53; Klein, 1931: 134), namun pemerintah kolonial Belanda kembali tidak memenuhinya sehingga kedudukan Cianjur sebagai ibukota Keresidenan Priangan tetap tidak tergoyahkan.

Dalam perkembangannya kemudian, upaya pemerintah kolonial Belanda untuk tetap mempertahankan Cianjur sebagai ibukota Keresidenan Priangan tampaknya terkalahkan oleh kuatnya gagasan memindahkan ibukota Keresidenan Priangan. Hal ini terlihat pada 1856, ketika Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahud memerintahkan pemindahan ibukota Keresidenan Priangan (ANRI, Besluit 11 Oktober 1856, No. 84). Berbeda dengan usulan yang disampaikan Andreas de Wilde pada tahun 1819, alasan memindahkan ibukota Keresidenan Priangan kali ini justru karena perkembangan pesat yang dicapai Kabupaten Bandung. Implementasi perintah pemindahan ibukota Keresidenan Priangan oleh Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahud baru dapat dilaksanakan kurang lebih delapan tahun kemudian atau tepatnya tahun 1864. Relatif panjangnya jarak waktu antara perintah pemindahan dengan pelaksanaan sebenarnya merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, namun keterbatasan sumber telah menimbulkan kesulitan tersendiri untuk bisa memberi penjelasan lebih lanjut.

Kalaupun tetap diperlukan sebuah penjelasan, setidaknya ada dua kemungkinan yang bisa dikedepankan. Pertama, relatif lamanya pelaksanaan pemindahan ibukota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung kemungkinan disebabkan masih adanya pro dan kontra yang tajam antara mereka yang menyetujui dan yang tidak menyetujui pemindahan ibukota Keresidenan Priangan. Munculnya usulan memindahkan ibukota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung sejak masa-masa awal dijadikannya Cianjur sebagai ibukota Keresidenan Priangan serta munculnya usulan untuk membagi Keresidenan Priangan menjadi dua keresidenan pada dasawarsa kelima abad ke-19 yang mana keduanya tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah kolonial, sedikit banyak menjadi bukti mendukung kemungkinan pertama ini. Kedua, perlunya persiapan yang matang dalam menata perpindahan tersebut, termasuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan bagi perpindahan tersebut. Perpindahan ibukota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung jelas tidak hanya sekedar memindahkan lokasi ibukota tetapi juga berarti memindahkan seluruh suprastruktur pemerintahan keresidenan beserta kelengkapannya serta pengadaan berbagai infrastruktur baru di ibukota keresidenan yang baru.

Perpindahan ibukota keresidenan dari Cianjur ke Bandung juga menuntut persiapan matang bagi penggantian suprastruktur politik kolonial yang dipindahkan ke Bandung (Dienaputra, 2004: 61-62). Dari surat residen Priangan, tertanggal 21 Mei 1864, yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, secara implisit terlihat adanya dua hal penting yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan perpindahan ibukota tersebut. Pertama, masalah anggaran biaya perpindahan bagi residen beserta para pegawainya yang berada di kantor keresidenan. Kedua, masalah pengangkatan suprastruktur politik kolonial yang baru untuk menggantikan suprastruktur politik kolonial yang lama di bekas ibukota Keresidenan Priangan, Cianjur. Menyangkut perpindahan kantor keresidenan, Residen Van Moore secara rinci mengemukakan jumlah aparat beserta perlengkapan pendukung yang perlu dipindahkan, termasuk anggaran biaya yang diperlukan bagi pemindahan tersebut. Menurut residen, yang memiliki nama lengkap Jacobus Willem Johannes Christiaan van der Moore ini (Naamlijst der Europesche Inwoners en

Hunne Afstammelingen van Het Mannelijk Geslacht, 1871: 40), biaya memindahkan kantor Keresidenan Priangan setidaknya membutuhkan dana sebesar *f*9.475 (ANRI, Besluit 7 Agustus 1864 No. 18).

Peta 1.2. Negorij Bandong sekitar tahun 1850. Bandung pada waktu itu masih merupakan desa kecil

Sumber: Haryoto Kunto, 1985. *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe.*

Sebagai pengganti suprastruktur politik kolonial yang dipindahkan ke Bandung, Residen Van Moore selanjutnya mengusulkan pula mengangkat beberapa pegawai baru yang ditempatkan di Kabupaten Cianjur (ANRI, Besluit 7 Agustus 1864 No. 18). Usulan-usulan Residen Van Moore dalam suratnya tanggal 21 Mei 1864, pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan pemerintah kolonial mengeluarkan besluit no. 18 pada 7 Agustus 1864. Dalam *besluit* yang menjadi dasar pelaksanaan pemindahan ibukota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung, bisa dikatakan sebagian

besar usulan residen Priangan ini dipenuhi oleh pemerintah kolonial. Hal ini setidaknya tampak dari dipenuhinya semua usulan residen Priangan menyangkut para pegawai baru yang perlu ditempatkan di Kabupaten Cianjur. Kalaupun ada perbedaan dengan usulan Van Moore maka perbedaan tersebut bukan dikarenakan adanya pengurangan pegawai dari apa yang diusulkan Van Moore, tetapi karena adanya penambahan pegawai di luar yang diusulkan Van Moore.

Pemindahan secara resmi ibukota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung dalam perkembangan selanjutnya membawa pengaruh besar pada perkembangan kota Bandung. Dengan diperolehnya fungsi baru sebagai ibukota Keresidenan Priangan, secara otomatis telah meningkatkan arti penting keberadaan Bandung di mata pemerintah kolonial Belanda. Makna penting Bandung sebagai ibukota Keresidenan Priangan tampak jelas manakala di Bandung kemudian banyak dibangun berbagai infrastruktur baru, khususnya infrastruktur pendidikan dan infrastruktur transportasi. Satu di antara pembangunan infrastruktur transportasi yang fenomenal adalah dibukanya lintasan kereta api ke kota Bandung pada dasawarsa kesembilan abad ke-20. Dari pembangunan tersebut, mulai tahun 1884 Bandung terhubung dengan Batavia melalui transportasi kereta api. Selanjutnya, sejak 1894, Bandung juga telah tersambung dengan jalur jalan kereta api yang berada di Jawa bagian Tengah, yakni jalur Cilacap-Yogyakarta. Bersambungnya jalur jalan kereta api yang melewati Bandung dengan jalur jalan kereta api Cilacap-Yogyakarta ditandai pula peristiwa penting lainnya sepanjang perkembangan jalan kereta api di Jawa, yakni bersambungnya lin Barat (Westerlijnen), yakni trayek Batavia-Yogyakarta, dengan lin Timur (Oosterlijnen), yaitu trayek Surabaya-Yogyakarta (Kartodirdjo, 1987: 364). Jalur jalan kereta api Cilacap-Yogyakarta, mulai operasional sejak tanggal 20 Juli 1887.

Tersambungnya jalur jalan kereta api dari Bandung hingga Cilacap dan Yogya, terjadi setelah dibangunnya beberapa jalur baru antara Bandung dengan Kesugihan. Pembangunan jalur jalan baru dari Bandung ke Kesugihan ini berlangsung dalam empat tahap. Tahap pertama, pembangunan jalur jalan kereta api Bandung-Cicalengka. Pembangunan jalur jalan kereta api tahap pertama ini selesai pada tanggal 10 September 1884. Pembangunan jalur jalan kereta api tahap kedua, dilakukan

untuk menghubungkan Cicalengka dengan Garut. Jalur jalan kereta api Cicalengka-Garut ini, secara resmi dibuka pada tanggal 14 Agustus 1889. Pembangunan jalur jalan kereta api tahap ketiga berlangsung dari Cibatu (Garut) hingga Tasikmalaya. Jalur jalan kereta api Garut-Tasikmalaya ini dibuka secara resmi pada tanggal 16 September 1893. Pembangunan tahap keempat atau tahap terakhir dilaksanakan dari Tasikmalaya hingga Kesugihan. Pembangunan tahap keempat ini diselesaikan pada tanggal 1 November 1894 (Reitsma, 1912: 16-17; Reitsma, 1928: 45-46). Dengan selesainya seluruh jalur baru jalan kereta api dari Bandung hingga Kesugihan (Cilacap) pada akhir tahun 1894, sejak saat itu perjalanan dari Cianjur ke arah Timur tidak lagi berakhir di Stasiun Bandung tetapi bisa terus hingga Cilacap dan Yogyakarta. Tersambungnya jalur jalan kereta api dari Bandung ke Cilacap secara otomatis telah menambah jumlah pelabuhan laut yang bisa dicapai secara langsung dari Bandung. Sebelum tahun 1894, satu satunya pelabuhan laut yang bisa dicapai dari Bandung hanyalah pelabuhan laut yang terdapat di Batavia.

Seiring berbagai perubahan yang dialami Bandung, tampak terjadi pula perkembangan jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Bandung. Pada 1829, jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 180.119 jiwa, yang terdiri dari pribumi 179.980 jiwa, Timur Asing (*vreemdeling*) 118 jiwa, dan Eropa 21 jiwa. Dari 118 jiwa *vreemdeling*, Tionghoa 51 jiwa, Melayu 5 jiwa dan Bugis 62 jiwa. Melihat komposisi penduduk yang dimiliki Kabupaten Bandung, terlihat bahwa walaupun jumlah penduduknya melebihi penduduk Cianjur, tetapi jumlah penduduk Eropa tidak mencapai setengah jumlah penduduk Eropa di Kabupaten Cianjur yang menyandang status sebagai ibukota Keresidenan Priangan. Kenyataan ini sedikit banyaknya bisa dijadikan bukti bahwa setidaknya hingga akhir dasawarsa ketiga abad ke-19, Cianjur masih menjadi daerah pilihan tempat tinggal terbaik bagi orang-orang Eropa. Kepopulerannya bisa dikatakan masih berada di atas Kabupaten Bandung. (ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Staat aantoonende de bevolking in de Resiedentie Preanger Regentschappen beneevens de Uitgestrektheid der Rijstvelden en hoeveelheid der Paddie alsmeede het Beestiaal over het Jaar 1800 Negen Entwintig, Bundel No. 2/3.). Kurang lebih sembilan tahun kemudian atau tepatnya tahun 1838, penduduk

Kabupaten Bandung hanya mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 8443 orang sehingga jumlah penduduknya menjadi 188.552 orang (ANRI, Koleksi Arsip Priangan, Algemeen Verslag 1838, Bundel No. 3/3.). Magnet Bandung sebagai ibukota Keresidenan Priangan segera terlihat pada tahun saat disandangnya posisi sebagai ibukota Keresidenan Priangan. Pada 1864 ini, penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 274.021 orang atau meningkat sebesar 62.013 orang. (ANRI, KoleksiArsip Priangan, Statistiek der Residentie Preanger Regentschappen 1864, Bundel No. 30/6).

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung, tampak terjadi pula pekembangan penduduk di Kota Bandung. Bahkan, antara tahun 1889 hingga tahun 1905 terjadi peningkatan jumlah penduduk lebih dari 250 persen. Grafik 1 di bawah ini menunjukkan realita perkembangan penduduk yang sangat signifikan tersebut.

Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung 1889 – 1905

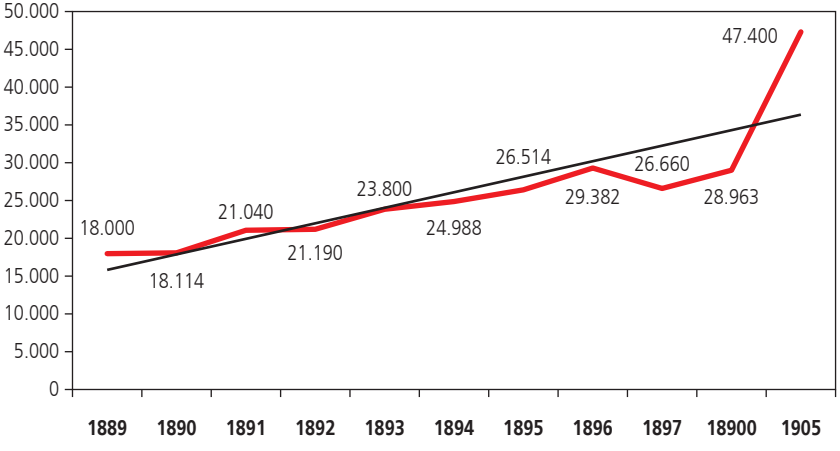

Sumber: Diolah dari Hardjasaputra, 2000: 127; Lith, 1917: 98.

Penambahan jumlah penduduk tersebut terjadi pada semua golongan penduduk, yaitu bumiputera, Eropa, dan Timur Asing. Jumlah penduduk

golongan bumiputera meningkat dari 16.424 pada tahun 1889 menjadi 41.400 pada tahun 1905. Dengan penambahan sebesar itu, rata-rata laju pertumbuhan penduduknya pada kurun tahun tersebut sekitar 5,78 % per tahun. Meskipun tergolong tinggi, tetapi laju pertumbuhan penduduk golongan bumiputera jauh di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk golongan Eropa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk golongan Eropa pada kurun tahun 1889-1905 sekitar 11,69 % per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk golongan Eropa tersebut menunjukkan bahwa arus kedatangan orang Eropa ke kota Bandung hampir dua kali dari penambahan penduduk golongan Bumiputera. Apabila dilihat dari jumlahnya, pada 1889 penduduk golongan Eropa berjumlah 339 orang kemudian meningkat sangat tinggi pada 1905 menjadi 2.200 orang. Dapat dipastikan bahwa penambahan jumlah penduduk golongan Eropa berasal dari faktor migrasi, sedangkan penambahan jumlah penduduk golongan Bumiputera disebabkan oleh faktor kelahiran dan migrasi.

Penambahan jumlah penduduk juga terjadi pada golongan Timur Asing. Pada 1889 jumlahnya masih 1.237 orang, lalu mengalami penambahan pada 1905 menjadi 3.800 orang. Dengan penambahan jumlah penduduk tersebut, maka rata-rata laju pertumbuhan penduduknya pada kurun 1889–1905 sebesar 7,01 % per tahun. Laju pertumbuhan tersebut juga tergolong tinggi, tetapi berada di bawah laju pertumbuhan penduduk golongan Eropa. Golongan penduduk ini didominasi oleh etnis Tionghoa yang mencapai 93 % dari populasi golongan Timur Asing. Etnis Arab yang merupakan etnis minoritas di kota Bandung pada kurun tahun tersebut, rata-rata laju pertumbuhan penduduknya menunjukkan angka negatif, yaitu sebesar -6,04 % per tahun. Salah satu penyebab hal tersebut adalah adanya pembatasan terhadap etnis Arab oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ketika itu diberlakukan kebijakan bagi etnis Arab untuk memiliki surat izin tinggal bila akan menetap di suatu daerah. Apabila tidak, maka pemerintah daerah dapat mengusirnya dari daerahnya (Hardjasaputra, 2002: 176).

Perkembangan Bandung yang sangat signifikan sejak menyandang status ibukota Keresidenan Priangan, tidak hanya ditandai membaiknya berbagai infrastruktur, tetapi juga ditandai oleh meningkatnya penduduk, termasuk peningkatan penduduk Eropa atau tepatnya orang-orang

Belanda. Realitas ini melahirkan tantangan tersendiri tentang bagaimana Kota Bandung mampu tampil menjadi kota modern yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya, khususnya penduduk Eropa. Tentu, tidaklah mudah bagi para penguasa pribumi untuk dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif saat harus berhadapan dengan penduduk Eropa. Dalam kaitan ini, pemerintah kolonial Belanda memandang penting menyelenggarakan pemerintahan sendiri bagi suatu wilayah yang banyak ditinggali orang-orang Eropa. Hal itu berlaku pula untuk Bandung.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pemerintahan sendiri bagi penduduk Eropa, pemerintah kolonial Belanda di awal abad ke-20 mengeluarkan berbagai regulasi di bidang pemerintahan, seperti, Undang Undang Desentralisasi 1903 (Decentralisatie Wet 1903), dan Keputusan Desentralisasi (Decentralisatie besluit) pada 1904. Regulasi-regulasi tersebut menjadi pintu masuk bagi pemerintah kolonial untuk merealisasikan kemauan politiknya bagi pembentukan pemerintahan sendiri untuk penduduk Eropa. Berangkat dari berbagai dinamika perkembangan itu, memasuki abad ke-20, sebuah perubahan mendasar kembali dialami kota Bandung. Berdasarkan ordonansi tanggal 21 Februari 1906, Bandung memperoleh status wilayah administratif baru sebagai *gemeente* (Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1906, No. 121). Peresmian, sekaligus penetapan Bandung sebagai sebuah *gemeente* dilakukan oleh Gubernur Jenderal J.B. Van Heutzs pada 1 April 1906 (Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng, 1919, hal. 1). Saat Gemeente Bandung didirikan, wilayahnya meliputi dua kecamatan *(onderdistrict)*, yaitu Kecamatan Bandung Kulon (Barat) dan Bandung Wetan (Timur). Kecamatan Bandung Kulon memiliki 8 desa: Andir, Citepus, Pasar, Cicendo, Suniaraja, Karanganyar, Astana Anyar, dan Regol. Kecamatan Bandung Timur memiliki 6 desa, yaitu Balubur, Kejaksan, Lengkong, Kosambi, Cikawao, dan Gumuruh. Dengan pendirian *gemeente* itu pula, wilayah kota Bandung tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan Bupati Bandung. Gemeente Bandung mempunyai pemerintahan sendiri yang lepas dari pemerintahan Kabupaten Bandung. Pemerintah Gemeente Bandung terdiri dari Dewan Kotapraja (Gemeente Raad), Badan Pemerintahan Harian (College van Burgermeester en Wethouders), dan Walikota (Burgermeester). Namun pada awal

pembentukannya, Gemeente Bandung dikelola oleh dewan kota. Ketika itu Dewan Kotapraja Bandung dipimpin secara exofficio oleh Asisten Residen Bandung, E.A. Maurenbrecher, yang menjabat sejak tahun 1906 sampai 1907. Anggota Dewan Kotapraja Bandung berjumlah 11 orang yang terdiri dari delapan orang Belanda, seorang Cina, dan dua orang pribumi. Dua orang pribumi itu adalah R.A.A. Martanegara (Bupati Kabupaten Bandung) dan Mas Rangga Tirta (Wedana Ujungberung Kulon). Hingga tahun 1913, Pemerintah Gemeente Bandung dipimpin secara berturut-turut oleh lima orang ketua dewan merangkap sebagai asisten residen, yaitu E.A. Maurenbrecher (1906-1907), R.E. Krijgboom (1907-1908), J.A. van der Ent (1909-1910), J.J. Verwijk (1910-1912), serta C.C.C.B van Vlenier (1912- 1913), dan B. van Bijveld (1913).

Sejak tahun 1913, pimpinan Pemerintah Gemeente Bandung tidak lagi dirangkap oleh asisten residen. Sejak tahun tersebut Gemeente Bandung dipimpin oleh seorang ***burgemeester*** (walikota). ***Burgemeester*** pertama adalah B. Coops yang menjabat selama tujuh tahunsampai tahun 1920. Ia kemudian digantikan S.A. Reitsma yang menjabat sampai tahun 1921. Pada 1921, ***burgemeester*** pertama Gemeente Bandung, B. Coops, kembali menjadi Burgemeester Bandung. Ia menjabat sampai tahun 1928. Status kota Bandung diubah menjadi ***stadsgemeente*** pada tahun 1926 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal 27 Agustus 1926. Burgemeester Stadsgemeente Bandung pertama dijabat B. Coops, yang sebelumnya sedang menjabat Burgemeester Gemeente Bandung. Ia menjabat Burgemeester Stadsgemeente Bandung sampai tahun 1928. Sejak tahun 1928 sampai tahun 1942 secara berturut-turut Burgermeester Stadsgemeente Bandung adalah sebagai berikut: Ir. J.E.A. van Wolsogen Kuhr (1928-1934); Mr. J.M. Wesselink (1934- 1936); dan N. Beets (1936-1942).

Sejak status ***gemeente*** disandang kota Bandung tidak pelak lagi Bandung semakin memainkan peranan penting dalam percaturan politik dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Bandung pun tampil sebagai primadona tempat peristirahatan orang-orang Barat, khususnya Belanda. Berbagai prasarana dan sarana penunjang kota modern kemudian banyak dibangun di Kota Bandung. Satu di antara sarana

dan prasarana yang segera mendapat perhatian pemerintah kolonial adalah pengadaan prasarana dan sarana fisik yang dapat digunakan pemerintahan *gemeente*. Dalam prakteknya, karena satu dan lain hal, keinginan untuk segera memiliki sebuah kantor pemerintahan *gemeente* yang representatif ini tidak dapat langsung direalisasikan. Untuk itu, pada masa awal pembentukan *gemeente* Bandung, sebagai kantor *gemeente* dipilih bagian atas gedung yang pernah menjadi toko buku Sumur Bandung di Jalan Asia Afrika. Beberapa waktu kemudian baru pindah ke "Gedong Papak" (Kantor Pemerintah Kotamadya Bandung sekarang), yakni sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah yang sempat dijadikan gudang kopi milik Andries de Wilde (Kunto, 1984: 1). "Gedong papak" ini karena letaknya yang strategis kemudian ditetapkan sebagai kantor tetap pemerintah *gemeente* Bandung. Penataan terhadap "gedong papak" sebagai kantor pemerintah *gemeente* Bandung bisa dikatakan dilakukan secara bertahap sebelum benar-benar dapat menjadi gedung pemerintahan yang representatif.

Gambar 1.6. Rumah Residen di Bandung 1910 (sekarang menjadi Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat)

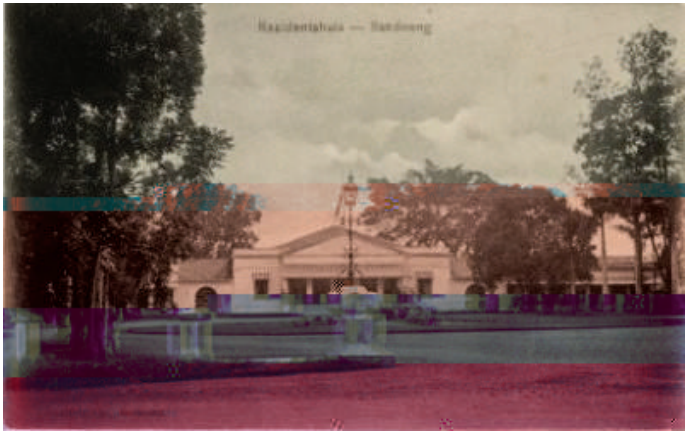

Sumber: KITLV

Memasuki abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda semakin menempatkan Bandung sebagai kota strategis. Arus ekonomi yang mengalir dari hasil perkebunan di sekitar Priangan tertampung atau transit di kota ini. Pemerintah melengkapi fasilitas kota yang percepatan tumbuhnya semakin bersaing dengan kota-kota bisnis lain seperti Batavia, Surabaya dan Medan. Salah satu instansi pemerintahan yang didirikan di Kota Bandung adalah De Javasche Bank Agentschap Bandoeng sebagai perwakilan bank sirkulasi sekaligus bank komersial milik pemerintah Hindia Belanda. Pendirian De Javasche Bank Agentschap Bandoeng berkaitan erat dengan alasan faktor keamanan selain kepentingan ekonomi. Pemerintah Hindia Belanda telah melihat jauh ke depan bahwa Bandung yang terletak di pedalaman bisa dijadikan sebagai basis pertahanan yang lebih baik ketimbang Batavia. Kondisi tersebut menjadi ciri yang membedakan Bandung dengan kantor cabang lain karena umumnya pendirian suatu bank lebih memprioritaskan kepentingan bisnis.

Pendirian De Javasche Bank bermula dengan terbitnya penetapan oktroi (*Octrooi en Reglement voor De Javasche Bank*) oleh pemerintah Hindia Belanda tanggal 11 Desember 1827 (Staatsblad voor Nederlandsche Indie 1827 No.111) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1828 selama sepuluh tahun. Modal awal bank adalah sebesar empat juta gulden yang terbagi atas 8.000 saham. Berdasarkan oktroi tersebut, De Javasche Bank diberi wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas terdiri dari pecahan *f*1000, *f*500, *f*300, *f*200, *f*100, *f*50, dan *f*5. Dengan demikian, De Javasche Bank berfungsi sebagai bank sirkulasi yang pertama di Jawa. Semula, presiden De Javasche Bank adalah Willem van Hogendrop, salah seorang pendiri Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Akan tetapi, yang bersangkutan menolaknya, sehingga akhirnya diputuskan untuk mengangkat Mr. Christiaan De Haan sebagai presiden pertama dan C.J. Smulders sebagai sekretarisnya yang tertuang dalam Besluit No.25 tertanggal 24 Januari 1828. Salah satu yang menarik dalam ketentuan mengenai susunan personalia pertama

dikuasainya Kerajaan Belanda oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1795, maka semua daerah koloni Kerajaan Belanda, termasuk *Kaapkolonie*, menjadi kekuasaan Napoleon Bonaparte. Supaya kekuasaan Napoleon Bonaparte tidak meluas ke daerah koloni Belanda, Inggris yang menjadi lawan Napoleon Bonaparte kemudian menduduki *Kaapkolonie* pada tahun 1795. Pada mulanya Bangsa Boer tidak menunjukkan penolakan atas pendudukan Inggris itu, tetapi ketika bahasa Inggris akan dijadikan bahasa utama di *Kaapkolonie*, Bangsa Boer menolaknya dengan melakukan migrasi ke wilayah pedalaman dan mendirikan pemukiman baru. Pemukiman baru itu kemudian menjadi negara baru. Terdapat dua negara baru bentukan Bangsa Boer, yaitu *Oranje Vrij Staat* dan *Zuid Afrikaansche Republiek*. Ketika Inggris akan menduduki kedua negara bentukan Bangsa Boer itu, mereka melakukan perlawanan. Perlawanan Bangsa Boer terhadap Inggris yang dikenal dengan *Boerenoorlog* (Perang Boer, berlangsung dua kali, yaitu tahun 1880-1881 dan 1899-1902). Dalam perang tersebut, pihak Inggris banyak mengalami kekalahan dan menewaskan ribuan tentaranya. Besarnya korban yang tewas dari pihak Inggris itu telah meningkatkan sentimen kebangsaan orang-orang Inggris. Mereka berbondong-bondong menjadi prajurit sukarela supaya bisa bertempur di Afrika Selatan. Meningkatnya sentimen kebangsaan orang-orang Inggris tersebut dikhawatirkan akan meluas dengan melawan bangsa Belanda pada umumnya. (Schoffer, 1973:23-42).

Kekhawatiran meluasnya perang serupa di kemudian hari, J. Reijsenbach, Presiden ke-10 De Javasche Bank, mengajukan permohonan kepada Dewan Militer melalui surat no. 165 tanggal 7 Mei 1902 agar membuka Kantor Cabang di Bandung. Permohonan yang sama juga disampaikan kepada Pemerintah Hindia Belanda dengan surat no. 420 tanggal 16 Juni 1902. Dengan pertimbangan bahwa kantor cabang Bandung yang akan didirikan belum tentu mendapat keuntungan, maka Direksi DJB mengharapkan adanya pengertian dari pemerintah mengenai biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Biaya dimaksud antara lain hibah beberapa bidang tanah untuk pendirian gedung dan biaya transportasi baik tenaga kerja maupun barang-barang material yang didatangkan dari Batavia dan luar Hindia Belanda. Dalam balasannya

melalui sekretaris Gubernur Jenderal pada tanggal 4 Februari 1903, pemerintah mengharapkan agar biaya-biaya pendirian gedung tersebut agar ditanggung oleh pihak DJB.

Usulan tersebut diterima oleh Direksi DJB. Namun, atas pertimbangan Menteri Jajahan Belanda, rencana pendirian DJB Bandung ditunda terlebih dahulu karena pemerintah sedang menguji kembali oktroi De Javasche Bank dan hampir berakhirnya tahun anggaran. Selain itu, De Nederlandsche Handels Bank (Bank Dagang Negara) telah lebih dahulu mendirikan kantor cabangnya di Bandung pada tahun 1903 (Arsip Bank Indonesia, *Sekilas Sejarah Bank Indonesia Bandung*).

Berselang tiga tahun, dalam rapat direksi yang berlangsung tanggal 29 Oktober 1906, tercantum bahwa telah diterima surat keputusan dari Gubernur Jenderal tanggal 24 Oktober 1906 no. 24 tentang penyerahan sebidang tanah seluas 10.460 meter persegi kepada De Javasche Bank di Desa Kejaksangirang tanpa penggantian biaya, dengan syarat bahwa di atas tanah tersebut khusus akan dibangun gedung kantor. Kantor Cabang De Javasche Bank Bandung di sudut tenggara simpang Bragaweg dan Landraadweg (sekarang Jalan Braga dan Perintis Kemerdekaan) dibuka resmi pada tanggal 30 Juni 1909, walaupun masih menempati gedung sementara (Katam, 2005). Dalam akte hak milik No. 103 tanggal 8 Maret 1907 berikut surat ukur no. 53 tanggal 13 Februari 1907 disebutkan lokasi tanah tersebut bertempat di *Residentie Preanger-Regentchappen*, *Bestuurs-afdeeling on hoofdplaats Bandoeng*, *district Oedjoengbroengjoeoen*, *dessa Kedjaksangirang* dengan nomor kadaster 1022 (Arsip Bank Indonesia, *Sekilas Sejarah Bank Indonesia Bandung*)

Setelah tanah untuk kantor cabang Bandung sudah tersedia, rencana pendirian dilanjutkan oleh Presiden De Javasche Bank yang baru, Mr. G. Vissering. Tindak lanjut rencana itu dapat terlaksana setelah terbit Keputuan Gubernur Jenderal no. 44 tanggal 9 Desember 1908 tentang persetujuan pendirian Kantor Cabang di Bandung dan Palembang. Secara resmi Kantor Cabang Bandung dibuka pada tanggal 30 Juni 1909 dengan A.M. Meertens sebagai Pemimpin Cabang Sementara

Gambar 1.7. Presiden ke-11 De Javasche Bank, Mr. G. Vissering.

Sumber: tropenmuseum

A.M. Meertens yang sebelumnya dikenal sebagai Pemegang Buku/ Pemimpin Cabang Pengganti Kantor Cabang Semarang merangkap Pemimpin Cabang Pengganti Kantor Cabang Yogyakarta dan Solo, ditetapkan sebagai Pemimpin Cabang sementara untuk Kantor Cabang Bandung. Dengan dibukanya Kantor Cabang Bandung ini, maka De Javasche Bank memiliki 15 kantor cabang, belum termasuk Kantor Cabang Palembang di wilayah kolonisasi Hindia Belanda. Ketika De Javasche Bank dipegang oleh E.A. Zeilinga Azn. (1912-1921) yang tercatat sebagai Presiden De Javasche Bank ke-12, tepatnya pada tahun 1915, gedung kantor cabang Bandung mulai dibangun secara permanen. Pembangunan gedung diawali dengan dibangunnya ruang khazanah. Kendala yang ada kala itu adalah sulitnya pengadaan bahan-bahan material yang harus didatangkan dari Eropa. Dengan memakan waktu lebih kurang tiga tahun, pembangunan gedung permanen Kantor Cabang Bandung dinyatakan selesai dan mulai digunakan pada tanggal 5 Mei 1918 (Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 1996). Semula, lokasi tempat berdirinya

De Javasche Bank Bandung merupakan tempat pertemuan para Preangerplanters (Pengusaha perkebunan di Priangan) setiap Sabtu sore, sekaligus pamer mobil baru mereka. Di seberang bank tersebut berdiri kantor Perusahaan Minyak Kelapa "Insulde", bersebelahan dengan Toko Buku dan Percetakan "Van Dorp & Co". Gedung bekas kantor perusahaan minyak itu pernah menjadi Kantor Komdak "Langlang Buana".

BAB 2

PERKEMBANGAN KOTA BANDUNG HINGGA AKHIR KEKUASAAN KOLONIAL (1909 – 1942)

Masa keemasan Bandung sebagai kota kolonial modern terjadi sepanjang periode permulaan abad ke-20 hingga kejatuhan ekonomi tahun 1930. Pada masa keemasan ini, pembangunan semakin gencar dilakukan dibandingkan masa awal kota Bandung abad ke-19. Tidak hanya itu, pertumbuhan serta dinamika masyarakat Kota Bandung semakin metropolis dengan hiruk-pikuk aktivitas jasa, perdagangan dan pusat-pusat hiburan. Iklan-iklan pariwisata di Bandung ramai melukiskan pesona kota seperti pada semboyan Bandoeng Vooruit*: "Don't come to Bandoeng, if you left a wife at home"* (Kunto, 1986: 276). Semboyan ini menjadi metafora yang menggambarkan betapa cantiknya Kota Bandung sehingga para pelancong akan 'jatuh hati' dibuatnya.

Bab kedua membahas dinamika Kota Bandung pada masa "Paris van Java", atau periode puncaknya sebagai kota modern di era kolonial. Diawali dengan bahasan mengenai pembangunan kota, antara lain gedung-gedung perhotelan, taman-taman kota dan akses transportasi. Tidak bisa dimungkiri dibangunnya fasilitas penunjang kota berkontribusi cukup besar terhadap geliat Kota Bandung pada masa kolonial. Selain itu, dibahas pula mengenai situasi perdagangan dan perbankan yang

berperan menggerakkan roda ekonomi penduduk kota. Salah satu perbankan yang memiliki peran cukup besar adalah De Javasche Bank (DJB). Sebagai bank sirkulasi dan komersial milik pemerintah kolonial, DJB turut mengawal pembangunan dengan ikut memberikan kredit kepada pemerintah kota dan perusahaan-perusahaan swasta. Oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemajuan Kota Bandung tidak hanya dipandang dari sisi ekonominya saja, melainkan sebagai lokasi rencana pemindahan ibukota menggantikan Batavia. Bagian terakhir bab ini akan membahas munculnya ide pemindahan ibukota hingga realisasinya yang terhambat karena krisis *malaise* tahun 1930.

Status *gemeente* dapat dikatakan menjadi batu loncatan bagi Kota Bandung untuk semakin berbenah dalam membangun infrastruktur sebuah kota modern, terutama sebagai kota pariwisata dan hunian bangsa Eropa. Kota Bandung yang bermula dari sebuah desa mulai menampakkan perubahannya ketika semakin ramai oleh para pendatang yang bermukim dan berwisata. Perkembangan pariwisata *gemeente* Bandung berkat kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, seperti *Vereeniging tot nut van Bandoeng en Omstreken* dan Bandoeng Vooruit, yang berperan besar dalam mengembangkan daya tarik objek wisata. Namun, lembaga tersebut memfokuskan pengembangan pariwisatanya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa dengan menjadikan Bandung sebagai destinasi utama di Hindia Belanda.

Dalam perkembangan selanjutnya, Bandoeng Vooruit menjadi lembaga yang sangat progresif dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di sekitar Kota Bandung, terutama wisata alam yang umumnya terletak di luar kota. Kota Bandung lebih berfungsi menjadi daerah transit antara tempat tinggal dengan daerah tujuan wisata. Wisatawan yang berasal dari luar Kota Bandung akan bermukim sementara sebelum dan setelah berwisata. Hal ini tentunya membutuhkan infrastruktur kota yang ditunjang dengan tersambungnya jaringan kereta api di seluruh Jawa

dan tersedianya sarana transportasi udara di Kota Bandung sejak tahun 1914. Perkembangan sektor pariwisata Kota Bandung juga diikuti oleh sektor-sektor lainnya yaitu jasa akomodasi, jasa penyedia makanan dan minuman, jasa transportasi pariwisata dan agen perjalanan (***travel trade sector***).

Sebagai daerah transit, perkembangan jasa akomodasi di Kota Bandung semakin meningkat pada dekade kedua dan ketiga abad ke-20. Dalam majalah ***Mooi Bandoeng*** pada Desember 1933 diberitakan bahwa sampai tahun tersebut di Kota Bandung telah berdiri 41 hotel, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Secara umum terdapat tiga kategori hotel yang berdiri di Kota Bandung, yaitu hotel kelas mewah, menengah dan garni (murah). Hotel mewah memberikan jasa lengkap dengan fasilitas mewah, atau hotel kelas bintang empat ke atas. Tarif hotel kategori ini berkisar antara ƒ8 – ƒ30 per kamar per hari. Hotel menengah memberikan jasa lengkap tetapi fasilitasnya tidak mewah, atau kelas hotel bintang dua sampai tiga. Tarifnya lebih rendah, yaitu antara ƒ2 – ƒ10 per orang per hari. Sementara hotel garni memberikan jasa tidak lengkap dan tidak mewah, atau pada masa sekarang ini dapat disamakan dengan hotel melati atau losmen. Tarifnya berkisar antara 10 sen sampai ƒ1 per orang per hari. Dilihat dari kepemilikannya, hotel mewah dimiliki oleh orang Eropa, hotel kelas menengah umumnya dimiliki oleh orang Eropa dan Tionghoa, sedangkan hotel kelas garni dimiliki oleh orang Cina dan Bumiputera (Nugraha, 2003).

Hotel kelas menengah dan garni sendiri dapat dikategorikan lagi menjadi dua kelompok, yaitu hotel umum dan hotel pension. Hotel umum adalah hotel yang menyediakan jasa yang baku untuk semua tamu dan biasanya menginap harian, sedangkan hotel pension selain menyediakan jasa yang bersifat umum juga menyediakan jasa khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan tamunya. Selain menerima tamu harian, hotel jenis ini juga menerima tamu bulanan dengan tarif per bulannya antara ƒ75–ƒ150 per orang untuk hotel kelas menengah.

Hotel kelas mewah yang berdiri di kota Bandung setidaknya ada tiga hotel, yaitu Grand Hotel Homann yang berada di ***Groote Postweg*** sisi bagian selatan, Grand Hotel Preanger yang juga berada di ***Groote Postweg*** tetapi berada di sisi sebelah utara, dan Grand Hotel National

berada di *Landraadweg* (Jl. Perintis Kemerdekaan). Untuk kategori hotel kelas menengah dan garni jumlahnya lebih banyak dan lebih menyebar di setiap sudut kota Bandung. Hotel kelas menengah yang tergolong hotel umum terdapat enam hotel, sedangkan yang tergolong hotel pension terdapat lima hotel. Hotel berkategori kelas garni yang tergolong hotel umum terdapat 34 hotel, sedangkan yang tergolong hotel pension terdapat 25 hotel (Nugraha, 2003).

Gambar 2.1. Grand Preanger Hotel Bandung Tahun 1915 (kiri) dan Tahun 1930 (kanan)

Sumber: KITLV

Grand Hotel Homann adalah hotel yang monumental bahkan sejak Bandung masih 'zaman baheula'. Sejak Kota Bandung masih berwujud desa kecil di pegunungan hingga menjadi kota modern, hotel ini telah menampung bermacam-macam tamu penting berkelas dunia. Deretan nama-nama seperti Perdana Menteri Perancis, George Clemenceau yang menginap tahun 1921; Raja Siam, Chulalonkorn dan Pangeran Prajathipok; Pakubuwono X; Sultan Deli beserta permaisurinya; bahkan Charlie Chaplin pernah menginap dua kali di hotel ini, yaitu pada tahun 1927 dan 1935 (Kunto, 1989: 17). Belum lagi pada masa setelah kemerdekaan dengan kehadiran tamu dari delegasi Konferensi Asia Afrika.

Tuan A. Homann sebagai pemilik pertama hotel ini adalah imigran dari Jerman yang datang bertepatan dengan berlakunya hukum agraria tahun 1870. Awalnya, bangunan hotel Homann masih berupa rumah bambu panggung, kemudian dirombak menjadi gedung papan setengah

tembok. Barulah pada tahun 1880 hotel ini dikembangkan menjadi gedung tembok utuh dan permanen bergaya arsitektur kolonial dengan gaya Art Deco. Beberapa *event* terkemuka sejak akhir abad ke-19 berlangsung di 'Homann', diantaranya penyelenggaraan pesta ketika pembukaan jalur kereta api Batavia – Bogor – Cianjur – Bandung pada tahun 1884, kemudian menyambut tamu dari para *Suikerplanters* (pengusaha perkebunan gula) tahun 1887, 'Kongres Teh Sedunia' yang digelar sekitar tahun 1924, jamuan dalam rangka *Fourth Pacific Science Congress*, dan lain sebagainya. Dan tentunya *event* yang menjadi sejarah bagi bangsa ini yaitu Konferensi Asia Afrika (Kunto, 1989: 17). Hotel Homann juga menyediakan kuda, dokar, kereta balon dan taksi untuk mengantar tamu ke objek wisata di Bandung. Pada tahun 1905, manajemen Hotel Homann bekerja sama dengan Hotel Van Horck di Garut menerbitkan buku panduan wisata berjudul *Gids voor Bandoeng Garoet en Omstreken* (Buku Petunjuk bagi Bandung Garut dan Sekitarnya). Inisiatif untuk memajukan pariwisata ini bahkan lebih dahulu daripada *Bandoeng Vooruit*.

Gambar 2.2. Grand Hotel Homann tahun 1925 (kiri) dan 1940 (kanan)

Sumber: KITLV

Beberapa hotel yang berdiri di Kota Bandung menyediakan fasilitas restoran, namun jasa penjual makanan dan minuman di luar hotel tersedia lebih banyak lagi, sehingga Kota Bandung tercatat sebagai kota yang memiliki restoran terbanyak di Hindia Belanda. Varian menu yang ditawarkan meliputi makanan Eropa, Cina, dan Bumiputera. Makanan Eropa ditawarkan di restoran-restoran yang berada di Bragaweg dan

Groote Postweg. Makanan Cina ditawarkan di restoran dan juga kedai makanan di sekitar Pasar Baru, pecinan dan alun-alun, sedangkan makanan pribumi di kedai-kedai makanan dan dijajakan di sekitar stasiun, pasar baru, dan alun-alun (Reitsma, 1926). Beberapa restoran Eropa yang terkenal di Kota Bandung antara lain Maison Bogerijen, Bandoengsche Melk Centrale, Holland Restaurant, Restaurant de Harmonie, Oranje Restaurant, Elita Restaurant, dan De Gouden Lepel. Restoran Tionghoa yang cukup terkenal terletak di Bragaweg dengan nama Shanghai Dream, Restaurant Ka Ping, Restaurant Yet Lie, dan Restaurant Hoa Sang. Restoran Bumiputera antara lain Roemah Makan Djawa Soedi Mampir, Waroeng Banjoemas, Lotek Edja, dan Lotek Arum (Nugraha, 2003).

Di sisi lain sektor jasa transportasi juga berkembang dengan baik. Masyarakat Bandung umumnya menggunakan delman dan sado sebagai sarana transportasi baik milik sendiri maupun sewaan, tercatat pada tahun 1903 jumlahnya kendaraan ini mencapai 687 buah. Delman dan sado juga menjadi sarana transportasi wisatawan untuk berkeliling Kota Bandung. Pada dasawarsa kedua abad ke-20 penggunaan mobil sebagai alat transportasi mulai ramai digunakan di Kota Bandung. Perkembangan jumlah mobil di Kota Bandung, selain didukung oleh importir mobil sejak tahun 1886 yang dilakukan oleh F.J. Fuchs, juga didukung oleh industri perakitan mobil di Cibadak yang dijalankan oleh Kerkhoven dan Mazel sejak tahun 1905. Kemudian pada tahun 1920 Perusahaan "Fuchs & Rens" di Bragaweg membuat industri yang sama (Kunto, 1985; Kunto, 1986; Nugraha, 2003).

Transportasi massal atau umum dikelola oleh suatu *onderneming* (perusahaan), baik yang mempunyai trayek tertentu maupun yang tidak, sementara untuk hotel menyewakan mobil bagi tamu-tamunya. Beberapa perusahaan angkutan darat yang dapat disebut antara lain Transporonderneming "Satim", "Ardjoeno", "Fuchs en Rens", "SH" Autobus Dienst, Autobusdienst "Bener", Autobus "The Zonen & Tan Lux", Autobus "GS Tjap Bola Dunia", Autobus "Matjan", dan "BK" Autodienst. Adapun perusahaan Transporonderneming "Satim", "Ardjoeno", dan "Fuchs en Rens" adalah perusahaan angkutan darat yang tidak memiliki trayek. Sebagai ilustrasi harga sewa mobil untuk melakukan perjalanan pada tahun 1926, perusahaan "Ardjoeno" menentukan harga sewa

ke Lembang sebesar ƒ4-ƒ6, ke Garut sebesar ƒ20-ƒ30, ke Cirebon ƒ28-ƒ32,50, dan ke Batavia ƒ50-ƒ60 (Nugraha, 2003). Perusahaan yang memiliki trayek akan menyewakan kendaraannya dengan umumnya memiliki jadwal tertentu. Trayek yang tersedia antara lain Bandung–Garut, Bandung–Tasikmalaya melalui Garut, Bandung–Tasikmalaya melalui Malangbong, Bandung– Ciamis, dan Bandung–Cianjur–Sukabumi. Pada tahun 1941, frekuensi perjalanannya sudah semakin sering, bahkan ada yang sampai setiap jam, seperti yang ditawarkan oleh Perusahaan Autodienst "Bener" dengan trayek Bandung–Tasikmalaya dan Autobus "The Zonen & Tan Lux" dengan trayek Bandung–Cianjur–Sukabumi. Kendaraan yang disediakan umumnya adalah jenis minibus, tetapi ada pula yang menyediakan bus, seperti yang ditawarkan Autobus "Matjan" dengan trayek Bandung–Tasikmalaya. Sebagai ilustrasi harga tiket, pada tahun 1926 "SH Autobus Dienst" menetapkan biaya sebesar ƒ3 untuk kelas I, ƒ2 untuk kelas II, dan ƒ5 untuk ***heen en terug*** (pulang–pergi) untuk trayek Bandung–Garut. (Nugraha, 2003)

Kemajuan lainnya di sektor pariwisata adalah keberhasilan dalam penyelenggaraan pameran ***Jaarbeurs*** yang merupakan ajang bagi pengusaha di Hindia Belanda untuk memperkenalkan produk-produknya pada masyarakat. Beberapa perusahaan internasional juga turut mendukung pameran ini. Oleh karena itu, ***Jaarbeurs*** lebih populer dan lebih banyak pengunjungnya dibandingkan dengan pameran sejenis yang diselenggarakan di Batavia (Pasar Malam Gambir) dan Surabaya (Jaarmarkt). Penyelenggaraan ***Jaarbeurs*** diprakarsai oleh B. Coops sebagai (walikota) Burgemeester Bandung, dan diselenggarakan secara rutin setiap bulan Juni atau Juli. Pengunjungnya tidak hanya dari penduduk Kota Bandung, tetapi juga dari luar Kota Bandung, dengan ***trend*** jumlah pengunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila pada awal penyelenggaraannya di tahun 1920 hanya dikunjungi 58.221 orang, maka pada tahun 1930 sudah mencapai 189.659 orang.

Gambar 2.3. Acara di Bandung tahun 1923

Sumber: KITLV

Event lain yang mengangkat kota Bandung sebagai kota *Meeting*, *Insentive*, *Convention*, *Exibhition* (MICE) di masa kolonial adalah Lomba Pacuan Kuda yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun di bulan Juli atau Agustus. Lomba ini diselenggarakan di Tegallega selama tiga hari berturut-turut dan selalu dipenuhi oleh pengunjung. Di alun-alun Kota Bandung juga sering dilakukan berbagai kegiatan, seperti lomba memanah antar pemuda yang diselenggarakan hampir di setiap hari Minggu dan juga berbagai pertunjukan kesenian. Sebuah konferensi penting yang pernah diselenggarakan di Kota Bandung adalah Konferensi Pengusaha Gula di tahun 1896 yang diikuti oleh pengusaha gula dari seluruh Jawa. Bandung dipercaya sebagai penyelenggara padahal di Kota Bandung dan sekitarnya tidak ada pabrik gula.

Selain industri pariwisata, pemerintahan kolonial Bandung juga mengembangkan prasarana dan sarana rekreasi bagi warganya. Beberapa taman dibuat di pemukiman golongan Eropa. Selain sebagai tempat rekreasi, taman-taman ini berfungsi juga sebagai areal serapan, paru-paru kota, dan pelestarian tanaman langka. Taman-taman yang terdapat di Kota Bandung adalah Pieterspark (Taman Merdeka) didirikan tahun 1885, Molukenpark (Taman Maluku) didirikan tahun 1919, Ijzermanpark (Taman Ganesha), Oranjeplein, Citarumplein, Jubileumpark (Taman Sari) dibangun tahun 1923 untuk menanam berbagai jenis tanaman langka, Insulindepark didirikan tahun 1925 yang kemudian menjadi Taman Lalu Lintas. Pada tahun 1933, Jubileumpark digabungkan dengan Bandoengsche Zoologischpark (Kebun Binatang Bandung).

Taman yang cukup unik adalah *Insulinde Park* atau jika diterjemahkan berarti Taman Nusantara. *Gemeente* Bandung sejak awal pembangunannya telah menetapkannya sebagai "inti" dari suatu komplek wilayah yang memiliki identitas nama jalan dengan nama-nama kepulauan di Nusantara, seperti Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Riau, Jalan Kalimantan, dan lain-lain. Taman yang saat ini lebih dikenal dengan nama Taman 'Lalu Lintas' itu, adalah hasil eksperimen para ahli botani dan pertamanan untuk menemukan corak taman yang representatif dengan paduan gaya tradisional dan iklim tropis. Dalam agenda *Bandoeng Vooruit* selama tahun 1930 – 1935, keberadaan taman-taman di Kota Bandung memang bukan hanya menjadi hiasan namun sebisa mungkin juga menjadi '*Mini Botanical Garden*'. Di bawah pengawasan ahli botani Dr. L. van der Pijl, pada setiap tanaman yang tumbuh di taman Kota Bandung terpasang papan nama dalam Bahasa Latin, Sunda, dan Melayu. Hal tersebut untuk memfungsikan taman juga sebagai sarana pendidikan dalam membangkitkan minat terhadap ilmu pengetahuan dan kecintaan akan kelestarian alam (Kunto, 1986: 295).

Prasarana dan sarana rekreasi lainnya yang dibangun adalah Museum van den Dienst van den Mijnbouw (Museum Geologi) tahun 1929 dan Museum van den Post Telegraaf en Telefondienst (Museum Pos), Dago Tee Huijs (perbukitan Dago), Bloemendel (di Ciumbuleuit). Selain itu, juga tersedia Societeit Concordia yang direnovasi pada tahun 1927-1929 menjadi bangunan yang megah dan tempat hiburan (*Soos Ons Genoegen*) bagi masyarakat Indo. Museum-museum yang dibangun tersebut berfungsi sebagai tempat rekreasi sekaligus untuk pendidikan. Kolam renang juga tersedia, yaitu di Lembangweg (Jl. Cihampelas) dan di Centrum. Tempat rekreasi belanja terdapat di sepanjang Bragaweg dan Passer Baroe (Pasar Baru). Kedua tempat ini sering dipromosikan oleh *Bandoeng Vooruit*.

Bagi masyarakat golongan Bumiputera, tersedia *Feestterrein* yang oleh masyarakat Kota Bandung dinamakan "*pistre varia*", serta alun-alun kota yang selalu menyelenggarakan kegiatan pada akhir pekan dan rekreasi kuliner setiap harinya. Bioskop juga menjadi tempat rekreasi penting bagi masyarakat Bumiputera. Bioskop pertama di Kota Bandung berdiri tahun 1907 yaitu de Crown Bioscop dan Oranje Electro Bioscop. Pada tahun-

tahun berikutnya bioskop yang didirikan semakin banyak. Bioskop yang didirikan pada tahun 1920-an dan sesudahnya antara lain Rivoli, Roxy, Majestic, Luxor, Orion, Oriental, Radio City, Elita, Oranje, Regol, Hawai, Empres, dan Apolo. Objek wisata alam yang berada di Kota Bandung dan banyak dikunjungi oleh masyarakat Bumiputera adalah Situ Aksan dan Situ Garunggang yang juga dikenal dengan nama Empang Cipaganti. Di empang ini pengunjung bisa menyewa perahu yang bernama Selimars.

Gambar 2.4. Gedung Bioskop De Orion (Preanger Theater) di Bandung 1920

Sumber: KITLV

Sejak masa kolonial penataan kota Bandung telah dilakukan dengan rapi. Tidak hanya dalam hal penataan ruang-ruang kota, namun penataan infrastruktur penunjang juga dilakukan dengan baik antara lain kondisi jalan; saluran gas; saluran air bersih dan kotor; dan hal-hal lain yang mendukung bagi kenyamanan penghuninya. Saluran air kotor dibuang ke suatu tempat pembuangan di selatan Tegallega (sekarang menjadi daerah Jalan Inhoftank) dengan menggunakan saluran-saluran buatan.

Di tengah kemajuan Kota Bandung yang ditopang pengusaha perkebunan Eropa, usaha pribumi yang mencoba bangkit dari keterpurukan bisa dibilang juga sangat signifikan. Salah satunya adalah dengan keberadaan *Urang Pasar* atau 'orang pasar', yakni para pedagang atau saudagar yang mampu menjadi pemain penting dalam geliat perekonomian Bandung. Pada perkembangannya saudagar-saudagar ini tidak hanya mementingkan usaha pribadi semata, melainkan turut berjuang mengangkat derajat kaum pribumi yang mendapat perlakuan berbeda dari pemerintah kolonial. Untuk menembus ketatnya persaingan ekonomi dengan bangsa Timur Asing dan peraturan pemerintah kolonial tersebut, saudagar-saudagar di Bandung membentuk kongsi dagang dan berkembang menjadi koperasi simpan pinjam yang dinamakan Himpunan Saudara (HS).

Sebelum masyarakat pribumi memiliki saudagar besar, pada akhir abad ke-19 sudah ada beberapa pedagang yang menjual barang-barang sederhana seperti ayakan dari bambu, keranjang, batu asahan, sapu, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat para pedagang kain batik yang umumnya berasal dari daerah Jawa Tengah yang sering disebut 'mandoran'. Asal-usul para pedagang batik ini dipercaya bermula dari hikayat leluhur mereka yang merupakan bekas pengawal Pangeran Diponegoro. Setelah mengetahui Belanda berhasil menangkap pemimpinnya, mereka berpindah dari Demak ke Cirebon. Ketika sampai di sebuah tempat di sekitar Plered (selatan Cirebon), mereka beralih profesi menjadi pedagang batik. Kemudian mereka pun membawa dagangannya serta bermukim di Pasar Baru Bandung dan masyarakat Bandung menyebut keturunannya sebagai *Urang Pasar* (Panigoro, dkk., 2006: 21). Dapat dikatakan bahwa pada masa itu golongan saudagar pribumi di Bandung memiliki pertalian darah dengan senapati pasukan Diponegoro. Akan tetapi, kepercayaan tersebut harus disembunyikan karena dalam berkas *Politieke Inlichtingen Dienst* atau Polisi Rahasia Hindia Belanda, sudah tercatat mengenai asal-

usul urang pasar tersebut. Bisa menjadi masalah apabila diketahui para saudagar itu keturunan kaki-tangan Pangeran Diponegoro yang dianggap pemberontak oleh Belanda (Panigoro, dkk., 2006: 21).

Para pedagang kain batik 'mandoran' mengambil barang dari berbagai tempat, seperti Solo, Yogyakarta, Pekalongan, Gresik, Banyumas dan Lasem. Kain yang dibelanjakan kemudian dijual kembali di Priangan. Sebagian besar disebar di Lembang, Padalarang, Cimahi, Soreang, Banjaran, Ciparay, Majalaya, Cicalengka, Ujungberung dan perkampungan di sekitar Kota Bandung. Perjalanan panjang menembus pedalaman hutan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah biasa dilakukan dalam bentuk kafilah yang terdiri dari rombongan puluhan pedagang dengan kawalan prajurit bayaran. Perjalanan yang memakan waktu berminggu-minggu itu terbayar dengan berkembangnya para pedagang pribumi di Kota Bandung, yang mulanya hanya menerima 'barang commisie', kemudian menjadi pedagang 'grosiran' yang melayani pedagang-pedagang eceran di sekitar alun-alun kota (Kunto, 1986: 849).

Menurut Dadang Dachmir dalam buku Haryoto Kunto, para pionir saudagar yang menjadi rumpun Urang Pasar sejak tahun 1850, antara lain H. Kadar, H. Doersaid, Ende Rapi'ah, H Saleh Katam. Dari merekalah kemudian menurunkan saudagar yang sukses tatkala Bandung memasuki abad ke-20, seperti: H. Pahroerodji, M. Masdoeki, H. Syarief, H. Idris, H. Ayoeb. H. Pagieh, H. Achsan, H.M. Boekri. Selain itu, adapula saudagar-saudagar terkenal keturunan Palembang, seperti K.M Thamim, K.H Anang Thayib, K. Abdul Syukur. Umumnya mereka memang tinggal di dekat Pasar Baru, di sekitar jalan Otto Iskandardinata, dan jalan Westerpassers-straat (Kunto, 1986: 850). Pada tahun 1906, beberapa saudagar itu mendirikan koperasi dan membuat serikat dagang untuk mempersatukan tenaga dan modal sehingga menjadi cikal bakal HS. Meski telah didirikan pada tahun 1906, HS baru diresmikan sebagai badan hukum oleh pemerintah kolonial setelah terbit *governementbesluit* tanggal 4 Oktober 1913.

Salah satu ciri HS pada masa awal mirip seperti berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) yang sama-sama dibesarkan oleh kaum santri. Salah satu prinsip yang dibawa oleh HS di Kota Bandung adalah mengampanyekan kepada para anggotanya agar hidup hemat serta rajin menabung. Hal itu tergambarkan dalam motto HS sebagai berikut:

Biblintik tut saeutik / Hemat cermat sedikit-dikit jadi bukit
Geus gede ngen kari make / Sudah terkumpul banyak tinggal pakai
Bapak tani sugih mukti / Bapak tani kaya bahagia
Nu dagan ngan kari senang / Yang dagang memetik keuntungan
Saudagar tambah baleunghar / Saudagar tambah kaya raya
Cekek gawe tibra hate / Hati tenteram punya pekerjaan.

Kiprah para saudagar batik dan pedagang-pedagang pribumi semakin menunjukan kegemilangannya pada tahun 1920. Akan tetapi, pemerintah kolonial kurang berkenan dengan masuknya pribumi sebagai pemain utama dalam mata rantai perdagangan dan pemasaran. Hal tersebut dikarenakan posisi pribumi sebagai agen atau pedagang grosiran masuk dalam mekanisme penentuan harga. Sementara itu, dengan diberlakukannya penggolongan penduduk Hindia Belanda dalam pasal 109 *regeringsreglement*, etnis Tionghoa lebih banyak berkembang karena

Gambar 2.5. Suasana Pasar Baru Bandung Tempo Dulu Tahun 1920

Sumber: KITLV

lengkap, toko De Vries juga menjadi salah satu pionir di Kota Bandung yang kala itu masih sepi penduduk Eropanya. Seiring pertumbuhan di sekitar pusat kota, bermunculan pula berbagai toko kelontong lain di sepanjang *grotepostweg*, seperti tiga toko milik orang Yahudi – toko "Ziekel", "Salomon & Son", dan toko "Luphe". Selain itu ada pula toko milik orang Belanda dan Perancis – toko "Thiem", "Rouch", dan toko "Baqiu" yang menjual minuman keras (Kunto, 1986: 327).

Dalam mengendalikan kestabilan harga di pasar, pemerintah kolonial melakukan kontrol dengan sangat ketat, terutama terhadap harga sandang dan pangan. Bahkan pada tahun 1921 didirikan satu perkumpulan bernama *Middenstandvereeniging Bandoeng* untuk melindungi kepentingan konsumen terutama orang Eropa. Pemerintah kolonial mewajibkan kepada setiap pedagang agar melengkapi barang dagangannya dengan label harga. Jika hal itu tidak dilakukan, maka pedagang-pedagang yang melanggar bisa dikenakan sanksi mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha (Kunto, 1986: 852).

Gambar 2.6. Toko Kelontong J.R de Vries & Co. di Jalan Braga Bandoeng

Sumber: KITLV

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan *Handelsvereniging te Bandoeng*, digambarkan bahwa Bandung telah tumbuh menjadi kota yang diperhitungkan dalam kegiatan perdagangan. Mengingat adanya kepentingan ekonomi tersebut, maka pada tanggal 22 Februari 1923, pemerintah kota bersama beberapa *stakeholder* membicarakan tentang pendirian kantor bea cukai. Walikota mengundang anggota pemerintah kotapraja dan para sekretaris perkumpulan perdagangan (*Handelsvereniging*) dan perkumpulan pedagang kelas menengah (*Middenstandvereniging*). Sebenarnya isu pendirian kantor bea cukai bukan sesuatu yang baru bagi pemerintah Hindia Belanda, tetapi karena kantor tersebut harus didirikan segera di Bandung, maka perlu pengamatan kembali terhadap beberapa hal seperti: jawatan yang akan mengurusi langsung impor dari luar negeri di Bandung; tempat penyimpanan; dan kerja sama dengan perusahaan perkapalan. Untuk poin pertama dilakukan oleh *Middenstandvereniging* karena produk/

barangnya berhubungan dengan rumah dagang, namun tetap dipantau oleh *Handelsvereniging* sebagai pembuat peraturan. Kegiatan tersebut juga dilakukan oleh perkumpulan pedagang Cina (*Handelsvereniging te Bandoeng*, 1923).

Handelsvereniging di Kota Bandung diketahui memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dengan pemerintah kota. Salah satunya adalah ketika mereka mengkritik Keputusan Gubernur tanggal 14 Juni 1923 No. 49 tentang perluasan jaringan telepon dari 3 km menjadi 6 km, sehingga abonemen telepon yang awalnya ditetapkan *f*8, lalu menjadi *f*12 dan terakhir menjadi *f*15. *Handelsvereniging* menyayangkan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan tidak berkoordinasi dengan advisornya. Sebagai pihak yang sama-sama membuat peraturan, keduanya masih kurang kerja sama dan menjalin kesamaan dalam pemahaman bahwa perkembangan ekonomi di Bandung merupakan hasil dari ramainya perdagangan.

Bukti lain dari daya tarik Bandung sebagai kota perdagangan adalah digelarnya pertemuan anggota *Handelsvereniging* tanggal 3 Agustus 1923 di Hotel Preanger. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan kantor dagang dari kota-kota besar di Jawa, antara lain A.H. kloppenburg; Ir. J.P. Delprat; M.G. van Heel; A.M. Weynhof dan G. Stout (Semarang) A.H. Geistdrfer; E.J. van Goor; dan A Bos (Surabaya) C.W.A.M. Groskamp; A.E. Simon Thomas (Batavia) Jhr. L.W. van Schutelen; B.F.E.R. Janssen-Andeweg; H. Hoekstra; J.B. van der Poll dan P.K.G. de Bont (Bandung).

Pasar menjadi jantung perekonomian kota Bandung, sebagaimana dalam laporan DJB tahun 1923 disampaikan bahwa bisnis pasar daerah memberikan pendapatan yang cukup banyak, bahkan tambahan/retribusi daerah juga menjadi sumber pendapatan yang besar. Namun, pemerintah kolonial memberikan perhatian pada masalah kendaraan yang lalu lalang di sekitar pasar. Berdasarkan keputusan *gemeenteraad*, kendaraan mobil yang membawa barang lebih dari 3,5 ton tidak diperbolehkan melintas. Karavan/iringan pedagang juga menjadi masalah bagi perdagangan mobil dan jasa truk karena sulitnya karavan untuk mengangkut barang-barang tersebut dibuat (*Jaarstukken Bandoeng 1922-1923*).

Kota Bandung dengan kondisi jalan yang sudah cukup baik juga mulai banyak dilintasi oleh mobil. Bahkan perusahaan besar "Fuchs &

Rens" yang merupakan agen penjual mobil sekaligus bengkel perakitan sudah berdiri di Bandung sejak tahun 1919. Perusahaan itu sudah mengimpor mobil ke Hindia Belanda sejak tahun 1886. Di bawah manajer tuan E. Hilkers (1928), "Fuchs & Rens" merakit mobil merek Packard, Chrysler, De Soto, Plymouth, Renault, dan Fargo. *Showroom* mereka yang terletak di Jalan Braga menjadi tempat para pengusaha perkebunan kaya *preangerplanters* membeli mobil-mobil sedan paling terbaru (Kunto, 1985: 307).

Kota Bandung yang menjadi kantung pariwisata dan perdagangan di Keresidenan Priangan, mendorong pemerintah lebih giat membangun infrastruktur. Sejak dibuka pada 30 Juni 1909, operasional De Javasche Bank Agentschap Bandoeng dapat dikatakan sudah cukup menjanjikan. Dalam laporan perjalanan dinas pada akhir September 1909 ke Cirebon, Semarang, Solo, Cilacap dan Bandung, Direktur De Javasche Bank, E.A. Zeilinga Azn., mengungkapkan kesan terhadap kantor cabang yang baru dibuka beberapa bulan tersebut. Ia berkunjung ke gedung DJB Bandung yang menempati tanah sewaan dari Firma van Arcken & Co yang terletak di Jalan Braga.

uang dari kantor-kantor cabang lain ke Bandung tidak diperlukan. Bahkan, dalam catatan lain pada tanggal 10 Agustus 1910 Direksi meminta agar DJB Cabang Bandung melakukan pengiriman uang peraknya sebanyak *f*200.000 ke Kantor Cabang Yogyakarta. Kepada pemimpin cabang, Zeilinga mengingatkan perlunya mencari penyelesaian untuk kelancaran pengeluaran uang perak ke peredaran. Hal itu juga sejalan dengan prinsip De Javasche Bank yang selalu berupaya sedapat mungkin membayarkan uang-uang pecahan kecil kepada para petani. Hal itu bisa terjadi apabila perusahaan-perusahaan perkebunan bersedia menerima uang pecahan kecil pada waktu mereka menarik uang atau saat pengambilalihan wesel. Oleh karena itu, Zeilinga juga menekankan kepada pemimpin cabang agar tidak mempertimbangkan agio sewaktu nasabah melakukan pembayaran dengan uang-uang pecahan kecil.

Dalam laporan Zeilinga pada tahun 1910 tersebut, dapat diketahui jam operasional DJB Bandung setelah diadakan kesepakatan bersama dengan beberapa bank di Bandung adalah pada pukul 09.00 hingga 15.00 dan pada hari Sabtu mulai pukul 09.00 hingga 12.00. Kendati di Bandung sudah lebih dulu berdiri beberapa bank seperti Nederlansche Indies Escompto Maatscappij dan Nederlansche Indies Handelsbank, kinerja De Javasche Bandung juga dirasakan mengalami peningkatan sehingga dengan perkembangan yang bertahap akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagai bank sirkulasi dan komersial, DJB Agentschap Bandoeng menjadi salah satu pihak pemberi pinjaman untuk dana pembangunan Kota Bandung. Salah satu surat permintaan pinjaman pada tahun 1911 menunjukkan skema pengajuan yang dimulai dengan masuknya surat pengajuan pinjaman oleh Asisten Residen Bandung kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Lalu setelah Gubernur Jenderal menyetujui usulan peminjaman dana tersebut, maka surat putusan itu dikirim kepada DJB Bandung dan diteruskan kepada DJB pusat di Batavia. Salah satu contoh alur ini antara lain tercatat dalam putusan *gemeenteraad* Bandung no. 540 tanggal 22 Desember 1911 mengenai *Leening Der Gemeente Bandoeng* (Peminjaman Kotamadya Bandung) sebesar 1.100.000 gulden (Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 10 Juni 1912).

Berdasarkan surat DJB Bandung kepada *gemeenteraad* Bandung tanggal 18 Februari 1913, pinjaman tersebut dapat diambil pada 1 Mei 1913. Bersama surat itu, DJB mengingatkan kepada *gemeente* untuk melengkapi beberapa dokumen, antara lain: salinan resmi bersertifikat persetujuan peminjaman dari *gemeente* Bandung; memoar penjelasan undang-undang ketetapan tersebut; keputusan persetujuan dari Gubernur Jenderal dan ketetapan yang disediakan pemerintah untuk memastikan pengawasan terhadap peminjaman tersebut. Adapun yang meminta surat-surat resmi ini adalah De Amsterdamsche Bank yang juga memberikan tawaran untuk peminjaman tersebut. De Amsterdamsche Bank juga meminta kepada *gemeente* Bandung sebuah penjelasan tertulis bahwa pihak *gemeente* menjamin dapat membayar bunga dan pelunasan dengan nilai pari (nilai rata-rata) Amsterdam. Hal itu diperlukan untuk mendapatkan catatan indeks resmi dari Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam (Asosiasi Bursa Efek Amsterdam) (Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 18 Februari 1913).

Pada masa awal abad ke-20, tingkat kepercayaan lembaga perbankan Eropa dalam memberikan kredit pinjaman kepada pemerintah daerah di Hindia Belanda masih sangat rendah. Seperti dalam laporan DJB Bandung kepada pusat mengenai permintaan pinjaman Keresidenan Priangan kepada DJB Bandung senilai 350.000 gulden. Kendati telah menyampaikan kesediaannya, DJB Bandung meyakini perlu adanya peran dewan pusat agar melibatkan satu atau lebih perbankan lain. DJB Bandung berpendapat pinjaman kepada Keresidenan Priangan dengan angka tersebut masih terbilang kecil sehingga ditolak catatan indeks bursa Amsterdam dan hanya masuk ke bursa Hindia Belanda. Lembaga-lembaga perbankan besar seperti Het Duitsche Rijk dan Het Koninkrijk Pruisen tidak dapat mendukung permintaan dana tersebut. Keresidenan dan daerah-daerah lain yang mulai mengembangkan permintaan kredit mereka ke pasar terbuka pada akhirnya tidak terlalu banyak mendapat dukungan dana. Bagaimanapun, pada waktu itu lembaga-lembaga perbankan besar menghendaki pertanggungjawaban moral untuk mengawasi keadaan pinjaman tersebut dan mendukung agar dapat menahan fluktuasi yang tinggi.

Jaminan pengembalian hutang menjadi isu penting bagi pihak-pihak yang memberikan pinjaman kredit. Hal itu berkaitan pula dengan kepercayaan pada alokasi dan kemampuan peminjam dalam melunasi bunga dan hutangnya. Dalam laporan pengajuan pinjaman kepada DJB Bandung, baik oleh Keresidenan Priangan di atas, maupun Gemeente Bandung pada 13 April 1931, dapat diketahui DJB Bandung menawarkan bunga tahunan sebesar 4,5%. Pada tahun 1931, pemerintah Kota Bandung meminta pinjaman jangka panjang kepada DJB sebesar 1.000.000 gulden dengan bunga 4,5% - 5% yang pembayarannya dilakukan dalam waktu 37 tahun mulai dari 1 Desember 1932 hingga 1979. Pinjaman dapat diambil secara penuh atau sebagian, atau dengan penyerahan surat pengakuan hutang dalam bentuk obligasi (Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 13 April 1931).

Beberapa alokasi pinjaman dari dana tersebut digunakan oleh pemerintah kota untuk membangun infrastruktur, antara lain pembangunan saluran air, gedung Departemen Pemerintahan (*Departemen van Gouvernement*) dan rumah para pegawai pemerintah (*ambtenaren*). Pada akhir tahun 1923 gedung Departemen Pemerintahan sudah rampung dan sudah dapat digunakan (*Jaarstukken Bandoeng 1921 – 1930*). Selain itu, De Javasche Bank juga bekerjasama dengan pemerintah dalam menarik investor luar agar membantu beberapa proyek pembangunan. Salah satunya pemerintah pernah meminta saran kepada DJB untuk mengumpulkan investor dalam proyek pembangunan observatorium sebesar 200.000 gulden dengan keuntungan sebesar 5%. DJB tidak memiliki wewenang sebagai pihak yang dapat menentukan besaran keuntungan tersebut melainkan langsung oleh pemerintah Belanda dan Hindia Belanda. Beberapa perusahaan yang berminat mendanai proyek ini antara lain Deutsche Rentenbank, Gewerktschaft Victor dan Francsche Spoorweg (Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 10 Desember 1928).

DJB Bandung sebagai bank komersial juga memberikan pinjaman kepada swasta. Untuk memastikan reputasi dari firma dan perusahaan peminjam dana, maka DJB melakukan korespondensi dengan beberapa

persatuan pedagang seperti Middenstad Vereeniging dan West Java Handel Maatschappij (Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 25 Agustus 1912). Seperti dalam kasus Firma Buyn & Co. yang mengalami pemeriksaan langsung oleh jaksa karena diduga melakukan kecurangan. Dalam laporan DJB tanggal 31 Juli 1925, disebutkan bahwa firma Buyn & Co sebagai perusahaan ekspor-impor sangat lambat dalam pengiriman produk yang dibelinya untuk pihak ketiga. Keterlambatan ini bisa sampai berbulan-bulan, sementara informasi dari Buyn & Co mengaku barang-barang tersebut belum diterima dari negeri Belanda, padahal barang tersebut sudah sampai ke NHM dan Nederlansche-Indische Escompto meski tidak digadaikan di sana karena perusahan tersebut tidak memiliki wewenang menggadaikan. Jaksa yang dikirim pemerintah dan kepala resersi sudah menyampaikan kepada NHM bahwa 90% barang Buyn & Co. yang didaftarkan kepada NHM sudah digadaikan dananya kepada pihak-pihak lain (Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 31 Juli 1925).

Ramainya perekonomian yang digerakan oleh sektor perdagangan mendorong hadirnya peran perbankan, tidak hanya di pusat kota namun bank juga hadir untuk menyalurkan bantuan ke desa-desa. Sampai tahun 1928, setidaknya sudah berdiri 200 bank desa di Bandung yang memberikan kredit perorangan dan dikeluarkan dalam tempo mingguan maupun bulanan dengan besaran *f*25 – *f*100. Bahkan, sudah ada kerjasama perbankan dengan Dinas Penyuluhan Pertanian. Kredit khusus diberikan kepada petani kentang di Pangalengan (Bandung Selatan) yang pengembalian kreditnya dapat dilakukan setiap enam bulan, yaitu menyesuaikan waktu panen para petani (ANRI, Memori Serah Terima Jabatan 1921 – 1930).

Secara umum, keadaan bank daerah di Bandung selama tahun 1926 hingga 1928 menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Selain melayani pelaku usaha di sektor pertanian, pelayanan bank desa juga diperluas menjangkau usaha-usaha normal dan perkebunan. Pada tahun 1927 diadakan pembicaraan mengenai pemberian kredit untuk membeli bibit teh dan membuat penyemaian bibit teh. Suku bunga juga diatur agar tidak memberatkan di distrik terpencil, dimana untuk kredit *f*200 ke bawah

diturunkan dari 18% menjadi 15%, bahkan diturunkan lagi menjadi 12% sejak 1 Januari 1928. Keberadaan bank desa di Bandung juga berperan untuk menekan praktik lintah darat yaitu dengan mengadakan pertemuan anti-lintah darat dan membantu memberikan kredit dengan jaminan dana garansi. (ANRI, Memori Serah Jabatan 1921-1930: CII)

Peran perbankan di Bandung bisa dikatakan cukup signifikan. Sebelum pembukaan kantor DJB di Bandung pada tahun 1909, memang sudah muncul beberapa lembaga perbankan lainnya. Salah satu bank tertua di Bandung adalah Nederlandsche Indische Escompto Maatschapij yang sudah dibuka sejak tahun 1857, dan berlokasi di persimpangan *Groote Postweg*. Bisa dibayangkan bahwa pada tahun tersebut Bandung masih menjadi desa, karena Bandung baru menjadi ibukota Priangan sejak *besluit* No. 18 tanggal 17 Agustus 1864, dan bahkan baru pada tahun 1906 menyandang status *gemeente*. Pada masa itu, arus kredit yang diberikan perbankan umumnya masih banyak mengalir kepada para pengusaha perkebunan (Panigoro, dkk., 2006: 19). Tentunya kredit pada periode tersebut juga hanya terbatas di kalangan pengusaha Eropa karena sampai tahun 1870, Belanda masih menerapkan sistem ekonomi yang konservatif.

Bank lain yang terbilang tua berdiri di Kota Bandung adalah De Eerste Nederlandsche-Indische Spaarkas en Hyphoteekbank (DENIS). Bank ini merupakan bank tabungan dan hipotek pertama di Hindia Belanda, pada tahun 1915 DENIS membuka kantor cabang Bandung yang terletak di Jalan Braga No. 14. Sementara itu Escompto Bank yang sejak pertengahan tahun 1900 bertempat di Jalan Braga bagian selatan (sekarang Balai Wartawan), sejak tanggal 29 Januari 1912 pindah ke gedung baru di Grote Postweg (Jalan Asia Afrika), berseberangan dengan kantor pos. Bank DENIS terbilang berjasa terhadap pemerintah Kolonial Belanda baik di pusat dan daerah Bandung dalam mengatasi krisis keuangan akibat malaise (1930-an) dan menghadapi Perang Dunia II (Hardjasaputra, 2002).

Peran perbankan dan koperasi juga sangat signifikan, khususnya pada saat krisis *malaise* tahun 1930. Salah satu dampaknya adalah semakin banyak bermunculan bank-bank gelap, atau praktik 'lintah darat' yang menjerat masyarakat. Mereka memberikan hutang dengan

bunga yang sangat tinggi, bahkan ada istilah T.T.T atau *Tien Terug Twaalf* (sepuluh kembali duabelas). Adanya koperasi simpan pinjam seperti HS dan perbankan juga sangat membantu bagi masyarakat yang butuh dana. Selain itu, sempat dibuat '*Anti-Woeker Vereeniging*' (Perkumpulan Anti Rentenir) dengan Residen Priangan E. Tacoma sendiri sebagai pelindung organisasi. Selama masa bakti tahun 1927 – 1938, tercatat ada 1.491 kasus menimpa orang Eropa, 75 kasus orang Cina, 1 kasus orang Arab, dan 1.883 kasus penduduk Pribumi (Kunto, 1986: 856).

Reputasi Kota Bandung sebagai kota kolonial modern menjadikan kota di jantung Jawa Barat ini pernah diusulkan sebagai Ibu kota Hindia Belanda. Usulan tersebut awalnya muncul dari laporan seorang ahli kesehatan Belanda, H.F Tillema, yang mengatakan bahwa kota-kota di pantai utara Jawa kurang sehat jika dijadikan sebagai pusat administrasi pemerintah. Menurut Tillema, hawa panas dan areal lahan yang dikelilingi rawa-rawa, tidak kondusif bagi para pegawai pemerintahan karena membuat badan cepat lelah dan rentan terjangkit penyakit. Tillema kemudian menyampaikan kepada Gubernur Jenderal van Limburg Stirum (1916 – 1921) agar ibu kota yang berada di Batavia dipindah ke Bandung yang memiliki nuansa sejuk pegunungan. Ide tersebut sempat luput dari perhatian Gubernur Jenderal, sampai kemudian Prof. J. Klopper, seorang Rector Magnificus *"Bandoengsche Technische Hoogeschool"* (sekarang ITB), mengangkat kembali isu pemindahan ibu kota (Kunto, 1996: 93).

Realisasi gagasan pemindahan ibu kota dilakukan dengan membentuk sebuah Tim Perencanaan yang terdiri dari gabungan beberapa instansi pemerintahan, antara lain: *Genie Militair, Burgerlijke Openbare Werken* (Dinas Pekerjaan Umum Pusat), *Gemeentelijk Bowbedrijf* (Perusahaan Bangunan Kotapraja), dan *Gemeentewerken* (Dinas Pekerjaan Umum Kota Praja). Sebagai ketua tim perencanaan, ditunjuk V.L. Slors yang merupakan pensiunan militer berpangkat kolonel. Salah satu alasan penunjukan Slors adalah karena pada tahun 1895, ia juga

pernah dipercaya pemerintah kolonial untuk membangun Kota Cimahi dan kompleks militer di Bandung.

Tim perencanaan tersebut juga turut mengikutsertakan nama-nama arsitek terkemuka seperti Ir. J. Gerber yang mewakili Landsgebowendienst (Dinas Pertanahan) lalu Ir. E.H. de Rood dan Ir. G. Hendriks yang mewakili pihak Gemeente van Bandoeng, serta beberapa teknisi lain dari Dinas Pekerjaan Umum Hindia Belanda (Kunto, 1996: 95). Tugas dari tim tersebut antara lain: Memindahkan semua departemen dan instansi pemerintah pusat dari Batavia ke Bandung; Memilih lokasi yang tepat di Kota Bandung, untuk dijadikan *Gouvernements Bedrijven* (GB) atau Instansi Pemerintah Pusat; Melengkapi kompleks instansi pemerintah pusat di Bandung dengan lebih kurang 1.500 bangunan rumah bagi karyawan pemerintah yang pindah dari Batavia; Serta mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan jawatan pemerintah yang terkait, guna melancarkan dan menyukseskan rencana yang ada.

Kompleks pemerintahan pusat yang akan dibangun di lahan itu yakni: (1) Departemen Lalu Lintas dan Pengairan (*Departement Verkeer en Waterstaat*); (2) Kantor Pusat Komunikasi (*Hoofdbureau Post Telegraaf en Telefoon*); (3) Departemen Kehakiman (*Departemen van Justitie*); (4) Departemen Pendidikan dan Pengajaran (*Departement van Onderwijs en Eredienst*); (5) Departemen Keuangan (*Departement van Financien*); (6) Departemen Dalam Negeri (*Departement van Binnenlands Bestuur*); (7) Departemen Perekonomian (*Departement van Economische Zaken*); (8) Mahkamah Agung (*Hooggerechtscholf*); (9) Dewan Rakyat (*Volksraad*); (10) Kantor Pemerintah Pusat (*Centrale Regeering*); (11) Sekretariat Negara (*Algemeene Secretarie*); (12) Laboratorium Geologi dan Pertambangan (*Laboratorium Geologie en Mijnwezen*) (Hardjasaputra, 2002: 138).

Pembangunan *Gouvernements Bedrijven* atau Gedung Pusat Pemerintahan dimulai sejak 27 Juli 1920 saat Johanna Catherina Coops - putri sulung Walikota Bandung B. Coops – meletakkan batu pertama, yang dihadiri pula Petronella Roelfsen selaku perwakilan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pembangunan Gouvernements Bedrijven memerlukan tenaga kerja sekitar 2.000 orang, 150 diantaranya orang Tionghoa yang memiliki keahlian memahat batu, dan sisanya orang pribumi. Batu-batu yang digunakan sebagai bahan bangunan berasal dari perbukitan di

wilayah Arcamanik dan Gunung Manglayang. Dari lokasi pengolahan, balok-balok batu diangkut dengan kereta gantung ke Cihaurgeulis, lalu diteruskan pengangkutannya memakai lori ke lokasi pembangunan.

Pembangunan *Gouvernements Bedrijven* akhirnya selesai pada September 1924. Sebelum bangunan *Gouvernements Bedrijven* rampung, beberapa bangunan penunjang pemerintahan lainnya telah selesai lebih dulu. Pada 29 Oktober 1918 perusahaan listrik *Gemeenschappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken* (GEBEO) didirikan, untuk mengelola pembangkit tenaga listrik di daerah Dago tahun 1921. Aliran listrik yang dikelola GEBEO sangat menunjang bagi pengadaan energi fasilitas kota. Pada 1924, aliran listrik Kota Bandung mendapat tambahan dari pembangkit listrik Sentral Lamajang (Cisangkuy). Di bidang komunikasi, pada 1923 berdiri Stasiun Radio Malabar yang dirancang oleh Ir. G. J. de Groot. Hubungan komunikasi radio resmi antara Hindia Belanda dengan negeri Belanda dilakukan pertama kali pada 5 Mei 1923. Sementara itu, pembangunan gedung pusat komunikasi *(Hoofdbureau Post Telegraaf en Telefoon)* baru selesai pada awal tahun 1924. Dalam bidang perhubungan - selain Bandung telah terbuka untuk transportasi kereta sejak 1884 – transportasi udara pun pertama kali dibuka sejak 1 November 1928 di Lapangan Udara Andir (sekarang Bandara Husen Sastranegara) yang sebelumnya telah diresmikan sebagai lapangan militer sejak 1914.

Selain dilengkapi dengan fasilitas penunjang pemerintahan, kota juga dilengkapi dengan fasilitas umum, seperti rumah sakit. Kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang memadai sudah menjadi tuntutan mengingat penduduk Kota Bandung sudah mencapai lebih dari 100 ribu jiwa pada 1920an. Adapun wewenang pengelolaannya tidak lagi berada di bawah Dinas Kesehatan Umum (pusat), tetapi dilimpahkan ke Dinas Kesehatan Daerah (*gemeente*). Pada tahun 1920an, berdiri beberapa rumah sakit di *Gemeente* Bandung, dengan yang pertama dibangun di Jalan Lembong *(Oud Hospitalweg).* Selanjutnya dibangun pula rumah sakit mata di Jalan Cicendo, Rumah Sakit Juliana (*Ziekenhuis*, sekarang Rumah Sakit Hasan Sadikin), Rumah Sakit Borromeus, dan Rumah Sakit Immanuel *(Zendinghospital)*.

Gambar 2.7. Rumah Sakit Juliana tahun 1920 (sekarang menjadi Rumah Sakit Hasan Sadikin)

Sumber: KITLV

Tugas tim perencanaan kota yang merupakan gabungan dari beberapa unsur pemerintahan memiliki tujuan yang lebih difokuskan pada upaya menjadikan Kota Bandung sebagai Ibu kota Hindia Belanda. Maka agar rencana pengembangan Kota Bandung yang sebelumnya telah dipersiapkan pemerintah *gemeente* tidak terbengkalai serta dapat tetap berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, Pemerintah *Gemeente* Bandung pada awal dasawarsa ketiga abad ke-20 atau tepatnya pada tahun 1921, membentuk sebuah komisi pembangunan Kota Bandung. Tugas komisi yang diberi nama Komisi Rencana Perluasan Wilayah *Gemeente* Bandung ini antara lain adalah membenahi wajah kota, termasuk di dalamnya menata dan menghijaukan kota dengan taman-taman agar Bandung benar-benar layak untuk menjadi Ibu kota Hindia Belanda. Melalui komisi inilah pada akhirnya lahir sebuah rencana pembangunan Kota Bandung yang benar-benar terpadu. Rencana pengembangan Kota Bandung produk Thomas Karsten ini kemudian dikenal dengan nama Karsten Plan.

Meskipun pada akhirnya rencana menjadikan Bandung sebagai Ibu kota Hindia Belanda tidak menjadi kenyataan, namun Bandung tetap dapat merasakan manfaat. Berkat rencana tersebut, pembangunan fisik Kota Bandung sepanjang dasawarsa ketiga abad ke-20 bisa dikatakan relatif pesat. Berbagai bangunan cukup megah yang semula dipersiapkan sebagai gedung perkantoran instansi pemerintah pusat telah berdiri di Bandung. Salah satunya adalah gedung yang semula direncanakan sebagai gedung kantor pemerintah pusat atau kini dikenal dengan nama Gedung Sate. Dalam perencanaan di sekitar Gedung Sate ini akan dibangun sebuah kompleks perkantoran untuk instansi-instansi pemerintah pusat, seperti kantor Departemen Pendidikan dan Pengajaran, kantor Departemen Keuangan, kantor Departemen Dalam Negeri, kantor Makhamah Agung, dan kantor Dewan Rakyat (Kunto, 1986: 93-97; Kunto, 1996: 94-97).

Gambar 2.8. Pegawai Pemerintahan ( ) di Bandung tahun 1937

Sumber: KITLV

Adapun komplek pemukiman untuk orang Eropa yang berupa rumah-rumah besar dan modern, pertama kali dibangun di daerah Andir atau di sekitar lapangan terbang Andir. Karena letaknya yang berdekatan dengan

lapangan terbang menjadikan pemukiman Eropa di seputar Andir ini juga dikenal dengan nama *Fokkerhuis*. Menyusul pembangunan pemukiman modern di daerah Andir, pemerintah *gemeente* bersama-sama dengan pihak swasta kemudian membangun pemukiman-pemukiman modern di daerah lainnya, seperti di sekitar Kosambi, khususnya di sekitar halte Cikudapateuh, dan di sekitar Jalan Riau, khususnya sekitar Oranje Plein. Berbeda dengan bangunan-bangunan perumahan yang dibangun di Andir dan Kosambi, bangunan-bangunan bertingkat yang didirikan di sekitar Oranje Plein, bisa dikatakan jauh lebih mewah.

Di luar pemukiman yang telah disebutkan di atas, masih ada daerah pemukiman orang Eropa lainnya yang jauh lebih baik. Daerah pemukiman tersebut masih terletak di sepanjang Jalan Riau, tetapi tidak berada dekat Oranje Plein. Pemukiman orang Eropa kali ini terletak di sekitar Gedung Sate dan Insulinde Park (kini Taman Lalu Lintas). Berbeda dengan sebelumnya, wilayah pemukiman di sekitar Insulinde Park ini juga direncanakan sebagai pusat kegiatan masyarakat Eropa di Kota Bandung. Kematangan dan kecermatan dalam menata pemukiman di sekitar Insulinde Park, yang dibangun sejak tahun 1918 oleh sekelompok teknisi di bawah pimpinan Direktur Dinas Bangunan *gemeente* Bandung V.L. Slors, pada akhirnya telah menjadikan wilayah pemukiman di sekitar Insulinde Park ini sebagai prototipe *Indische Koloniaal Staad* (Kunto, 1984: 64-66). Masih dalam kaitannya dengan rencana perpindahan ibukota Hindia Belanda, selama kurang lebih tujuh tahun atau sejak tahun 1918 hingga tahun 1925 telah berhasil dibangun sebanyak 400 hingga 750 bangunan rumah modern yang direncanakan sebagai tempat tinggal para pegawai pemerintah pusat (Kunto, 1996: 103).

Bila pemukiman untuk orang Eropa umumnya berupa bangunan-bangunan besar dan modern, maka tidak demikian halnya dengan bangunan-bangunan untuk warga Timur Asing dan terlebih lagi pribumi atau rakyat kebanyakan. Pemukiman penduduk Timur Asing khususnya Tionghoa, oleh pemerintah *Gemeente* Bandung ditempatkan di sekitar pusat-pusat perdagangan, salah satunya adalah di sekitar wilayah Pasar Baru. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila di kemudian hari daerah sekitar Pasar Baru ini banyak dijumpai daerah-daerah Pecinan atau tempat pemukiman etnis Tionghoa.

Bersamaan dengan pembangunan berbagai sarana fisik pemerintahan di Bandung, dibangun pula berbagai prasarana dan sarana yang memiliki keterkaitan erat langsung dengan kebutuhan hiburan warga kota. Untuk hiburan yang berupa tontonan, di Bandung dibangun gedung-gedung bioskop serta *feesterrein*. *Feesterrein* yang dibangun antara lain di sekitar daerah Kebonjati (Orion), Suniaraja (Empires), dan Cikakak (Orange). Sesuai fungsinya, di *feesterrein* ini antara lain sering dipertunjukkan hiburan-hiburan, seperti, sandiwara, *ketuk tilu*, pencak silat, dan opera. Untuk tempat rekreasi warga kota, antara lain dibangun arena khusus untuk bursa tahunan (*Jaarbeurs*), taman-taman kota, seperti *Mollukenpark*, *Ijzermanpark*, *Orenje Plein*, dan *Citarum Plein*, serta memindahkan kebun binatang dari Cimindi ke Taman Sari.

Di bidang transportasi pembangunan di Kota Bandung sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dilakukan melalui upaya-upaya optimalisasi, khususnya optimalisasi jalur kereta api. Perjalanan kereta api dari Bandung menuju Batavia dan sebaliknya melalui jalur kereta api baru lewat Purwakarta dan Cikampek, sejak 1 November 1934 dapat ditempuh dalam 2 ¾ jam (Kunto, 1984: 101). Untuk menampung besarnya minat penumpang yang menggunakan transportasi kereta api jalur Batavia-Bandung ini, perusahaan kereta api negara (*Staats Spoorwegen*) mengoperasikan sekaligus empat rangkaian kereta api dalam sehari. Pelayanan kereta api Batavia-Bandung ini kemudian dikenal dengan nama *vlugge vier* (empat cepat). Untuk jarak pendek, jalur Bandung-Soreang selesai dibangun tanggal 13 Februari 1921 dan jalur Soreang-Ciwidey selesai dibangun tanggal 17 Juni 1924.

Gambar 2.9. Pembuatan Jalur Kereta Api antara Purwakarta – Bandung tahun 1900—1905

Sumber: KITLV

Di luar pembangunan kedua jalur tersebut, berhasil dibangun pula jalur lintasan Bandung-Citeureup-Majalaya dan jalur lintasan Dayeuhkolot-Majalaya. Pembangunan jalur sepanjang 6 km ini berhasil diselesaikan tanggal 6 Juni 1919. Jalur lintasan Bandung-Citeureup-Majalaya selesai dibangun tanggal 18 Maret 1921, sementara jalur lintasan Dayeuhkolot-Majalaya selesai dibangun tanggal 3 Maret 1922.

Masih berkaitan dengan upaya optimalisasi pemanfaatan transportasi kereta api, dibangun pula halte-halte di Kota Bandung. Pembangunan halte di sekitar Kota Bandung ini pada intinya dilakukan untuk menampung calon-calon penumpang kereta api yang berasal dari Bandung Barat dan Bandung Timur, yang dari waktu ke waktu memperlihatkan lonjakan penumpang yang cukup tajam. Dengan kata lain, pembangunan halte tersebut juga sekaligus untuk mengurangi beban Stasiun Bandung dalam menampung calon penumpang yang akan pergi dan tiba di Kota Bandung.

Gambar 2.10. Stasiun Bandung tahun 1910

Sumber: KITLV

Setidaknya ada tiga halte baru yang dibangun di Kota Bandung dalam dasawarsa ketiga abad ke-20. Ketiga halte baru tersebut adalah Halte Andir dan Kiara Condong yang selesai dibangun tahun 1923, dan Halte Cikudapateuh yang selesai dibangun tahun 1925. Sebenarnya, bangunan ketiga halte tersebut tidaklah sama sekali baru, atau merupakan hasil peningkatan dari *stopplaats* yang telah ada sebelumnya (*Verslag der Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indie Jrg.* 1925: 46).

Pembangunan sarana transportasi pada masa *stadsgemeente* Bandung semakin berkembang dengan lompatan fenomenal berupa pembukaan pintu masuk menuju Kota Bandung melalui jalur udara ini ditempuh dengan membangun lapangan udara Andir. Setelah dipandang layak, pada tanggal 1 November 1928 diadakan uji coba penerbangan perdana dengan menggunakan pesawat terbang milik perusahaan penerbangan kerajaan atau *Konikelijk Nederlands Indies Leger Maatschappij* (KNILM). Penerbangan uji coba yang menempuh rute Bandung-Batavia ini berlangsung dengan sukses. Setelah sukses dengan uji coba, tidak berapa lama kemudian atau tepatnya sejak tahun 1930

Bandung secara resmi telah dapat dihubungkan melalui jalur udara. Rute penerbangan yang dapat ditempuh dari Bandung sejak tahun 1930 adalah rute penerbangan menuju Semarang, Surabaya, Palembang, dan Singapura (Kunto, 1984: 259-260). Keberhasilan Bandung membuka jalur udara memiliki makna yang sangat penting. Dengan adanya jalur udara ini, waktu tempuh dari Bandung ke kota-kota lain yang telah memiliki jalur udara menjadi lebih singkat. Lebih dari itu, melalui jalur udara ini, koneksi antara Kota Bandung dengan daerah-daerah lain di luar Jawa, khususnya Sumatera, bisa dilaksanakan secara lebih intensif.

Untuk memberi arti yang lebih penting bagi upaya menjadikan Bandung sebagai daerah terbuka, sejak abad ke-20 kota ini juga dilengkapi dengan sarana komunikasi radio. Sarana komunikasi radio yang cukup berarti yang dibangun di Kota Bandung adalah radio telepon. Pembangunan studio pemancar bagi radio telepon ini dilakukan di lereng Gunung Malabar. Setelah melalui persiapan yang memakan waktu selama kurang lebih lima tahun, sarana radio telepon ini sejak tanggal 5 Mei 1923, telah dapat digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yakni dari Hindia Belanda ke Belanda. Dengan terbukanya sarana komunikasi radio telepon ini maka hubungan antara dua wilayah yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh tersebut dapat berlangsung jauh lebih cepat.

Menyusul keberhasilan membangun sarana radio telekomunikasi, dipersiapkan pula sarana komunikasi berupa radio. Langkah awal ke arah penyediaan sarana komunikasi radio di kota Bandung dimulai tanggal 15 April 1926 dengan didirikannya Bandoengsche Radio Vereeniging (BRV), yang diketuai oleh J.G. Prins. Setelah melalui berbagai persiapan yang cukup matang, BRV melakukan ujicoba siaran untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Agustus 1926. Setelah keberhasilan siaran percobaan ini, secara resmi BRV mulai mengudara. Siaran ujicoba dan siaran-siaran selanjutnya BRV dilakukan di studio BRV yang terletak di ruang atas percetakan Vorkink (dulu sempat menjadi TB Sumur Bandung) (Kunto, 1984: 197-200).

Siaran BRV yang tadinya hanya ditujukan untuk pemirsa di daerah Bandung dan sekitarnya, ternyata dapat pula ditangkap di Medan, Pare-pare, Samarinda, dan Pontianak. Bahkan pancarannya dapat pula ditangkap di luar negeri. Beberapa negara yang dapat menerima pancaran

BRV antara lain adalah Afrika Selatan dan Selandia Baru. BRV yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai media komunikasi Bandung dengan dunia luar secara berkesinambungan, tidaklah berusia lama. Berhubung satu dan lain hal, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendanaan, BRV tidak dapat melanjutkan siarannya secara mandiri. Untuk itu, sejak tahun 1929, pengelolaaan BRV diambil alih oleh Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM).

Aspek pembangunan pertama yang dilakukan pemerintah kolonia adalah perbaikan jalan dan perluasan wilayah kota. Untuk merealisasikannya maka pada tahun 1909 ***Stadsgemeente*** Bandung menyediakan anggaran sebesar ƒ15.000 untuk memperbaiki ***Merdekaliogweg*** (sekarang Jalan Wastukencana), ***Kerklaan*** (Jalan Gereja, sekarang jalan Perintis Kemerdekaan), ***Parklaan*** (Jalan Merdeka), ***Dagoweg*** (Jalan Dago), dan ***Lembangweg*** (Jalan Cihampelas-Setiabudi sekarang). Penyediaan anggaran perbaikan jalan terus bertambah besar tiap tahunnya, dimana dalam jangka waktu tiga tahun dari 1912 hingga 1915 dana yang dihabiskan sebesar ƒ221.830.

Gencarnya pembangunan kota melalui perluasan dan pembangunan berbagai sarana fisik kota tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya rencana pemindahan Ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Antara tahun 1918 hingga awal 1920an, Pemerintah ***Gemeente*** Bandung mulai fokus pada pembenahan kota, termasuk pemukiman orang Eropa. Sebenarnya, langkah-langkah dalam mempersiapkan Bandung sebagai Ibu kota Hindia Belanda telah dimulai sejak 1896, ketika garnisun militer dibangun di Cimahi sebagai pertahanan dan pelindung Kota Bandung. Dua tahun berselang, pabrik mesiu dari Ngawi (Madiun) dan pabrik senjata ***(Artilerie Constructie Winkel)*** dipindahkan ke Kota Bandung (sekarang Pindad). Langkah awal ini kemudian diteruskan dengan rencana pemindahan pusat komando militer dari ***Weltevreden*** (sekarang Gambir) ke Bandung. Rencana ini dimulai dengan dibangunnya kompleks gedung seluar 7.000 m^2 sejak 1908. Gedung yang menjadi markas ***Departement van Oorlog*** ini baru ditempati pada tahun 1916 (Kunto, 1996: 80).

Sebagai sebuah kota modern, bidang pendidikan tak luput dari pembangunan kota, melalui pendirian berbagai jenjang sekolah, seperti sekolah rakyat ***(volkschool)*** sejak 1907, ***Hollandsch-Chineesche School***

(HIS) sejak 1908, *Hollandsch-Indische School* dan MULO *(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)* sejak 1914, *Algemeene Middlebareschool* (AMS) dan Sekolah untuk guru bagi Bumiputera (*Kweekschool voor Inlandsche Onderwijs*) pada 1920. Berdiri pula sekolah tinggi teknik pertama di Hindia Belanda, yakni *Technische Hoogeschool (THS)* yang diresmikan pada 3 Juli 1920, yang kelak menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Gambar 2.11. Gedung

tahun 1920

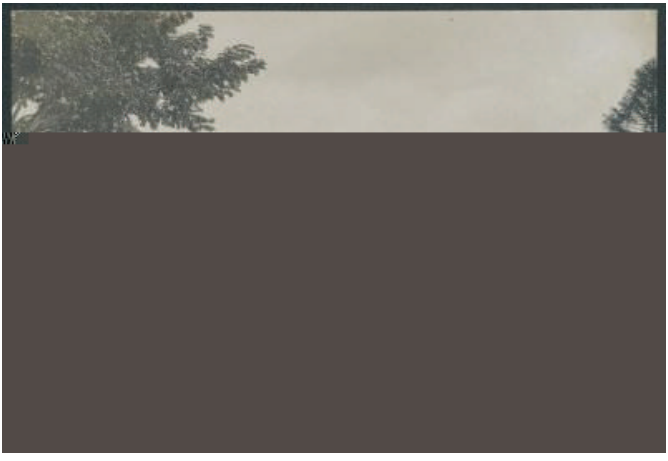

Sumber: KITLV

Salah satu fasilitas umum yang mendapat perhatian pemerintah adalah terkait fasilitas keagamaan. Selain memugar dan merenovasi Masjid Agung, fasilitas keagaamaan lain seperti gereja dibangun, yakni gedung *Theosofische Vereeniging* (Perkumpulan Teosofi) tahun 1918, Gereja Bethel di Jalan Wastukencana pada 1925, dan Gereja St. Petrus di Jalan Merdeka pada 1930. Sarana perhubungan pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Selain delman dan sado, transportasi dalam kota diperluas dengan pembanguan jalur trem yang menghubungkan

Cikudapateuh dan Banjaran Kopo serta Banjaran-Cisondari. Dibuka juga jalur ke Ciwidey pada 18 Maret 1921. Jalur yang resmi dibuka pada akhir tahun 1921 ini merupakan bagian dari plan perluasan wilayah.

Gambar 2.12. Masjid Agung Bandung 1920

Sumber: KITLV

Gambar 2.13. (Perkumpulan Teosofi) tahun 1920

Sumber: KITLV

Stadsgemeente Bandung yang giat melakukan pembangunan, telah membuat Kota Bandung mengalami perkembangan yang pesat dan tumbuh menjadi sebuah kota modern. Perkembangan ini diikuti dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan khususnya dari golongan Eropa dan Timur Asing. Demikian pula dengan wilayahnya yang terus mengalami perluasan. Sebagai perbandingan, pada tahun 1906 luasnya masih 1.922 ha dengan luas terbangun 240 ha atau 12,5% dari luas wilayah Kota Bandung. Pada tahun 1931 luasnya telah bertambah 48,4 % dari tahun 1906 menjadi 2.853 ha, dengan luas daerah terbangun 1.300 ha atau 45,6 % dari luas wilayah Kota Bandung.

Tabel 2.1. Persentase Luas Daerah Terbangun Kota Bandung 1906-1950

Tahun	Luas Kota	Luas Daerah Terbangun	Persentase Daerah Terbangun
1906	1.922	240	12,5
1911	2.150	300	13,9
1916	2.150	380	17,7
1921	2.853	850	29,8
1926	2.853	1.050	36,8
1931	2.853	1.300	45,6
1943	5.413	-	-
1950	8.098	1.900	23,5

Sumber: Diolah dari Hardjasaputra (2000: 15).

Menurut Kunto (1986: 220), pada tahun 1935 persentase areal Kota Bandung yang dihuni oleh ketiga golongan penduduk itu adalah sebagai berikut: golongan Eropa 52%, golongan Bumiputera 40%, dan golongan Timur Asing 8%. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, yaitu golongan Eropa sebanyak 22.178 jiwa, golongan Bumiputera 142.009 jiwa, dan golongan Timur Asing 19.242 jiwa. Dalam kenyataannya maka terlihat suasana pemukiman di daerah penduduk golongan Eropa sangat jarang dan lapang, sangat kontras dengan situasi daerah pemukiman penduduk golongan Bumiputera dan

Timur Asing yang sangat padat. Dengan luas wilayah 2.853 ha pada tahun 1831, setiap orang Eropa menempati areal seluas 668,93 m^2, sedangkan golongan Bumiputera hanya 80,36 m^2 per jiwa, dan golongan Timur Asing 118,62 m^2 per jiwa.

Kondisi ini membuat Thomas Karsten menyusun rencana penataan wilayah Kota Bandung untuk 25 tahun kedepan (1930-1955). Dalam rencana penataan itu, Karsten menghubungkan analogi perluasan wilayah yang berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Ia berasumsi bahwa pada tahun 1955, Kota Bandung harus memiliki wilayah seluas 12.758 ha dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 750.000 jiwa. Pemerintah pusat merespon rencana Karsten tersebut dengan membentuk Komisi Penilai Rencana Pemekaran *Gemeente* Bandung *(Commisise voor de Bevordeeling van de*

memasukkan argumentasi-argumentasi yang keluar saat rapat paripurna tanggal 16 Desember 1929, dalam sidang *Provincialen Raad van West Java* (Kunto, 1996: 102). Beberapa poin yang muncul terkait Bandung sebagai ibukota antara lain:

Tabel 2.2.
Argumentasi pro dan kontra mengenai rencana Bandung sebagai Ibukota Hindia Belanda

Pro	Kontra
Letaknya sentral dan memiliki iklim yang nyaman. Keadaan ini senyaman musim panas di Perancis Selatan.	Bandung memang sentral di Jawa Barat, tetapi tidak untuk seluruh Hindia Belanda. Batavia dinilai cukup memiliki ikilm yang lebih baik dibandingkan kota-kota tropis lainnya di dunia.
Keadaan iklim yang cocok bagi bangsa Eropa khususnya bangsa Belanda.	Batavia bagian selatan mempunyai lingkungan yang lebih sehat dan cukup berwibawa untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan.
Tingkat kematian antara tahun 1919 sampai 1929 lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian Batavia yaitu dari 59 menjadi 38 permil, berbanding dengan Bandung yang hanya 25 menjadi 20 per mil.	Kesehatan masih dapat ditingkatkan apabila kesehatan lingkungan diperbaiki.
Bandung memiliki perguruan tinggi terkemuka dan merupakan pusat kaum intelektual.	Batavia memiliki perguruan tinggi dan intelektual yang jumlahnya lebih besar daripada Bandung.
Bandung memiliki *terrain* (kontur tanah) yang baik. Sehingga memungkinkan pengembangan lingkungan yang lebih indah dan nyaman.	Bandung tidak memiliki hubungan *interinsular* dan *intercontinental* menyebabkan kedudukan Gubernur Jenderal akan terisolir dari hubungan dengan dalam dan luar negeri.
Bandung masih memiliki lahan cukup luas untuk mengembangkan suatu kawasan pusat pemerintahan yang anggun dan berwibawa	

Sumber: Haryoto Kunto, 1996. *Balai Agung di Kota Bandung*. Bandung: Granesia.

Pada akhirnya, realisasi pemindahan ibukota yang ditandai dengan pembangunan kompleks perkantoran serta instansi pemerintah pusat,

tidak sepenuhnya dirampungkan. Penyebab utamanya adalah terjadinya resesi ekonomi dunia yang dikenal dengan krisis malaise. Krisis tersebut mulai terjadi pada tahun 1929 dan memuncak di tahun yang sama. Peristiwa itu mengakibatkan kota-kota besar di seluruh dunia mengalami krisis, terutama kota dengan pendapatan yang bergantung pada industri berat. Kegiatan pembangunan gedung-gedung terhenti. Sementara wilayah pedesaan yang hidup dari hasil pertanian juga tak luput terkena dampak karena harga jual produk pertanian turun 40% hingga 60%. Begitu pula dengan sektor primer lain seperti pertambangan dan perhutanan (Booth, 1998: 36-39).

Depresi memuncak ditandai dengan peristiwa 'Selasa Hitam', yaitu peristiwa jatuhnya bursa saham Wall Street. Saat itu ekonomi Amerika Serikat memasuki masa resesi selama musim panas 1929 (sekitar bulan Mei–Juli), yakni ketika daya beli konsumen menurun dan mengakibatkan barang-barang menumpuk sehingga memperlambat laju produksi. Pada saat yang sama, harga saham terus mengalami kenaikan hingga pada musim gugur tahun 1929 (tepatnya bulan Agustus–Oktober) mencapai tingkat yang tidak dapat diperkirakan. Pada 24 Oktober 1929, investor mulai menjual saham mereka secara besar-besaran (Booth, 1998: 36-39). Pada saat itu tercatat sekitar 12,8 juta saham diperdagangkan. Peristiwa itu dikenal sebagai 'Kamis Hitam'. Lima hari kemudian, pada 29 Oktober 1929, barulah terjadi peristiwa yang dikenal dengan "Selasa Hitam". Sekitar 16 juta lembar saham diperdagangkan pasca gelombang kepanikan susulan yang melanda Wall Street. Jutaan saham berakhir tidak berharga dan para investor yang telah membeli saham dengan uang pinjaman disapu bersih seluruhnya (Booth, 1998: 36-39).

Sebagaimana konsumen yang menghilang di tengah jatuhnya pasar modal, penurunan pengeluaran dan investasi mendorong pabrik serta bisnis lain untuk memperlambat produksi dan konstruksi mulai memikirkan nasib karyawan mereka. Bagi mereka yang cukup beruntung untuk tetap bekerja, upah akan jatuh dan daya beli terus menurun. Banyak orang Amerika yang terpaksa membeli secara kredit justru jatuh dalam lilitan hutang. Selain itu, penggunaan standar emas dalam pertukaran mata uang membuat depresi dari Amerika Serikat menyebar hingga ke seluruh dunia.

Hantaman krisis terasa begitu keras bagi Hindia Belanda. Industri yang berkembang di Hindia Belanda pada masa itu, yaitu industri pengolahan tebu, kopi, teh, dan hasil perkebunan lainnya mengalami penurunan akibat terlalu bergantung pada pasar Eropa. Sementara itu, kondisi pasar Eropa mulai lesu ketika krisis terjadi sehingga ketika pasar Eropa merosot dilanda krisis maka pendapatan ekspor hasil industri di Hindia Belanda turut pula merosot. Harga gula di tahun 1929 jatuh sebesar 22% dari harga di tahun 1925, getah karet sebesar 10%, kopra sebesar 18%, kopi sebesar 27 %, dan teh mengalami penurunan terbesar hingga 50%. Jika dirata-ratakan, penurunan harga komoditas perkebunan wilayah koloni di pasar Eropa mencapai kisaran 31% (Onghokham, 1987).

Namun yang disayangkan bahwa kerajaan Belanda dan Hindia Belanda masih mempertahankan standar emas dan tidak mendevaluasi gulden-nya. Politik moneter itu justru berdampak sangat luas hingga membuat perekonomian Hindia Belanda masuk dalam penderitaan selama beberapa tahun. Tindakan yang dijalani pemerintah kolonial dalam menangani permasalah tersebut di antaranya dengan menurunkan upah, membuat regulasi pajak-pajak baru, menurunkan berbagai tarif, dan hal lainnya. Pada dasarnya, politik deflasi itu dapat dijalankan karena wilayah koloni pada masa itu belum terdapat serikat buruh. Lebih jauh lagi, ekonomi di tingkat pedesaan juga terkena depresi dengan menurunnya harga hasil perkebunan seperti ketela, jagung dan padi. Sementara harga komoditas praktis tidak turun. Masyarakat menderita kerugian karena berkurangnya sewa tanah, upah buruh dan pembayaran beberapa pelayanan (Onghokham, 1987).

Batalnya pemindahan ibukota secara keseluruhan, bukan berarti pembangunan yang telah berjalan di Bandung sejak tahun 1918 terbengkalai begitu saja. Terlebih lagi sejumlah kantor jawatan pemerintah di Batavia telah rampung dibangun. Maka dari itu, berdasarkan Raad van Besluit 18 Desember 1929, yang diresmikan tanggal 25 Januari 1930, pihak G*emeente* van Bandoeng menyediakan asset berupa sebidang lahan berbentuk empat persegi panjang, seluas 27.000 m^2 di bagian utara Kota Bandung, yang membentang dari selatan ke utara, dimulai dari Gedung Sate dengan sumbu lurus ke arah Gunung Tangkubanprahu.

Selain itu, disediakan pula lahan seluas 0,5 ha di sekitar Jubileum Park, tepatnya di Jalan Tamansari sebagai Villa peristirahatan Gubernur Jenderal (Kunto, 1996: 103). Pembangunan baru benar-benar berhenti ketika pada akhirnya hegemoni pemerintah kolonial Hindia Belanda runtuh di tangan tentara Jepang pada awal tahun 1942.

BAB 3
KOTA BANDUNG MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942 – 1945

Industrialisasi Jepang awal abad ke-20 membawa dampak bagi perkembangan politik dan ekonomi di Asia-Pasifik. Tidak hanya memimpin percepatan ekonomi, Jepang juga mampu menunjukkan kemampuan militernya saat menghadapi negara Barat, ditandai dengan kalahnya Armada Baltik milik Rusia dalam pertempuran di Selat Tsushima pada Mei 1905. Pertempuran tersebut membuka keyakinan Jepang atas hegemoninya di wilayah Asia Timur dengan membangun imperium besar. Memasuki Perang Dunia II, Jepang terbukti mampu mengukuhkan pengaruhnya dengan melakukan ekspansi dan pendudukan atas wilayah Manchuria, kemudian ke arah Selatan menuju Asia Tenggara. Menanggapi gerakan agresif Jepang tersebut, hampir seluruh kekuatan Sekutu terkonsentrasi ke wilayah Pasifik demi menghentikan ambisi Jepang membentuk Asia Timur Raya.

Pada bab ketiga buku ini akan khusus membahas periode pendudukan Jepang di Kota Bandung dan sekitarnya. Jika pada bab sebelumnya dikatakan bahwa Kota Bandung gagal dijadikan sebagai ibukota Hindia Belanda, namun kegagalan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan aspek strategis kota ini. Hal itu dapat dilihat menjelang kedatangan Jepang, Kota Bandung dijadikan sebagai pusat pemerintahan darurat. Maka dari itu, bagi Jepang sendiri penyerbuan Kota Bandung adalah kunci kemenangan merebut Hindia Belanda. Benar saja, pada tahun

1942 Belanda harus menyerahkan wilayah koloni terbesarnya itu kepada Jepang setelah pos-pos pertahanan di sekitar Bandung berhasil ditembus. Wajah Bandung pada masa pendudukan Jepang pun ikut berubah, termasuk situasi Kota Bandung yang menjadi kamp penampungan orang Eropa serta kondisi ekonomi yang mengekang masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi yang awalnya menyambut Jepang dengan simpati, berubah menjadi antipati karena segala hal dibatasi dan dikontrol demi kepentingan perang. Sebuah cerita menarik lainnya adalah bagaimana pihak Belanda berusaha menyelamatkan asetnya yang tersimpan dalam khazanah De Javasche Bank (DJB) di Batavia, dengan melarikan ke DJB Bandung dan dikirim ke beberapa negara.

Belanda segera menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941, tepat sehari setelah penyerbuan Pearl Harbour. Keputusan ini disampaikan oleh Gubernur Jenderal Tjarda Strakenborgh Strachouwer mengingat cepat atau lambat armada Jepang yang mengarah ke Daerah Selatan akan menuju Hindia Belanda. Pengumuman perang dengan Jepang disiarkan berulang-ulang lewat radio dengan mengatakan '*wij rijn in oorlog met Japan*'. Jepang sendiri menilai keputusan Belanda diliputi keragu-raguan, padahal ada keinginan Jepang menginvasi tanpa perlu pertempuran demi menghindari bumi hangus oleh pihak Hindia Belanda. Hal ini diusahakan karena fasilitas yang dimiliki Hindia Belanda untuk mengolah sumber daya alam sudah cukup lengkap, khususnya instalasi pengilangan minyak bumi dan perkebunan karet. Wilayah Hindia Belanda juga memang sudah direncanakan sejak awal menjadi sasaran serbuan 'Daerah Selatan' yang dibuat oleh Kementerian Angkatan Darat Jepang pada 4 Oktober 1940.

Jepang mendeklarasikan perang kepada Hindia Belanda pada 9 Januari 1942 sekaligus membuka pertempuran ke seluruh Asia Tenggara. Untuk menghadapi serbuan Jepang, pihak Sekutu pada 15 Januari 1942

membangun komando gabungan yang terdiri dari aliansi empat negara melalui ABDACOM (*American*, *British*, *Dutch*, *Australian Command*). Akan tetapi, komando yang dipimpin Marsekal Sir Archibald Wavell dari Inggris dan bermarkas di Lembang itu tidak benar-benar efektif. Permasalahannya adalah negara-negara yang menjadi anggota lebih menonjolkan kepentingannya masing-masing, sehingga pada 22 Febuari 1942 aliansi ini dibubarkan. Sementara komando Sekutu di Asia Tenggara diberikan kepada Jenderal Ter Poorten. Pada waktu itu kekuatan sekutu yang terpecah semakin mengurangi kekuatan Belanda dalam melindungi wilayahnya. Demi menciptakan situasi kondusif bagi penduduk di tengah ketidakpastian melawan Jepang, NIROM (*Nederlands Indie Radio Omroep Maatschappij*) menyiarkan berita bernada propaganda dengan mengatakan bahwa pihak militer Hindia Belanda telah siaga dan memiliki kekuatan 300.000 tentara, 2.000 pesawat terbang serta didukung armada angkatan laut yang kuat. Berita ini juga diteruskan "Radio Oranye" di London (Onghokham, 1987: 282), tempat pengungsian Ratu Belanda yang negerinya sudah diduduki Jerman.

Faktanya, kekuatan pertahanan Hindia Belanda jauh dari yang diberitakan NIROM. Pada waktu menjelang perang, Hindia Belanda hanya memiliki sekitar 85.000 tentara yang terdiri dari: 6.000 milisi pribumi, 25.000 milisi yang dimobilisasi dan sipil dimobilisasi (*landstorm*), 20.000 *Stads* dan *Landwachten*, serta 30.000 tentara KNIL. Dengan demikian, pasukan yang siap berperang tidak sampai 30.000 personil, bahkan 25.000 tentara ditempatkan hanya terpusat di Pulau Jawa (Onghokham, 1987: 271). Sementara untuk pertahanan di laut, armada Belanda memiliki tiga kapal perusak ringan (*lichte cruiser*) *de Ruyter*, *Java*, dan *Sumatera*. Selain itu, ada pula enam kapal jenis buru torpedo (*torpedoboot jagers*), sebelas kapal selam dan satu *kannoneerboot.* Sementara Angkatan Udara hanya memiliki kira-kira 275 pesawat dari berbagai jenis. Hal ini menunjukan bahwa kekuatan militer Belanda masih kalah dari segi jumlah dan kualitasnya jika dibandingkan daya tempur militer Jepang yang masif dan telah dipersiapkan untuk serangan besar. Setidaknya, untuk ekspansi ke Malaya dan Hindia Belanda, Jepang mengerahkan 700 dari 1.500 pesawat terbang dari berbagai kelas, didukung 4.000 penerbang berpengalaman dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Pertempuran Belanda - Jepang berlangsung cepat dengan kekalahan lebih banyak dipihak Belanda. Pasukan Jepang mendarat di Tarakan pada 11 Januari 1942 dan segera merebut kilang minyak milik Belanda di Kalimantan. Beberapa minggu setelah kejatuhan Tarakan dan wilayah timur Hindia Belanda, Jepang segera mendaratkan pasukannya di tiga tempat di pulau Jawa, yakni di Indramayu, Banten, dan Rembang. Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat yang memiliki kota besar seperti Bandung dan Batavia, merupakan daerah yang penting. Wilayah ini adalah konsentrasi pemerintahan Hindia Belanda dan dipusatkan sebagai kubu-kubu pertahanan Belanda. Di wilayah ini pula terdapat *Departement van Oorlog* (Departemen Perang), Gudang perbekalan dan bengkel-bengkel senjata. Dari segi fasilitas, Jawa Barat adalah pusat pertahanan terbaik milik Hindia Belanda. Begitupun dengan Kota Bandung sebagai *'bergvesting'* atau benteng-benteng di gunung untuk menahan serbuan yang datang dari daerah pantai. Jika pelabuhan Batavia dan Cirebon digempur oleh Angkatan Laut Jepang, maka Pelabuhan Cilacap di selatan Jawa Barat direncanakan sebagai pintu keluar sekaligus penghubung dengan Australia.

Seperti telah diceritakan, Jepang berhasil mendaratkan pasukan di Teluk Banten dan Eretan (Indramayu) pada malam tanggal 28 Februari 1942 bersama Tentara ke-16nya. Pendaratan di pantai Indramayu ini bertujuan umtuk menggempur pertahanan Belanda di pangkalan Kalijati, Subang. Jika pangkalan milik Belanda ini berhasil dijatuhkan, maka kota Bandung akan kehilangan pertahanan terbesarnya. Strategi taktis ini direncanakan Jepang mengingat pada 22 Februari 1942, pusat-pusat pemerintahan di Batavia sudah dipindahkan ke Kota Bandung, sehingga serangan ke Bandung akan langsung memukul ke jantung pemerintahan Hindia Belanda. Demikian pula Gubernur Jenderal Tjarda van Strakenborgh berikut para petinggi pemerintahan yang mengungsi ke Hotel Savoy Hooman serta Preanger Hotel. Sehari setelah mendarat di Eretan, satu detasemen pimpinan Kolonel Toshinori Shoji berkekuatan 5.000 personil yang disiapkan menyerbu Bandung berhasil merebut Pangkalan Udara Kalijati milik Belanda di Subang (Poesponegoro, 2010: hlm 8).

Jatuhnya pangkalan udara Kalijati pada 1 Maret 1942 yang berjarak kurang lebih 40 km dari Bandung menurunkan semangat bertempur

tentara KNIL. Tiga kali serangan balasan secara beruntun oleh tentara Belanda pada 2 hingga 4 Maret 1942 untuk merebut kembali Kalijati berakhir dengan kegagalan dan korban jiwa yang tidak sedikit. Keesokan harinya, Jepang mulai mengerahkan pasukan di Kalijati untuk menyerbu Bandung dari arah utara. Terjadi pertempuran hebat di Ciater pada 6 Maret 1942. Pertempuran ini berhasil memukul mundur pasukan Belanda ke Lembang, dan kemudian Lembang sebagai pos pertahanan paling terakhir bagi Bandung juga ikut jatuh dikuasai Jepang pada keesokan harinya. Pintu masuk Jepang ke Bandung terbuka lebar. Keadaan kritis ini mendorong Panglima KNIL, Letjen Ter Poorten mengirim pesan kepada panglima di Jawa Barat, Mayjen Pesman untuk menghindari pertempuran di dalam Kota Bandung. Alasannya karena di Kota Bandung pada waktu itu sudah penuh sesak dengan pengungsi, penduduk sipil, dan korban perang (Poesponegoro, 2010: 9). Keadaan ini berakhir dengan permintaan penyerahan lokal (Kota Bandung) kepada pihak Jepang, akan tetapi usulan tersebut ditolak Jenderal Hitoshi Imamura sebagai pemimpin tentara ke-16 yang menginginkan penyerahan seluruh pasukan Sekutu di Jawa.

Jepang mengirimkan ultimatum kepada Belanda agar datang ke Kalijati untuk berunding. Selain itu, Jenderal Imamura mengajukan tuntutan lainnya, yakni Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Stakenborgh harus diikutsertakan dalam perundingan tersebut. Apabila tuntutan Jepang tidak diindahkan pihak Belanda, maka Jepang mengancam akan memborbardir Bandung dengan pesawat-pesawat dari Pangkalan Udara Kalijati. Pihak Belanda pun memenuhi permintaan Jepang, Gubernur Jenderal Tjarda, Panglima KNIL Ter Poorten dan beberapa petinggi militer serta penerjemah pergi ke Kalijati. Dalam perundingan yang terjadi pada 8 Maret 1942 ini, awalnya hanya Ter Porteen yang menerima tuntutan Imamura. Sementara Gubernur Jenderal Tjarda masih menolak dengan alasan Bandung menjadi kota terbuka bagi Jepang. Penolakan lainnya adalah karena Imamura berkeras bahwa penyerahan yang terjadi dalam perundingan bukan hanya soal Bandung, namun juga Hindia Belanda secara keseluruhan. Namun setelah terjadi *deadlock* dan ditunda beberapa menit, akhirnya pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak, yakni kapitulasi (menyerah) tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang (Poesponegoro, 2010: 12).

Gambar 3.1. Pangkalan Udara Kalidjati 1930

Sumber: KITLV

Gambar 3.2. Deretan Pesawat Tempur Koolhoven FK 51 di Kalidjati tahun 1940 - 1941

Sumber: KITLV

Berita penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang disiarkan radio NIROM Bandung pada Senin, 8 Maret 1942. Sepanjang hari radio NIROM Bandung mencoba menghubungi bagian-bagian tentara di seluruh pelosok Hindia Belanda agar menyerahkan diri. Dalam siaran tersebut dikatakan '*soldaten vervoegt U, zo ge reeds Uw Uniform hebt uitgedaan, onverwijld dat is nu – bij uw oderdeel anders zijt gij deerteur*' (Serdadu-serdadu lapor segera – pada bagianmu. Harap tuan melepaskan *uniform* /seragam, jika tidak tuan dianggap melakukan desersi). Pada hari itu juga NIROM menutup siarannya dari gelombang radio dengan mengatakan '*wij sluiten nu, vaarwel tot betere tijden. Lang leve de Koningin*' (kita tutup sekarang, selamat bertemu di hari-hari yang lebih baik. Hidup Ratu) (Onghokham, 1987: 356). Keputusan Jenderal Ter Poorten menimbulkan kontra, bahkan protes keras datang baik dari pihak Sekutu maupun pihak Belanda sendiri. Banyak tentara yang telah dilatih tetapi harus menyerah tanpa melepaskan satupun tembakan. Kemarahan juga datang dari pihak Australia karena tentaranya yang berjumlah 4.000 hingga 15.000 masih siap menghadapi Jepang (Onghokham, 1987: 360).

Dalam karya Onghokham 'Runtuhnya Hindia Belanda' yang merujuk karya Quispel memasukkan satu investigasi wartawan Jepang tentang gambaran betapa dramatisnya perundingan di Kalijati. Dalam perundingan tersebut, panglima Imamura bertanya kepada Gubernur Jenderal Tjarda "apa tuan menyerah tanpa syarat?", Gubernur Jenderal menggelengkan kepala dan menjawab "Tidak". Panglima Imamura bertanya "Jika tuan tidak bisa bicara selaku panglima tertinggi, mengapa tuan lalu datang ke sini?" Gubernur Jenderal menjawab "Tuan meminta saya datang dan saya memenuhi undangan tersebut, karena saya mengharapkan untuk membicarakan tentang pemerintah sipil atas Pulau Jawa." Panglima Imamura beralih ke Jenderal Ter Poorten selaku panglima angkatan bersenjata Belanda dan perwakilan komando Sekutu, "Apakah tuan menyerah tanpa syarat?" Ter Poorten menjawab "saya hanya dapat menawarkan pada tuan pernyerahan Kota Bandung." Imamura menanggapi bahwa kapitulasi Bandung bukan menjadi perhatiannya, begitupun Ter Poorten yang kembali menjawab "hanya Bandung yang bisa diserahkan" (Onghokham, 1987: 358).

Imamura pun pada akhirnya mengatakan bahwa "tidak ada gunanya untuk mengulangi permintaan ini. Jikalau tuan tidak menyerah maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali meneruskan penyerangan. Tuan dapat kembali segera ke Bandung. Saya akan memberi kepada Tuan satu pas jalan (*vrijgeleide*) sampai lini terdepan, tetapi pada waktu melintasi lini ini, saya akan melakukan pengeboman atas Bandung oleh pesawat-pesawat yang tuan lihat telah siap sedia di lapangan ini. Tetapi saya akan memberikan kepada tuan kemungkinan terakhir untuk mempertimbangkan…" Imamura memberikan waktu 10 menit untuk perwakilan Belanda supaya berunding. Setelah waktu berakhir, Ter Poorten sebagai panglima tentara menerima untuk menyerah atas nama seluruh Hindia Belanda (Onghokham, 1987). Demikian penyerahan pada 8 Maret 1942 ini dianggap sebagai tanda tunduknya Hindia Belanda kepada Jepang. Demi menghindari kehancuran total kota Bandung, keputusan yang dibuat Ter Poorten di Kalijati membuat runtuhnya Hindia Belanda secara keseluruhan.

Peta 3.1. Jalur Kedatangan Tentara Jepang ke Bandung tahun 1942

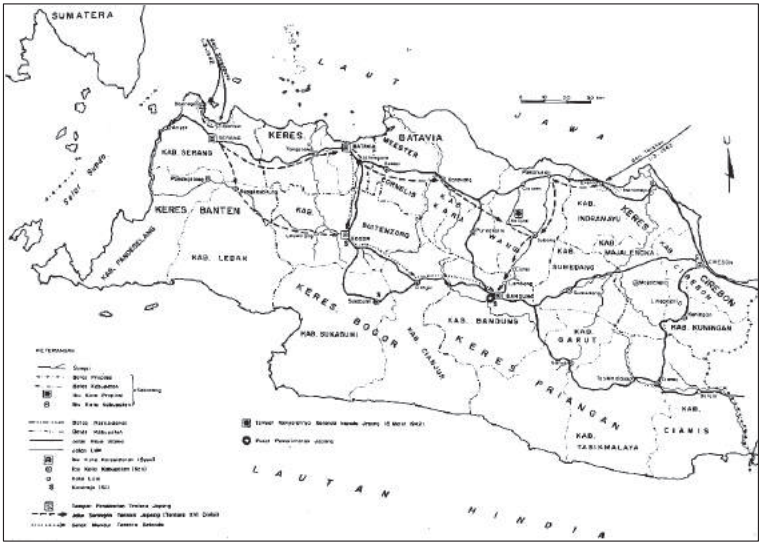

Peta 3.1. Jalur Kedatangan Tentara Jepang ke Bandung tahun 1942 (Lanjutan)

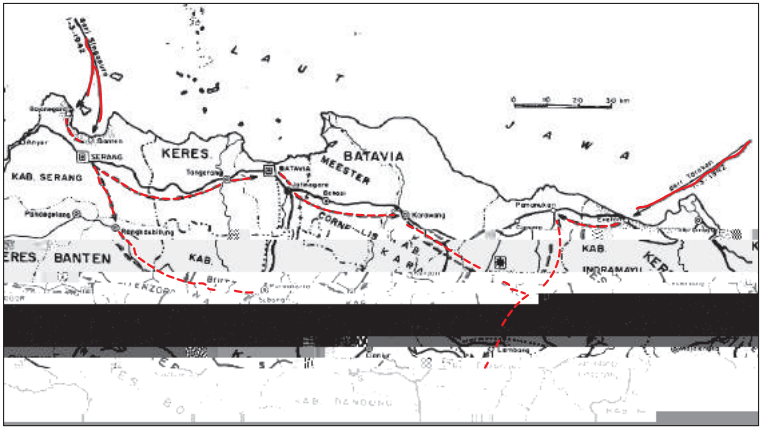

Sumber: Peta Sejarah Provinsi Jawa Barat, 1987. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Koleksi Perpustakaan Nasional.

Perundingan yang berujung pada kapitulasi (penyerahan kekuasaan tanpa syarat) di Kalijati antara Jepang dengan Belanda membawa babak baru dalam sejarah Indonesia. Letjen Hitoshi Imamura bersama Bala Tentara ke-16 masuk pada 10 Maret 1942 ke Kota Bandung yang merupakan pusat pemerintahan terakhir Hindia Belanda. Mereka datang dari arah Lembang dan disorak-sorai oleh rakyat yang antusias dengan meneriakan kata '*banzai*' di sepanjang jalan dari Lembang menuju Bandung serta di dalam Kota Bandung itu sendiri. Imamura mengumumkan mulai saat itu Dai Nippon mengambil alih seluruh kekuasaan Hindia Belanda (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 2005: 71-72). Rakyat pribumi pun menganggap bahwa kehadiran tentara Jepang sebagai pembebas atas penjajahan bangsa Eropa yang telah berlangsung selama ratusan tahun.

Berbeda dengan sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Jepang menggunakan sistem pemerintahan militer. Seperti yang diketahui bahwa pemerintahan militer Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga bagian. Wilayah Sumatera dan Jawa dikuasai oleh Angkatan Darat (*Rikugun*), Sementara wilayah timur Indonesia dikuasai Angkatan Laut (*Kaigun*). Pulau Jawa berada di bawah Tentara ke-16 dan untuk mengukuhkan pemerintahan tersebut dituangkan dalam Undang-undang No.1 pasal 1 yang dikeluarkan Panglima Tentara ke-16 yang intinya Tentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera. Segala peraturan yang berlaku pada masa sebelumnya untuk sementara waktu masih diberlakukan, terkecuali pegawai-pegawai Belanda yang kemudian dipecat, dan *Raad van Indie* serta *Volksraad* dihapuskan. Untuk mengisi kekosongan staf pegawai yang dahulu dipegang orang Belanda, Jepang terpaksa merekrut dari golongan Bumiputera untuk menduduki jabatan pegawai tinggi sampai menengah (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 2005: 45).

Fungsi pemerintahan militer dijalankan oleh *Gunseibu* yang kekuasaannya di Jawa Barat berpusat di Bandung, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing berpusat di Semarang dan Surabaya. Daerah-daerah otonom dibawahnya pun berganti nama dengan susunan versi Jepang seperti diatur dalam UU. No.27 dan No. 28. Tidak jauh berbeda dengan susunan pada masa pemerintah Hindia Belanda, Pulau Jawa terbagi ke dalam beberapa *Shuu* yang setingkat Keresidenan. Di bawah *Shuu* terdapat *Ken* yang berarti Kabupaten (*regentschap*), dan *Si* berarti Kotamadya (*staadgemeente*). Maka Kota Bandung yang dahulu berstatus *staadsgemeente* berubah menjadi Bandung *Si* yang dipimpin seorang *sichō* (wali kota).

Berbeda dengan sistem pemerintahan Hindia Belanda, pada masa pendudukan Jepang menggunakan sistem tunggal untuk masing-masing *Ken* dan *Si.* Jika dahulu suatu kabupaten atau kotamadya dijalankan oleh *regent* (bupati) atau *burgemeester* (wali kota) bersama dengan *raad* (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan *College* (Badan Pemerintah Harian), maka setelah dibuatnya otonomi daerah yang baru, maka seluruhnya dipegang oleh *Kenchō* (Bupati) maupun *Sichō. Kenchō* dan *sichō* ini juga dibantu kepala daerah yang lebih kecil lagi lingkupnya

seperti *gun* (distrik/kewedanan), *son* (onderdistrik/kecamatan), *ku* (desa), hingga yang paling kecil *tonarigumi* (rukun tetangga) (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 2005: 74).

Pemerintahan militer Jepang yang menguasai bekas wilayah Hindia Belanda menjalankan ambisi utamanya di negeri ini, yaitu memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan perang. Wilayah Jawa diproyeksikan

bersimpati pada Dai Nippon, serta termakan propaganda *Sendenbu* (Departemen Propaganda Jepang) menjadi antipati. Sebelumnya ada dua cara yang digunakan Jepang untuk menguasai Jawa, yaitu menarik hati rakyat miskin (*mishin ha' aku*) serta mengindoktrinasi dan menjinakan (

Peta 3.2. Peta Persebaran Kamp Tawanan Jepang

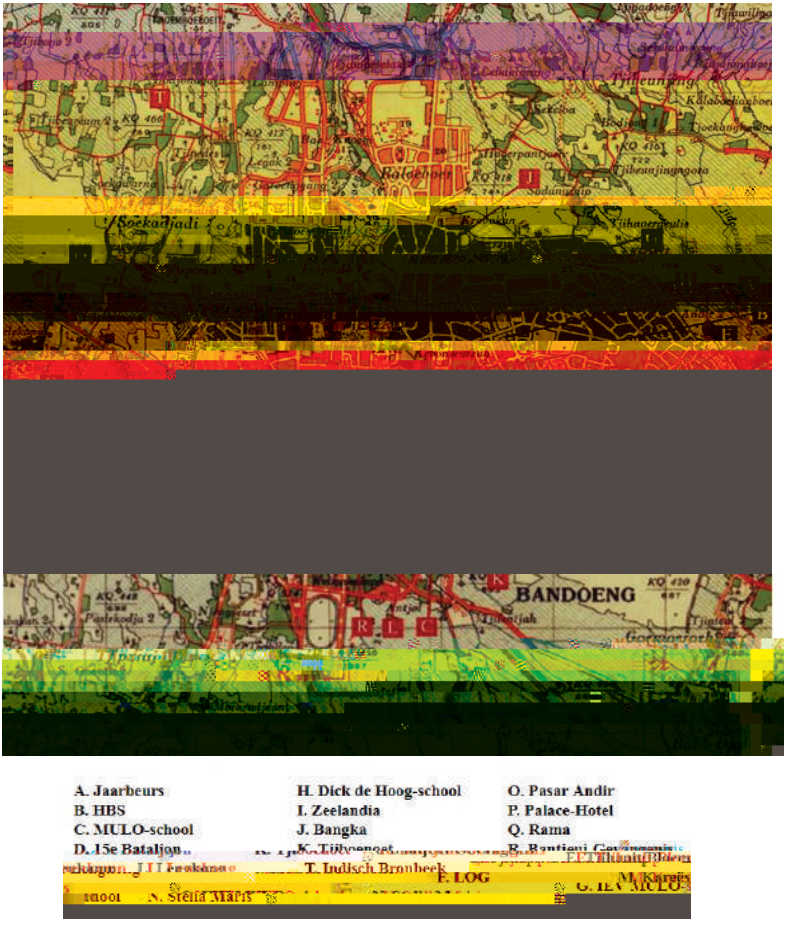

Sumber: https://japansekrijgsgevangenkampen.nl

Menjelang akhir tahun 1942, kloter pertama tawanan dari Bandung dan sekitarnya mulai diangkut untuk melakukan kerja rodi di luar Jawa. Pengasingan pun dimulai. Para tawanan dipisahkan dengan keluarganya. Kontak dengan keluarga hanya melalui surat atau kartu pos. Surat/ kartu tersebut biasanya datang sebulan sekali bahkan setahun sekali.

Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan kabar yang didapat. Pada September 1942, transportasi besar mulai beroperasi ke penampungan para pekerja (*werkkamp*) di Maluku (pembangunan bandara), Sumatera (jalan kereta api Pekanbaru), Birma dan Thailand (jalan kereta api Birma), Mantsjoerije/Manchuria, Formosa dan Jepang (kerja rodi di pabrik, pelabuhan dan penambangan). Dari Bandung dan Cimahi transportasi terebut melanjutkan perjalanannya, melewati penampungan Batalion ke-10 di Batavia lanjut ke Tanjung Priok langsung ke tujuan atau melalui penampungan di Singapura (Voskuil, *Beeld van Een Stad*).

Alasan bagi Jepang untuk memilih Bandung dan sekitarnya sebagai lokasi utama militer mengatasi KNIL dan memusatkan konsentrasi aliansi, didasarkan pada cukupnya akomodasi, dalam bentuk penampungan-penampungan besar KNIL. Selain itu, sebagian besar pihak-pihak yang terlibat dalam kapitulasi dan pertempuran sebelumnya, sebagian besar tinggal di Priangan. Kehidupan tawanan di Bandung dan Cimahi tidak memiliki bukti foto. Keadaan yang dilukiskan pada waktu itu didapatkan dari para penduduk maupun buku harian. Dokumen penting berasal dari Charles Burki melalui gambar dan lukisannya tentang kejadian masa itu. Burki adalah seorang anak arsitek Belanda yang lahir di Magelang. Pada akhir tahun masa pendudukan Jepang, Burki menjadi seorang pembuat reklame dan ilustrator yang banyak dicari untuk periode tersebut (Voskuil, *Beeld van Een Stad)*.

Organisasi kamp tawanan berada di bawah instansi besar Perdana Menteri Jepang dan Menteri Peperangan yang hingga Agustus 1944 dijabat oleh Jenderal Tojo Hideki. Perlakuan kamp tawanan ini mendapat banyak protes keras dari orang-orang Belanda di negerinya. Kritik dari orang-orang Belanda dan beberapa tawanan lainnya terutama para tawanan lama yang mengalami pelanggaran hukum; seperti kurang sistematisnya pemberian makanan, pakaian, obat, dan beberapa kebutuhan hidup lainnya. Atas kejadian tersebut banyak para tahanan yang mati karena penyakit, kelelahan bahkan penganiayaan. Banyak kekerasan yang tak masuk akal dilakukan, seperti kurungan dalam kandang yang berkawat tajam dan eksekusi tawanan yang gagal melarikan diri. Ada kelompok yang ditugaskan mengontrol tahanan, tetapi lebih sering mereka juga

Gambar 3.4. Beberapa Sketsa Charles Burki yang Menggambarkan Kekejaman Jepang di Kamp Tahanan Bandung sekitar tahun 1942 – 1945

Sumber: http://tweede-wereldoorlog.org

menganiaya. Setiap orang harus mengikuti upacara, termasuk yang sedang sakit. Sering dilakukan inspeksi memeriksa semua tahanan sementara beberapa anggota membangunkan tawanan dengan paksa mencari apa yang seharusnya tidak dimiliki dan mengambil beberapa yang berguna. Jepang tak segan untuk membakar tawanan yang tidak disiplin sekaligus memperlihatkan kekuasaannya saat itu. Upacara harus dihadiri semua orang tanpa terkecuali untuk menghormati kaisar dan

semua tawanan harus menandatangani kesepakatan atas ketaatannya pada kaisar. Penandatanganan ini dilaksanakan pada akhir Juli di Kamp Bandung dan Cimahi.

Gambar 3.5. Contoh plat dari kamp tawanan Jepang di Cimahi tahun 1942

Sumber: KITLV

Kondisi kebutuhan pangan para tawanan kamp-kamp di Bandung, Cimahi dan beberapa daerah di Jawa masih lebih baik dibandingkan kamp di *Buitengewesten* (wilayah luar jajahan) seperti Birma dan Thailand. Untuk para tawanan di Jawa Barat seharusnya mendapatkan jatah kalori kurang lebih 1.800 kkal per hari, tetapi pada kenyataannya, kondisi sulit dan kerja rodi yang berat menjadi masalah. Mereka mendapatkan asupan gizi yang tidak seimbang sehingga kelebihan karbohidrat – terutama karena memakan umbi-umbian – dan kekurangan protein, lemak, mineral dan vitamin. Tentu saja para tawanan mencoba semua cara untuk hidup, tetapi pada akhirnya resistensi tubuh menurun dan banyak yang jatuh sakit.

Buruknya kondisi kamp menyebabkan para tawanan rentan terserang disentri, malaria, tipes, penyakit kuning, bisul tropis dan gangguan kulit lainnya serta gangguan organ pernapasan.

Kota Bandung yang dahulu primadona bumi Priangan pun berubah menjadi penjara besar yang merenggut kebebasan penghuninya. Tidak hanya orang-orang Eropa yang diperlakukan keji oleh pemerintahan militer Jepang, pribumi yang dianggap sebagai masyarakat kelas dua juga sama malang nasibnya. Bahkan bisa dibilang lebih menderita karena diperas untuk sekian kali di negeri sendiri. Pribumi yang berpendidikan dipekerjakan di fasilitas-fasilitas perang Jepang, sementara ekonomi masyarakat mengalami kemandekan sebab segala hasil produksi baik pertanian maupun kerajinan harus diserahkan kepada pemerintah. Seluruh rakyat dari mulai laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, dikerahkan tenaganya untuk kepentingan militer Jepang.

Shuuchokan pada 10 September 1942 mengeluarkan peraturan yang membatasi lalu lintas perekonomian rakyat. Aturan tersebut melarang pemindahan bahan-bahan serta alat tekstil atau diperjualbelikan secara bebas. Misalkan pemilik perusahaan tekstil harus mendaftarkan nama perusahaannya sekaligus mencatat aset yang dimiliki (jenis benang, nomor benang, warna benang, serta obat dan catnya). Selain barang-barang tekstil, produk lain yang juga dilarang diperjualbelikan secara bebas antara lain minyak sereh, minyak *eucalyiptus* dan minyak kayu putih. Dalam Priangan Shuu sendiri yang paling terkena dampak aturan tersebut adalah di sekitar Bandung, karena industri tekstil dan pabrik penyulingan minyak sereh sebagian besar terdapat di daerah ini (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 2005: 75).

Awal pemerintahan Jepang sedang gencar-gencarnya mengeluarkan maklumat yang mengatur segala hal terkait sosial politik dan tidak terkecuali ekonomi. Setelah mengatur soal izin pelaksanaan industri, pemerintahan militer juga mengeluarkan aturan yang menetapkan harga-harga barang kebutuhan pokok. Sebagai contoh di Bandung *Ken* (Kabupaten Bandung), barang-barang yang diatur meliputi harga hewan ternak, buah-buahan, daging, ikan, kacang-kacangan, beras, padi dan sebagainya. Untuk harga ayam ditentukan Rp0,25 – Rp0,70 per ekor, belimbing Rp0,10 – Rp0,30

per 10 buah, dan lain-lain. Bahkan beberapa hari berikutnya juga diatur mengenai hasil sayur mayur dan perkebunan (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 2005: 76). Aturan mengenai penjualan hasil sayur antara lain: tanaman sayur di Lembang *Gun* dan yang berkualitas baik diserahkan untuk keperluan Balatentara Dai Nippon, sedangkan sayur berkualitas kurang baik dijual dengan seizin Peraturan Kebun Pertaruhan Keluaran Sayur-sayuran. Bagi yang melanggar dikenakan hukuman berat.

Sementara untuk hal-hal terkait pengawasan perkebunan, dibuat satu badan khusus bernama *Saibai Kigyo Konrikodan* (SKB). Di daerah Bandung cabang SKB mengawasi perkebunan kina, kopi, karet dan teh. Contoh aturan yang dibuat terkait perkebunan Kina adalah larangan melakukan kegiatan sebagai berikut: menanam pohon kina yang baru atau memindahkannya, menghasilkan kinine, memungut hasil kulit kina, dan memindahkan kulit kina, biji kina, dan barang-barang yang terbuat dari kina.

Terbatasnya kegiatan ekonomi berdampak pada langkanya barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Pada awal tahun 1943 mulai terjadi kelaparan karena sulitnya mendapatkan beras sebagai makanan pokok. Hal ini karena sebagian besar panen beras diserahkan kepada pemerintah Jepang, sementara cadangan gabah petani tidak mencukupi hingga musim panen berikutnya. Bahkan untuk yang bukan petani dan hidup di kota, mengandalkan bantuan beras dari pemerintah dengan dijatah 200 gram per hari. Keadaan ini menjadi sebuah ironi, karena di satu sisi dengan dalih meningkatkan produksi padi, Jepang giat memberikan penyuluhan dan pelatihan ke masyarakat terkait teknik dan sistem pertanian yang lebih modern, sementara hasil panennya sebagian besar diangkut ke negeri Jepang sehingga petani dan rakyat terus mengalami kekurangan beras. Rakyat berusaha bertahan dalam keadaan yang sulit tersebut dengan mencari alternatif makanan pokok pengganti nasi. Pada Januari 1944 ada berita bahwa beberapa penduduk tidak memakan nasi dari beras, melainkan dari ketela pohon. Nasi yang kemudian dikenal sebagai nasi *sampeu* ini diolah dari ketela yang diparut kemudian dimasak. Pengenalan nasi *sampeu* didemonstrasikan secara lebih meluas di wilayah Bandung dan sekitarnya. Meskipun nilai gizinya lebih rendah dari nasi beras umumnya, menu ini jadi kebutuhan pokok yang 'mau tidak mau'

harus dikonsumsi rakyat pribumi dari berbagai kalangan (Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, 2005: 70).

Keadaan ekonomi yang sulit selama masa pendudukan Jepang terjadi karena pemerintahan militer berusaha meruntuhkan sistem yang telah ada sejak masa Hindia Belanda. Tidak hanya pada sektor riil, Jepang mengatur sistem moneter di masa-masa awal pendudukan. Salah satunya adalah melikuidasi beberapa bank milik Belanda, Inggris dan Tionghoa, dengan penangguhan pelunasan hutang-hutang hingga November 1942. Pemberlakuan aturan mengenai likuidasi ini mengakibatkan berhentinya bank sirkulasi Belanda pada 9 Maret 1942 yang fungsinya dijalankan DJB. Meski begitu, Jepang tetap mempekerjakan pegawai DJB membantu penyelesaian proses likuidasi, dan membantu Jepang melaksanakan kegiatan perbankan lain (*Kan Po*, 1942). Kerugian yang dialami DJB secara keseluruhan ketika masa pendudukan Jepang antara lain: (1) uang kertas senilai *f*87 juta yang diambil, kemudian diedarkan kembali oleh Jepang. (2) Uang logam yang diambil dari khasanah DJB dan dibawa ke Jepang senilai *f*20 juta. (3) Uang yang diambil paksa tentara Jepang sebesar *f*107 juta. (4) Klaim hutang DJB oleh *Nanpo Kaihatsu Ginko* (NKG) senilai *f*8 juta (Koesoma, 2014: 75-76). Tujuannya adalah untuk memenuhi pembiayaan Jepang di Indonesia.

Fungsi dan tugas perbankan segera digantikan oleh bank-bank milik Jepang. Padahal, menjelang runtuhnya Hindia Belanda bank-bank Jepang tersebut sempat ditutup oleh pemerintah kolonial. Bank yang dimaksud adalah *Yokohama Specie Bank*, *Taiwan Bank*, dan *Mitsui Bank*. Selanjutnya, NKG dibuka sebagai bank sirkulasi menggantikan DJB selama pendudukan. Bank sirkulasi pada masa pendudukan Jepang ini juga bertugas mengkoordinasi bank-bank lainnya seperti *Yokohama Specie Bank* (*Yokohama Shokin Ginko*) untuk Pulau Jawa, dan *Taiwan Bank* (*Taiwan Shomin Ginko*) untuk luar Pulau Jawa (Arsip BI Sekilas Pendirian Kantor Cabang Bandung: 17). Bank sirkulasi yang dipegang

oleh NKG memiliki tugas mencetak dan mengedarkan uang untuk seluruh wilayah Indonesia. Mata uang yang berlaku pada masa pendudukan adalah *Gulden Jepang* atau Rupiah Jepang. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengawasan, pengontrolan peredaran mata uang, dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, NKG juga memiliki tugas likuidator yang meliputi, antara lain: Penyelesaian tagihan-tagihan bank yang ada; Pembayaran kembali kepada kreditur yang dianggap bukan 'musuh' Jepang sebesar 30%; Penyelesaian simpanan tertutup dan *safe-lokketen* (*safe deposit box*) (Hartono, 1976: 28-29).

Sebelum NKG dibentuk pada April 1943, pemerintah militer Jepang menggunakan mata uang pendudukan (*invasion money*) atau uang militer (*gunpyo*) yang dicetak di negeri Jepang. Ciri dari mata uang ini adalah berupa tanda yang tertera dalam uang tersebut bertuliskan *de Japansche Regeering Beetalt aan toonder*, artinya 'Pemerintah Jepang membayar kepada sang pembawa' (Tim Penulis Bank Indonesia, 2007: 34). Pada dasarnya uang tersebut adalah uang yang pernah berlaku pada masa sebelum perang, hanya saja diberikan '*note*' sebagai uang yang dikeluarkan Jepang di seluruh daerah pendudukan. Misalkan, di Hindia Belanda berlaku *gulden*, Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara menggunakan *strait dollar*, di Australia *pound*, sementara *peso* di Filipina (Yoshimasa, 1996: 179).

Sebelum menginjakkan kaki di tanah Hindia Belanda, uang *invasion* sudah disebar ke wilayah-wilayah penyerbuan dari geladak kapal Jepang. Sampai pada pertengahan Januari 1942, sebesar *f*58.873 diedarkan selama operasi pendudukan di Jawa, Sumatera dan daerah Hindia Belanda yang lain. Sementara itu, uang yang dikeluarkan DJB sampai pada Maret 1942 sebesar *f*316 juta. Terjadinya dualisme dalam peredaran mata uang pada masa awal pendudukan ini menimbulkan inflasi yang luar biasa karena banyaknya jumlah uang beredar (Yoshimasa, 1996: 179) Selain untuk menunjukan hegemoni Jepang atas wilayah yang didudukinya, strategi ini memang dilakukan untuk menghancurkan perekonomian Eropa di tanah jajahannya. Dengan menjatuhkan nilai mata uang mereka, pendanaan perang di daerah koloni pun menjadi terhambat.

Setelah nilai mata uang Hindia Belanda jatuh. barulah NKG mencetak

uang Jepang yang bernama uang *Nanpatsu.* Uang ini memiliki nota *Dai Nippon Teikoku Seifu* (Administrasi Tentara Jepang) dengan pecahan Rp1/2, Rp1, Rp5 dan Rp10 (Tim Penulis Bank Indonesia, 2007: 34). Pada perkembangannya, NKG membuka cabang di seluruh kota besar di Indonesia dengan cara mengambil alih aset dan tugas bank sirkulasi yang dijalankan DJB. Dengan digantikannya fungsi tersebut, secara otomatis hal-hal yang berkenaan kegiatan perbankan Belanda dihentikan, termasuk pembuatan Tahun Pembukuan DJB yang ke-114 tahun 1941/1942 (Arsip BI, Sekilas Pendirian Kantor Cabang Bandung: 17).

Kendati pada 1942 segala aktivitas perbankan telah dikuasai Jepang, tindakan penyelamatan aset DJB sudah diantisipasi beberapa tahun sebelum Jepang menyerbu Hindia Belanda. Kekhawatiran terhadap meluasnya ekspansi kekuasaan Jepang ke wilayah Hindia Belanda memunculkan rencana penyelamatan aset termasuk sarana fisik antara lain kantor-kantor DJB di beberapa kota besar. Sebagai antisipasi untuk melindungi aset kantor pusat DJB di Batavia, maka diusulkan menyediakan khazanah perang di kantor cabang Bandung. Alasan pemilihan kota Bandung sebagai lokasi khazanah perang mengingat lokasinya yang dekat untuk memobilisasi aset-aset DJB dari Batavia ke pelabuhan 'belakang' di Cilacap yang lokasinya strategis untuk melarikan aset ke luar Hindia Belanda.

Ide ini digagas *Commissie Economische Verdediging van Nederlandsch Indie* (Komisi Ketahanan Ekonomi Belanda). Adapun usul tersebut dibuat oleh Komandan Tentara sebagai Ketua Dewan Mobilisasi Negara Hindia Belanda dengan surat bertanggal 25 September 1936 No. 03/01/2 – RAHASIA yang dikirimkan kepada Mr. Dr G. G. Van Buttingha Wichers, Presiden DJB ke-14. Surat tersebut juga dilampiri dengan salinan laporan hasil pertemuan Komisi Ketahanan Ekonomi Hindia Belanda

Peta 3.3. Pelabuhan Cilacap tahun 1942

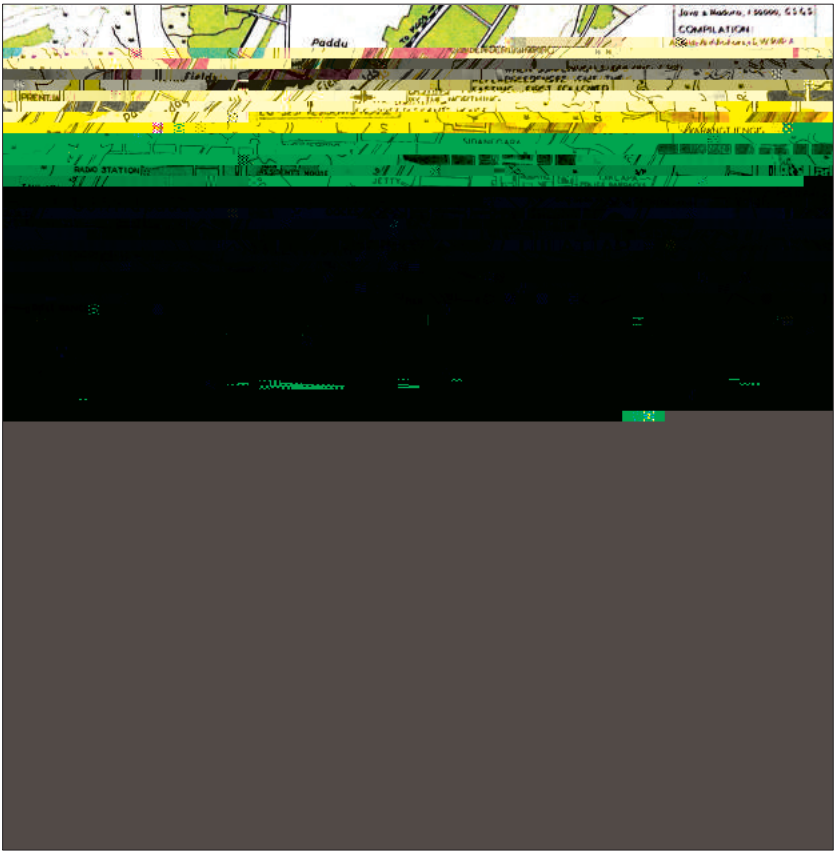

Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional

sangat mudah dikenali dan menjadi sasaran empuk serangan udara.

Setelah tercapai kesepakatan mengenai pembangunan khazanah termasuk hal-hal terkait pembiayaan dan teknis penyelesaian, pelaksanaan pun diserahkan kepada DJB. Sebagai arsitek ditunjuk "Fermont-Cuypers", sementara pembangunannya dilakukan oleh N.V Volker's Aanneming Maatschappij dengan waktu kontrak tanggal 26 Agustus 1937 sampai

diperkirakan selesai pada 5 Mei 1938 dengan biaya keseluruhan *f*311.805 gulden. Khazanah ini yang merupakan bagian dari gedung DJB Bandung diresmikan Gerard Gilles van Buttingha Wichers pada 19 Maret 1939, anak dari van Buttingha Wichers yang masih berusia 7 tahun. Khazanah tersebut mampu menampung sisa persediaan emas yang masih ada sebanyak 59,7 ton. Memang pada akhirnya pemindahan itu berjalan sesuai rencana, berdasarkan yang diberitakan Louis Sweers dalam NRC-Handlesblad (surat kabar Belanda), ketika Jepang pada tanggal 5 Maret 1942 menemukan peti-peti di dalam khazanah DJB Batavia, mereka tidak menemukan emas milik DJB kecuali simpanan lukisan koleksi Regnault, berupa karya seni dari Chagall, Kandinski, Permeke, dan sekitar enam koleksi karya Vincent van Gogh (Arsip BI, *Penyelamatan Persediaan Emas DJB Masa Perang Dunia II*).

Gerakan cepat pasukan Jepang dari utara yang satu persatu menduduki wilayah Hindia Belanda pada akhirnya memaksa pemerintah memilih untuk menyelamatkan cadangan emas yang ada di khazanah perang Bandung. Keputusan ini diambil pada tanggal 8 Januari 1942, pada saat itu Kantor DJB Bandung menyimpan emas seberat 59,7 ton atau senilai *f*120 juta. Sebelumnya, pada awal tahun 1940-an emas seberat 125 ton dan bernilai *f*250 juta telah lebih dulu dikirim dan berhasil dikapalkan ke Amerika Serikat, sehingga total emas DJB yang diketahui dipindahkan senilai *f*380 juta atau emas seberat 190 ton. Penyelamatan simpanan logam mulia DJB menjadi prioritas dari bank tersebut. Simpanan logam mulia, baik berupa emas atau perak, dapat dikatakan sebagai kekayaan yang paling berharga bagi suatu bank sirkulasi. Selain diperjual-belikan, emas atau perak juga disimpan oleh bank sentral sebagai cadangan yang menjamin uang kertas yang diedarkannya. Menjelang meletusnya Perang Dunia II diketahui cadangan emas DJB adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Cadangan Emas De Javasche Bank 1939-1942

Tahun	Total Nilai
1939	*f* 116.885.665,40
1940	*f* 141.121.079,94
1941	*f* 109.126.351,07
1942	*f* 123.386.825,20

Sumber: Diolah dari Verslag van de President van DJB 1939-1941 dan Arsip DJB No. 1137, Koleksi Bagian Arsip Bank Indonesia.

Rencananya pengiriman emas ini menggunakan 12 kapal, dengan masing-masing memuat *f*10 juta atau emas seberat 5.000 kg. Hanya dari kapal KM "Tegelberg" dari perusahaan KPM yang diperoleh berita memuat *f*25 juta di Cilacap pada 16 Februari 1942 dan tiba di Durban, Afrika Selatan pada awal Maret 1942. Akan tetapi, mengingat situasi perang yang mendesak, maka penggunaan kapal perang tersebut hanya menggunakan 7 kapal, tiap-tiap kapal harus membawa muatan lebih banyak dari rencana semula. Dua kapal pertama yang tidak diketahui namanya meninggalkan Tanjung Priok pada Januari 1942, sementara lima kapal lainnya diberangkatkan menyusul dari dua pelabuhan, yakni Tanjung Priok dan Cilacap. Untungnya, kapal-kapal tersebut selamat dari kejaran patroli armada Jepang di Laut Jawa. Selanjutnya emas yang bersangkutan disimpan dalam khazanah Commonwealth Bank of Australia dan di dalam khazanah de Reserve Bank van Suid di Pretoria, Afrika Selatan (Arsip BI, *Penyelamatan Persediaan Emas DJB Masa Perang Dunia II*). Salah satu telegram terakhir yang dikirimkan Gubernur Jenderal Tjarda van Strakenborgh kepada Pemerintah Pengasingan Kerajaan Belanda di London tanggal 5 Maret 1942, memuat jawaban-jawaban atas pertanyaan Perdana Menteri Pieter Syoerds Gerbrandy mengenai keadaan persediaan emas yang dikirimkan:

> *"Merujuk telegram tuan no. 66 Butir 5: Persediaan emas de Javasche Bank dengan pasti telah aman tiba di luar negeri, namun penegasan resmi belum kami terima. Rincian nilainya dalam jutaan gulden*

berturut-turut adalah sebagai berikut: New York 250,2[1]; Australia 9,2; Australia dalam pelayaran 74; Afrika Selatan 14,5; Afrika Selatan dalam pelayaran 30,8; jumlah 387,3. Emas tersebut tidak sampai terlantar – Stakenborgh."

Para direksi DJB yang masih ditahan di Hindia Belanda kemudian dipaksa oleh Jepang untuk menandatangani pernyataan penyerahan seluruh aset dan kepemilikan bank-bank di Hindia Belanda termasuk DJB kepada Jepang dengan tanpa syarat. Penyerahan tersebut berarti secara resmi kepemilikan DJB telah beralih ke tangan pemerintah militer Jepang. Pihak Jepang menjadi berang ketika mendapati khazanah-khazanah De Javasche Bank di Palembang, Batavia dan Bandung dalam keadaan kosong. Pejabat tinggi DJB yang ditawan kemudian diinterogasi oleh Kempeitai (Polisi Rahasia Militer Jepang), beberapa di antara mereka disertai penyiksaan berat hingga meninggal dunia. Presiden DJB pada masa itu, van Buttingha Wichers juga mengalami hal yang sama. Ia menjadi sasaran pemeriksaaan di dalam kamp dengan penyiksaan fisik dan mental yang sangat berat. Selama sepuluh bulan ia ditawan oleh Kempeitai di Bandung, Jakarta dan Bogor dan selebihnya berada dalam kamp tawanan di Jakarta, Bandung dan Cimahi, hingga akhirnya dibebaskan pada November 1945.

Sebagai langkah politik pasca pendudukan Jepang, pemerintah Hindia Belanda memerintahkan Gubernur Jenderal-nya bersama beberapa pejabat termasuk Direktur DJB, Dr. R.E. Smits, untuk meninggalkan Hindia Belanda menuju wilayah bebas yaitu Australia. Rombongan kecil ini kemudian bertindak sebagai pemerintahan sementara untuk hubungan internasional sekaligus mempersiapkan kemungkinan kembalinya pemerintahan Hindia Belanda apabila perang usai. Namun, kebijakan likuidasi bank-bank Belanda yang dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang telah memberikan kesan pada pemerintah Belanda bahwa kondisi perbankan di Indonesia telah runtuh dan tidak mungkin dipulihkan kembali saat perang usai. Akibatnya, Pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan Surat Keputusan E-10 tertanggal 3 Februari 1944 yang melarang segala kegiatan perbankan di Hindia Belanda tanpa adanya izin

1 Satuan dalam juta gulden

dari gubernur jenderal. Keputusan ini dikeluarkan di London yang menjadi tempat pengasingan Ratu dan pemerintah Kerajaan

Belanda akibat didudukinya Negeri Belanda oleh Pasukan Nazi Jerman. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan tanggal 21 Februari 1944 tentang pembentukan De Bank Voor Nederlandsch-Indie di Paramaribo, Suriname, sebagai satu-satunya wilayah koloni Belanda yang masih bebas. De Bank Voor Nederlandsch-Indie merupakan bank gabungan sebagai wadah dari institusi perbankan terutama perbankan swasta yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Para pemegang saham bank itu adalah Pemerintah Hindia Belanda, Nederlandsche Handels Maatschappij NV (NHM), Nederlandsch-Indische Handelsbank (NIHB) dan Nederlandsch-Indische Escompto Maatchappij (NIEM). Saham pemerintah Belanda pada saatnya nanti akan dialihkan kepada DJB. Bank baru ini pada dasarnya merupakan gabungan dari bank-bank yang sudah ada di Hindia Belanda, termasuk DJB sebagai bank sirkulasi di dalamnya.

Kapal Pembawa Emas

Lima Kapal yang Tercatat Mengirimkan Persediaan Emas *de Javasche Bank* ke luar negeri

1. KM "Phrontis" (1926, 6.181 brt) nahkoda J. Hendriks Jansen, MP "Oceaan", tiba di Tj Priok 13 Febuari 1942, dimuat emas pada 19 Febuari 1942, berangkat kembali pada 20 Febuari 1942 ke Geelong, di Melbourne, Australia.
2. KM "Java" (1939, 11.927 brt) nahkoda W. Persson, MP "Nederland", berangkat dari Tj Priok 20 Febuari 1942 ke New York, tiba 17 Maret 1942.
3. KM "Tegelberg" (1938, 14.150 brt) nahkoda J.W. Zuyderhoudt, MP "KPM", berangkat dari Cilacap 16 Febuari 1942 ke Afrika Selatan dengan muatan 25 juta gulden = 12,5 ton emas, tiba di Durban awal Maret 1942.
4. KM "Tjitjalengka" (1939, 10,972 brt) nahkoda J. Adrianese, MP "Java-Cina-Japan Lines". Berangkat dari Cilacap 21 Febuari 1942 dengan dikawal oleh KM "Willem v.d Zaan" tiba di Melbourne 5 Maret 1942.
5. KM "Jagersfostein" (1934, 10.083 brt) nahkoda M. A. van der Est, MP NSM berangkat dari Cilacap 21 Februari 1942 dengan dikawal oleh KM "Willem v.d. Zaan" tiba di Melbourne 4 Maret 1942.
6. (brt = berat kotor dalam ton)

Catatan: dua kapal yang berangkat pada kloter kedua ini tidak tercatat, diperkirakan berangkat lebih dahulu melalui pelabuhan Tj Priok.

Keadaan Pelabuhan Cilcacap

Sebelum penyerangan Jepang di Pearl Harbour pada 8 Desember 1941, pemerintah Hindia Belanda sudah memperhitungkan pelabuhan Cilacap akan menjadi pangkalan penting dalam pertahanan dan pintu pelarian terakhir meninggalkan negeri ini.

Sementara itu, kondisi pelabuhan Cilacap sendiri semenjak awal 1930an telah mengalami kemunduran dikarenakan menurunnya harga komoditas gula dan hasil bumi lainnya. Dengan didudukinya Belanda oleh Jerman pada Mei 1939, sudah mulai mendesak untuk perbaikan menyeluruh. Perbaikan ini diantaranya meliputi perluasan dan peningkatan fasilitas berlabuh serta pengembangan fasilitas bongkar muat barang, perbaikan tempat penimbunan barang dan sebagainya. Kepala pelabuhan J. Fray, di dalam laporannya untuk masa pertengahan Januari sampai 8 Maret 1942 menyebutkan diperlukannya tambahan sebanyak 13 penambatan kapal, dan dari Surabaya didatangkan dok dengan bobot 8.000ton.

Tenaga karyawan kantor pelabuhan dan dermaga-dermaga ditingkatkan menjadi tiga kali lipat. Sarana kepelabuhan lainnya tidak lupa memperoleh perhatian dengan perbaikan dan pengembangan sesuai kebutuhannya.

Gambar 3.6. Pelabuhan Cilacap

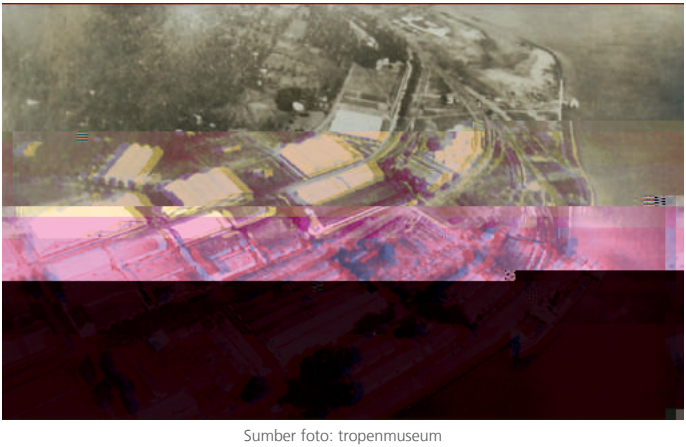

Sumber foto: tropenmuseum

BAB 4

REVOLUSI DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA BANDUNG

Setelah Jepang bertekuk lutut pada Sekutu dalam Perang Pasifik, gelora euforia terjadi seantero Kota Bandung. Rakyat Bandung yang telah dengan tegas menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia, berusaha mempertahankan amanat Proklamasi dari propaganda Sekutu dan upaya kembalinya kekuasaan Belanda. Konfrontasi terjadi di tengah masa transasi tersebut. Pertempuran pun tidak dapat dihindari baik di dalam maupun di luar Kota Bandung. Serangkaian peristiwa pembumihangusan nan heroik menjadi latar kota yang pernah berjuluk *Paris van Java*. Bab ini membahas mengenai revolusi fisik di Kota Bandung pada masa perang mempertahankan kemerdekaan serta situasi sosial ekonomi di tengah situasi politik yang memanas akibat perang. Peristiwa itu menjadi latar bagi cerita situasi moneter masa itu, yang ditandai dengan beredarnya beragam mata uang hingga terjadinya kekacauan ekonomi. De Javasche Bank Agentschap Bandung yang sempat ditutup pada Maret 1942 juga dibuka kembali pada 22 Mei 1946. Begitu pula dengan situasi ekonomi, kredit dan perbankan pasca Perang Dunia II yang terjadi di Kota Bandung.

Usai pembacaan teks Proklamasi kemerdekaan yang disampaikan pada malam hari tanggal 17 Agustus 1945 dan diulangi lagi keesokan harinya, berbagai kisah heroik dan suasana euforia kemerdekaan terjadi

di Kota Bandung. Berita kemerdekaan Indonesia dengan cepat menyebar ke wilayah Jawa Barat melalui radio yang berada di lingkungan PTT Palasari (Sitaresmi, 2013: 64). Penyebaran berita tidak hanya melalui radio, *Harian Tjahaja* juga menerima informasi tersebut melalui telegram dari kantor berita Domei di Jakarta. Teks Proklamasi kemudian ditulis ulang pada papan tulis di depan kantor *Harian Tjahaja* oleh Bari Lukman, wartawan *Harian Tjahaja* (Lubis, 2016: 129-130). Bendera merah putih milik Jawa Hokokai yang didapat dari Isa Ansyhari, seorang wartawan *Harian Tjahaja* kemudian dikibarkan di depan gedung harian pro Republik tersebut. Aksi heroik terjadi saat Mulyono dan Endang Karmas menyobek bendera Belanda yang terpasang di atas gedung De Eerste Nederlands Indische Spaarbank (DENIS) di Jalan Braga (Sitaresmi, 2013: 65). Aksi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan pada instansi-instansi milik pemerintah militer Jepang ini bersamaan dengan penyobekan warna biru pada bendera Belanda dan penurunan bendera Hinomaru (bendera Jepang). Instansi milik pemerintah militer Jepang direbut secara paksa oleh para pemuda meskipun ada beberapa yang diserahkan secara sukarela. Menanggapi aksi pengibaran bendera merah putih, beberapa masyarakat Belanda yang tidak berada di kamp interniran masih mengibarkan bendera Belanda sehingga menyebabkan bendera-bendera tersebut disobek oleh para pemuda. Aksi lain dilakukan oleh salah seorang wartawan *Harian Tjahaja*, Atje Bastaman, yang mengumpulkan masyarakat di Tegallega saat akan pulang ke rumahnya untuk membacakan teks Proklamasi (Sitaresmi, 2013: 65).

Penulisan teks Proklamasi dan pemasangan bendera merah putih memicu reaksi dari tentara Jepang yang kemudian menghapus tulisan tersebut. Sebelumnya, pemerintah militer Jepang telah mengeluarkan peringatan pelarangan penyebarluasan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Namun, kantor berita Domei yang sudah dikuasai pemuda Bandung telah mendahului menyampaikan informasi tersebut. Kantor *Harian Tjahaja* kemudian dikepung, beruntung kantor harian tersebut telah kosong. Selain mengepung kantor *Harian Tjahaja*, tentara Jepang juga menangkap karyawan Radio Bandung Hoshokyoku yang menyebarkan berita Proklamasi menggunakan panggilan Radio Republik Indonesia (RRI).

Meski demikian, sejumlah pegawai Studio Radio Bandung tetap melakukan penyiaran berita mengenai kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan dua mobil bak terbuka mengelilingi wilayah di sekitar Kota Bandung, seperti Dayeuhkolot, Banjaran, Soreang, Majalaya, Ciparay, Rancaekek, Ujungberung, Lembang, Padalarang, dan Cimahi. Selain itu, selebaran dengan huruf berwarna merah mengenai proklamasi kemerdekaan beredar di kawasan Kota Bandung. Belakangan diketahui bahwa selebaran tersebut dicetak oleh percetakan pimpinan Sasmita. Reaksi masyarakat atas penyebaran informasi mengenai kemerdekaan Indonesia pun beragam. Ada yang tidak percaya karena bukan diumumkan secara resmi oleh kepala daerah, ada pula yag langsung mengibarkan bendera merah putih seperti halnya kantor Kabupaten Bandung.

Memasuki bulan September 1945, sambutan rakyat Kota Bandung terhadap kemerdekaan Republik Indonesia semakin meluap. Dukungan penuh semua lapisan masyarakat dibuktikan dengan ramainya masa yang datang pada Rapat Besar di Alun-alun Kota Bandung pada 2 September 1945. Rapat yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Komite Nasional Kota Bandung itu dihadiri kira-kira 100.000 orang. Hasil dari rapat besar adalah mosi yang menunjukkan sikap rakyat Kota Bandung, antara lain mengumumkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan ingin tetap merdeka; berjanji akan mendukung dan berdiri di belakang Presiden Republik Indonesia; serta mempertahankan kemerdekaan berdasarkan *wereldmoraal* yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Mosi itu dikirim kepada Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta dan salinannya dikirim kepada Komite Nasional Indonesia Daerah Priangan (Pemda Bandung, 1981: 136).

Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia juga disuarakan oleh pegawai-pegawai pemerintah daerah dan guru sekolah. Mereka menetapkan sikap tunduk kepada rencana perjuangan yang sudah ditetapkan untuk kepentingan nasional. Pegawai perusahaan-perusahaan strategis juga menunjukkan sikap dukungannya, seperti Algemene Constructie Winkel (Pabrik Senjata Kiaracondong) dan diikuti oleh pemuda-pemuda dari Perusahaan Pengangkutan Darat, Djawatan Kereta Api (DKA), Djawatan Kehutanan, Pegawai Penyelidik Teknik dan Radio

Tegallega, serta pekerja dari perkebunan dan para kaum ulama. Mereka mengadakan rapat besar yang juga menghasilkan mosi mendukung berdirinya Republik Indonesia (Pemda Bandung, 1981: 136 – 137). Sehubungan dengan dukungan itu, pemerintah pusat di Jakarta juga menginstruksikan kepada semua pegawai negeri, menjadi pegawai Republik Indonesia. Instruksi tersebut kemudian disampaikan juga oleh KNI Kota Bandung dalam sebuah maklumat yang mengharuskan pertukaran pimpinan kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan milik Jepang kepada pimpinan Bangsa Indonesia per tanggal 28 September 1945.

Pada 19 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia yang telah terbentuk melakukan penyusunan kementerian yang terdiri dari 12 kementerian dan membagi Indonesia ke dalam delapan provinsi, yakni Provinsi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil yang masing-masing dikepalai oleh Gubernur. Pada tiap-tiap provinsi terdapat keresidenan yang dikepalai seorang Residen, dan tiap-tiap keresidenan dibagi menjadi kabupaten dan kotapraja yang masing-masing dikepalai oleh Bupati dan Walikota.

Khusus untuk Provinsi Jawa Barat yang dikepalai Mr. R. Sutarjo Kartohadikusumo, pada mulanya berpusat di Jakarta, kemudian dipindahkan ke Bandung pada September 1945. Sejak saat itu, Bandung menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Guna menyempurnakan struktur pemerintahan daerah, pemerintah pusat membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, KNID dikepalai Oto Iskandar Di Nata. Sementara wilayah Keresidenan Priangan dan Kabupaten Bandung yang berada di bawah Provinsi Jawa Barat masing-masing dikepalai oleh R. Nitisomantri dan Sutalaksana. Tugas KNID adalah menghimpun, memimpin, dan mengarahkan rakyat, termasuk di dalamnya memilih pejabat-pejabat setingkat Residen, Bupati, dan Walikota.

Provinsi Jawa Barat sendiri terbagi atas 5 keresidenan, 18 kabupaten, dan 5 kotapraja. Kelima keresidenan tersebut antara lain keresidenan Banten, Jakarta, Priangan, Bogor, dan Cirebon. Khusus untuk Keresidenan Priangan yang dikepalai R. Puradireja, wilayahnya terbagi atas Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, dan

Kotapraja Bandung. Secara umum, pembagian wilayah administratif pada masa pasca kemerdekaan sama seperti masa Hindia Belanda. Kepala daerah yang telah dipilih oleh KNID merupakan pejabat-pejabat yang telah berpengalaman menduduki pemerintahan pada masa Pemerintahan Militer Jepang. Bahkan, jabatan setingkat bupati ke bawah tetap dipertahankan seperti halnya pada masa Pemerintahan Militer Jepang. Saat itu, Kotapraja Bandung dipimpin oleh seorang Walikota dengan didampingi oleh KNID Kota Bandung. Jabatan walikota dipegang R. A. Atmadinata dan jabatan KNID Kota Bandung dipegang R. Sjamsoerijal. Pada saat menjalankan tugasnya, R. A. Atmadinata mengalami sakit sehingga tugas walikota dialihkan pada R. Sjamsoerijal yang sekaligus menjabat sebagai Ketua KNID Kota Bandung (Sitaresmi, 2013: 75-76).

Peta 4.1. Peta Administratif Wilayah Jawa Barat 1945 – 1950 dan 1950 - 1960

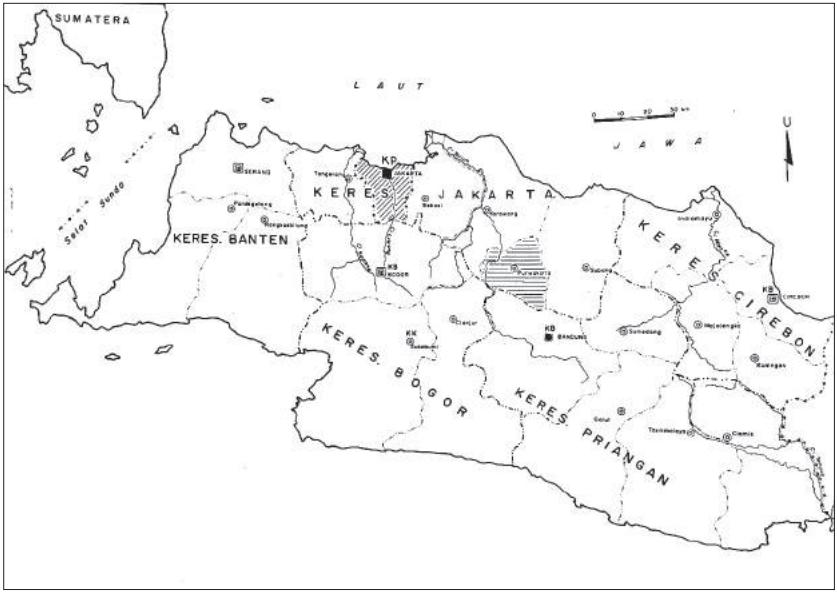

Sumber: Peta Sejarah Provinsi Jawa Barat, 1987. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pemindahan pemerintahan acap kali terjadi, seperti pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat ke Bandung dan pemindahan Markas Badan Keamanan Rakyat (BKR) Keresidenan Priangan ke Bandung. Namun, tidak terkonsentrasinya tenaga-tenaga pimpinan menyebabkan tatanan pemerintahan simpang siur, sehingga Kota Bandung lebih banyak berkutat pada urusan politik dan militer. Dalam kondisi demikian, rakyat masih patuh menyerahkan senjata dan kendaraan yang mereka sita dari Jepang kepada KNI, BKR dan Polisi. Terlebih dari pemerintah pusat di Jakarta juga mengeluarkan instruksi resmi agar masyarakat Kota Bandung tetap tenang, tentram, berdisiplin dan tidak bertindak sendiri-sendiri (Nasution, 1977: 319).

Belum genap sebulan usia kemerdekaan Republik Indonesia, tentara Sekutu mendarat di Jakarta yang tergabung dalam Allied Forces in Netherlands East Indies (AFNEI). Tugas satuan ini antara lain untuk melindungi dan menjalankan pemindahan tawanan perang, melucuti tentara Jepang sekaligus mengembalikan ke negara asalnya serta menjaga ketertiban umum di wilayah bekas jajahan Jepang. Akan tetapi, pendaratan tentara Sekutu ternyata diboncengi oleh kekuatan tentara dan sipil yang berusaha menjajah kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kehadiran tentara Sekutu dan NICA ini yang seringkali memicu gesekan, perpecahan, hingga pertempuran di wilayah Republik, tidak terkecuali juga terjadi di sekitar wilayah Kota Bandung sehingga kondisi menjadi mencekam dan praktis kegiatan perekonomian serta pembangunan berhenti. Pemerintahan administratif yang baru terbentuk memfokuskan diri pada upaya menciptakan keamanan dan mempertahankan kemerdekaan.

Pelopor-pelopor Sekutu dan NICA tiba di Kota Bandung sebagai pasukan Recovery of Allied Prisoners of War and Internees (RAPWI) yang dipimpin Kapten Gray bersama dengan Palang Merah Internasional. Pemerintah Republik menganjurkan agar masyarakat Bandung tetap menjaga 'kesopanan internasional' kepada pasukan RAPWI. Namun, dari hari ke hari situasi di Kota Bandung semakin kacau lantaran upaya pejuang dan pemuda yang berusaha mengambil alih bekas-bekas kekuatan Jepang seringkali menimbulkan keributan dengan tentara Jepang yang bertahan. Ketegangan juga diperparah setelah orang-orang Belanda dan Indo-

Belanda yang menjadi tawanan selama perang dibebaskan dari kamp-kamp interniran. Mereka memusuhi prokalamasi Republik Indonesia dan melakukan aksi provokasi yang menyulut amarah pemuda pejuang (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005: 88). Pada waktu itu, Kota Bandung berpenduduk 70.000 orang bangsa Belanda yang kebanyakan juga bekas tawanan pada masa pendudukan Jepang. Setelah dibebaskan, mereka memenuhi wilayah Bandung utara yang juga merupakan bekas tangsi serta markas-markas Jepang, sehingga makin lama berubahlah Bandung utara menjadi perbentengan Belanda-Jepang (Nasution, 1977: 320).

Pada 12 Oktober 1945, tentara Sekutu di Bandung bertambah dengan datangnya Brigade Mc Donald dari Divisi India ke-23. Meskipun tentara Sekutu (dalam hal ini Inggris) berusaha netral terhadap kondisi konflik antara para pejuang dengan tentara Belanda di Kota Bandung saat itu, namun gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan membuat Inggris mengeluarkan ultimatum agar penduduk pribumi meninggalkan Bandung bagian utara dan mengungsi ke Bandung bagian selatan dengan batas rel kereta api. Ultimatum keluar pada tanggal 27 November 1945 dalam suasana kepedihan pasca bencana banjir yang menimpa masyarakat kota Bandung. Ketika tentara Inggris sibuk membebaskan tahanan perang, tentara NICA sibuk mengatur strategi guna melanjutkan pendudukannya di Indonesia. Pasca ultimatum dikeluarkan, penduduk dari Bandung bagian utara terus mengungsi ke Bandung bagian selatan (Sitaresmi, 2013: 90-91). Berbagai kesulitan dialami oleh penduduk terutama yang tidak memiliki sanak keluarga di Bandung bagian selatan. Namun, hal ini dapat diminimalisasi dengan bantuan laskar rakyat dan penduduk setempat yang merasa sebagai saudara senasib sepenanggungan.

Pertempuran di Kota Bandung terus terjadi, mulai dari pembombardiran daerah Lengkong oleh tentara Inggris pada 2 Desember 1945 akibat pembebasan tawanan perang yang dihalangi oleh para pejuang hingga penyerangan Cicadas pada 14 Desember 1945 akibat kekhawatiran kemungkinan jatuhnya gudang senjata yang lokasinya di Bojong Koneng, tidak jauh dari Cicadas. Pada pertempuran ini, korban lebih banyak berasal dari penduduk sipil, bukan tentara atau pejuang. Garis batas (demarkasi) berupa rel kereta seringkali dilanggar kedua

belah pihak yang memicu pertempuran. Tindakan di luar hukum dan aksi teror marak terjadi di Kota Bandung saat itu, sehingga kegiatan ekonomi menjadi lumpuh total. Bahkan penduduk hanya mengandalkan tukar menukar barang seadanya untuk mendapatkan kebutuhan makanan.

Gambar 4.1. Patroli pasukan NICA di sekitar Bandung

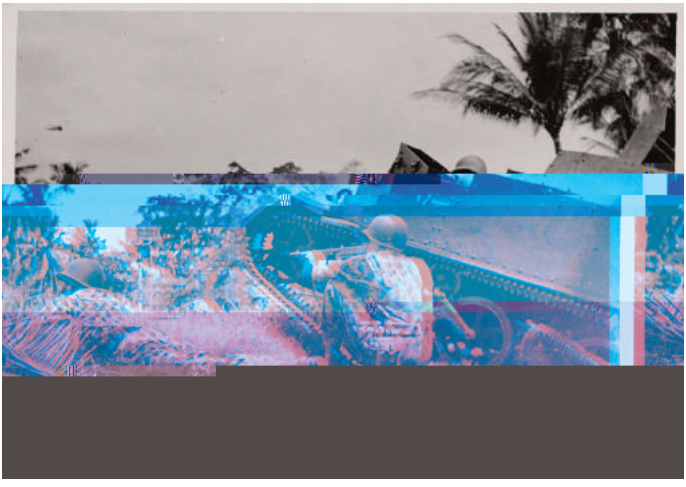

Sumber: Geheugen van Nederland

Inggris menganggap ultimatum pertama tetap menimbulkan gangguan dalam usaha menjaga keamanan dan membebaskan para tahanan perang. Oleh sebab itu, pada 17 Maret 1946, panglima tertinggi AFNEI di Jakarta memberikan ultimatum kedua kepada Perdana Menteri Sutan Sjahrir agar memerintahkan pasukan bersenjata RI untuk meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 1946 pukul 24.00. Dalam ultimatum tersebut, Inggris menyatakan tidak akan mengganggu proses pemindahan dan hanya akan bertindak dengan gas air mata tanpa tembakan, mortir, dan bom apabila terdapat pejuang yang masih menghalangi usaha mereka dalam menjaga keamanan. Dari ultimatum ini, Inggris berupaya memperlihatkan sikap netral. Hanya pemerintah sipil, polisi dan penduduk

sipil yang diperbolehkan untuk menetap. Ultimatum ini diterima oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dengan beberapa pertimbangan antara lain tentara Inggris bukanlah musuh yang sebenarnya melainkan tentara Belanda, dan tentara serta pejuang Indonesia bukan tandingan tentara Inggris yang merupakan pemenang Perang Dunia II, sehingga perlu diselamatkan guna menghadapi tentara Belanda. Hal ini sebagai strategi demi memperoleh pengakuan secara *de facto* sebelum memperoleh pengakuan *de jure*.

Kemudian Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengutus Mayjen Didi Kartasasmita dan Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara ke Bandung untuk melakukan perundingan dengan tentara dan pejuang kemerdekaan sekaligus melihat keadaan Kota Bandung. Mr. Sjafruddin menganjurkan agar tentara mundur ke selatan, namun Residen Ardiwinangun mengajukan keberatan. Seperti halnya Residen Ardiwinangun, Kolonel Nasution juga mengajukan keberatan atas perintah ini dan hanya akan mundur apabila penduduk juga ikut mundur bersama dengan tentara dan pejuang. Pihak Inggris kemudian menyebarkan pamflet di Bandung bagian selatan melalui jalur udara sehubungan dengan ultimatum tersebut yang dilakukan ketika Kolonel Nasution dan Mayjen Didi Kartasasmita sedang mengelilingi Bandung bagian utara untuk melihat kondisi kerusakan yang diakibatkan oleh pejuang kemerdekaan (Sitaresmi, 2013: 101-115).

Dalam kondisi persiapan untuk mundur tersebut, muncul perintah untuk tetap mempertahankan Kota Bandung sampai titik darah penghabisan melalui sebuah kawat yang berasal dari Yogyakarta tanpa diketahui pengirimnya. Perintah ini diduga berasal dari Panglima Sudirman, pemimpin tertinggi Tentara Republik Indonesia (TRI). Reaksi dari tentara dan pejuang beragam, mulai dari mematuhi untuk mundur hingga berupaya tetap menantang pasukan Inggris dan Belanda secara *head to head* meskipun persenjataan terbatas. Saat itu tentara Indonesia dan para pejuang di kota Bandung hanya memiliki sekitar 100 persenjataan dengan total sekitar 10.000 pasukan berbanding 12.000 pasukan Inggris dengan persenjataan lengkap dan modern. Sebagai jalan tengah atas perintah yang berlainan tersebut, Kolonel Nasution mengusulkan untuk mundur dari Kota Bandung, tetapi terlebih dahulu menghancurkan fasilitas yang

dapat dimanfaatkan tentara Inggris dan Belanda (Sitaresmi, 2013: 101-115).

Sebelum batas akhir ultimatum, tentara dan pejuang melakukan rapat konsolidasi di Markas Divisi III Tentara Rakyat Indonesia pada 24 Maret 1946 pukul 10 pagi yang dihadiri Komandan Divisi III Kolonel Nasution, Komandan Resimen 8 Letkol Omon Abdurrahman, Komandan Batalyon I Mayor Abdurrahman, Komandan Batalyon II Mayor Sumarsono, Komandan Batalyon III Mayor Ahmad Wiranatakusumah, Ketua MP3 Letkol Soetoko, dan Komandan Polisi Rukana. Dalam rapat tersebut, Komandan Polisi Rukana mengusulkan untuk mempersulit ruang gerak tentara Inggris dan Belanda dengan meledakkan "Sang Hyang Tikoro", sebuah terowongan Sungai Citarum di Rajamandala sehingga sungai meluap dan menjadi lautan air (Sitaresmi, 2013: 101-115). Setelah banjir yang melanda, lautan air di Kota Bandung berubah menjadi api setelah beberapa objek vital kota Bandung dibumihanguskan oleh tentara dan para pejuang.

Rencana aksi bumi hangus dimulai dari pukul 2 siang tanggal 24 Maret 1946. Kolonel Nasution mengumumkan seruan untuk meninggalkan kota Bandung sejauh 11 km dari pusat kota Bandung sekaligus perintah membumihanguskan bangunan-bangunan yang memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh tentara Inggris dan Belanda. Perintah ini lalu disebarkan kepada seluruh pimpinan masyarakat seperti ***azacho*** (ketua rukun warga) dan ***kumicho*** (ketua rukun tetangga) untuk memudahkan koordinasi. Pada hari yang sama juga diputuskan beberapa daerah yang akan menjadi tempat pengungsian, yaitu Keresidenan Priangan ke Garut, Walikota Bandung ke Garut, Bupati Bandung ke Banjaran, Jawatan Kereta Api ke Cisurupan (Cikajang), Jawatan PTT ke Tasikmalaya, Rumah Sakit ke Garut dan Banjaran, para guru dan anak-anak ke Kertasari, serta penjara Sukamiskin ke Yogyakarta (Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung, 2002: 30). Setelah pengumuman melalui radio oleh Kolonel Nasution, tentara Inggris dan Belanda memberikan reaksi dengan mengganggu proses perpindahan penduduk dengan menyatroni rumah penduduk, membuat kekacauan, dan memberondong para pejuang dengan timah panas sehingga proses pemindahan tidak berjalan lancar.

Tindakan ini jelas melanggar perintah pada saat ultimatum diberikan oleh pimpinan AFNEI di Jakarta.

Kondisi Kota Bandung pada proses pemindahan penduduk, pemerintahan dan militer tersebut sangat kacau sekaligus mencekam. Penduduk saat itu gelisah, panik dan ketakutan. Pasukan TRI dan para pejuang dihadapkan pada situasi sulit, yakni menyelamatkan keluarga mereka dan mempersiapkan pembumihangusan Kota Bandung. Suasana di kantor-kantor dan instansi publik sangat sibuk. Kantor Kemakmuran dan Perekonomian Kota Bandung memindahkan makanan, pakaian dan alat-alat tulis. Sementara beberapa bahan makanan dibagikan kepada masyarakat (Sitaresmi, 2013: 139-146). Beberapa arsip penting pun turut dibawa, sisanya dimusnahkan untuk menutup kemungkinan pihak Inggris dan Belanda memanfaatkan arsip tersebut. Tidak hanya Kantor Kemakmuran dan Perekonomian, Kantor RRI pun turut mengungsikan barang-barang pentingnya, seperti pemancar, alat perlengkapan radio, dan piringan menuju Majalaya. Sementara itu, kondisi kepanikan juga dialami oleh anak-anak yang masih bersekolah. Mereka bergegas kembali ke rumah untuk membantu persiapan mobilisasi. Pada pukul 5 sore, gelombang pengungsi mulai ramai memenuhi jalan-jalan kota menuju ke selatan. Mereka pun mematuhi perintah untuk membakar rumah mereka tanpa memikirkan dampak yang mereka hadapi pasca perang berakhir. Hanya bahan makanan seadanya dan pakaian secukupnya yang mereka bawa.

Sekitar 200 ribu penduduk ikut serta mengungsi dari Kota Bandung saat itu. Para pengungsi menyusuri jalan melewati Regentsweg (sekarang Jalan Dewi Sartika), Jalan Banjaran (sekarang Jalan Mohammad Toha), Jalan Kopo, dan Jalan Buahbatu. Ada pula yang melalui Cigereleng menuju Dayeuhkolot. Di sepanjang jalan ini terdapat banyak mayat bergelimpangan, baik dari tentara Inggris dan Belanda, maupun TKR (Sitaresmi, 2013: 147-156).

Rencana pembumihangusan Kota Bandung dimulai pukul 00.00 dengan peledakan pertama di sudut selatan Alun-alun Bandung pada gedung Indische Restaurant yang kini menjadi gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Alat-alat yang disiapkan guna membuat Kota Bandung

Gambar 4.2. Kerusakan yang terjadi di Kota Bandung setelah peristiwa Bandung Lautan Api

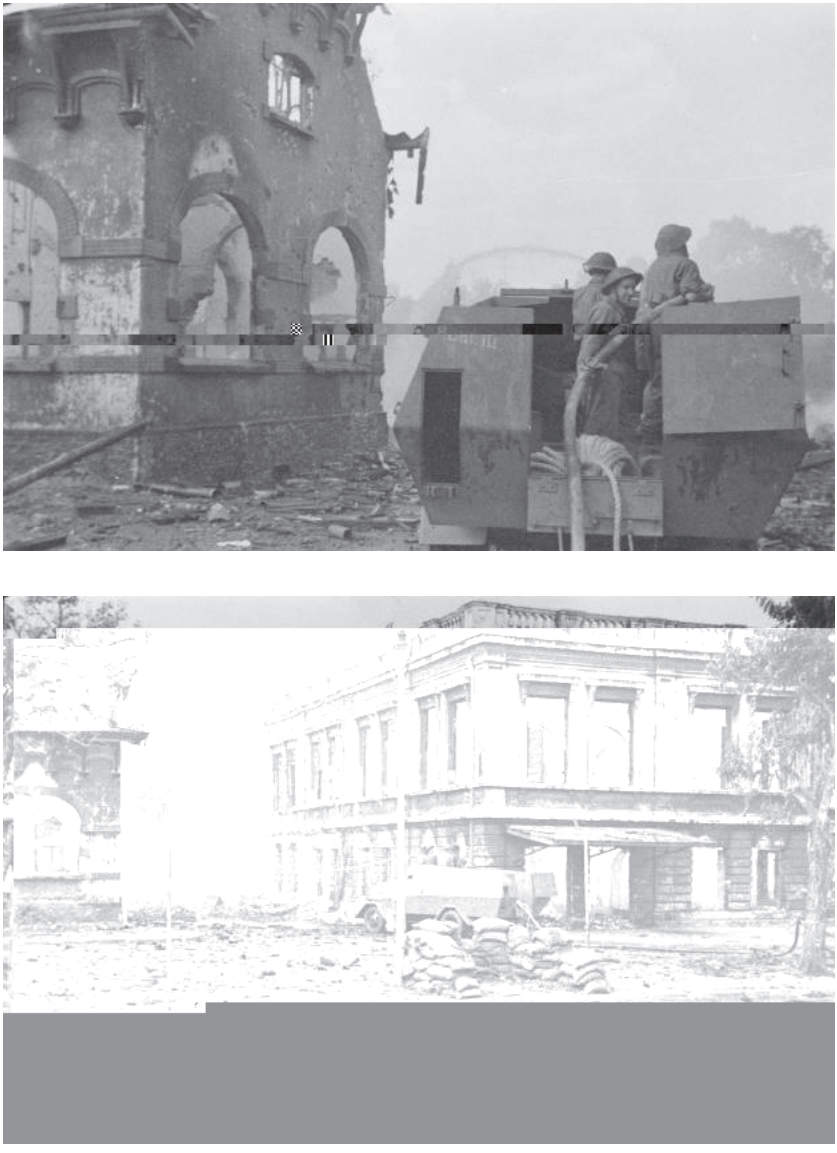

Gambar 4.2. Kerusakan yang terjadi di Kota Bandung setelah peristiwa Bandung Lautan Api (Lanjutan)

Gambar 4.2. Kerusakan yang terjadi di Kota Bandung setelah peristiwa Bandung Lautan Api (Lanjutan)

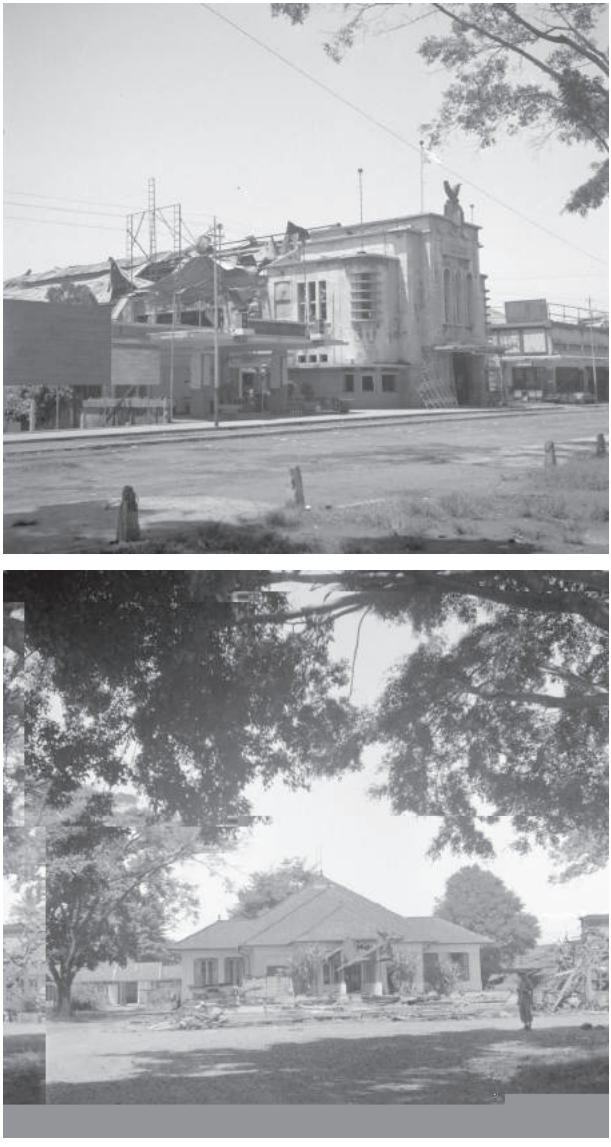

Gambar 4.2. Kerusakan yang terjadi di Kota Bandung setelah peristiwa Bandung Lautan Api (Lanjutan)

Sumber: nationaal archief (gahetna.nl)

Atas pemindahan penduduk, militer, dan pemerintahan, Markas Besar Tentara Rakyat Indonesia di Yogyakarta menyalahkan tindakan defensif tersebut. Pemindahan ini tidak diikuti oleh semua penduduk. Beberapa penduduk memilih bertahan seperti hanya penduduk keturunan Tionghoa, terutama yang tergabung dalam Po An Tui. Mereka merasa lebih aman apabila bertahan di Kota Bandung sembari menjaga harta benda yang mereka miliki. Beberapa pejuang juga bertahan lebih dalam rangka memantau situasi di dalam kota Bandung sekaligus menjadi informan bagi pejuang dan tentara yang berhijrah. Pemindahan ini membuat pemerintahan Kabupaten Bandung dibagi menjadi dua, yakni utara dan selatan agar roda pemerintahan tetap bergulir. Daerah utara yang meliputi Lembang dan Cicalengka di bawah perintah Patih Badung Anggakusumah, sementara daerah selatan yang meliputi seluruh kabupaten Bandung kecuali Lembang dan Cicalengka langsung berada di bawah perintah bupati. Pengosongan kota tidak serta merta

menghentikan pertempuran antara pejuang dan TRI melawan tentara Inggris dan Belanda. Pertempuran justru bergeser ke bagian pinggiran Kota Bandung. Para pejuang, laskar, dan TRI membentuk pertahanan di selatan Bandung. Saat itu sudah memasuki Bulan Ramadhan dan pasukan perjuangan mayoritas berpuasa. Guna memberikan semangat dalam bertempur merebut kembali Kota Bandung, muncul slogan "Lebaran di Bandung". Pada akhirnya daerah-daerah seperti Cikole, Ciater, dan Lembang berhasil direbut (Sitaresmi, 2013: 184).

Dalam upaya merebut kembali kota Bandung, para pejuang bersama dengan TRI biasanya melakukan serangan pada malam hari dengan menyusup melalui hutan, pematang sawah, dan daerah-daerah pinggiran kota. Guna memberikan semangat dalam merebut kembali kota Bandung, selain slogan "Lebaran di Bandung", muncul pula lagu penyemangat berjudul "Halo-Halo Bandung". Dalam lirik lagu tersebut terdapat istilah lautan api dan ajakan untuk merebut kembali kota Bandung. Citra yang berusaha diangkat melalui lagu tersebut adalah kerinduan akan kota Bandung yang secara eksplisit disebutkan dengan "sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau". Lagu ini dipopulerkan oleh kelompok Tonil Pak Kasur dengan notasi yang disempurnakan oleh Ismail Marzuki (Sitaresmi, 2013: 195-198). Selain lagu "Halo-Halo Bandung", tercipta pula lagu perjuangan berjudul "Gempur dan Rebut Bandung Kembali" yang mengajak seluruh rakyat bersatu merebut kota Bandung dari tangan tentara Inggris dan Belanda.

RADIO MALABAR DAN KISAH LAGU 'HALO-HALO BANDUNG'

Masyarakat Bandung harus berbangga dengan peninggalan kotanya. Saat mencapai puncak perkembangannya pada masa kolonial, terjadi momentum paling penting di kota ini bagi dunia telekomunikasi waktu itu, yakni peresmian Radio Telepon yang menghubungkan Kepulauan Nusantara ke Negeri Belanda di Eropa. Radio telepon yang diresmikan pada 5 Mei 1923 itu membentang lebih dari 12.000 km, lebih panjang dari radio telepon New York ke London yang hanya berjarak kurang lebih 9.000 km. Dibalik proyek ini, Ir. G.J. de Groot berperan dalam merintis dan merancang instalasi yang diselesaikan hampir 5 tahun. Stasiun radio ini didirikan di lereng Gunung Malabar, sehingga dinamakan 'Radio Malabar'.

Bagi penduduk Eropa di Bandung waktu itu, hubungan Hindia dengan Negeri Belanda lewat udara (Verbinding Indie – Holland door de Lucht) merupakan sesuatu yang sangat emosional. Sebelum dibangun Radio Malabar, korespondensi dua negeri ini dihubungkan lewat pos yang dikirim dengan kapal laut. Butuh berbulan-bulan untuk bisa berkomunikasi, sementara dengan adanya radio telepon, hanya perlu satu jam menunggu lalu sudah bisa langsung bercakap-cakap. Momen tersebut dipopulerkan dengan lagu yang dibuat pada tahun 1923, dan dinyanyikan oleh penyanyi top Willy Derby, berjudul "Hallo-Hallo Bandung". Lagu tersebut tentu berbeda dengan lagu "Halo-Hallo Bandung" gubahan Ismail Marzuki yang kita kenal saat ini. Lagu versi tahun 1923 ini mengisahkan tentang pembicaraan seorang ibu yang menghubungi anaknya dari negeri Belanda ke Hindia.

HALLO-HALLO BANDUNG
Klein modertje stond te beven
Op het telegraaf kantoor
Vriendelijk vraagt de telefoon juffrow
Dadelijk krijgt U wel gehoor
Greep zij de mikrofoon
En toen horde zij verwonderd
Naar de stem van haar zoon
Hallo – Hallo Bandoeng?
Ja moeder hier ben ik!
Dag lieve jongen zegt zij met
een snik
Hallo – Hallo
Hoe gaat het oude vrouw?
Jongen lief, ik verlang zo erg naar jou!

HALLO HALLO BANDUNG
Bunda mungil berdiri menggigil
Di suatu kantor telepon
Dengan ramah operator telepon wanita bertanya
Sebentar ibu bakal dapat jawaban
Gemetar ia berdiri di topang kaki tua
Diraihnya mikropon
Dengan heran terdengar
Suara dari putranya
Hallo – Hallo Bandung?
Ya Ibu, aku di sini!
Anakku sayang, ucapnya terbata
Hallo - Hallo
Apa Kabar Bunda?
Anakku sayang, aku amat rindu padamu!

Sumber: Haryoto Kunto, 1985. Wajah Bandoeng

Gambar 4.3. Stasiun Radio Malabar tahun 1915 (atas)

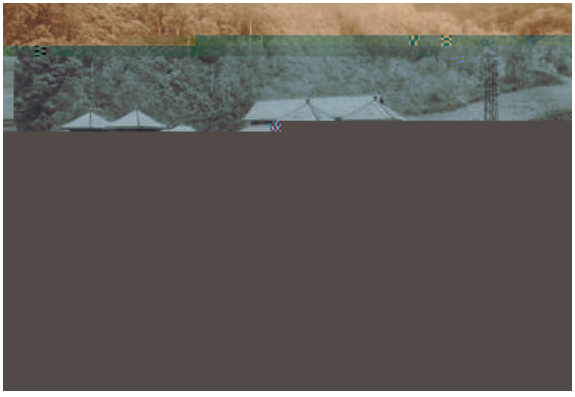

Gambar 4.4. Ruang Mesin Radio Malabar tahun 1923 (bawah)

Sumber: KITLV

Setelah peristiwa 'Bandung Lautan Api', pemerintahan Republik Indonesia yang berdiri di Kota Bandung tidak berfungsi. Walikota Bandung Syamsurijal tidak dapat menjalankan tugasnya lagi sebab para pejabat lainnya telah mengungsi ke luar kota. Sejak ditinggalkannya Kota Bandung oleh sebagian besar penduduk, kondisi perekonomian mengalami kemacetan. Tidak hanya di Bandung Selatan yang memang sebagian besar pengungsi berasal dari wilayah ini, situasi yang sama juga dialami oleh penduduk Bandung Utara. Hal tersebut terutama disebabkan karena pabrik-pabrik makanan, toko-toko dan warung-warung, terletak di bagian selatan (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, 1981: 232).

Situasi perekonomian yang sulit ini juga dirasakan oleh penduduk Bandung Utara yang banyak dihuni oleh Tentara Sekutu, NICA dan orang Tionghoa yang mengungsi ke utara. Pada awal Maret 1946, sebelum pembumihangusan terjadi, perekononian Kota Bandung di sebelah utara ikut merosot ditandai dengan langkanya makanan utama, yaitu roti. Terjadi pembagian jatah roti di kalangan Belanda dan Tionghoa. Selain kekurangan, harga makanan di Bandung Utara juga sangat tinggi. Perbedaan harga tersebut bahkan dapat mencapai 6 kali lipat dibandingkan harga makanan di Bandung Selatan. Alasannya, selain karena di Bandung Selatan adalah sumber makanan, penduduk Bandung Utara juga diketahui berasal dari golongan orang berpunya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pedagang makanan untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang sangat tinggi (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, 1981: 232). Kondisi yang semakin parah terjadi setelah Bandung Selatan juga kosong ditinggal penduduknya, sehingga roda perekonomian seakan berhenti.

Kedatangan NICA ke wilayah-wilayah pendudukan juga membawa mata uang cetakan sendiri. Mata uang NICA sudah dipersiapkan pada Desember 1942 ketika pemerintahan Hindia Belanda mengungsi ke Australia. Peredaran mata uang NICA atau disebut "uang merah" dicetak di Amerika Serikat oleh *American Bank Note Company*. Uang NICA diedarkan dengan sembilan pecahan yaitu terdiri dari 50 sen dan pecahan

1, 2, 5, 10, 50, 100, dan 500 rupiah. Selain uang kertas, Belanda juga mencetak koin 1/5, 1, dan 2,5 sen serta 0,25 gulden. Penggunaan istilah rupiah adalah bagian dari strategi Belanda untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Uang NICA menjadi salah satu alat perang Belanda untuk mengacaukan perekonomian Indonesia. Belanda juga menggunakan uang Jepang yang diperoleh dari bank-bank yang berhasil dikuasai di kota besar. Uang Jepang ini kemudian dimanfaatkan untuk menggaji pegawai. Akibat peredaran uang yang sangat banyak itulah kemudian terjadi inflasi, meskipun sebenarnya terpuruknya kondisi ekonomi telah dimulai sejak zaman pendudukan Jepang yang juga melepaskan uang dalam jumlah sangat besar.

Gambar 4.5. Uang Merah NICA

Ket. gambar pecahan 50 cent: Penandatangan: Dr. H.J.van Mook & Dr. R.E. Smits ; Ukuran (mm): 126 x 73 ; Warna dominan/desain utama depan : merah / lambang Belanda & Ratu Wihelmina dalam bingkai oval ; Warna dominan/desain utama belakang: Hijau/ Nilai angka 50 cents da n teks Undang-undang 2 bahasa ; Pencetak: American Banknote Company ; Tanggal penerbitan: 2 Maret 1943 (diedarkan tahun 1945 saat NICA masuk Indonesia); Tanggal penarikan kembali: -

Sumber: *Lintasan* (2015, 131-132).

Ketika DJB dibuka kembali dan mengedarkan uang NICA, terjadi kekacauan moneter di wilayah Republik Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, nasib DJB selama masa pendudukan Jepang tidak hanya digantikan oleh NKG, melainkan untuk sementara waktu pemerintah Kerajaan Belanda membentuk Bank voor Nederlandsch-Indie di Paramaribo pada tahun 1944 yang fungsinya menjalankan kegiatan DJB dan bank-bank besar pengkreditan milik Belanda yang sudah berdiri sebelumnya. Bank-bank tersebut berkesempatan mengisi kembali staf mereka, mengatur administrasi dan melakukan persiapan untuk memulai bisnis agar dapat mengambil alih tugas Bank voor Ned-Indie lagi.

Akibat banyaknya masalah pada sektor perbankan, pada November 1945 dibentuklah Komisi Perbankan (*Commissie voor het Bankwezen*) terdiri dari Direktur Finansial sebagai ketua, seorang Anggota Direksi dari setiap bank-bank di Hindia Belanda dan seorang sekretaris. Komite ini menjadi wadah kerjasama antara pemerintah dengan perbankan. Setelah beberapa bulan persiapan, akhirnya DJB kemudian dibuka kembali di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1946. Setelah itu, disusul pembukaan kembali kantor-kantor cabang di kota lain yang sudah diduduki oleh Belanda.

Berdasarkan risalah Rapat Direksi, kantor DJB Bandung dibuka kembali pada tanggal 9 Mei 1946. Hal itu juga dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 119/1-Diversen (Rupa-rupa) tanggal 22 Mei 1946 tentang telah dibukanya kembali 10 kantor-kantor De Javasche Bank, antara lain di Batavia, Amsterdam, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Pontianak, Banjarmasin, Makassar dan Manado. Sementara delapan kantor cabang lain yaitu Malang, Kediri, Solo, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Padang dan Kotaraja (Aceh) belum terjangkau karena kota-kota tersebut masih dikuasai Republik.

Segera setelah Kantor Cabang Bandung dibuka kembali, telah dilaporkan dengan surat No. 119/88 GZ tanggal 14 Maret 1947 tentang kerusakan-kerusakan gedung akibat dari Pendudukan Jepang dan masa Revolusi Kemerdekaan. Detil kerusakan berikut kerugiannya antara lain: Pagar besi di sekeliling halaman kantor telah dibongkar dan diangkut oleh Jepang dengan kerugian *f*60.000; Pagar loket kuningan senilai *f*5.000; Biaya perbaikan untuk memasang kembali pemisah antara ruang

Pemimpin Cabang Pengganti dengan ruang kerja pembukuan yang terbuat dari kayu dan kaca-kaca, sebesar *f*1.000; Kerugian inventaris kantor sebesar *f*13.775; Penggalian kembali ruang Khazanah Perang yang telah ditimbun pasir guna mencegah serangan bom. Usaha untuk mengembalikan fungsi khazanah ke keadaan semula, perlu dibersihkan pasir kurang lebih sebanyak 600 meter kubik dan membongkar tembok sepanjang 100 meter dengan tinggi 1,5 meter. Perbaikan tersebut baru dapat dikerjakan setelah tersedianya fasilitas angkutan serta tenaga pekerja, dengan perkiraan biaya sebesar *f*5000, termasuk penanaman rumput.

Di sisi lain, untuk mengatasi beredarnya uang NICA, pemerintah RI mengeluarkan maklumat tentang mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah bagi rakyat Indonesia, yaitu:

1. Maklumat Pemerintah tanggal 2 Oktober 1945 menetapkan pelarangan penggunanaan uang NICA di wilayah RI;
2. Maklumat Presiden Republik Indonesia No. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945, yang menetapkan jenis mata uang yang berlaku sementara waktu sebagai alat pembayaran yang sah yaitu:
    a. Uang kertas DJB yang diterbitkan antara tahun 1925-1941 yang terdiri dari delapan pecahan rupiah, yaitu 1000, 500, 200, 100, 50, 25, 10, dan 5 rupiah;
    b. Uang kertas Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1940-1941 yaitu pecahan 2,5 dan 1 rupiah;
    c. Uang kertas Jepang di Jawa yang terdiri atas pecahan 100, 10, 5, dan 1 rupiah, serta 50, 10, 5, dan 1 sen;
    d. Uang logam Belanda yang dikeluarkan sebelum tahun 1942, terbuat dari bahan emas: pecahan 10 dan 5 rupiah; bahan perak: pecahan 2,50 rupiah (***ringgitan***), 1 rupiah (***perakan***), 50 sen (***tengahan***), 25 sen (***talinan***), dan 10 sen (***picisan***); bahan nikel: pecahan 5 sen; dan dari tembaga: pecahan 2,5 sen (***gobangan***), 1 sen (***senan***), dan 0,5 sen (***peseran***).[3]

3 Kusnodiprodjo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah RI 1945* (Jakarta: SK Seno, 1951), hlm. 51-52.

Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, dan beredarnya ketiga jenis mata uang tersebut direspons secara beragam oleh masyarakat. Misalnya, ketika seseorang menyimpan dan bertransaksi dengan uang NICA, maka ia dicurigai pro-Belanda. Ketika pemerintah RI sedang merencanakan mengeluarkan mata uang sendiri, NICA masih mengedarkan uang NICA di daerah yang dikuasai. Mereka yang bekerja di wilayah ini menerima upah dalam bentuk uang NICA, tetapi untuk berbelanja mereka membutuhkan uang Jepang karena uang NICA tidak diminati pedagang. Situasi ini mengacaukan kondisi perekonomian dan meningkatkan inflasi.

Peredaran uang cetakan NICA yang dianggap masyarakat menjadi masalah, akhirnya disiasati oleh pemerintah Belanda dengan mencetak uang terbitan De Javasche Bank mulai tahun 1946 untuk wilayah-wilayah yang berhasil diduduki. Setidaknya ada tiga kali pencetakan uang DJB seri federal yang dicetak melalui perusahaan Johan Enshede en Zonen dan G. Kolff, yaitu pada Seri Federal I (terbit tahun 1946); Seri Federal II (terbit tahun 1947); Seri Federal III (terbit tahun 1948). Ketiga seri uang federal DJB ini memiliki pecahan mulai dari 10 sen, 25 sen, ½ rupiah, 1 rupiah, 2 ½ rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, 100 rupiah dan 1000 rupiah. Keberadaan uang DJB sebagai pengganti uang NICA mendapat dukungan dari Sekutu sehingga makin menjatuhkan kedaulatan ekonomi Republik Indonesia yang baru saja merdeka (Darsono, 2017: 222).

Gambar 4.6. Uang DJB seri federal, urutan atas ke bawah: seri I (tahun1946), seri II (tahun 1947) dan seri III (tahun 1948)

Gambar 4.6. Uang DJB seri federal, urutan atas ke bawah: seri I (tahun1946), seri II (tahun 1947) dan seri III (tahun 1948) (Lanjutan)

Keterangan pecahan 5 Gulden; Penandatangan: H. Teunissen & Dr. R.E. Smits; Ukuran (mm): 150x75; Warna dominan/desain utama depan: Ungu/teratai; Warna dominan/desain utama belakang: Ungu/logo DJB & teks Undang-undang 4 bahasa; Pencetak: Johan Enschende en Zonen; Tanggal penerbitan: 1946; Tanggal penarikan kembali: -

Sumber: *Lintasan* (2015: 151-152)

Merespons beredarnya mata uang NICA dan DJB, Pemerintah RI melihat urgensi untuk mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI). Kehadiran ORI tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar yang sah menggantikan mata uang DJB, uang NICA dan uang Jepang, namun juga sebagai representasi dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat secara ekonomi, bahkan masuknya ORI ke daerah pendudukan NICA

menjadi simbol perlawanan (Rahardjo, 1995: 49). Diawali dengan instruksi Menteri Keuangan A.A. Maramis pada 24 Oktober 1945 kepada tim Serikat Buruh Percetakan G. Kolff di Jakarta untuk mencari pencetakan uang yang modern, akhirnya diputuskan bahwa pencetakan G. Kolff dan *Nederlandsch-Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken* (NIMEF) di Malang dipakai untuk mencetak uang. Selanjutnya menteri keuangan membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Oeang Kertas RI, yang diketuai TRB Sabaroedin dari Kantor Bank Rakyat Indonesia.

Sejak Januari 1946 pencetakan ORI dimulai oleh Percetakan Balai Pustaka selaku pembuat desain dan bahan baku (*master*) berupa negatif kaca yang dilakukan oleh Boenjamin Soerjohardjo, sedangkan pelukis Abdussalam dan Soerono sebagai pelukis pertama ORI (Grup Riset Kebanksentralan, 2014: 80). Proses pencetakan akhir (*offset*) dilakukan oleh Percetakan Republik Indonesia di Jakarta di bawah Kementerian Penerangan. Karena situasi keamanan yang mengkhawatirkan, pada Mei 1946 percetakan ORI di Jakarta dihentikan dan dipindahkan ke daerah seperti Yogyakarta, Solo, Malang, dan Ponorogo dengan menafaatkan perusahaan pencetakan swasta yang terpercaya. Pencetakan ORI di Surakarta diawasi oleh panitia khusus yang dibentuk Menteri Keuangan pada 16 September 1946. Bahan dan alat-alat harus diselundupkan dari daerah pendudukan Belanda yang penuh bahaya. Pencetakan ORI dilakukan oleh perusahaan Pertjetakan Gading di kampong Tjokrodiningratan di bawah pimpinan pimpinan Soedarbo dan Soekijo (Darsono, 2017: 281).

Sebelum ORI beredar di masyarakat, pada 15 Juli 1946 pemerintah menetapkan bahwa ketiga jenis mata uang yang beredar sebelumnya harus disimpan di bank-bank yang ditunjuk, yaitu BNI, BRI, Bank Surakarta, Bank Nasional, Bank Tabungan Pos, dan Rumah Gadai. Setiap orang hanya boleh memegang uang tunai maksimal 50 rupiah uang Jepang untuk mencukupi kebutuhan. Melalui UU No. 17 Tahun 1946 tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah menetapkan pengeluaran ORI, dan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. SS/1/35 ORI berlaku secara sah sebagai alat pembayaran pada 30 Oktober 1946 (Darsono, 2017: 281).

Namun dalam praktik, peredaran ORI menghadapi banyak hambatan. Di tengah-tengah gejolak perang yang masih berkecamuk, pendistribusian ORI ke daerah-daerah memerlukan keberanian dan perjuangan karena harus melewati medan yang berat, menghadapi kemungkinan disergap tentara NICA dan perampokan di perjalanan. Pengunaan ORI sendiri sebagai alat tukar cukup dilematis bagi penduduk baik yang tinggal di daerah pendudukan NICA maupun di wilayah RI. Dilema dialami penduduk karena jika diketahui memiliki ORI oleh tentara Belanda dapat dibunuh karena dianggap pendukung republik, sebaliknya ia juga takut menggunakan uang NICA karena bisa dianggap anti-republik atau mata-mata NICA.

Perkembangan politik dan keamanan memengaruhi keberlanjutan pencetakan ORI. Ketika terjadi Agresi Militer I (Juli 1947) dan II (Desember 1948), pencetakan ORI terganggu dan bahkan terhenti karena tempat pencetakan dan alat-alatnya dikuasai Belanda. Usaha memindahkan alat-alat pencetakan dari Malang dan Madiun ke Yogyakarta diketahui Belanda, akibatnya para pegawainya ditangkap/dibunuh dan uang hasil cetakan dibakar. ORI kemudian dicetak di Yogyakarta sebagai ibukota negara dengan penjagaan ketat para pejuang agar tidak diketahui tentara NICA. Demikian pula peredarannya dilakukan melalui jalur-jalur gerilya yang dirahasiakan. Semua seri ORI yang dicetak di Yogyakarta diberi tanda tempat cetak. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemerintahan RI masih ada dan beribukota di Yogyakarta. Untuk mengatasi kesulitan mendistribusikan ORI ke daerah-daerah yang masih dikuasai NICA, akhirnya pemerintah Indonesia mengizinkan mencetak dan mengedarkan ORI Daerah (ORIDA) kepada para pemimpin daerah yang setia terhadap republik, hal ini terjadi selama periode tahun 1947-1949.

Gambar 4.7. Oeang Republik Indonesia (ORI) Seri I

Keterangan: Pecahan 10 rupiah; Penandatangan: A.A. Maramis; Ukuran (mm): 158x76; Warna dominan/desain utama depan: Biru gelap/Presiden Soekarno dan pemandangan alam; Warna dominan/desain utama belakang: Coklat/teks Undang-undang dan ornamen; Pencetak: Pertjetakan Negara Republik Indonesia 1946; Tanggal penerbitan: 17 Oktober 1945; Tanggal penarikan kembali: -Biru

Sumber: *Lintasan* (2015: 211-212)

Keadaan di Kota Bandung pada awal tahun 1947 dikabarkan masih sangat sunyi. Penduduk yang pergi sejak malam pembumihangusan belum kembali dari pengungsian. Dapat dikatakan bahwa masalah utama Kota Bandung pada waktu itu adalah kekurangan penduduk. Dalam Harian Republik, 31 Maret 1947 dikatakan bahwa penduduk Kota Bandung baru kembali 20%. Cadangan makanan khususnya beras masih serba kekurangan, sehingga beberapa penduduk terpaksa menggantinya dengan gaplek. Demi mengatasi kekurangan penduduk, tentara Belanda melakukan propaganda agar penduduk yang mengungsi di sekitar perbatasan segera kembali ke dalam kota. Propaganda dilakukan antara lain melalui kabar bahwa di dalam kota Bandung sudah mulai aman dan para pengungsi yang kembali akan diterima dengan senang hati. Selain itu juga dikirimkan beberapa unit kendaraan ke perbatasan kota untuk mengangkut penduduk yang tertarik kembali ke Kota Bandung (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, 1981: 285 dan 288).

Situasi Kota Bandung sendiri khususnya Bandung Selatan sebenarnya masih belum layak untuk dihuni kembali. Jalan-jalan besar di bagian selatan tidak terpelihara, saluran air mengalami kerusakan, demikian pula kondisi kebersihan dan kesehatan kota yang memprihatinkan. Mempertimbangkan situasi tersebut, pemerintah menganjurkan kepada

rakyat yang ingin kembali ke Kota Bandung agar menahan diri terlebih dahulu, sampai pemerintah dapat mengatur kembali kesediaan bahan makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, 1981: 290).

Kendati Pemerintah Kota Bandung tidak dapat secara langsung mengawasi dan mengatur kehidupan rakyatnya, kehidupan di pengungsian pada umumnya terbilang lebih baik. Kepala desa dan perangkatnya di daerah-daerah yang didatangi pengungsi seperti Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya dan Sumedang berusaha membantu meringankan beban dengan mendirikan tempat penampungan serta dapur umum. Bahan makanan untuk dapur umum diperoleh dari masyarakat setempat yang kebanyakan adalah petani. Di sisi lain, para pengungsi juga berusaha agar tidak bergantung pada masyarakat setempat. Di antara pengungsi ada yang berusaha kembali berdagang, menjadi pengajar, atau kembali bekerja sebagai pegawai dengan bergabung pada instansi semula. Terjadi ikatan yang kuat antara sesama pengungsi, yakni dengan dibentuknya organisasi maupun koperasi yang bertujuan untuk memupuk semangat dan meringankan beban kehidupan (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, 1981: 298 dan 304).

Kembalinya penduduk ke Kota Bandung berangsur-angsur terjadi setelah Belanda melakukan aksi Agresi Militer I pada 21 Juli 1947. Pada agresi ini, Belanda melakukan aksi-aksi militer di kawasan Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis yang merupakan daerah pengungsian. Para penduduk merasa bahwa keselamatannya tetap terganggu sehingga memutuskan lebih baik kembali ke Kota Bandung. Seruan untuk kembali dari pengungsian juga dikumandangkan R. T. A. Juarsa. Hal ini terkait dengan akan dilangsungkannya Konferensi Jawa Barat III yang bertujuan untuk membentuk negara federal, yaitu Negara Jawa Barat (kemudian dalam sidang menjadi Negara Pasundan). Pembentukan negara ini memerlukan banyak orang guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sehingga seruan untuk kembali perlu dilakukan (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2005: 98-100).

Istilah Negara Pasundan telah ada sejak 4 Mei 1947. Saat itu Partai Rakyat Pasundan (PRP) memproklamirkan berdirinya Negara Pasundan di

Alun-alun Kota Bandung guna mempersatukan rakyat Jawa Barat yang diketuai R.A.A Musa Suriakartalegawa. PRP berdiri sejak 20 November 1946 dengan diketuai R.A.A Musa Suriakartalegawa dan Mr. Kustomo sebagai sekretaris. Namun, PRP kurang mendapat sambutan rakyat mengingat saat itu rakyat sedang menggelorakan gelombang revolusi. Adanya Negara Pasundan ini diketahui oleh Belanda sehingga Belanda menjadikannya sebagai boneka guna memecah belah dan menduduki kembali Bandung, bahkan seluruh wilayah Jawa Barat. Seperti pada masa Hindia Belanda, pemerintahan terdiri atas elite birokrasi yang berasal dari tradisional (garis keturunan) dan profesional. Belanda kemudian membentuk Badan Pemerintahan Daerah Sementara (Regering Commissaris Bestuurs Aangelegheden) yang diketuai R. A. Hilman Djajadiningrat dengan salah satu tujuannya membantu pembentukan pemerintahan administratif. Beberapa konferensi mulai dilakukan hingga puncaknya pada konferensi ketiga pada 16 Februari 1948 dibentuk parlemen Negara Pasundan yang berpusat di Kota Bandung dan diketuai R. T. A. Juarsa.

Gelombang pengungsi terus mengalir ke Kota Bandung. Keadaan yang dirasa mulai aman dan banyaknya rakyat yang direkrut menjadi pegawai pemerintah menjadi daya tarik untuk kembali. Sinyal amannya Kota Bandung diberikan dengan mengirimkan batik sebagai tanda pada kerabat atau keluarga yang masih mengungsi. Rakyat yang kembali ke Kota Bandung harus menerima berbagai kenyataan pahit. Uang yang mereka bawa ketika mengungsi ternyata sudah tidak berlaku ketika kembali dari pengungsian. Saat itu uang yang berlaku adalah mata uang Belanda atau biasa disebut uang merah. Sekembalinya mereka ke Kota Bandung, mereka seperti masuk ke dalam kota mati yang telah ditinggalkan penghuninya. Sebagian besar rakyat tidak memiliki rumah karena telah dibakar ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Beruntung bagi rakyat yang rumahnya masih utuh, meskipun tidak sedikit yang perabotnya telah dicuri. Saat itu, rakyat harus memperjuangkan nasibnya masing-masing dan menata kembali kehidupannya di Kota Bandung dari nol. Banyak di antara mereka yang menjual harta benda termasuk perhiasan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun rumah yang telah rata dengan tanah (Sitaresmi, 2013: 223-227).

Saat itu terlihat jelas jarak secara finansial antara rakyat yang mengungsi dan rakyat yang tetap berdiam diri di Kota Bandung. Mayoritas rakyat yang tetap tinggal di Bandung berasal dari etnis Tionghoa sehingga sendi-sendi perekonomian dikuasai etnis ini. Tak jarang pula penduduk yang berasal dari etnis Tionghoa ini mengambil alih rumah penduduk pribumi dan mendaftarkannya pada otoritas hak milik (*Vergunning voor Bewonen*) sehingga mereka secara legal menjadi pemilik sah rumah-rumah tersebut. Sebenarnya rakyat yang mengungsi memiliki hak untuk memulihkan kembali kepemilikan selama mereka mengungsi dengan melakukan *rechtsherstel* (pemulihan hak) melalui Allied Military Administration-Civil Affairs Branch (AMACAB). Akan tetapi banyak rakyat yang tidak paham mengenai hal tersebut. Bagi Belanda sendiri, pemberian ijin dan keistimewaan pada etnis Tionghoa sengaja dilakukan untuk menimbulkan kebencian rakyat pribumi pada etnis Tionghoa sebagai siasat memecah-belah penduduk.

Ekonomi yang belum bangkit sepenuhnya, ditandai dengan daya beli masyarakat yang menurun karena ketiadaan penghasilan. Suplai bahan pokok, terutama beras menipis, sementara permintaan meningkat sehingga kelangkaan terjadi di seantero Kota Bandung. Harga bahan pokok pun melambung tinggi. Bagi rakyat yang bekerja pada pemerintah, keadaan ekonomi mereka sedikit lebih baik. Dalam masa ini, muncul beberapa serikat pekerja seperti Perserikatan Buruh Kereta Api, Vakbond Pamongpraja, Bond Pegawai PTT, dan Serikat Guru Indonesia yang bertujuan memberikan pekerjaan dan pemerataan penghasilan agar perekonomian rakyat Kota Bandung kembali berdenyut. Tidak hanya itu, beberapa wakil rakyat di parlemen Negara Pasundan juga menyuarakan kepentingan rakyat seperti perbaikan kampung yang dianggarkan sebesar *f*500.000 dengan waktu pengerjaan mulai tahun 1948 hingga 1949. Perbaikan lainnya juga dilakukan pada tahun 1949 dan 1950 meliputi perbaikan jalan dan saluran air. Rencana perbaikan kampung tersebut sasarannya lebih diutamakan di bagian selatan agar kembali pulih pasca perang (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, 1981: 391-392).

Normalisasi ekonomi di Bandung ditandai dengan berdirinya toko-toko besar dan perusahaan dagang yang didominasi oleh pengusaha Tionghoa. Harga-harga bahan pokok memang masih mahal, namun berkat kebijakan pemerintah pusat, harga bahan pokok perlahan mulai dapat dijangkau oleh masyarakat. Kegiatan perdagangan yang mendominasi mata pencaharian masyarakat Bandung diwadahi oleh Persatuan Saudagar Bandung Indonesia (PSBI) (Panigoro, 2006: 47). Sejak Bandung berada di bawah negara Pasundan hingga Bandung berada di pangkuan NKRI, pemerintah menyalurkan bantuan bahan pokok melalui PSBI. Akan tetapi spekulasi terhadap kenaikan harga yang memicu penimbunan barang-barang komoditi ekspor membuat barang-barang tersebut langka di pasaran dan harga melonjak tajam.

Pinjaman yang pemerintah dapatkan dari luar negeri turut pula dirasakan oleh masyarakat Bandung. Bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan pada masa perang kemerdekaan mulai direhabilitasi, seperti gedung pemerintahan, pertokoan, hingga rumah-rumah penduduk. Rehabilitasi ini mencapai puncaknya ketika Kota Bandung disiapkan untuk menggelar Konferensi Asia Afrika. Mulai dari hotel hingga rumah tinggal pun disiapkan. Tidak ketinggalan kompleks pertokoan di Jalan Braga turut direhabilitasi. Kompleks pertokoan yang disebut sebagai kompleks perniagaan terkemuka di Nusantara (*De meest Europeesche Winkelstraat van Indie*) ini memegang peranan cukup penting bagi denyut nadi ekonomi Kota Bandung, terutama dalam hal perdagangan (Kunto, 1995: 4-6).

Kebijakan pemerintah yang menaikkan 20% gaji pegawai pemerintahan turut memicu meningkatnya daya beli masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai dan memberikan sumbangsih bagi perputaran roda perekonomian. Peran lembaga keuangan seperti Himpunan Saudara turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat Bandung, terutama dalam menghimpun dan menyalurkan uang di tengah-tengah masyarakat. Upaya masyarakat dalam membuat usaha baik di bidang perdagangan maupun pertanian banyak didukung oleh lembaga keuangan ini. Pengajuan kredit meningkat. Rata-rata masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai menggunakan pinjamannya untuk membangun atau

memperbaiki rumah. Tercatat sekitar 45% pinjaman masyarakat Bandung melalui Himpunan Saudara digunakan untuk mendirikan dan memperbaiki rumah, 22% untuk usaha perdagangan, 12% untuk pertanian, dan 21% untuk keperluan rumah tangga (Panigoro, 2006: 52).

Pasokan beras juga mulai diperhatikan dan perusahaan-perusahaan penggilingan mulai membuka kembali usahanya di sekitar Kota Bandung. Dalam surat peminjaman kredit ke DJB Bandung, Handel Maatshappij Palasari Tjiandjoer mengajukan pinjaman sebesar *f*250.000 untuk memborong padi dan mengelolanya menjadi beras di penggilingan "Pamakolon" di Cianjur. Setelah perang, mereka memiliki keyakinan bahwa keamanan sudah kembali dan adanya kerja sama yang baik dengan tentara Republik, orang-orang menanggap saatnya untuk memulai kembali perusahaan (Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng, 15 April 1950). Mengenai kebijakan kredit jangka panjang yang diberikan DJB di Jakarta kepada kantor cabang Bandung juga diketahui berfokus pada peminjaman bagi pemohon yang berfokus pada pembelian beras untuk memasok kebutuhan masa mendatang di Kota Bandung (Arsip Bank Indonesia, Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng, 7 Juni 1951).

Pasca perang mempertahankan kemerdekaan yang ditandai dengan diakuinya kedaulatan Indonesia, upaya pemulihan ekonomi yang hancur lebur saat perang memang tidak mudah. Upaya semacam *trial error* dilakukan guna membuat roda perekonomian kembali berputar. Beberapa ahli ekonomi dan moneter berupaya keras menyeimbangkan neraca yang defisit. Mulai dari Sumitro Djojohadikusumo, Sjafruddin Prawiranegara, Jusuf Wibisono, hingga Iskaq Tjokrohadisurjo bahu membahu memulihkan kondisi keuangan negara yang belum sehat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para Menteri yang duduk dalam *zaken cabinet* tersebut banyak memberikan stimulasi positif bagi perekonomian meskipun pada prakteknya harus melalui perdebatan hingga pertentangan. Pergolakan daerah dan instabilitas politik menjadi hambatan nyata dalam mencapai kesejahteraan umum sebagaimana cita-cita yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Kendati demikian, babak baru sejarah Kota Bandung memasuki tahap penataan. Dekade 1950-an merupakan batu loncatan

bagi Kota Bandung untuk mempercantik diri menyambut tatapan mata dunia dengan rencana berlangsungnya perhelatan internasional yaitu Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1950. Dinamika politik dan ekonomi Republik Indonesia yang telah sepenuhnya merdeka dari Belanda juga ditandai dengan nasionalisasi berbagai perusahaan-perusahaan dan instansi strategis, tidak terkecuali nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Selengkapnya akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB 5
BANDUNG PERIODE AWAL BANK INDONESIA (1953 – 1968)

Nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) menjadi Bank Indonesia (BI) menjadi tonggak penting bagi independensi kebijakan ekonomi tanpa campur tangan Pemerintah Belanda. Adanya otonomi dalam pembangunan ekonomi memberikan arah dan kejelasan kepada rakyat akan hadirnya pemerintahan yang berdaulat saat itu. Seperti halnya yang terjadi di Kota Bandung. Kota yang semakin berkembang setelah dipercaya menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya Konferensi Asia Afrika, mulai merajut kembali keindahan yang tercabik dalam perang selama hampir satu dekade.

Bab ini membahas perkembangan Kota Bandung setelah masa nasionalisasi DJB hingga dikeluarkannya Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1968. Pembahasan perkembangan Kota Bandung tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sejarah yang menyertai perjalanannya, mulai dari Konferensi Asia Afrika (KAA), pemilu pertama, perubahan pemerintahan dari perlementer ke presidensial, dan peristiwa G30S. Aspek politik, sosial, dan ekonomi menjadi bingkai pembahasan pada bab ini dalam menjelaskan evolusi kelembagaan Bank Indonesia selama periode 1950-an hingga tahun 1968.

Pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), roda perekonomian masyarakat Kota Bandung kembali bergerak. Kegiatan perdagangan kembali ramai dan pegawai pemerintahan mulai sibuk memulihkan infrastruktur serta kondisi sosial di Kota Bandung.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah pusat untuk menata perekonomian turut diimplementasikan ke tingkat daerah. Salah satunya adalah pembentukan bank sentral melalui kebijakan nasionalisasi pada tahun 1953, sehingga DJB cabang Bandung beralih menjadi BI cabang Bandung. Selain kebijakan ekonomi, pemerintah Indonesia pada era tersebut mencanangkan kebijakan politik luar negeri "bebas aktif" (Poesponegoro, 2010: 323-328). Gaung politik bebas aktif sudah disuarakan sejak pemerintahan Perdana Menteri Sukiman dan diteruskan Perdana Menteri Wilopo. Penerapan kebijakan politik bebas aktif terlihat jelas di masa kepemimpinan Ali Sastroamijoyo yang meningkatkan sisi ekonomi Indonesia tetap netral dalam memandang situasi politik dunia tanpa unsur keberpihakan. Konfigurasi politik dunia yang memanas pasca Perang Dunia II dengan adanya dua kekuatan Blok Barat dan Blok Timur, memaksa negara-negara lain di dunia untuk menentukan sikap, bahkan cenderung dipaksa untuk berpihak (Poesponegoro, 2010: 323-327). Akan tetapi, dalam berbagai perundingan pemerintah Indonesia berupaya tetap netral. Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955, menjadi tonggak penting dalam pengimplementasian politik bebas aktif.

Konferensi yang dihadiri berbagai negara Asia dan Afrika menjadi oase di tengah panasnya persaingan antar blok. Sebagai persiapan sebelum konferensi besar, beberapa konferensi sudah lebih dahulu dilaksanakan, seperti Konferensi Kolombo (28 April – 2 Mei 1954), Konferensi New Delhi (25 September 1954) dan Konferensi Bogor (28 – 31 Desember 1954) (Poesponegoro, 2010: 328-332). Kota Bandung sebagai penyelenggara mendadak sibuk dengan segala macam persiapan.

Pemilihan Bandung sebagai tuan rumah didasari pertimbangan bahwa kota ini dianggap sebagai tempat yang lebih netral dibandingkan dengan Jakarta. Kondisi tersebut mengingat suasana politik parlementer yang membuat Jakarta rentan dengan kondisi instabilitas politik akibat pergantian kekuasaan. Selain itu, letak geografis Bandung yang berada pada ketinggian 753 meter di atas permukaan laut, menjadikan wilayahnya nyaman untuk menjamu para delegasi. Bagi Presiden Soekarno sendiri yang menghabiskan masa mudanya dalam semangat perjuangan kemerdekaan di kota kembang ini, Bandung dianggap sebagai representasi perjuangan Indonesia.

KAA sendiri juga dianggap sebagai representasi perjuangan negara Asia dan Afrika dalam mencapai kemerdekaan dan bebas dari tekanan dua poros kekuatan dunia. Meskipun fisik kota Bandung pernah mengalami masa kelam dalam peristiwa Bandung Lautan Api, namun sisa fasilitas dan infrastruktur yang dibangun pada masa Hindia Belanda merupakan yang terbaik di Indonesia kala itu sehingga masih dapat tegak berdiri.

Persiapan menjadi tuan rumah sebuah perhelatan internasional adalah sebuah kerja bersama yang harus dilakukan dengan solid. Pada tingkat daerah dibentuk panitia lokal yang diketuai oleh Gubernur Jawa Barat, Sanusi Hardjadinata. Dana untuk mempercantik kota diperoleh dari pinjaman luar negeri yang didapat pemerintah Republik Indonesia. Kesibukan rehabilitasi dan perbaikan Kota Bandung dimulai pada tahun 1953 dan mencapai puncak kesibukannya pada tahun 1954. Beberapa kegiatan berbenah dan mempercantik kota antara lain, mempercantik Hotel Swarha dan Savoy, serta merenovasi hotel-hotel, seperti Homann, Preanger, Orient, Harapan, Trio, van Hengel, dan Braga (Kunto, 1995: 4). Berbagai rumah di Jalan Dago, Cipaganti, Sukajadi, Tamansari, dan Setiabudi juga ikut dipugar. Pemerintah Indonesia meminta arsitek Frank Silaban merenovasi gedung Societeit Concordia dan gedung Pensioenfonds yang direncanakan sebagai tempat berlangsungnya konferensi. Pasca renovasi, kedua gedung ini berubah nama masing-masing menjadi Gedung Merdeka dan Dwi Warna (Kunto, 1995: 5).

Fasilitas pendukung juga diperbaiki, seperti jalan-jalan di pusat Kota Bandung, kawasan perniagaan di Jalan Braga, Bandara Husein Sastranegara, Stasiun Bandung berikut kereta yang akan digunakan,

serta Masjid Agung Bandung yang dipersiapkan menjadi tempat ibadah bagi delegasi negara-negara muslim. Di Jalan Braga yang disebut sebagai kompleks pertokoan Eropa paling terkemuka di Nusantara (De Meest Europeesche van Indie), berbagai *coffee shop* mulai mempercantik diri. Begitu pula dengan Restoran Queen yang turut menyemarakkan persiapan KAA (Kunto, 1995: 5-6). Kedatangan berbagai tokoh politik dunia dari negara-negara di Asia dan Afrika, menjadikan Kota Bandung kemudian dikenal sebagai Ibukota Asia Afrika (Kunto, 1996: 88-89).

Joint Secretariat sebagai panitia kegiatan pimpinan Roeslan Abdulgani disibukan dengan hal-hal teknis. Panitia menyiapkan 143 unit mobil sedan, 30 taksi dan 20 bus, beserta 230 tenaga supir untuk transportasi peserta konferensi dan wartawan. Guna memenuhi kebutuhan bahan bakar, disediakan 30 ton bensin setiap harinya dengan 175 ton untuk cadangan selama lima hari. Meski sempat terjadi kendala beberapa hari sebelum konferensi dibuka. Maskapai minyak Stanvac yang menjanjikan ketersediaan bensin selama acara, mendadak tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Langkah yang ditempuh pemerintah dan panitia adalah menyelesaikan instalasi pengilangan minyak di Cirebon yang dapat menampung 800.000 liter bensin. Sementara untuk distribusinya, dibangun 4 buah pompa bensin baru di Kota Bandung (Abdulgani, 2015: 58). Persiapan dalam hal akomodasi transportasi dalam jumlah besar tidaklah mudah, karena saat itu pemerintah Indonesia belum memiliki Pertamina sebagai induk perusahaan minyak negara.

Roeslan Abdulgani menceritakan keseriusan Presiden Soekarno dalam memastikan acara KAA ini berjalan dengan lancar. Soekarno yang berlatar belakang insinyur dibantu dengan arsitek Frank Silaban, menginspeksi sendiri hal-hal detail, salah satunya penentuan nuansa di gedung Societiet Concordia. Sempat terjadi silang pendapat antara Soekarno dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Bagi Perdana Menteri Ali yang mengetahui seluk-beluk anggaran, memiliki prinsip sehemat dan secermat mungkin dalam menyelenggarakan acara tersebut. Bertolak belakang dengan itu, Soekarno berpendapat bahwa salah satu kunci sukses keberhasilan konferensi ini adalah tersampainya 'ilham' perjuangan kepada seluruh delegasi. Menurutnya, interior gedung jangan seperti buku undang-undang yang kaku, tapi harus mampu menginspirasi

delegasi yang hadir. Namun, karena status kepresidenan Soekarno adalah simbolis-konstitusional (di bawah demokrasi parlementer), maka dekorasi interior gedung pada akhirnya tetap mengikuti arahan Perdana Menteri Ali.

Polemik yang terjadi tidak hanya dalam soal teknis, namun juga pandangan kontra yang datang dari dalam maupun luar negeri. Tekanan dari dalam datang dari oposisi pemerintah di parlemen yang sempat mengeluarkan dua kali mosi tidak percaya. Meski mosi tersebut tidak berhasil menjatuhkan rencana terselenggaranya KAA, namun kritik dan sindiran tetap disuarakan media dengan membandingkan kondisi Kota Bandung di sekitar lokasi konferensi dengan daerah-daerah kampung dan rumah rakyat. Pers oposisi menyoroti dua sisi Kota Bandung, satu sisi yang terang benderang siap menyambut konferensi sementara sisi lain masih gelap gulita. Bahkan singkatan KAA (Konferensi Asia-Afrika) diplesetkan menjadi 'Konferensi Apa-apaan' (Abdulgani, 2015: 62). Opini kontra juga datang dari luar negeri, salah satunya dari media Amerika Serikat yang memberitakan pengalaman salah satu delegasi dari India setelah Konferensi Bogor. Media tersebut menulis akomodasi yang begitu buruk, mulai dari air yang tidak mengalir, gantungan pakaian yang tidak ada di lemari, hingga listrik yang kedap-kedip, sehingga meragukan Indonesia dapat menyelenggarakan Konferensi di Bandung (Abdulgani, 2015: 50). Meski pandangan-pandangan kontra berdatangan tidak menyurutkan semangat Perdana Menteri Ali dan Roeslan Abdulgani sebagai ketua penyelenggara. Pada akhirnya, KAA yang berlangsung selama lima hari dicatat oleh sejarah terselenggara dengan baik dan dikenang hingga sekarang. KAA menjadi simbol perjuangan negara Dunia Ketiga dalam meraih kemerdekaan.

Kegiatan nasional yang penting pasca KAA adalah pemilihan umum untuk pertama kali. Pesta demokrasi pertama tersebut selain melahirkan pemimpin baru, juga membuat pengeluaran pemerintah membengkak, padahal sebelumnya pengeluaran untuk KAA juga tidak sedikit. Pada pemilu pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR diikuti oleh 39 juta rakyat Indonesia, yang memberikan suaranya kepada 100 partai besar dan kecil, termasuk di dalamnya 86 organisasi

Gambar 5.1. Pembukaan KAA tahun 1955 oleh Pemimpin Negara-negara Delegasi

dilanjutkan pada 15 Desember 1955 serta diadakan pemilihan untuk Dewan Konstituante (Poesponegoro, 2010: 320-321).

Pengeluaran biaya pesta demokrasi yang begitu besar membuat pemerintah harus melakukan penghematan dan pengetatan pengeluaran. Pada tahun 1953, defisit anggaran pemerintah mencapai lebih dari Rp3 milyar, bahkan terus bertambah hingga menyentuh angka Rp5,3 milyar pada 1957. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, cenderung tidak bersifat kontinyu dengan hanya mengandalkan penerimaan pajak-pajak tidak langsung dan sangat bergantung pada perkembangan perdagangan luar negeri. Selain itu, *current expenditure* (pengeluaran yang sedang berjalan) terus meningkat seiring meningkatnya perluasan program pembangunan (Poesponegoro, 2010: 336). Imbasnya beberapa pembangunan mengalami stagnansi. Untuk menjaga stabilitas keamanan, pemerintah juga memiliki pengeluaran yang tidak sedikit guna memberantas gerakan pemberontakan seperti PRRI/Permesta dan DI/TII yang menghendaki dibentuknya Negara Islam. DI/TII di Jawa Barat sendiri mulai tercerai-berai, dan gerakan ini berhasil ditumpas melalui Operasi Pagar Betis tahun 1957.

Kegiatan ekonomi di Bandung dan sekitarnya mulai bergeliat kembali pasca tumbangnya gerakan separatis. Dapat dilihat pada Juli 1957 terdapat pembangunan 50 toko baru yang dengan cepat terisi (Pikiran Rakjat, 9 Juli 1957). Pemilik toko-toko tersebut merupakan pengusaha keturunan asing, yang hingga 1957 dominasi kalangan jenis pengusaha ini begitu kuat di Kota Bandung. Pengusaha nasional hanya muncul satu dua orang dalam berbagai bidang misalnya bidang apotek. Pada Oktober 1957 dibuka Apotek Pasar Baru dengan direkturnya Wiranata yang disebutkan sebagai apotek pertama yang dimiliki atas usaha nasional, meski merupakan apotek ke-15 di kota Bandung (Pikiran Rakjat, 10 Oktober 1957).

Pemukiman liar merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintahan Kota Bandung. Pada Oktober 1957 dalam sidang Dewan Kotapraja Bandung, pemegang kuasa Komando Militer Kota Bandung (KMKB) mengeluarkan larangan pemakaian tanah orang lain tanpa izin dan menggunakan tanah orang lain dengan cara serobot (Pikiran Rakjat,

21 Oktober 1957). Pada periode itu, banyak berdiri pemukiman liar sebagai imbas dari urbanisasi masyarakat di pinggiran Kota Bandung yang merasa tidak aman akibat dari gerakan DI/TII yang terjadi.

Kondisi ekonomi saat itu cukup memprihatinkan, terlihat dari harga kebutuhan pokok yang bergejolak cukup tajam dalam rentang waktu yang dekat. Pada awal November 1957, harga beras di pasar baru untuk kualitas I sudah mencapai Rp 5,30/ kg dan yang paling murah Rp 5,10/kg (Pikiran Rakjat, 1 November 1957). Harga beras itu meningkat tajam pada Desember 1957 menjadi Rp 7,50/kg untuk kualitas terbaik dan Rp 6,25/ kg untuk kualitas terendah (Pikiran Rakjat, 11 Desember 1957). Kondisi ini diakibatkan kurangnya pasokan beras dan permainan pedagang beras merupakan permasalahan klasik. Seperti diberitakan pada 10 Desember 1957, polisi menyita 2 ton beras yang diangkut ke luar Kota Bandung secara tidak sah (Pikiran Rakjat, 11 Desember 1957). Kenaikan harga beras tersebut membuat semakin tidak terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Namun stagnansi pembangunan dan ekonomi tidak membuat Bandung kehilangan daya tarik bagi kaum urban. Masyarakat dari wilayah sekitar Kota Bandung seperti Cicadas, Padasuka, Muararajeun, dan Cikaso berbondong-bondong untuk menetap di Bandung (Kunto, 1995: 6-7). Penyebabnya adalah faktor keamanan wilayah di luar Kota Bandung yang sebelum tahun 1957 banyak terjadi berbagai huru-hara yang diciptakan oleh DI/TII yang tidak segan-segan merampok para penduduk (Poesponegoro, 2010: 362). Alasan keamanan, lapangan pekerjaan, dan jaminan pendidikan menjadi beberapa alasan utama. Akibatnya dalam waktu 1 tahun terjadi ledakan penduduk di Kota Bandung, yaitu 986.880 jiwa pada tahun 1959 menjadi 1.028.245 jiwa pada tahun 1960. Padahal di tahun 1952 jumlah penduduk tercatat hanya 659.977 jiwa.

Luas wilayah Kota Bandung sendiri terbilang cukup luas, dengan luas areal 8.098 ha yang berlaku berdasarkan UU No.16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. Ini sudah merupakan perluasan dibandingkan sebelum kemerdekaan, namun kepadatan penduduk membuat rata-rata

kepadatan per hektarnya menjadi berkurang. Pada tahun 1959 rata-rata kepadatan penduduk per hektarnya 122 jiwa, dan meningkat menjadi 136 jiwa pada tahun 1967.

Pada akhir periode pemerintahan Presiden Soekarno, jumlah penduduk Kota Bandung telah menjadi 1.081.000 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1952- 1966 sebesar 3,29 % per tahun. Namun pada periode tahun 1959-1966, rata-rata laju pertumbuhannya hanya 1,3 % per tahun. Situasi politik dan pemerintahan yang bergejolak dalam kurun waktu tahun 1959 hingga tahun1966 sangat berpengaruh kepada pertumbuhan penduduk di Kota Bandung.

Grafik 5.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung 1942-1967

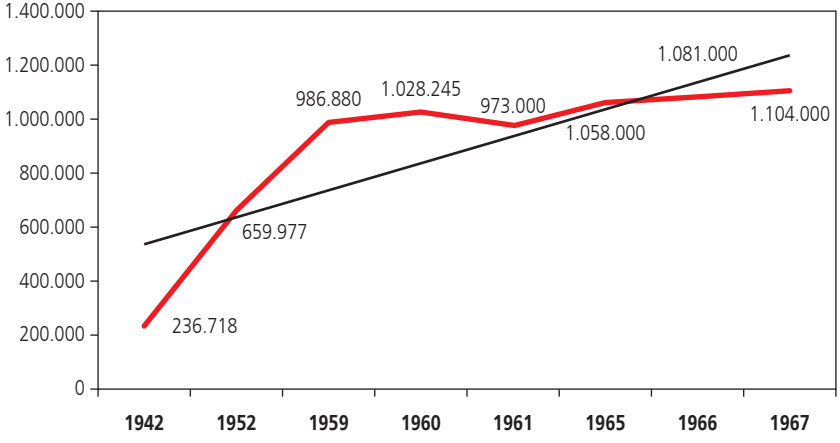

Sumber: Diolah dari Tjahaja, Juli 1942; Kementerian Penerangan RI, 1953; Kantor Sensus dan Statistik Jawa Barat, 1972.

Pada masa Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sekaligus pengangkatan Presiden Soekarno dengan masa jabatan seumur hidup, ternyata tidak membuat situasi politik membaik termasuk yang terjadi di Kota Bandung. Pada bidang pemerintahan, setelah Walikota R. Enoch meninggal dunia pada April 1957, diperlukan waktu beberapa bulan untuk menemukan penggantinya. Melalui proses

yang cukup panjang, pada akhirnya Kota Bandung memiliki walikota baru, yaitu R. Priatna Kusumah (1957-1966). Peristiwa monumental yang mengiringi adalah mencuatnya kembali usulan untuk menjadikan Bandung sebagai Ibukota Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pikiran Rakjat edisi 23 September 1957 bahwa Ir. Liem Khe Lien, R. Enoch, dan Prof. Ir. Thijsse menyusun sebuah nota dan *blueprint* ibukota negara. Mereka berpendapat bahwa tidak ada yang memiliki bahan-bahan planologi kota selengkap Kota Bandung. *Blueprint* ini menurut R. Priatna Kusumah telah diberikan pada Presiden Soekarno.

Dalam 10 tahun kepemimpinan R. Priatna Kusumah, salah satu kebijakan peninggalannya adalah pembagian Kota Bandung ke dalam empat kewedanan. Pada 1966-1968, merupakan periode kepemimpinan R. Didi Djukardi sebagai Walikota Bandung. Masa kepemimpinan tidak lama, karena yang bersangkutan ditangkap pada Agustus 1968 atas dugaan ikut serta dalam peristiwa G30S. Dan terpilih penggantinya R. Hidayat Sukarmadijaya, yang juga menjadi Walikota Bandung tidak lama hanya periode 1968 - 1970. Hal ini menggambarkan bahwa instabilitas politik sangat berpengaruh terhadap pemerintahan daerah saat itu.

Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap di Bandung. Memasuki tahun 1960, pemerintah mulai membangun beberapa fasilitas, seperti proyek air minum Cisangkuy di Jalan Badak Singa, pembangunan fasilitas olahraga Gelora Saparua dan Stadion Siliwangi, serta pembangunan fasilitas pendidikan berupa kampus Universitas Padjajaran dan Universitas Parahyangan. Pendirian Universitas Padjajaran didasari atas Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1957 yang menyebutkan pembukaan universitas terhitung sejak tanggal 1 September 1957 (Poesponegoro, 2010: 387). Di bidang pendidikan, Kota Bandung memiliki berbagai jenis sekolah dan jenjang pendidikan. Sekolah-sekolah yang ditutup sejak berlangsungnya Perang Kemerdekaan dan Peristiwa Bandung Lautan Api, kembali beraktivitas sejak tahun 1950. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan pendidikan nasional pemerintah melalui UU No.4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah, yang diperkuat dengan UU No.12 tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 7 tahun 1950 (Poesponegoro, 2010: 387). Selain itu pendidikan nonformal

oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menjadikan DJB sebagai bank negara ataupun bank swasta. Adapun peraturan yang tertera dalam De Javasche Bankwet 1922 dinyatakan masih berlaku sebagai landasan praktis DJB, yang mengatur bahwa DJB merupakan satu-satunya bank sirkulasi yang memiliki tugas mengedarkan uang kertas serta bertindak pula sebagai "kasir" pemerintah dalam hal memberikan pinjaman (Tim PP-PPBI, 2013: 56-61).

Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada dasarnya tidak secara tegas menyatakan bahwa DJB menjadi bank sentral. Namun, indikasi menuju arah tersebut terlihat dengan banyaknya orang Indonesia yang dipekerjakan dalam tubuh DJB. Selain itu, Bank Negara Indonesia yang semula akan dijadikan bank sentral diberi tugas memberikan pinjaman kepada importir dalam upaya pengembangan perdagangan internasional. Pasca pengakuan kedaulatan, pinjaman dari pemerintah tetap diberikan kepada pedagang dalam upaya menutupi kekurangan modal yang sering dialami oleh pedagang sehingga mampu berkembang dan berkontribusi pada aktivitas perekonomian. Hal ini merupakan wujud implementasi dari kebijakan ekonomi Benteng yang dipelopori oleh Sumitro Djojohadikusumo (Poesponegoro, 2010: 332).

Secara umum, perubahan politik yang terjadi hingga Konferensi Meja Bundar, bukan hanya mengubah tatanan kekuasaan tetapi juga menentukan arah dan peran DJB sebagai lembaga penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia merasakan bahwa DJB merupakan aset nasional. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat berakhir sekaligus menandai lahirnya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi pun mengalami perubahan dengan digantinya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950. Jabatan di bidang perekonomian pun menunjukkan perubahan, yakni M. Natsir sebagai pimpinan kabinet dan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan (Poesponegoro, 2013: 307-309.

Pada masa Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951) inilah mencuat wacana pengambilalihan DJB. Permasalahan muncul tatkala

terdapat dua golongan yang berbeda pendapat soal nasionalisasi. Golongan pertama adalah golongan nasionalis seperti Sumitro Djojohadikusumo dan Jusuf Wibisono yang menghendaki nasionalisasi DJB. Alasannya ialah bila tidak dinasionalisasi, maka bank sirkulasi akan dimanfaatkan Kerajaan Belanda untuk kepentingannya, seperti melakukan penekanan terhadap kebijakan politik dan ekonomi Pemerintah Indonesia. Sementara itu, golongan kedua yang dimotori Sjafruddin Prawiranegara lebih mempertimbangkan dampak ekonomi yang akan terjadi bila DJB dinasionalisasi, terutama terkait dihentikannya pemberian pinjaman dari DJB kepada Pemerintah Indonesia.

Selaku Menteri Keuangan, Sjafruddin Prawiranegara lebih memfokuskan kebijakannya pada stabilitas pemerintahan. Belum utuhnya kedaulatan Pemerintah Indonesia mengharuskan adanya pertimbangan pengambilan kebijakan dari Kerajaan Belanda. Ada kekhawatiran apabila Kabinet Natsir tidak bijaksana terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, maka akan memunculkan tekanan politik dari Kerajaan Belanda. Upaya nasionalisasi DJB akhirnya mulai terlihat setelah Kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman pada 28 Mei 1951 secara tegas di depan DPR mengemukakan rencana nasionalisasi DJB. Hal ini kembali memunculkan protes dari Sjafruddin Prawiranegara bahwa nasionalisasi DJB terlalu berisiko melemahkan ekonomi negara karena pada dasarnya DJB masih menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Sebagai seorang ahli ekonomi, perbankan, dan moneter, Sjafruddin menghendaki adanya nasionalisasi pegawai-pegawai terlebih dahulu daripada langsung harus menasionalisasi lembaga dan fungsinya secara utuh. Di sisi lain, Sumitro Djojohadikusumo berpendapat bahwa harus dilakukan nasionalisasi seluruh lembaga vital seperti bank sirkulasi, perusahaan listrik, dan sebagainya, yang lebih bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.

Pada 29 Juni 1951 langkah nasionalisasi semakin nyata setelah dibentuknya Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank. Tugas panitia tersebut adalah mempersiapkan masalah nasionalisasi dan mengajukan usul-usul kepada pemerintah beserta usul pembentukan undang-undang nasionalisasi. Adapun anggota panitia diketuai oleh Mohammad Soediono

dari Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan serta beberapa anggota, yakni Soetikno Slamet dari Thesaurier Jenderal Kementrian Keuangan, Sumitro Djojohadikusumo dari Komisaris Pemerintah De Javasche Bank, T.B. Sabaruddin dari Direktorat Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri, A. Oudt dari Penasehat Umum Kementrian Keuangan, dan Khouw Bian Tie dari Penasehat Umum Kementrian Perekonomian (Tim Penulis LP3ES, 1995: 61).

Langkah nasionalisasi ini ternyata tidak dikomunikasikan dengan Direksi DJB. Akibatnya, A. Houwink selaku Presiden De Javasche Bank mengundurkan diri karena beranggapan bahwa Pemerintah Indonesia sudah tidak percaya pada kinerja dan kepemimpinannya. Pengunduran dirinya yang diajukan pada 12 Juni 1951 akhirnya disetujui oleh Pemerintah Indonesia. Kekosongan jabatan pimpinan DJB ini menimbulkan perdebatan tentang siapa yang pantas menduduki jabatan tertinggi bank sirkulasi tersebut. Jajaran Direksi DJB seperti A. Houwink, S. Spies, Th. Teunissen, Indrakusuma, dan Lukman Hakim menghendaki Sjafruddin Prawiranegara sebagai calon Presiden De Javasche Bank. Jusuf Wibisono yang menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sjafruddin Prawiranegara tidak setuju terhadap usulan tersebut. Alasannya ialah kekhawatiran terhambatnya upaya nasionalisasi karena pandangan Sjafruddin selama ini terhadap upaya nasionalisasi tersebut. Selain itu, pada masa DJB, tidak banyak orang Indonesia yang menduduki posisi-posisi penting pada perusahaan yang telah berusia satu abad itu. Tercatat hanya Mr. R. B. Gandasoebrata (Kepala Urusan Devisa), Mr. Loekman (Komisaris Pemerintah pada Bank dan Wakil Presiden De Javasche Bank), dan Ir. R. M. T. Sarsito Mangunkusumo (anggota Direksi) (Tim Penulis LP3ES, 1995: 90).

Jusuf Wibisono mengusulkan nama Sumitro Djojohadikusumo sebagai calon pimpinan DJB. Namun, usul ini tidak disetujui Wakil Presiden Mohammad Hatta, dengan alasan bahwa penolakan pencalonan Sjafruddin akan menimbulkan permasalahan dalam tubuh Partai Masyumi. Latar belakang Sjafruddin sebagai ahli keuangan dan perbankan sangat cocok untuk menjadi pemimpin DJB. Selain itu, beberapa pihak termasuk Hatta sendiri melihat bahwa Sjafruddin tidak memiliki ambisi tertentu selain memajukan perekonomian negara sehingga dirasa cocok untuk

menduduki posisi orang nomor satu di DJB tersebut (Tim Penulis LP3ES, 1995: 107).

Hal ini atas dasar bahwa Kabinet Sukiman dan Sjafruddin sama-sama berasal dari Masyumi. Dukungan kuat Hatta ini akhirnya membuat Menteri Keuangan Jusuf Wibisono mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden DJB pada 14 Juli 1951. Sjafruddin menjadi orang Indonesia pertama dan terakhir yang menjabat sebagai pimpinan setelah 123 tahun berdirinya DJB. Setelah memilih pimpinan DJB, Panitia Nasionalisasi kemudian membeli saham-saham DJB sejak tanggal 3 Agustus 1951 hingga batas tanggal 30 September 1951 yang kemudian diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 1951. Pembelian saham tersebut menggunakan kurs 120 % untuk saham yang dibeli dengan uang gulden dan 360 % untuk kurs yang menggunakan nilai rupiah. Pemerintah Indonesia mengakuisisi 97 % saham DJB dengan total biaya ƒ8.800.000. Sementara 3 % saham tidak berhasil dibeli karena kehilangan jejak pemiliknya. Pada tanggal 11 Desember 1951, DJB resmi dinasionalisasi Pemerintah Indonesia, dengan landasan UU No. 24 Tahun 1951 Tentang Nasionalisasi De Javasche Bank (Tim Penulis LP3ES, 1995: 60-61).

Setelah resmi dinasionalisasi, persoalan status baru DJB sebagai bank sentral kemudian diurus oleh Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank. Hal ini mengacu pada Rencana Undang-Undang (RUU) yang mengatur peraturan pokok mengenai penggantian nama DJB menjadi Bank Indonesia (BI). Rencana tersebut diajukan ke parlemen pada tanggal 31 Desember 1952 dan dibahas oleh parlemen pada Maret 1953. Hal-hal yang dibahas berkaitan dengan ketentuan umum, tugas bank, kedudukan dewan moneter dan dewan penasehat, penetapan surat-surat tahunan dan pembagian laba, serta neraca singkat.

Ketentuan umum menyebutkan bahwa BI berpusat di Jakarta, ditambah pembukaan cabang di daerah-daerah, pendirian kantor korespondensi serta pembukaan kantor agensi di luar negeri. Modal bank ditetapkan sebesar Rp25 juta. Sementara itu, perihal tugas, BI berwenang mengatur nilai satuan rupiah, melakukan stabilisasi nilai uang, menyelenggarakan peredaran uang, memajukan dan memperlancar uang giral, meningkatkan jalannya pembayaran dengan luar negeri, memajukan

perkembangan yang sehat urusan kredit dan bank, serta melakukan pengawasan terhadap bidang perkreditan.

Tugas utama lainnya ialah kewenangan mengeluarkan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah, dengan ketentuan tidak lebih kecil dari lima rupiah. Ada pula aturan untuk tidak mengganti uang kertas yang hilang serta hak untuk menarik uang dari peredaran bila jenis uang digantikan. Hak dan kewajiban lainnya ialah menjadi pemegang kuasa atau menjadi bankir pemerintah atas transaksi-transaksi keuangan, memberi bantuan teknis dalam perjanjian-perjanjian dengan negara lain serta organisasi-organisasi luar negeri atas permintaan pemerintah, mengurus dan menyelenggarakan administrasi penyediaan alat-alat pembayaran luar negeri, serta memberi uang muka kepada pemerintah dengan ketentuan dari seluruh uang muka yang diberikan sebesar Rp50 juta yang tidak dikenakan bunga.

RUU Bank Indonesia pun menetapkan adanya tiga dewan yang mengatur dan melaksanakan kegiatan bank secara menyeluruh. Pertama, Dewan Moneter yang memiliki wewenang menetapkan kebijakan umum bidang moneter dari bank sentral, memberi petunjuk bagi Direksi Bank mengenai kebijakan bank dalam mengatur nilai satuan uang, mengembangkan dan mengawasi bidang perkreditan, menyelenggarakan administrasi pengadaan alat-alat pembayaran luar negeri. Pihak yang menjadi Dewan Moneter adalah Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Sentral. Kedua, Direksi Bank yang mempunyai wewenang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Moneter dan memiliki otonomi penuh dalam kegiatan harian, seperti pemberian dan penolakan pinjaman. Keanggotaan Direksi Bank terdiri dari maksimal 5 orang dengan pimpinan tertinggi dipegang oleh Gubernur Bank Sentral dengan masa jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali. Ketiga, Dewan Penasehat yang mempunyai wewenang untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Moneter dalam menjalankan kewajibannya. Semua ketentuan-ketentuan RUU tersebut disetujui oleh parlemen pada tanggal 10 April 1953 dengan suara bulat. Kemudian pada tanggal 2 Juni 1953 ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok

Bank Indonesia (UUPBI). Pemberlakuan resmi undang-undang tersebut ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1953 (Tim Penulis LP3ES, 1995: 60-61).

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok ini, maka seluruh cabang DJB menjadi milik pemerintah Indonesia, bukan lagi milik pihak swasta. DJB Bandung yang mulai dibuka pada 30 Juni 1909 kemudian menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Bandung (Tim PP-PPBI, 2013: 17). Kantor cabang ke-11 milik DJB ini mulai menjalankan fungsi membantu kantor pusat di Jakarta dalam upaya menjaga stabilitas rupiah, mengatur kredit dan dana perbankan, serta mengatur peredaran uang. Bank Indonesia cabang Bandung kemudian diklasifikasikan sebagai bank cabang kelas II sesuai dengan kinerja pokok dan pelengkap, sama seperti Makassar, Palembang, Banjarmasin, Padang, Manado, dan Pontianak (Tim PP-PPBI, 2013: 5). Bank Indonesia cabang Bandung memiliki fungsi sebagai bank sentral dengan wilayah kerja di Jawa Barat, salah satu wilayah yang memiliki peran penting pada perekonomian Indonesia.

Nasionalisasi DJB merupakan sebuah langkah strategis dalam upaya mengedepankan independensi dalam perekonomian setelah sebelumnya dalam pengambilan kebijakan, terutama kebijakan moneter masih tidak bisa terlepas dari campur tangan pemerintah Belanda. Meski upaya nasionalisasi ini diwarnai pertentangan dan perdebatan, namun proses panjang tersebut justru menstimulasi hal positif dalam bidang moneter di Indonesia. Kebijakan moneter dapat diambil dengan cepat serta independensi selalu dipertahankan dalam fungsi maupun tugas bank sentral, termasuk independensi dalam sikap dan kepentingan yang dimiliki oleh pucuk pimpinan. Dipilihnya Sjafruddin Prawiranegara merupakan salah satu bukti bahwa pimpinan bank sentral harus bebas dari ambisi maupun kepentingan pribadi sehingga independensi terlihat secara eksplisit.

Penyebutan nama Bank Indonesia dalam penjelasan UUD 1945 adalah landasan yang kuat bagi kehadiran dan peran strategis BI sebagai bank sentral di Indonesia. Namun, mewujudkan amanat UUD itu tidaklah mudah, terutama pada masa revolusi yang penuh ketidakpastian. Jangankan mewujudkan bank sentral yang stabil, Indonesia masih disibukkan untuk mewujudkan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan

negara. Namun apresiasi patut diberikan kepada para pendiri bangsa yang terus berupaya untuk mendirikan bank sentral sebagai salah satu prasyarat berdaulat dalam ranah ekonomi moneter di tengah kondisi yang serba susah tersebut.

Setelah diberlakukannya UU No. 11 Tahun 1953 pada 1 Juli 1953 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia atau juga disebut UUPBI tahun 1953, secara resmi De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, masa lima tahun pasca Nasionalisasi DJB, orang-orang Belanda masih dipekerjakan secara penuh untuk menjalankan fungsi BI. Hal tersebut dapat dipahami mengingat fungsi dari BI sendiri adalah melanjutkan fungsi DJB yang telah berjalan sebelumnya.

Salah satu butir kesepakatan KMB adalah penunjukkan DJB sebagai Bank Sentral Republik Indonesia Serikat, dan Bank Negara Indonesia sebagai bank pembangunan. Dengan adanya nasionalisasi DJB ini, tidak hanya memiliki tujuan-tujuan yang bersifat politis-nasionalis saja, akan tetapi dimaksudkan juga untuk memenuhi kebutuhan sebuah bank sentral yang dapat memutuskan kebijakan-kebijakan moneter. Diharapkan kehadiran BI dapat memberikan kebijakan moneter yang tepat bagi Indonesia, walaupun sulit karena kebijakan yang diambil dimasa masih sebagai DJB membawa muatan politis Kerajaan Belanda, juga secara teknis sangat dipengaruhi dinamika pasar uang Eropa. Ditambah lagi sikap Pemerintah Belanda yang dinilai oleh sebagian pengamat dan politisi Indonesia selalu ingkar janji, antara lain dalam kasus Irian Barat. Berdasarkan kesepakatan KMB, seharusnya wilayah itu dikembalikan kepada Indonesia selambatnya setahun setelah perjanjian disepakati, namun pihak Belanda selalu mengulur waktu penyerahannya.

Selain masalah politik, fakta bahwa kekuatan ekonomi Belanda pada dasarnya masih tetap mencengkeram bangsa Indonesia. Hampir semua bidang ekonomi strategis dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang sering disebut "The Big Five", yaitu Internationale Crediet en Handelsvereniging Rotterdam (Internatio), Jacobson van den Berg, Borneo Sumatera Handelmaatschappij (Borsumij), Lindeteves Stokvis, dan Geo Wehry.

Adapun di bidang perbankan, beberapa bank swasta Belanda antara lain Nationale Handels Bank (NHB) dan Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) masih terlihat unggul dibandingkan dengan bank-bank nasional yang sudah berdiri, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Industri Negara (BIN yang didirikan tahun 1950). Meskipun begitu, sambutan masyarakat Indonesia sangat antusias terhadap lahirnya Bank Indonesia. Dalam beberapa surat kabar nasional disebutkan bahwa lahirnya BI sebagai pembuka zaman baru di bidang keuangan.

Susunan Dewan Direksi yang menjadi penanggung jawab terselenggaranya fungsi-fungsi bank sentral, terdiri dari Gubernur dan sekurang-kurangnya dua orang Direktur yang dapat ditambah sebanyak-banyaknya empat orang. Semua anggota Dewan Direksi harus berkewarganegaraan Indonesia, dan diangkat oleh Pemerintah atas usul Dewan Moneter. Gubernur pertama BI adalah Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur De Javasche Bank.

Pada 15 April 1954 Indonesia resmi menjadi anggota International Monetary Fund (IMF) dan International Bank for Reconstruction and

Julipun b TJ0.131 TwRIST(har15ak-banyamj0.jurnyal amohoksi nggota lational)MFon

yang dipergunakan di dunia perbankan. Berdasarkan Penpres No. 6 Tahun 1960, BI harus menyesuaikan tugas dan tata kerjanya dengan amanat Presiden yang disusun Departemen Penerangan Nasional (Depernas) setahun sebelumnya pada 1959.

Untuk mempertegas tugas dan kewajiban dunia perbankan sesuai amanat tersebut, maka pada 1961 Presiden membentuk Panitia Negara Perbankan yang bertugas menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan dan RUU Bank Indonesia berdasarkan azas-azas ekonomi terpimpin serta bersih dari sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme. Dua tahun kemudian (1963), Sukarno mencetuskan Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai pengejawantahan sistem ekonomi terpimpin. Prof. Widjojo Nitisastro, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, menilai bahwa pada dasarnya Dekon merupakan sistem ekonomi kerakyatan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politik daripada pertimbangan ekonomi, sehingga menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini antara lain tercermin dari keputusannya untuk menyatukan semua lembaga perbankan milik negara dalam satu komando yang disebutnya sebagai "Bank Berjoeang–Bank Tunggal". Pengintegrasian dalam satu komando itu dilandasi kepentingan bahwa bank-bank negara merupakan salah satu alat revolusi.

Presiden Sukarno menegaskan bahwa Bank Indonesia dan bank-bank negara adalah alat revolusi yang mempunyai kewajiban ikut serta membantu Pemerintah memenangkan revolusi, antara lain dengan aktif dalam "Bank Berjoeang". Sebenarnya, pemanfaatan lembaga perbankan sebagai alat revolusi sudah dipraktikkan sejak awal tahun 1962, setelah Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta yang menelan biaya 24% dari seluruh biaya Anggaran Belanja Nasional (Subarkah, 2008: 11). Melalui Penpres No. 6 Tahun 1960 memang secara implisit memberi wewenang kepada Menteri keuangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diangggap perlu dalam rangka penyesuaian tata kerja Bank Indonesia dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) meskipun harus menyimpang dari Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 sehingga tidak mengherankan apabila lembaga perbankan menjadi alat revolusi.

Beberapa kebijakan diambil Menteri Keuangan dalam upaya penyesuaian pada masa Demokrasi Terpimpin. Kebijakan tersebut antara lain perubahan cara penyusunan neraca Bank Indonesia dan rangkap jabatan yang dipegang Gubernur Bank Indonesia sebagai akibat dari adanya *regrouping* kabinet yang diusulkan Presiden Soekarno (Subarkah, 2008: 8-9). Sejak 1 Januari 1961, neraca singkat milik Bank Indonesia tidak lagi dipublikasikan sehingga masyarakat tidak tahu kondisi Bank Indonesia dan seputat moneter. Hal ini memicu munculnya spekulasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan (Subarkah, dkk, 2008: 8-9). Selain kebijakan tersebut, kebijakan lain terkait *regrouping* adalah pengangkatan Gubernur Bank Indonesia menjadi Menteri Urusan Bank Sentral pada 1962. Masuknya Bank Indonesia dalam kabinet membuat posisi Bank Indonesia berada dalam kendali presiden dan tidak independen.

Usaha menyempurnakan *regrouping* kabinet kembali dilakukan pada 1963 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 232 tanggal 13 November 1963 yang menekankan pada perjuangan anti kolonialisme dan imprelialisme. Bidang keuangan pada kabinet diubah menjadi Kompartemen Keuangan dan ditambah seorang Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta. Seperti halnya Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta juga memanfaatkan Bank Indonesia sebagai aparatur dan penghubung antara Menteri dan seluruh bank swasta (Subarkah, dkk, 2008: 9).

Konsep Bank Berjuang yang diperkenalkan Gubernur Bank Indonesia sekaligus Menteri Urusan Bank Sentral, Jusuf Muda Dalam, berusaha membagi tugas dalam melayani sektor-sektor ekonomi tertentu. Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Dagang Negara, dan Bank Umum Negara digabung menjadi semacam bank pembangunan yang bertugas membiayai proyek-proyek pemerintah (Subarkah, dkk, 2008: 13). Konsep Bank Berjuang ini mulai diperkenalkan pada Musyawarah Bank Berjuang Sabang-Merauke yang diselenggarakan tanggal 1 sampai 5 Juli 1964. Konsep Bank Berjuang pada dasarnya mengarah pada sistem Bank Tunggal terutama setelah pidato Presiden Soekarno pada 11 April 1965 dihadapan Sidang Umum MPRS III yang menyatakan bahwa struktur perbankan Indonesia secara bertahap

mengarah pada Bank Tunggal (Subarkah, dkk, 2008: 14). Sebagai wujud nyata pelaksanaan menuju Bank Tunggal, Bank Indonesia memprakarsai Konferensi Kerja Berdikari yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 4 sampai 8 Mei 1965. Salah satu hasil resolusinya adalah pengintegrasian Bank Berjuang dengan perjuangan masyarakat.

Tahapan dalam pelaksanaan penyatuan bank-bank pemerintah menjadi satu bank tunggal ini adalah pengintegrasian bank pemerintah ke dalam bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Pengintegrasian ini ditetapkan melalui Penetapan Presiden No. 8 tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 (Subarkah, dkk, 2008: 15). Struktur tunggal ini dibuat dengan tujuan memudahkan pengawasan dan penggunaan dana secara efisien dan efektif sekaligus menyebarkan tenaga ahli perbankan guna pengaturan sistem pembayaran dan lalu lintas uang secara lebih terpimpin dan terorganisir. Setelah penyatuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 pada tanggal 27 Juli yang menyebutkan mengenai pendirian bank tunggal milik negara dengan nama Bank Negara Indonesia (Subarkah, dkk, 2008: 17). Di bawah Bank Negara Indonesia ini akan melebur Bank Indonesia bersama dengan bank-bank lain milik pemerintah.

Konsep Bank Tunggal yang sudah direalisasikan tersebut mendapat penolakan dari Direktur Utama Bank Dagang Negara sekaligus Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, JD. Massie. Menurutnya, konsep Bank Tunggal akan membingungkan koresponden di luar negeri. Akhirnya Bank Dagang Negara tidak dilebur dalam Bank Tunggal, melainkan tetap berdiri sendiri dengan struktur, organisasi, dan kegiatan yang tetap seperti undang-undang pendirian bank tersebut. Bapindo yang merupakan bank pembangunan dan bukan bank umum pun mengalami hal yang sama, yakni tidak mengalami peleburan. Bapindo berada di bawah wewenang Kompartemen Pembangunan dan tidak termasuk dalam wewenang Menteri Urusan Bank Sentral (Subarkah, dkk, 2008: 18).

Pengintegrasian bank-bank pemerintah di bawah Bank Tunggal mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1965 setelah dikeluarkannya SK Menteri Urusan Bank Sentral pada tanggal 30 Juli 1965. Dua puluh tahun setelah Indonesia merdeka terjadi perubahan yang cukup signifikan

dengan upaya sentralisasi ini. Penetapan tersebut sekaligus membuat Bank Indonesia beroperasi dengan nama Bank Negara Indonesia Unit I. Semua pegawai Bank Indonesia baik di pusat maupun di daerah menjadi pegawai Bank Tunggal, termasuk direktur-direkturnya yang menjadi direktur pengganti dan direktur Bank Tunggal tersebut (Subarkah, dkk, 2008: 23). Pasca diterapkannya sistem Bank Tunggal, pemerintah belum memiliki konsep tujuan dan struktur Bank Tunggal sehingga pada 3-5 Agustus 1965 diadakan konferensi di gedung Bank Negara Indonesia Jalan Lada No. 1 guna membahas tujuan dan strukur bank tunggal (Subarkah, dkk, 2008: 25).

Peristiwa politik kembali terjadi yaitu G30S yang secara langsung mengakibatkan kondisi perekonomian Indonesia merosot drastis, yang ditandai antara lain melonjaknya inflasi dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok pada bulan-bulan berikutnya pasca peristiwa tersebut. Dalam rangka menanggulangi naiknya harga-harga bahan pokok barang-barang kebutuhan masyarakat serta merosotnya nilai mata uang rupiah, Pemerintah menerbitkan satu kebijakan moneter berupa pemberlakuan mata uang baru bagi seluruh wilayah Indonesia. Kejelasan mengenai status dan fungsi Bank Tunggal semakin jelas ketika dalam tahun 1967 pemerintah mengajukan delapan RUU perbankan kepada DPR-GR. Kedelapan RUU itu terdiri dari satu RUU tentang Pokok-pokok Perbankan, satu RUU tentang Bank Sentral, dan enam RUU tentang pendirian Bank-bank Umum Milik Negara lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 600/M/IV/12/1968, tanggal 18 Desember 1968, semua Undang-Undang perbankan mulai berlaku pada 31 Desember 1968. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, maka semua Bank Umum Milik Negara yang sebelumnya merupakan unit-unit yang terintegrasi dalam Bank Tunggal yang bernama Bank Negara Indonesia, sejak akhir tahun 1968 menjadi bank-bank negara yang berdiri sendiri berdasarkan undang-undangnya masing-masing. Dengan demikian sejak akhir tahun itu pula secara hukum Bank Berjoang – Bank Tunggal resmi berakhir. BI kembali menjadi bank sentral, yang menurut Undang-undang No.13 Tahun 1968, diwajibkan untuk melepaskan kegiatan komersialnya.

Kendati demikian, untuk beberapa daerah seperti di Irian Barat, BI masih tetap menjalankan kegiatan komersialnya, mengingat satu-satunya bank yang beroperasi adalah BI. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1968 tentang pelepasan aktivitas komersial dari cabang BI di wilayah Irian Barat secara bertahap. Pada awal masa nasionalisasi DJB, persoalan yang mendapat perhatian besar adalah personalia BI, yang sebagian besar staf dan pejabatnya masih dipegang oleh keturunan Belanda dan Tionghoa. Untuk itu dilakukan berbagai latihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, khususnya keturunan bumiputra. J.A. Sereh merupakan salah satu peserta gelombang pertama yang mendapatkan kesempatan pendidikan dan kelak dipercaya untuk memegang pimpinan di Kantor Cabang Bandung. Struktur organisasi BI sendiri per 1 Juli 1953 memperlihatkan adanya 12 satuan kerja yaitu Pembukuan, Kas, Administrasi, Urusan Efek, Pemberian Kredit Jakarta, Sekretariat dan Personalia, Urusan Wesel, Pemberian Kredit Pusat, Dana Devisien, Statistik Ekonomi, Urusan Umum dan Bagian Luar Negeri.

Sementara itu, seperti telah disinggung di atas, dalam periode 1953-1957 sebagian besar personalia BI, terutama pejabat dan pimpinan, masih dipegang oleh keturunan Belanda dan Tionghoa. Dalam kondisi demikian, ditambah dengan tidak terdapatnya informasi dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 1953-1957, maka Pemimpin Cabang Bank Indonesia Bandung pada awal lahirnya BI adalah mantan pimpinan DJB Cabang Bandung, yaitu H.C. Hordijk. Sementara itu, berdasarkan dokumentasi surat No. 5/83-Pegawai tanggal 16 Januari 1958, diketahui bahwa Pemimpin Cabang Bank Indonesia Bandung hingga akhir tahun 1957 adalah P. Bordes. Selain itu, dari dokumen tersebut juga dapat diketahui bahwa jumlah personil BI cabang Bandung, setidaknya pada awal Januari 1958 berjumlah 70 orang.

BAB 6
KOTA BANDUNG ERA KONTEMPORER 1968 – 2015

Geliat pembangunan Kota Bandung setelah menjadi tuan rumah Konferesi Asia Afrika, seperti disinggung Haryoto Kunto, justru menjadi 'semrawut'. Pembangunan infrastruktur dan kepadatan penduduknya terus merapat ke tengah kota. Mulai dari kemacetan lalu lintas sampai pencemaran lingkungan menjadi isu sehari-hari yang melekat dalam kehidupan orang Bandung. Padahal Kota Bandung sejak tahun 1971 sudah memiliki rencana induk kota atau ***master plan*** sebagai tuntunan membangun kota terencana. Di era kontemporer semangat pembangunan tumbuh kembali seiring dikenalnya jati diri Kota Bandung sebagai kota kreatif. Pembangunan infrastruktur disertai penggunaan teknologi modern ditujukan untuk menjalankan fungsi kota pintar (***smart city***).

Secara keseluruhan bab ini akan menjelaskan geliat pembangunan Kota Bandung di era kontemporer. Dimulai sejak program pembangunan Bandung di awal orde baru hingga memiliki rencana pembangunan ***smart city.*** Tidak bisa dimungkiri bahwa setiap pembangunan pasti akan menemui kendala, dalam hal ini adalah terjadinya pergeseran fungsi-fungsi infrastruktur kota, sehingga mengubah ruang terbuka hijau dan area pemukiman menjadi tempat bergeraknya perekonomian. Namun

persoalan tersebut perlahan terurai seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat Kota Bandung akan rencana tata kota. Merupakan sebuah kebanggaan bagi warganya karena selain memiliki rencana menuju *smart city*, Kota Bandung juga pernah dinobatkan sebagai *creative city* oleh British Council pada 2009. Hal ini merupakan sebuah bentuk pengakuan sebagai kota kreatif berkelas dunia.

Pembangunan ekonomi Kota Bandung sendiri tidak lepas dari basis industri kreatif dan UMKM yang terus dikembangkan dengan dukungan semua pihak, tak terkecuali Bank Indonesia. Pada bagian kedua bab ini akan dijelaskan peran Bank Indonesia melalui serangkaian program dalam hal pembinaan, konsultasi dan membuka akses untuk memudahkan pengembangan usaha. Tentunya sebagai bagian dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar, sistem keuangan, dan sistem pembayaran.

Dinamika Pembangunan Kota Bandung Hingga Era *Smart City*

Merujuk kembali apa yang dikatakan Kunto, ada dua alternatif dalam membuat perencanaan pembangunan kota: (1) *master plan* atau rencana induk kota (RIK); (2) dan prinsip '*zoning plan*' yaitu penataan dengan membagi kota dalam kawasan fungsional yang sering disebut *zones*. *Zoning plan* umumnya digunakan di kota-kota besar di Amerika Serikat, dengan konsekuensi adanya dukungan dalam hal efisiensi jaringan lalu lintas dan angkutan yang tentunya menuntut biaya besar dalam penerapannya. Sementara kota-kota besar di Nusantara semenjak masa kolonial menggunakan prinsip *master plan*, yakni memandang perancangan kota dalam satu kesatuan. Sebagai peletak pertama konsep *master plan* di Nusantara adalah arsitek terkenal Belanda, Thomas Karsten, yang juga berperan besar dalam merancang kota Bandung masa kolonial (Pikiran Rakyat, 1990).

Kendati Kota Bandung telah memiliki *master plan* jauh sebelum masa kemerdekaan, namun sistem ini memiliki kendala. Salah satunya

Peta 6.1. Peta Kota Bandung tahun 1976. Belum ada perluasan ke arah Gedebage

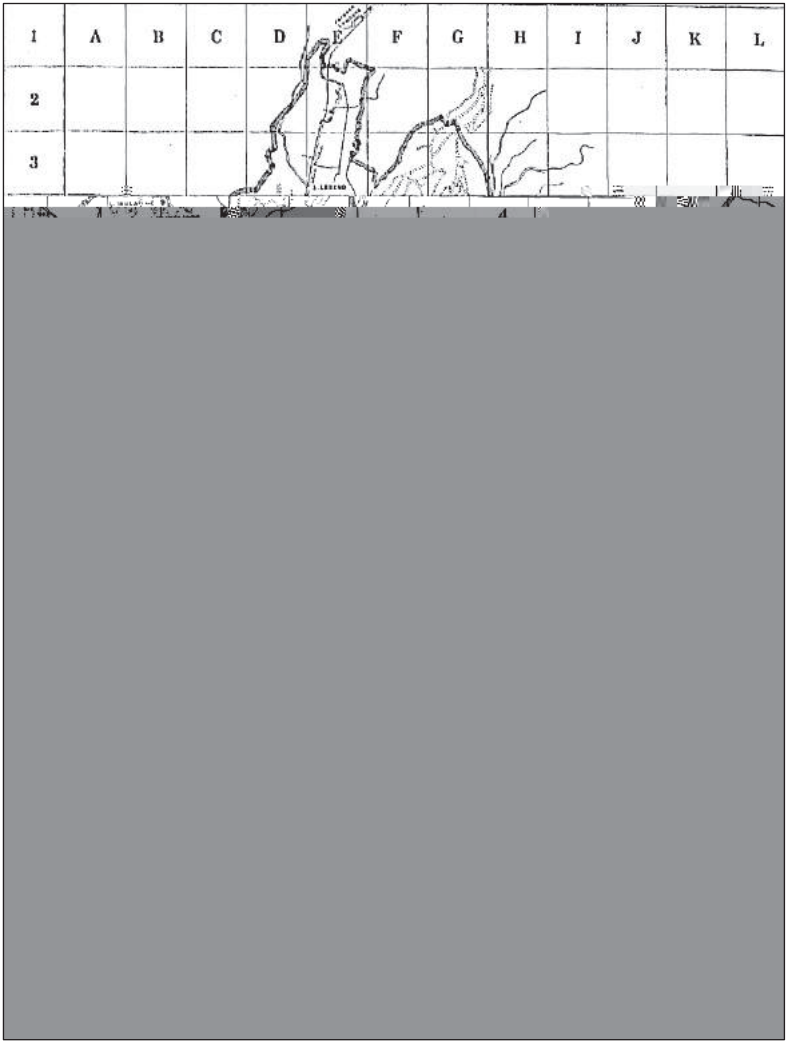

Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional

Peta 6.2. Peta Kota Bandung setelah Perluasan

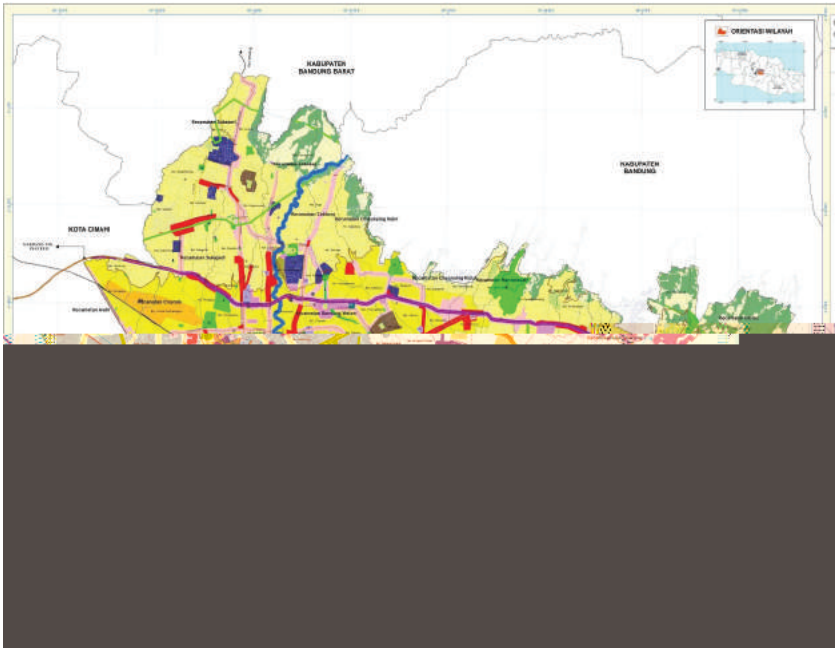

Sumber: Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Bandung

Terlepas dari ***master plan*** yang telah disiapkan untuk menghadapi dinamika kota di masa mendatang, populasi penduduk Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bagaikan manisnya ***gula-gula*** sebuah kota besar di Jawa Barat, Bandung menjadi magnet urbanisasi bagi ***hinterland*** di sekitarnya. Menurut H.W. Hoogland terdapat sajak yang berasal dari ramalan Jagabaya[9], berbunyi "***Bandung bakal heurin ku tangtung***" yang artinya "sekali waktu Bandung bakal penuh dan padat penduduknya". Dan ternyata ungkapan tersebut terbukti memasuki tahun 1960, penduduk kota Bandung mencapai angka satu juta jiwa dengan luas areal kota sebesar 8.098 ha.

9 Dalam beberapa sumber yang dimakud ramalan Jagabaya adalah ramalan Jayabaya yang terkenal

Tabel 6.1.
Jumlah Penduduk dan Persentase Rata-rata Pertumbuhannya

Peningkatan persentase jumlah penduduk Kota Bandung yang luarbiasa terjadi dua kali, yaitu pada dekade 1911 – 1921 dengan kenaikan 9,1%, dan pada dekade 1941 – 1951 dengan kenaikan 11,3%. Pada tahun 1911 dengan jumlah penduduk 48.000 jiwa, melonjak menjadi 114.300 jiwa pada tahun 1921. Masa itu adalah periode Bandung *gemeente* yang sedang gencar melakukan pembangunan untuk pemukiman Eropa, khususnya di sebelah utara Bandung. Misalkan Prof Voronoff dari Gemeentelijk Grodenbedrijf (Perusahaan Tanah Kotapraja) seorang pengusaha properti berkebangsaan Rusia, dia mempromosikan kepada para pensiunan Belanda untuk bermukim di Bandung. Bahkan dalam surat kabar yang beredar di Batavia maupun Surabaya juga menampilkan iklan properti yang mengundang agar orang-orang luar kota Bandung untuk tinggal dan menetap. Dalam salah satu iklan tertulis *"Komt te Bandung, Blijft te Bandung, Bouwt te Bandung"* yang artinya 'Datanglah ke Bandung, Tinggalah di Bandung, Bangunlah (Rumah) di Bandung' (Kunto, 1986: 886). Alasan yang berbeda terjadi pada peningkatan penduduk gelombang kedua (1941-1951). Pada periode ini peningkatan penduduk didukung oleh situasi sosial, politik dan ekonomi. Begitupun pada tahun-tahun pasca kemerdekaan, populasi penduduk Kota Bandung meningkat pesat diantaranya disebabkan perpindahan masyarakat dari desa ke kota karena alasan keamanan (Kunto, 1986: 890).

Peningkatan populasi Kota Bandung juga tidak terlepas dari pengaruh kebijakan konsep fungsi kota yang dituangkan dalam 'Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bandung' yang disahkan lewat Peraturan Daerah No. 17/PD/1984. Dalam kebijakan tersebut fungsi Kota Bandung ditetapkan sebagai berikut: (1) Fungsi Pemerintahan; (2) Fungsi Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan; (3) Fungsi Perdagangan; (4) Fungsi Perindustrian; (5) Fungsi Pariwisata dan Kebudayaan. Dengan 'memborong' kelima fungsi dan peranan kota tersebut, maka tentulah berdampak pada arus urbanisasi yang lebih besar, dengan pendatang dari desa diperkirakan mencapai 70%, sementara 30% lainnya berasal dari kota-kota lain. Kedatangan mereka memiliki tujuan untuk mencari kerja (20%) dan alasan pindah kerja demi penghidupan yang lebih baik (40%) (Kunto, 1986: 892).

Kebijakan tersebut juga memiliki dampak pada isu alih fungsi serta ketersediaan lahan untuk menampung aktivitas dan tempat tinggal penduduk. Berdasarkan data kependudukan kota besar di pulau Jawa, pada tahun 1975, kepadatan rata-rata penduduk Kota Bandung sekitar 150 jiwa/ha, merupakan yang tertinggi, mengalahkan Jakarta yang pada waktu itu masih 76 jiwa/ha. Bahkan pada tahun 1970, penduduk Kota Bandung sudah mencapai angka 1,2 juta jiwa dengan areal luas kota hanya sekitar 8.000 ha.

Tabel 6.2.
Perbandingan Kepadatan Penduduk Kota Bandung tahun 1975

Nama Kota	Kepadatan Rata-rata (jiwa/ha)
Jakarta	76
Bandung	150
Surabaya	52
Semarang	22

Sumber: Haryoto Kunto, Semerbak Bunga di Bandung Raya

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bertambahnya peranan serta fungsi kota yang semakin kompleks merupakan alasan kuat perlunya pembangunan fisik Kota Bandung untuk segera diperluas. Perubahan

batas antara Kota dan Kabupaten Bandung awalnya sempat menimbulkan perdebatan, karena Kota Bandung terletak di dalam wilayah Kabupaten. Soal perluasan wilayah ini pun pada akhirnya diselesaikan lewat surat jawaban Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 22 Januari 1985 No.135/313/POUD. Selanjutnya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Wilayah Daerah Tingkat (DT) II Bandung meningkat hingga dua kali lipat, yang tadinya memiliki luas 8.096 ha menjadi 16.730 ha.

Perluasan wilayah ini tentunya berakibat menggeser batas wilayah lama. Batas wilayah Kotamadya Bandung setelah mengalami perluasan terdiri dari: sebelah timur berbatasan dengan Sungai Cibiru; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Cilengkrang dan dibatasi garis ketinggian 750 mdpl. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Deyeuhkolot atau yang saat ini menjadi Jalan Tol Cipularang; Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cisarua (PP No.16 tahun 1987). Selain itu, Kotamadya Bandung yang sebelumnya hanya memiliki 16 kecamatan, setelah diperluas memiliki 26 kecamatan. Setidaknya, Kota Bandung sejak menjadi *Gemeente* mengalami beberapa kali penambahan luas wilayah untuk menampung hunian penduduk serta fasilitas kota.

Peta 6.3. Perluasan Kota Bandung sampai Tahun 1987

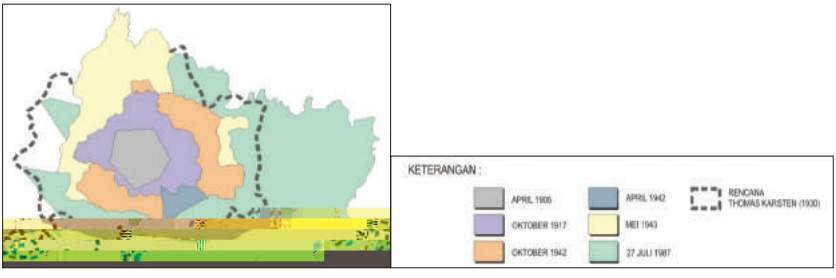

Sumber: RPJMD Kota Bandung

Thomas Karsten memang sudah memproyeksikan perluasan Kota Bandung pada tahun 1930-1935 sebagaimana terlihat pada peta di atas. *Plan Karsten* atau *Uitbreidingsplan Stadsgemeente Bandoeng* berencana memperluas Kota Bandung yang hanya 2.853 ha pada tahun 1930, menjadi 12.758 ha dan mampu menampung 750.000 penduduk. Namun realisasinya pada masa orde baru, luas area kota menjadi 16.729,650 ha (3.971 ha lebih luas dari rencana Karsten) dan menampung 1,5 juta penduduk pada tahun 1985.

Walaupun telah diperluas, ternyata permasalahan Kota Bandung tidak serta merta bisa cepat terurai. Salah satunya terlihat dari persebaran pembangunan, karena konsentrasi aktivitas penduduknya masih berpusat di sekitar alun-alun kota (Kunto, 1986: 912). Bahkan pada tahun 1993, sekitar 80% penduduk Kota Bandung yang sudah mencapai 2 juta jiwa, masih tinggal di sekitar pusat kota lama. Mereka enggan pindah ke daerah yang menjadi perluasan, karena area seluas 9.000 ha yang baru tersebut masih kosong dan minim infrastruktur (Kompas, 1993).

Penambahan wilayah menuntut pemerintahan kota untuk menyediakan infrastruktur serta aksesibilitas transportasi yang memadai. Isu kemacetan di Kota Bandung sejak dulu sudah menjadi bahasan sehari-hari, sempat diduga penyebabnya adalah transportasi tradisional terutama becak. Namun ternyata setelah pelarangan angkutan becak diberlakukan, jalanan di sekitar pusat kota tetap macet. Penelitian lebih lanjut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembangunan jumlah ruas jalan dengan peningkatan jumlah kendaraan. Berdasarkan RIK Bandung 1984, penambahan panjang jalan di Kota Bandung selama tahun 1970an sampai 1980an adalah: 460,928 km (1976); 517,712 km (1981); 554,590 km (1983) atau rata-rata pertambahan hanya 11,375 km per tahun. Sementara itu, pertambahan kendaraan bermotor sekitar 3.000 mobil sedan dan 6.000 sepeda motor untuk setiap tahunnya (Kunto, 1986: 996-997).

Rumitnya mengurai masalah kemacetan ini membuat Walikota Bandung periode 1983–1993, Ateng Wahyudi, melakukan beberapa terobosan. Dalam harian Kompas (1989), Ateng pernah mengatakan "*Saya mau membongkar isi perutnya (Bandung) …. Saya akan bikin*

Bandung macet selama 3 bulan, tapi setelah itu lancar." Pengertian 'isi perut' ini merujuk pada jalan di Kota Bandung, jaringan air bersih, serta saluran pembuangan kotoran. Dikatakan bahwa Kota Bandung sudah lama sakit, kemacetan di pusat kota disebabkan jaringan jalan yang tidak banyak bertambah sehingga tidak mampu menampung kendaraan yang laju pertumbuhannya 10 – 15 % per tahun. Disamping hal lain yang mengganggu yaitu bentuk jalan yang radial dan memiliki banyak persimpangan (Kompas, 1989).

Pemerintah Kota Bandung menerapkan beberapa terapi untuk mengobati 'penyakit' kota ini. Salah satunya adalah program yang dirancang sejak 1974 dengan nama *Bandung Urban Development Strategies* (BUDS), yang kemudian dikembangkan pada periode 1977-1978 dengan nama *Bandung Urban Development and Sanitation Study* (BUDSS). Kemudian konsep ini disempurnakan oleh Ateng Wahyudi dengan menyiapkan tiga program strategis utama yang dikenal *Bandung Urban Development Project* (BUDP). Program tersebut antara lain: (1) Program Strategis Penataan Kotamadya Bandung; (2) Program Strategis

hanya manusia". Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa sumber utama pendapatan kota Bandung adalah dari sumber daya manusianya itu sendiri, yakni melalui pajak dan retribusi. Misalkan jika untuk pendanaan kebutuhan air bersih dibebankan kepada pelanggan, maka untuk pembangunan jalan dibebankan pada retribusi parkir. Menurut perhitungan Ateng Wahyudi, pada tahun 1988/1989 estimasi retribusi parkir sebesar Rp3 milyar. Dengan pendapatan bersih Rp1,35 milyar, maka sejumlah Rp400 juta per tahun akan digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk membantu pembayaran cicilan hutang ke Bank Dunia. Sebagai walikota Ateng Wahyudi mengatakan *"...itu prinsip saya. Biar macet sedikit asal rakyat makan, daripada jalan lancar tapi rakyat tidak bisa makan..."* (Kompas, 1989).

Gambar 6.1. Jalan Asia Afrika tahun 1980an

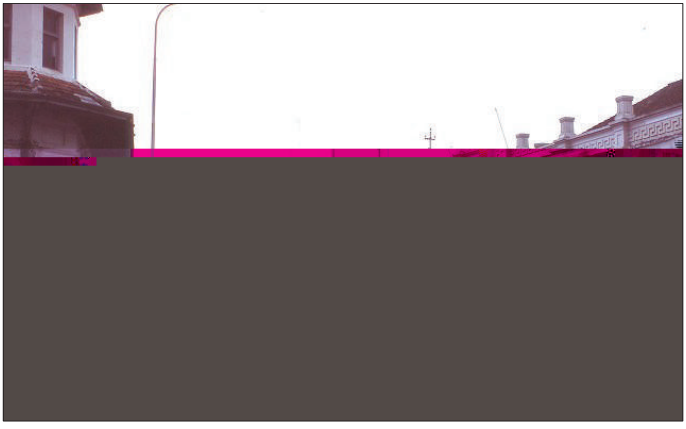

Sumber: *Public Source*

Orientasi pembangunan Kota Bandung ini juga termuat dalam Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat. Kebijakan spasial dalam Perda ini menempatkan Kota Bandung dalam wilayah Bandung Raya, sebagai kawasan yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cianjur, Garut, dan Sumedang. Pertimbangan penempatan wilayah-

wilayah pembangunan ini berdasarkan pendekatan sistem administrasi pemerintahan, aliran sungai, aliran barang dan orang, di samping ciri khas masing-masing wilayah dengan struktur dan hierarki perkotaannya.

Secara lebih spesifik, pola pembangunan Bandung Raya pada wilayah pusat (Kotamadya dan Kabupaten Bandung) yang tertuang dalam Perda tersebut meliputi: (1) Budidaya pertanian yang dikembangkan adalah perkebunan, holtikultura dan hijauan makanan ternak serta usaha peternakannya, adapun industri secara selektif dikembangkan di sekitar Bandung; (2) Lokasi pendidikan tinggi disebarkan di sekitar Bandung antara lain di Jatinangor; (3) Utilitas dan fasilitas perkotaan terutama sebagai Ibu Kota Provinsi terus disempurnakan; (4) Kota-kota pusat pertumbuhan dan Ibu Kota Kabupaten dikembangkan dengan jarak yang memadai di sekitar Kotamadya Bandung; (5) Konservasi sumber daya alam dengan mengusahakan pengembangan hutan di bagian utara dan beberapa pegunungan yang merupakan sumber air.

Terkait dengan konservasi sumber daya alam sebagai salah satu poin dalam pola pembangunan tersebut secara normatif memang sudah disahkan, namun pada perkembangannya terjadi dilema akibat konflik kepentingan. Batas sebelah utara Kota Bandung selain berbatasan dengan kecamatan Lembang (Kabupaten Bandung), juga dibatasi oleh garis ketinggian 750 mdpl. Alasan pembatasan oleh garis ketinggian adalah pada wilayah tersebut diperuntukkan sebagai daerah konservasi atau resapan air, sehingga pemekaran dan pembangunan tidak boleh mengganggu area hijau tersebut (Kunto, 1986: 912). Wilayah utara Kota Bandung atau yang disebut 'Kawasan Bandung Utara' (KBU) ini terletak di kaki Gunung Burangrang dan Tangkuban Perahu dengan wilayah inti dari mulai Kecamatan Ngamprah di kaki Gunung Burangrang di Bandung sebelah barat, terus menyusuri Gunung Masigit, Gedogan Sunda, Tangkuban Perahu dan berakhir di Kecamatan Cimenyan, yakni di kaki Gunung Manglayang sebelah timur kota Bandung. Kawasan ini terbagi ke dalam 4 wilayah administratif pemerintahan, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi, yang meliputi 21 kecamatan, 89 kelurahan, dan 16 desa dengan luas kurang lebih 38.543,33 ha. Sudah sejak zaman kolonial KBU dipersiapkan

untuk konservasi, karena potensinya sebagai penyuplai 60% sumber air bagi penduduk di cekungan Bandung ("Gambaran Umum Mengenai KBU", 2017, http://diskimrum.jabarprov.go.id/kbu/, 31 Mei 2017). Permasalahannya adalah kawasan Kawasan Bandung Utara ini juga ikut digerus pembangunan meskipun sudah terbit peraturan mengenai kawasan lindung.

Peta 6.4. Kawasan Bandung Utara

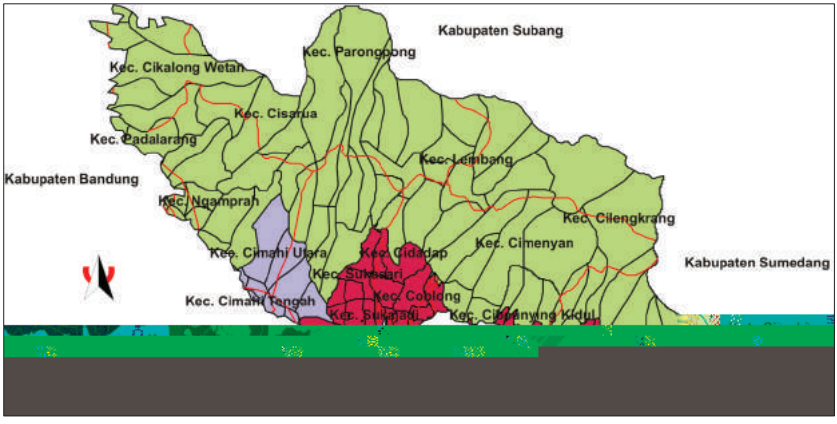

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Jawa Barat

Wilayah KBU yang paling parah terkena dampak pembangunan adalah di Kecamatan Cidadap, tepatnya kawasan Puncak Ciumbuleuit (Punclut). Hingga tahun 2003 lalu, luas Punclut yang meliputi 286 ha menyumbang hancurnya 70% KBU. Di Punclut sendiri kawasan hutan dan pertanian turun masing-masing 12% dan 14%, sedangkan kawasan pemukiman dan semak belukar meningkat masing-masing 149% dan 87% (Krisna Mukti, 2005, http://www.itb.ac.id/news/read/543/home/konflik-punclut-mempertimbangkan-lingkungan-dalam-bisnis-2, 2 Juni 2017). Permasalahan pembangunan kawasan ini sudah mulai ada sejak tahun 1961, yakni ketika pemerintah memberikan sertifikat hak milik tanah kepada 948 pejuang untuk dibangun rumah dalam waktu lima

tahun. Akan tetapi hak tersebut justru dijual kepada pengembang, dan permasalahan semakin rumit ketika pengembang mendapat ijin untuk membangun Punclut tahun 1994. Pengembang merajalela dengan memohon Hak Guna Bangunan (HGB) atas wilayah seluas 37,31 ha.

Wilayah inti Bandung Utara yang tertutup untuk pembangunan perumahan dan difungsikan sebagai resapan air juga sudah ditetapkan dalam SK No. 181.1/SK.1624-Bapp/1982, pada 5 November 1982, namun pembangunan secara diam-diam tetap berlangsung. Gubernur Jawa Barat, R. Nuriana, mengeluarkan surat tanggal 22 April dan 31 Oktober 1994 menginstruksikan Bupati dan Walikota tidak memberikan izin pembangunan di Bandung Utara. Dalam lampiran surat itu ditetapkan kembali 74 desa di 10 kecamatan Kabupaten Bandung dan 37 desa di 11 kecamatan Kodya Bandung yang masuk daerah resapan air Wilayah Inti Bandung Utara. Kenyataanya tetap saja perumahan mewah masih terus dibangun di kawasan itu. Menurut catatan Kompas, setidaknya ada 17 *developer* perumahan mewah, vila, dan tempat peristirahatan yang menguasai 2.700 ha lahan (Kompas, 1995).

Gambar 6.2. Berlaihnya Kawasan Bandung Utara untuk perumahan dan perhotelan

Sumber: jabarprov.go.id

Permasalahan dalam pembangunan Kota Bandung selain sarat akibat konflik kepentingan, juga besarnya proyek-proyek strategis yang sedang digalakkan, terlebih setelah adanya perubahan kewenangan pemerintah daerah pasca era reformasi. Memasuki era reformasi diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 13 Juli 2004 mengenai Kerja Sama Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Metropolitan Bandung yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat, Bupati Bandung, Wali Kota Bandung, Bupati Sumedang dan Wali Kota Cimahi. Akan tetapi kedudukan SKB tidaklan sekuat Peraturan Daerah (Perda) karena tidak ada penetapan sanksi jika ada pelanggaran (Kompas, 2004). Setidaknya SKB tersebut membuka langkah untuk mencari jalan keluar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yaitu masing-masing Kepala Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan terhadap daerahnya.

Kebijakan itu sekaligus menjadi momen revisi terhadap model pembangunan Repelita Orde Baru, juga membuka kesempatan penyusunan dokumen Pokok-pokok Reformasi yang berlaku menjelang diberlakukannya UU Otonomi Daerah. Kemudian dengan semangat otonomi daerah tersebut disusun kembali dokumen perencanaan lima tahunan, melalui 'Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000-2004' (Perda No.05 Tahun 2000). Dalam Poldas tersebut, Kota Bandung menetapkan visinya yaitu "Meningkatkan Peran Kota Bandung Sebagai Kota Jasa, Menuju Terwujudnya Kota Jasa yang Genah Merenah Tumaninah". Walaupun pada tahun 1999 pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung, telah menyepakati Visi Tatar Bandung, yaitu "Tatar Bandung 2020 Ramah dan Cerdas (*Smart and Friendly*)".

Konsep kota pintar atau *smart city* telah menjadi pilihan bagi sebagian besar kota modern di dunia, dengan merencanakan pembangunan tata ruang kota berdasarkan perhitungan tata ruang dan demografis yang jauh ke depan. Konsep tersebut muncul sejalan dengan kemajuan teknologi yang terjadi pada masa kini. Terminologi *smart city* pertama kali digunakan pada tahun 1990. Saat itu fokus utamanya ditujukan pada konsep *Information Communication Technology* (ICT) untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur modern dalam kota. The California Institute,

merupakan institusi pertama yang berfokus pada permasalahan bagaimana masyarakat menjadi pintar dan bagaimana kota dapat dirancang untuk mengimplementasikan teknologi informasi (Albino, 2015). Sementara penggunaan istilah *smart city* dalam penelitian lain disebutkan bahwa terminologi "*smart*" dalam "*smart city*" merujuk pada bahasa pemasaran "*smartness*" yang dirasa lebih halus dibandingkan kata "*intelligent*" dan terkesan elitis.

Kota Bandung menjadi percontohan *smart city* pertama kali di Indonesia, yaitu menjelang pelaksanaan peringatan ke-50 Konferensi Asia Afrika tahun 2015. Program yang digagas Walikota Bandung Ridwan Kamil dengan membentuk *Bandung Command Center* (BCC). Tujuan awalnya hanya sebatas bentuk pengamanan kepala negara dan tamu-tamu asing yang masuk ke Bandung. Namun, setelah pelaksanaan kegiatan selesai, Pemerintah Kota Bandung kemudian merancang agar BCC menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kotanya. Proyek tersebut mengaplikasikan kamera CCTV hingga 4.000 unit (Pikiran Rakyat, 2015).

Selang setahun sejak proyek percontohan tersebut diterapkan, tepatnya pada 2 September 2016 diadakan *Indonesia Smart City Forum* 2016 di Kota Bandung, Jawa Barat. Dihadiri perwakilan 79 kota dan kabupaten di Indonesia (Kompas, 2016). Forum ini menjadi sarana pembelajaran bagi daerah dalam mengembangkan *smart city*, sekaligus meningkatkan sumber data aparatur negara.

Dalam konsep *smart city*, peranan kepala daerah dan aparatur pemerintah sangat penting. Meski demikian, berdasarkan data tahun 2016, hanya 40% aparatur negara yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan, sementara 60% lainnya keahlian bidang administrasi (Kompas, 2016). Salah satu hasil dari *Smart City Forum* dalam menanggapi kondisi tersebut menyepakati akan dilakukannya penyelenggaraan pendidikan vokasional bagi aparatur negara agar lebih kreatif dan inovatif. Kota Bandung sendiri sebagai tuan rumah telah merealisasikan gagasan tersebut sejak tahun 2013. Bandung *smart city* menjadi prioritas pada periode Walikota Ridwan Kamil (2013-2018), yang menilai bahwa suatu kota yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik pula (Pikiran Rakyat, 2014). Terminologi 'kota yang baik' untuk era sekarang ini adalah kota yang

bisa hidup berdampingan dengan teknologi, melalui pengaplikasiannya dalam menjalankan fungsi tata kota, sehingga segala pekerjaan dan biaya pemerintah dapat diatur secara lebih efektif dan efisien.

Kota pintar yang terintegrasi diharapkan menjadi solusi dari segala masalah perkotaan saat ini. Dalam sudut pandang lebih jauh, Suhono Harso Supangkat menjelaskan bahwa visi Bandung *smart city* sekaligus menjadi *prototype* kota pintar di Indonesia (Pikiran Rakyat, 2014). Pemerintah Kota Bandung secara perlahan mewujudkan *smart city* dengan menerapkan beragam aplikasi pelayanan publik di berbagai perangkat pemerintah kota, misalnya di setiap kantor dinas, kantor kecamatan dan kantor kelurahan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Konsep ini menggabungkan infrastruktur berbasis teknologi informasi serta penerapan beragam aplikasi dalam pelayanan publik. Perencanaan yang dibuat, yaitu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki 4 hingga 5 aplikasi yang jika diakumulasi dari 30 SKPD akan berjumlah 150 aplikasi (Pikiran Rakyat, 2014). Harapan Pemkot Bandung apabila tercapai maka Bandung layak disebut *smart city* dan segala urusan dapat dijangkau melalui aplikasi.

Selain penggunaan aplikasi yang mampu menjangkau persoalan masyarakat, aparat daerah juga dituntut untuk mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat, misalnya dengan mewajibkan setiap SKPD memiliki akun *twitter* (Pikiran Rakyat, 2014). Budaya baru itu membuat pantauan kinerja setiap SKPD lebih mudah karena mereka diwajibkan melampirkan foto pekerjaannya baik sebelum ataupun sesudahnya sebagai laporan kepada pimpinan dan juga publik. Akan tetapi rencana tersebut tidak berjalan mulus di lapangan, baru 10% dari seluruh SKPD Kota Bandung yang memanfaatkan media sosial secara optimal (Pikiran Rakyat, 2016). Berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Bandung yang mayoritas merupakan pengguna aktif media sosial seperti *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, *Path* dan lain sebagainya. Masyarakat aktif menyampaikan permasalahan kota, bahkan membentuk komunitas media sosial untuk mendiskusikan permasalahan seperti Netizen Foto PRFM (Pikiran Rakyat FM), Ridwan Kamil *Watch*, dan lain-lain (Pikiran Rakyat, 2016).

Masih rendahnya persentase penggunaan media sosial di tubuh SKPD disebabkan oleh kekhawatiran Pemkot Bandung terhadap sejumlah pasal UU ITE, di antaranya: Pasal 26 tentang Perlindungan Identitas Seseorang; Pasal 27 tentang Penyebaran Informasi yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik dan pemerasan atau pengancaman; Pasal 28 tentang Penyebarluasan Berita Bohong; Pasal 32 tentang Penyebaran Informasi Rahasia; dan Pasal 35 tentang Autentisitas Informasi yang diunggah (Pikiran Rakyat, 2016). Permasalahan tersebut terbilang hal kecil jika melihat potensi Bandung yang begitu besar untuk dirancang menjadi *smart city.* Dalam hal ini sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Bandung cukup mampu bersaing dengan Jakarta dalam hal pengimplementasian *smart city*.

Kota Bandung memiliki kelengkapan infrastruktur dan melimpahnya sumber daya manusia sebagai faktor penunjang kota ramah teknologi, setidaknya terdapat tiga faktor utama. Pertama, dengan jumlah penduduk yang lebih dari delapan juta orang menjadikannya sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "Data Penduduk Bandung", www.jabarprov.go.id, 2 Juni 2017). Komposisi demografi penduduk dengan rasio 60% berusia di bawah 40 tahun yang merupakan usia produktif. Populasi yang didominasi usia muda dan paham penggunaan teknologi semakin mendukung hadirnya ekosistem teknologi di kota ini. Kedua, Pemkot Bandung memiliki komitmen kuat untuk membesarkan *startup*. Ketiga, Pemkot Bandung sangat mendukung inisiatif teknologi. Keempat, Bandung berusaha menjadi pionir *technopark* di Indonesia.

Salah satu proyek besar adalah Teknopolis yang diharapkan dapat menjadi Silicon Valley-nya Indonesia di masa depan. Bandung telah menyiapkan lahan seluas 800 ha di wilayah Gedebage sebagai proyek Teknopolis mendukung pembangunan *smart city.* Total investasi proyek itu mencapai sekitar 800 juta dollar AS (Pikiran Rakyat, 2014). Teknopolis memang bukan konsep baru. Pada 1970-an, gagasan itu sempat diterapkan dengan membangun lokasi yang nyaman untuk pertumbuhan dan penyebaran industri-industri baru. Konsep Bandung Teknopolis terinspirasi dari Silicon Valley yang berada di Amerika Serikat, yang juga

telah dikembangkan di beberapa negara seperti Akademegorodok di Rusia dan Tsukuba di Jepang.

Peta 6.5. Teknopolis Kota Bandung

Sumber: kominfo.go.id

Pembangunan *smart city* dengan proyek Bandung Teknopolis sebagai salah satu andalannya dilakukan secara berangsur-angsur, sejak diwacanakan di tahun 2013. Pemkot Bandung menganggarkan dana cukup besar untuk pembangunannya, proyek berkala itu diperkirakan selesai dalam waktu tiga tahun, terhitung sejak 2014. Waktu ini terbilang sangat singkat dalam upaya membangun *smart city.* Ridwan Kamil selaku walikota memiliki pendapat bahwa *smart city* dibangun untuk mengkonversikan urusan manual menjadi digital, mulai dari masalah kependudukan seperti pembuatan KTP hingga komplain warga (Pikiran Rakyat, 2016). Akan tetapi, hal itu belum dapat dikatakan sebagai *smart city* yang utuh karena belum memenuhi aspek-aspek yang saling terintegrasi secara sistematis berdasarkan definisi yang dijelaskan Suhono Harso Supangkat. Jika merujuk pada definisi yang disampaikan di awal,

Bandung di tahun 2017 baru dapat merealisasikan sebagian kecil dari definisi *smart city* yang utuh.

Peta 6.6. Perencanaan Strategis Kota Bandung

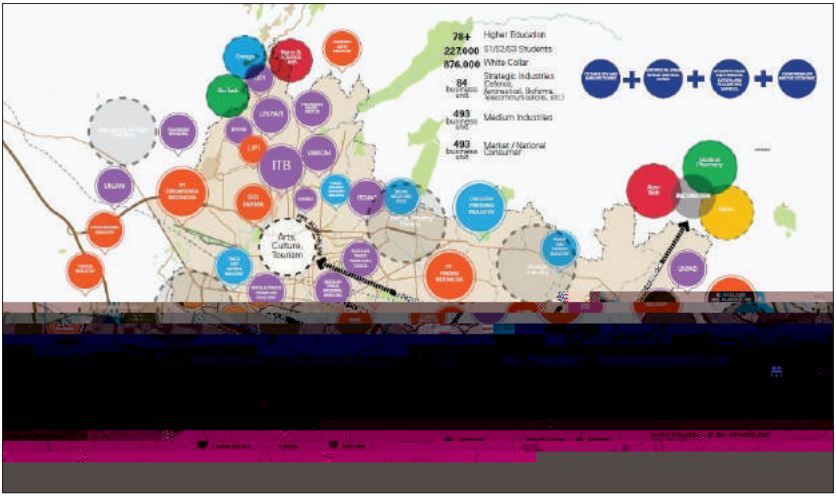

Sumber: kominfo.go.id

Perencanaan Pemkot Bandung dalam membangun *smart city* yang terintegrasi, mendekati definisi ideal, setidaknya dalam moda tranportasi massal, tersusun lengkap dalam *master plan* 'Bandung Urban Mobility Project'. Bandung merintis proyek besar *smart city* yang direncanakan rampung pada 2031. Proyek besar tersebut fokus pada transportasi publik dengan perencanaan yang dibentuk meliputi berbagai hal yang mendukung hampir semua lini dalam masyarakat di antaranya: Kehidupan, Pekerjaan dan Hiburan (*Live*, *Work*, *Play*); Peningkatan prasarana/infrastruktur transportasi (*Road Network*); Pengembangan sarana angkutan umum berbasis angkutan umum massal (*Public Transport*); Pengembangan teknologi dan perilaku (*Technology and Behaviour*) (Pemerintah Kota Bandung, *Bandung Urban Mobility Project*, 2013).

Aspek pertama '*Live*, *Work*, *Play*' merupakan strategi terpadu untuk segala kebutuhan masyarakat. Pada tahap awal, demi mewujudkan kota

terpadu yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan perjalanan masyarakat seperti ke tempat tinggal (perumahan), wisata (hiburan), pendidikan, dan lain-lain. Kemudian, dari kebutuhan-kebutuhan itu dapat dibuat *Transportation Demand Management* (TDM)[10]*strategy* dengan melakukan perayonan dan simpul-simpul penyebaran. Setelah itu, dilakukan strategi pemanfaatan lahan dengan membagi kawasan-kawasan dalam suatu wilayah.

Kedua, *Road Network*, yaitu peningkatan prasarana/infrastruktur transportasi. Konsep ini bertujuan memperkuat struktur jaringan jalan di Kota Bandung dengan meningkatkan kapasitas jaringan jalan. Peningkatan kapasitas itu dapat dilakukan dengan pembangunan jalan baru, pelebaran jalan, pemeliharaan jalan/perbaikan jalan, perbaikan hierarki jalan (pelengkapan pola jaringan jalan dan sinkronisasi kapasitas/*road condition*), serta pembangunan *flyover/underpass* pada persimpangan-persimpangan jalan yang sering mengalami kemacetan lalu lintas (*bottlenecking*) (Pemerintah Kota Bandung, *Bandung Urban Mobility Project*, 2013).

Ketiga, *Public Transport* yang merupakan pengembangan sarana angkutan umum berbasis angkutan umum massal. Dalam pelaksanaannya, strategi yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM). Fungsinya ialah sebagai *backbone* atau tulang punggung transportasi umum di Kota Bandung. Pengembangan lebih jauh SAUM adalah transportasi berbasis rel atau *rail based* (*Monorail*/LRT dan *heavy rail*) dan berbasis jalan atau *road based* (BRT, bus sekolah). SAUM pada dasarnya menghubungkan semua pusat kegiatan yang ada di Kota Bandung. Sementara itu, untuk mendukung SAUM tersebut, dikembangkan pula sistem pengumpan (*feeder*) angkutan umum yang memungkinkan pengguna angkutan umum mencapai tujuan perjalanannya secara cepat, murah, selamat dan nyaman. Sistem *feeder* angkutan umum yang ada menggunakan berbagai moda, antara lain angkutan kota (MPU), taksi, sepeda, ojek dan sebagainya. Fungsi angkutan umum perkotaan dikembalikan pada fungsi semula, yaitu sebagai *feeder*

berjarak pendek yang menghubungkan antarkawasan pendukung dan kawasan perumahan. Selain itu, juga dikembangkan angkutan umum yang berfungsi menunjang perkembangan pariwisata di Kota Bandung, yaitu bus wisata, *cable car* dan lain-lain.

Keempat, *Technology and Behaviour*. Realitanya, selama ini sistem transportasi di Kota Bandung belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Padahal, pemanfaatan teknologi di bidang transportasi dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan. Sistem transportasi menjadi efisien dan ramah lingkungan, bahkan diperkirakan dapat mengubah perilaku masyarakat yang masih akrab dengan sistem transportasi tradisional. Konsentrasi pemerintah akan terpusat pada pengembangan tiga sektor, yaitu manajemen lalu lintas (*traffic management*), transportasi hijau (*green transport*) yang ramah lingkungan, dan transportasi pintar (*smart transport*) yang praktis dan efisien (Pemkot Bandung, *Bandung Urban Mobility Project*, 2013).

Pembangunan *smart city* bukannya tanpa kendala. Hingga tahun 2014, pembentukan *smart city* di Indonesia masih belum memiliki regulasi yang mendukung (Pikiran Rakyat, 2015). Hal itu cukup dikhawatirkan beberapa pihak meskipun tidak terjadi kendala hukum yang signifikan. Penyusunan Perda tetap diperlukan agar tidak berdampak konsekuensi hukum di kemudian hari. Perda Kota Bandung No.01 Tahun 2013 masih berkutat pada pembangunan kepariwisataan daerah (Peraturan Daerah Kota Bandung No. 01 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah). Proyek Bandung Teknopolis belum termasuk dalam Perda tersebut. Melalui Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035, hal-hal terkait pembangunan *smart city* mulai mendapat dukungan hukum. Dalam RDTRK, tujuan Penataan Ruang Sub Wilayah Kota (SWK) Gedebage adalah pengembangan kawasan yang bersinergikan antara pendidikan tinggi, ekonomi kreatif, komersial dan pusat pemerintahan berkonsep teknopolis, dalam mewujudkan fungsi PPK Gedebage (Pikiran Rakyat, 2016b).

Kendati demikian, alih fungsi lahan menjadi tetap persoalan utama karena menyangkut ekonomi penduduk kota. Berdasarkan pengamatan

Yuswadi Saliya, dari Arsitektur ITB, ada kecenderungan terjadinya alih fungsi dan penetrasi di jalan protokol Kota Bandung akibat tingginya Pajak Bumi Bangunan (PBB). Rumah tinggal yang tidak produktif kemudian beralih fungsi menjadi toko, hotel, bank, restoran, tempat kursus, fotokopi, kios, warung, bengkel *showroom* dan lain sebagainya. Kawasan pemukiman yang beralih fungsi menjadi kawasan perdagangan antara lain Jalan Buahbatu, Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudhi dan Jalan Riau (Pikiran Rakyat, 2016b). Rumah-rumah penduduk terpaksa beralih jadi pertokoan. Satu sisi, sangat disayangkan jika rumah-rumah yang memiliki arsitektur asli kemudian dijual kepada pengembang dan dijadikan tempat usaha sehingga kehilangan nilai historisnya. Sementara di sisi lain, usaha rumahan dalam bentuk *factory oulet* (FO) yang menjamur di Kota Bandung dapat menggerakan roda perekonomian daerah.

Kontribusi Bank Indonesia dalam Membangun Kota Bandung

Pertumbuhan Kota Bandung yang masif tidak terlepas dari peranan perwakilan bank sentral di Kota Bandung yang telah mengalami beberapa perubahan nama kantor (Arlyana, dkk., 2019: 199). Sejak tahun 2016 sampai saat ini nama kantor yang resmi adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Barat, yang sekaligus berperan sebagai kantor koordinator bagi KPwBI Tasikmalaya dan Cirebon. Namun dalam hal tulisan ini akan lebih berfokus pada kontribusi KPwBI Jabar (Bandung) terhadap Kota Bandung. Untuk memudahkan pembaca, maka untuk selanjutnya akan menggunakan penyebutan Bank Indonesia Bandung atau BI Bandung.

Sebagai kepanjangan tangan kantor pusat, BI Bandung memiliki visi yaitu menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Serta memiliki misi yaitu menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran

untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan. Adapun amanat tugas pokok yang dimiliki, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi *advisory* kebijakan kepada Kepala Daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
2. Mendukung pelaksanaan fungsi *Regional Financial Surveillance* dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan.
3. Melaksanakan fungsi statistik ekonomi dan keuangan daerah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan/atau kebijakan di kantor pusat maupun daerah.
4. Melaksanakan fungsi Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pendistribusian, dan pengolahan uang, serta layanan kas.
5. Melaksanakan fungsi Sistem Pembayaran
6. Melaksanakan fungsi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Keuangan Inklusif.
7. Melaksanakan Komunikasi Kebijakan

Bank Indonesia Mengawal Industri Kreatif dan Pemberdayaan UMKM

Bank Indonesia menyadari pentingnya keberadaan UMKM yang telah terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional dalam melewati beberapa periode krisis ekonomi. Oleh karena itu Bank Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya sangat mendukung pengembangan UMKM baik dari sisi permintaan dan penawaran. Kebijakan dari sisi permintaan (*demand*) adalah dalam rangka "Meningkatkan akses UMKM kepada Bank" sementara di sisi penawaran (*supply*) melalui upaya "Mendorong Bank dalam membiayai UMKM" (Tim Penyusun Bank Indonesia, 2011: 5).

Ketika masa awal pendirian Bank Indonesia, fungsi penyaluran kredit masih tetap berjalan. Melalui bank-bank komersial, Bank Indonesia

memberikan dukungan penyediaan kredit untuk petani (Kredit Bimas dan Inmas). Sementara untuk perkembangan usaha kecil sebagian besar fasilitas kredit dari bank diberikan dengan skema Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Bank Indonesia mendukung pengembangan program KIK/KMKP dengan memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Program KIK/KMKP memperoleh KLBI sebesar 90% dengan suku bunga 3% per tahun, dan suku bunga kredit bank kepada nasabah sebesar 12% per tahun. Dalam perkembangan selanjutnya di tahun 1985 Kredit Bimas digantikan dengan Kredit Usaha Tani (KUT) yang disalurkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Sejak tahun 1999/2000 seiring penerbitan Undang-Undang No.23 tanggal 16 November 1999 tentang Bank Indonesia, seluruh program kredit yang bersumber dari KLBI dihapus. Sejak saat itu kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM menjadi bersifat tidak langsung. Pendekatan kepada UMKM khususnya peranan bank sentral telah bergeser dari *developmental role* menjadi *promotional role*. Pendekatan sebelumnya melalui pemberian subsidi kredit dan bunga murah bergeser kepada yang lebih menitikberatkan pada bentuk aktivitas tidak langsung seperti pelatihan dan penyediaan informasi termasuk penelitian, survei, riset, dan advokasi (Tim Penulis Bank Indonesia, 2001).

Secara umum BI melakukan pola pendekatan yang digunakan dalam 'trilogi pembangunan', yakni aspek pemerataan pada sektor riil di samping mengontrol fungsi moneter. Dalam konteks keterbatasan akses usaha kecil terhadap jasa perbankan untuk menunjang permodalannya, BI menjembatani dengan mempertemukan antara pengusaha kecil dan pejabat pemberi kredit. Survei dan pemantauan juga dilakukan dalam rangka menjaga serta memelihara kesinambungan proyek-proyek yang dibina kredit perbankan, penyempurnaan sistem dan mempromosikan produk-produk usaha kecil kepada bank dan instansi terkait. Pada proses pembinaan juga disediakan jasa-jasa konsultatif, misalnya di Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung memiliki lima konsultan, yakni: *development banker specialist; agricultural specialist; industrial specialist; regional representative SMIEP/AFP; regional Coordinator PHBK* (Tim Peneliti Bank Indonesia, 1996).

Bank Indonesia memberikan perhatian terhadap masih kecilnya akses permodalan dari perbankan terhadap UMKM yang terjadi akibat banyak faktor baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Sebagai salah satu langkah intermediasi, BI Bandung memberikan program pelatihan bagi pihak pemberi kredit, sebagaimana dilakukan pada tahun 1991. BI Bandung menyelenggarakan pelatihan Counterpart Angkatan II pada bulan Desember 1991 yang diikuti oleh pejabat-pejabat perbankan dari Bandung, Cirebon dan Tasikmalaya dengan materi yang berkaitan dengan pemberian kredit. Selain itu, BI Bandung bekerja sama dengan Kanwil Departemen Koperasi Jawa Barat juga memberikan pelatihan yang diikuti oleh para manajer KUD/Koperasi (Arsip BI Bandung, 1992). Pada tanggal 22 Juni 2000, BI Bandung bekerjasama dengan Perbarindo Jabar juga menyelenggarakan pelatihan perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai unit perbankan yang dekat dengan pengusaha kecil (Arsip BI Bandung, 2000). Pelatihan kepada perbankan merupakan program yang berkelanjutan, sebagai upaya mendekatkan dunia perbankan khususnya dengan pengusaha UMKM.

Penguatan struktur ekonomi mikro khususnya terhadap sektor pertanian, juga mendapatkan perhatian Bank Indonesia, sesuai dengan tipikal sosial masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan data pada tahun 2003, sektor pertanian di Jawa Barat meliputi 32,55% bergerak di sektor pertanian, 15,41% di industri agro, dan 21,4% di sektor jasa-perdagangan agro. Maka dengan jumlah penduduk Jabar yang sekitar 36 juta jiwa, maka ada sekitar 18 juta orang bergerak pada usaha agrobisnis (Pikiran Rakyat, 2003b)

Upaya yang dilakukan BI Bandung, misalnya pada tahun 2003 dilakukan pembentukan tim khusus untuk mendukung dan menyinergikan pembentukan forum pembiayaan agrobisnis Jawa Barat. Pimpinan BI Bandung, Djoko Sarwono, mengajak kalangan perbankan daerah untuk turut membantu usaha agro sejalan dengan program *road show* yang telah dicanangkan pada tahun tersebut. Menurut Kepala Dinas Indag Agro Jabar, H. Mustopa Djamaludin, pengembangan agrobisnis Jabar bertujuan agar usaha ini lebih kompetitif, terutama untuk menghadapi perdagangan bebas di kawasan ASEAN (AFTA). .

Salah satu metode penguatan struktur ekonomi mikro yang dilakukan Bank Indonesia adalah melalui kebijakan yang memfasilitasi pembentukan klaster.[11] Pendekatan ini dinilai strategis karena bersifat terintegrasi, meningkatkan daya tawar dan lebih menguntungkan, tidak hanya efisiensi biaya tetapi juga bagi pengembangan ekonomi wilayah. Implementasi kebijakan tersebut di BI Bandung, misalnya pada tahun 2006 dilakukan memfokuskan pengembangan kepada klaster alas kaki dan paprika. Melalui program ini, BI tidak hanya mendorong fungsi intermediasi perbankan, tetapi juga meningkatkan daya beli yang akhirnya memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia Jabar. Analisa dilakukan terhadap permasalahan yang ada dan potensi pengembangannya baik itu di bidang pemasaran, pembukuan, atau *research and development* (R&D). Progam ini adalah sebuah program yang selalu dijaga keberkelanjutannya bekerjasama dengan lembaga atau instansi terkait. Seperti pada tahun 2007 dan 2008 BI Bandung bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran (Balista), koperasi dan perusahaan eksportir. Bahkan untuk klaster paprika juga didukung penerapan teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHD), sehingga hasil panen berkualitas tinggi. Program klaster ini terus dikembangkan dalam berbagai produk sesuai hasil analisa, terutama terhadap produk yang mempunyai dampak signifikan dalam mempengaruhi tingkat inflasi daerah.

Tabel 6.3.
Kluster UMKM Binaan Bank Indoensia

No.	Komoditas Program Pengembangan Klaster	Lokasi	Tahun Dimulai
1	Paprika	Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat	2007
2	Cabai Merah	Kab. Garut	2011
3	Alas Kaki	Kec. Cibaduyut, Kota Bandung	2012
4	Sapi Potong	Kec. Purabaya, Kab. Sukabumi	2014
5	Sayuran	Kec. Pengalengan, Kab.Bandung	2014
6	Sapi Potong	Kec. Cikelet, Kab. Garut	2015
7	Sayuran	Kec. Lembang, Kab.Bandung Barat	2015

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Jawa Barat November 2016, hal. 113.

11 Klaster adalah upaya untuk mengelompokkan industri/usaha inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, informasi, teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga terkait.

BI Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Pengembangan Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah (P3UKM) juga terus berupaya mengembangkan kualitas pendampingan bagi UKM. Dijalin kerjasama dengan stakeholder eksternal, Kadin dan Dinas terkait untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, klinik konsultasi kredit, pelatihan dan intermediasi, membangun portal atau website, bahkan memasarkan produk asuransi bagi UMKM. Beberapa hasil yang telah dicapai oleh P3UKM pada tahun 2008 adalah: (1) Menyelenggarakan 18 pelatihan kepada 510 calon pendamping (2) Mengakreditasi 44 PUKM (34 lembaga dan 10 individu (3) Menghubungkan 6.239 debitur kepada 32 lembaga keuangan formal dengan total nilai plafond kredit sebesar Rp249,63 miliar (Bank Indonesia, Dokumen Nota Penyerahan Pimpinan Bank Indonesia Bandung, 21 April 2008).

Akses kredit perbankan kepada pengusaha kecil juga terus memberikan gambaran yang menggembirakan. Pada tahun 2005, lebih dari 80% kredit yang diberikan perbankan di Jabar diberikan kepada UMKM. Hingga akhir 2005, pemberian kredit kepada sektor UMKM mencapai Rp40,75 triliun, meskipun pada semester I 2006 tercatat pertumbuhan kredit melambat karena dampak kenaikan bahan bakar minyak (Pikiran Rakyat, 2006). Demikian pula dengan tahun 2015 pemberian kredit kepada UMKM terus mengalami pertumbuhan, peningkatan laju pertumbuhan kredit terlihat dari triwulan III sebesar 5,61% menjadi 5,78% di triwulan IV. Mayoritas kredit kepada UMKM disalurkan oleh Bank BUMN sebesar 54,59% dengan NPL sebesar 4,09% (Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Keuangan Regional, Tw IV 2015).

Dalam mengawal perkembangan perekonomian Jawa Barat, Bank Indonesia dengan Pemda Jawa Barat menjalin kesepakatan *Kerjasama Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah* yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Jawa Barat pada 31 Juli 2008. Beberapa program yang disepakati adalah: (1) Sektor perikanan, dengan mengembangkan budidaya udang Vaname di Cibalong, Pamengpeuk, Garut dan budidaya ikan air tawar di Cijengkol, Sukamandi, Subang; (2) Peningkatan ekonomi masyarakat di daerah terpencil, utamanya dalam menyalurkan bantuan seribu pohon enau

bagi lahan kritis serta pelatihan manajerial kewirausahaan, meningkatkan nilai tambah gula aren dan fosil kayu untuk menjadi benda seni; (3) Sektor peternakan, utamanya dalam memberikan pelatihan manajemen keuangan dalam mengelola peternakan dan terkait dengan program Sarjana Membangun Desa, selain itu juga meningkatkan budidaya ayam kampung di Sukabumi dan peternakan sapi perah di Kabupaten Bandung; (4) menggandeng perbankan dalam *expo* pembiayaan UMKM 2010 di Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Subang dan Bogor; (5) memfasilitasi sarasehan Pengembangan Potensi Wisata dan Budaya Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya; (6) dan meningkatkan kompetensi petugas KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank). Dalam pelaksanaan tentunya BI Bandung bekerjasama dengan stakeholders terkait.

Salah satu sektor yang tumbuh di Jawa Barat adalah ekonomi kreatif.

UMKM kerajinan, makanan, atau fashion yang menjadi ikon ekonomi lokal kota Bandung. Selain itu juga melakukan pembiayaan reformasi atau revitalisasi pasar tradisional kota Bandung. Produk atau program yang akan dilakukan perbankan adalah pembentukan *payment point* yang melibatkan kepala Rukun Warga (RW Net), serta pelaksanaan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan (Bank Indonesia, 2013a, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/, 17 Juni 2017).

Sejalan dengan program pembangunan kota Bandung tersebut, industri fashion di Kota Bandung semakin menunjukkan kiprahnya di pasaran terutama dengan menjamurnya *factory outlet* (FO), yang turut berkontribusi dalam menggerakan perekonomian. Hal itu terlihat dari struktur ekonomi Kota Bandung atas dasar harga berlaku periode 2008 – 2012 yang menunjukkan sektor perdagangan, hotel dan restauran menyumbang 40,8% dari keseluruhan. Ramainya perkembangan *trend* dan *fashion* juga mendorong warga Kota Bandung mencari inovasi baru supaya mampu bersaing dengan kompetitor, sehingga banyak bermunculan UMKM dari industri kreatif. Setidaknya ada 15 sektor industri kreatif yang secara umum tersebar di Kota Bandung, antara lain: (1) Periklanan, (2) Arsitektur, (3) Benda Seni, (4) Kerajinan, (5) Desain, (6) *Fashion*, (7) Video, Film dan Fotografi, (8) Permainan Interaktif, (9) Musik, (10) Seni Pertunjukan, (11) Penerbitan dan Percetakan, (12) Layanan Komputer dan Piranti Lunak, (13) Televisi dan Radio, (14) Riset dan Pengembangan, dan (15) Kuliner. Meskipun FO juga tumbuh di kota-kota besar lain, namun FO Bandung sudah menjadi *trademark* dan tak terpisahkan dalam daftar tujuan wisata kota ini. Antara FO bisa saling bersaing tidak hanya dalam hal keragaman produk fashion, namun juga terkait pelayanan, kreativitas dan inovasi pengelolanya. Kota Bandung menjadi ikon bagi produk tertentu, misalnya *jeans*, dengan toko yang tersebar di Jalan Cihampelas dan Jalan Tamim, beragam jenis dan pilihan desain bisa ditemukan disana (Kompas, 2004b).

Industri Kreatif membutuhkan pengelolaan bisnis yang baik, sebagaimana dikatakan Direktur Program Bandung Kreatif, Tb. Fikri Chikara Satari. Industri kreatif merupakan bisnis yang memiliki prospek pendapatan yang jelas. Untuk itu, ia mengharapkan para pelaku industri

kreatif harus memulai membuat *business plan* dan rencana *cash flow*-nya dengan jelas. Para pelaku bisnis industri kreatif juga harus belajar membuat proposal bisnis. (Pikiran Rakyat, 2009).

Bentuk dukungan lain dari para pemangku kebijakan publik untuk menarik para investor, salah satunya adalah melalui penyediaan data serta informasi kegiatan ekonomi di Kota Bandung. Gagasan tersebut disampaikan Pemimpin Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ibu Rosmaya Hadi, sewaktu mengadakan kegiatan *Bandung Open Data Summit and Challenge* (Boscha) pada 21 Febuari 2015. Boscha merupakan sebuah konferensi dan kompetisi pengembangan aplikasi *open source* yang merupakan bagian dari gerakan keterbukaan data di Bandung. Investor tentunya membutuhkan banyak informasi, mulai dari peluang proyek investasi, data dan analisis perkembangan ekonomi daerah, profil, sektor unggulan, informasi mekanisme tahapan investasi dan pelayanan satu atap, data perbankan dan data *market*. (Pikiran Rakyat, 2009). Disampaikan bahwa Bandung merupakan kota percontohan oleh BI Jawa Barat dalam menerapkan *open data* untuk pengembangan bisnis dan investasi, sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan ekonomi Kota Bandung yang bertumpu kepada industri kreatif dan perdagangan.

Promosi Kota Bandung sebagai kota kreatif juga terus dilakukan. Dalam satu kesempatan, Walikota Bandung Ridwan Kamil, saat menerima kunjungan 20 diplomat Uni Eropa mengajak agar negara-negara Eropa berinvestasi dalam sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dinilai cukup efektif untuk mengatasi pengangguran, oleh karena itu, pelaku UMKM perlu didukung untuk mengembangkan produknya. Khususnya terkait keunggulan Kota Bandung dalam mengembangkan ekonomi kreatif, seperti di bidang makanan dan *fashion*. Hal juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bandung sebagai kota cerdas (*smart city*) (Kompas, 2016).

Terkait dengan konsep Bandung *Smart City*, BI Bandung selalu terdepan dalam memberikan dukungan. Di tahun 2015, BI Bandung dan Pemerintah Kota Bandung serta didukung oleh Bank Mandiri, BNI, Bank Mega, BCA, BRI dan PT Telekomunikasi Indonesia melakukan kerja sama dalam mewujudkan Bandung *smart city* melalui *smart card* dalam rangka

elektronifikasi transaksi yaitu upaya perubahan pola pembayaran tunai menjadi non tunai. Bandung *smart card* ini juga sejalan dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Bank Indonesia. Dalam acara *soft launching* Bandung *smart card*, Ibu Rosmaya Hadi mengatakan bahwa salah satu kriteria agar Bandung menjadi *smart city* adalah mewujudkan *smart economy* yang ditunjukkan dengan efisiensi sistem pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik yang terintegrasi dengan sistem lain (*Smart Card*) seperti kartu identitas, perparkiran, *ticketing*, kartu akses dan sebagainya (Bank Indonesia, 2015, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/, 14 Desember 2015).

Gambar 6.3. g Bandung

Sumber: Website BLINK internal BI: "Bandung Smart Card : Satu Lagi Komitmen Bandung Juara", http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/

Di awal peluncuran Bandung smart card ini hanya sebagai alat pembayaran, namun di tahun 2016, Bandung *smart card* akan dikembangkan dengan injeksi data identitas, diimplementasikan menjadi kartu akses, kartu parkir elektronik di pinggir jalan (*on the street parking*)

dan tiket elektronik di Trans Metro Bandung (TMB) serta Bandros (*Bandung Tour on Bus*). Kualitas hidup masyarakat kota Bandung akan semakin meningkat dengan berbagai kemudahan dan efisiensi kegiatan, akses dan transaksi ekonomi.

Gambar 6.4. Ujicoba Parkir Elektronik

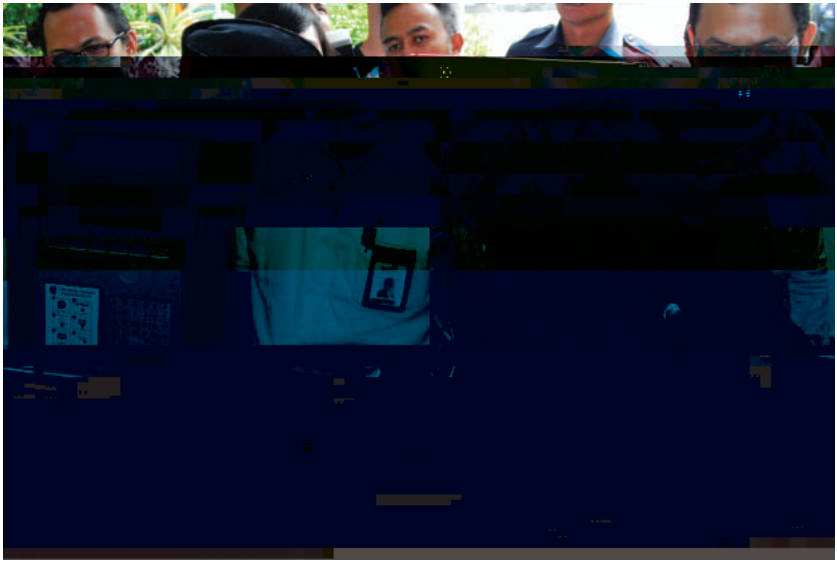

Sumber: Website BLINK internal BI: "Bandung Smart Card : Satu Lagi Komitmen Bandung Juara", http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/

Bank Indonesia Mengawal Stabilitas Keuangan dan Inflasi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dekade 1980-an telah meningkatkan potensi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan, namun kebijakan di bidang perbankan belum banyak mendorong penghimpunan dana masyarakat khususnya kelompok bank pemerintah. Hingga pada pertengahan tahun 1980an, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan deregulasi yang dilakukan secara bertahap. Kebijakan deregulasi 1 Juni 1983 terkait kebebasan bank untuk

menentukan suku bunganya sendiri, adapun kebijakan deregulasi aspek kelembagaan terkait kemudahan perijinan dalam pendirian bank yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 1988 atau dikenal dengan Pakto 27 / Pakto 88.

Sejak terbitnya Pakto 88, terlihat adanya pertumbuhan perbankan yang cukup signifikan baik pendirian bank baru maupun perluasan jaringan kantor bank. Di wilayah kerja BI Bandung sendiri telah berhasil melahirkan 1 (satu) bank umum baru yang merupakan peningkatan status dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada tahun 1990 sampai 1992 telah terjadi peningkatan jumlah seluruh perbankan sebanyak 61 bank di wilayah kerja BI Bandung seperti pada tabel dibawah.

Tabel 6.4.
Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kantor Bank, di Wilayah Kerja Bank Indonesia Bandung

Dati II	1990 / 1991					1991 / 1992				
	Penduduk (1)	Bank Umum (2)	Seluruh Bank (3)	Rasio		Penduduk (1)	Bank Umum (2)	Seluruh Bank (3)	Rasio	
				1:2	1:3				1:2	1:3
1. Kodya Bandung	1.810.917	211	223	8.583	8.121	1.829.026	236	248	7.750	7.375
2. Kab. Bandung	2.971.905	65	102	45.722	29.136	3.179.938	65	117	48.922	27.179
3. Kodya Sukabumi	119.940	36	37	3.332	3.242	130.734	39	40	3.352	3.268
4. Kab. Sukabumi	1.771.365	14	31	126.526	57.141	1.800.969	16	33	112.561	54.575
5. Kab. Cianjur	1.662.067	37	38	44.921	43.739	1.664.638	44	49	37.833	33.972
6. Kab. Garut	1.675.123	40	55	41.878	30.457	1.720.486	40	55	43.012	31.282
7. Kab. Sumedang	1.206.758	45	59	26.817	20.454	1.208.732	47	63	25.718	19.186
8. Kab. Subang	832.729	32	47	26.023	17.718	836.371	32	47	26.137	17.795
9. Kab. Purwakarta	563.467	17	22	33.145	25.612	568.452	18	23	31.581	24.715
Jumlah	**12.614.271**	**497**	**614**	**356.945**	**235.618**	**12.939.346**	**537**	**675**	**336.865**	**219.348**

Sumber : Arsip Bank Indonesia, 1992

Meningkatnya jumlah perbankan diharapkan akan meningkatkan stimulus pembiayaan kredit yang akan menggerakkan roda perekonomian daerah. Perkembangan kredit bank umum di wilayah kerja BI Bandung terlihat mengalami peningkatan dalam laporan BI per Maret 1989 hingga 1992. Sebagian besar kredit tersebar pada sektor industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Daerah Pemkot Bandung pada tahun tersebut

menyerap kredit paling besar, yakni 90% dari seluruh wilayah kerja BI Bandung. Tidak dipungkiri hal ini dipengaruhi oleh pesatnya kegiatan ekonomi daerah, ditambah dengan fasilitas kota yang sudah memadai. Hal ini sesuai dengan prinsip *banks follow the business* dan belum mengarah kepada *banks create the business* (Peneliti Bank Indonesia, 1996).

Tabel 6.5.
Perkembangan Kredit Bank Umum di Wilayah Kerja BI Bandung (dalam jutaan rupiah)

Wilayah Kerja BI	Maret 1989	Maret 1990	Maret 1991	Maret 1992
1. Kotamadya Bandung	2.577.664	3.846.257	5.178.922	5.710.254
2. Kab. Bandung	59.285	97.141	145.443	156.128
3. Kab/Kodya Sukabumi	74.024	115.850	154.187	160.222
4. Kab. Cianjur	44.669	64.386	93.665	99.958
5. Kab. Garut	39.824	53.261	50.604	57.998
6. Kab. Sumedang	27.290	42.259	47.802	51.303
7. Kab. Subang	50.318	74.831	85.895	83.558
8. Kabupaten Purwakarta	21.742	27.281	32.234	45.312
Jumlah	**2.894.816**	**4.321.266**	**5.788.752**	**6.364.734**

Sumber: Peneliti Bank Indonesia, Tahun 1996

Dalam laporan Pimpinan Bank Indonesia Bandung, Djoko Sarwono, pada Febuari 2003 mengatakan bahwa delapan bank umum yang berkantor pusat di Bandung mengalami peningkatan kinerja. Hal tersebut terlihat dari kenaikan total aset sebesar 6,2%, dana pihak ketiga (DPK) sebesar 3,8%, kredit sebesar 9,4%, dan *loan to deposit ratio* (LDR) menjadi 73,2%, dibandingkan 2002. Pada periode yang sama, total aset meningkat dari Rp116 triliun menjadi Rp117 triliun, dan penyaluran kredit oleh bank-bank umum di Jawa Barat meningkat dari Rp28,9 triliun menjadi Rp31 triliun. Peningkatan ini diindikasikan antara lain oleh rencana penambahan jaringan dan pembukaan kantor bank syariah oleh beberapa bank. Indikasi lain yaitu hasil dari terobosan BI dan instansi terkait dengan menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sehingga mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil menengah (Pikiran Rakyat, 2003).

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, yang bermakna stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah. Untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan, diperlukan bauran kebijakan yang komprehensif dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta kebijakan sektoral, baik di pusat maupun daerah. Menyadari hal itu, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPI) sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2008 diperluas hingga ke level daerah melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang beranggotakan KPw BI, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah, serta instansi terkait lainnya. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pengendalian inflasi daerah memegang peranan penting untuk mencapai inflasi nasional yang rendah dan stabil (Diah, dkk., 2015: 35-36).

Sehubungan dengan hal tersebut, pengendalian inflasi memerlukan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah. Di tingkat pusat koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diperkuat dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi (TPI) pada tahun 2005. Di tingkat daerah koordinasi tersebut diwadahi dengan pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada tahun 2008 di sejumlah daerah (Tim Pelaksana Kelompok Kerja Nasional TPID, 2014: 1).

Salah satu perangkat pengendalian inflasi yang dimiliki BI Bandung adalah Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Jawa Barat. Forum ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat, dengan tugas rutin melakukan pemantauan, evaluasi serta pengendalian terhadap sumber-sumber serta potensi tekanan inflasi di Jawa Barat. Hasil pemantauan akan diinformasikan kepada masyarakat melalui media massa untuk mengarahkan ekspektasi inflasi kepada masyarakat umum. Sampai tahun 2010, FKPI Jawa Barat telah memilki level dibawahnya yaitu Forum Pengendali Inflasi (FPI) Kota Cirebon, FKPI Kota Tasikmalaya, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten (Bank Indonesia, Nota Penyerahan Pimpinan Bank Indonesia Bandung, 2010).

Salah satu keterlibatan FKPI Jawa Barat dalam meredam kenaikan harga bahan pokok (beras dan gula pasir) adalah sebagaimana terjadi

di awal tahun 2010. FKPI Jawa Barat menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri beberapa pejabat dari instansi terkait, antara lain dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Bulog Drive III Jawa Barat, dan Bank Indonesia Bandung. Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut adalah: (1) Sekda mengajukan permohonan Operasi Pasar (OP) kabupaten/kota kepada Menteri Perdagangan, serta secara intensif akan mengawasi kesiapan kabupaten/kota terkait proses administrasi distribusi beras miskin (raskin) agar cepat direalisasikan; (2) FKPI Jawa Barat bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat akan mengamankan distribusi raskin; (3) Mempercepat penunjukan tender distributor gula pasir impor; (4) FKPI Jawa Barat memandang perlu untuk mewacanakan terkait revitalisasi Bulog sebagai lembaga dan berwenang dalam hal stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Dampak dari pelaksanaan rekomendasi FKPI Jawa Barat terlihat pada penurunan inflasi untuk kelompok bahan makanan, dengan besaran 5,1% (yoy) pada Januari 2010, menjadi 3,4% pada akhir triwulan 1 tahun 2010. Hal yang sama juga terjadi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, yang turun dari 7,5% (yoy) menjadi 6,5%.

Pada tahun 2012, upaya pengendalian inflasi memiliki tantangan yang berat akibat dari ketidakpastian pemulihan ekonomi global yang menyebabkan harga komoditas berfluktuatif. Sementara dari sisi domestik yaitu kebijakan pemerintah yang membatasi konsumsi BBM bersubsidi serta kenaikan tarif dasar listrik yang dapat meningkatkan rasio inflasi. Masalah lain adalah perubahan cuaca ekstrim yang mengakibatkan penurunan produksi bahan pangan. Untuk menghadapi tekanan inflasi tersebut FKPI Jawa Barat merumuskan strategi baru yaitu lima langkah pengendalian inflasi dan satu strategi untk membentuk ekspektasi inflasi di masyarakat (5+1 strategi pengendalian inflasi) atau yang disebut Paket Kebijakan 5 Plus 1 (Bank Indonesia, 2012, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/, 17 Juni 2017). Penjabaran Paket Kebijakan 5 Plus 1 adalah sebagai berikut:

1. **Menjaga Target Produksi Potensi Lokal** melalui pembentukan 1000 orang penyuluh pertanian, memberikan bantuan 750 traktor

dan alat pertanian lainnya, serta penerapan inseminasi buatan yang lebih intensif dan integrasi pemeliharaan ternak ruminansia di lahan perkebunan dan kehutanan.

2. **Antisipasi Penyediaan Pangan** dengan menambah cadangan pangan Pemprov sebesar 300 ton beras, melaksanakan Pola Kemitraan antara Pemprov – Perusahaan – Mitra Bulog – Bulog – Perbankan untuk pembiayaan kepada petani dalam rangka meningkatkan cadangan beras Bulog, serta mendorong pelaksanaan resi gudang di Cianjur, Subang dan Indramayu oleh pemerintah kabupaten/kota.
3. **Antisipasi Penanganan Distribusi** melalui pengadaan mobil angkutan daging ayam yang dilengkapi dengan mesin pendingin dan optimalisasi penggunaan Rumah Potong Unggas (RPU) di Jawa Barat yang saat ini sebanyak 12 unit.
4. **Antisipasi Ketidakpastian Harga Pangan** dengan cara penyaluran 2 bulan Raskin (84.000 ton beras) kepada 2,8 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Pada tanggal 20 Januari 2012, melakukan OP-mobile (truk keliling) untuk mempengaruhi ekspektasi pedagang bahwa ketersediaan beras di Bulog masih mencukupi, serta mengalokasikan dana APBD sebesar Rp10 miliar untuk pelaksanaan OP-Murah.
5. **Antisipasi kenaikan TDL & Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi** dengan mengoptimalkan produksi dan penggunaan biogas serta mengoptimalkan kebijakan "Kuningisasi", yakni perubahan plat nomor kendaraan angkutan barang milik UMKM dari hitam menjadi kuning.
6. **Sosialisasi Kepada Masyarakat** sebagai edukasi agar lebih rasional sehingga ketika harga bahan pangan mahal dapat merubah konsumsi ke produk substitusinya, mengingat besarnya dampak permintaan (*demand*) dalam menentukan harga.

Mengingat pentingnya Kota Bandung dalam perhitungan inflasi secara nasional maupun Jawa Barat, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk FKPI Kota Bandung yang dikukuhkan pada hari Rabu, 27 Maret 2013 di Halaman Pasar Kosambi Bandung. dengan dikukuhkannya

FKPI Kota Bandung maka telah lengkap terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di 7 kota perhitungan inflasi (Bandung, Bekasi, Depok,

dilakukan kunjungan pasar oleh anggota FKPI Kota Bandung yang baru dibentuk (Bank Indonesia, 2013b, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita, 19 Juni 2017).

Gambar 6.6. Kunjungan Pasar Kosambi Bandung oleh Walikota Bandung dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Sumber : Website BLINK internal BI: "Pengukuhan FKPI Kota Bandung:"Bengkung ngariung bongkok ngaronyok", http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/

Pada tahun 2013 FKPI Jawa Barat bersama dengan TPID Sumatera Utara dan TPID Nusa Tenggara Timur terpilih menjadi salah satu TPID terbaik ditingkat nasional dari 33 TPID Provinsi se Indonesia. Sejak terbentuknya FKPI Jawa Barat tahun 2008, laju inflasi Jawa Barat selalu lebih rendah dibanding laju inflasi nasional. Pada April 2013, inflasi Jawa Barat mencapai 5,52% lebih rendah dari nasional sebesar 5,57%. Rahasia keberhasilan kinerja tim ini adalah: (1) sinergitas dinas/instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta BI yang berperan aktif melakukan upaya pengendalian inflasi; (2) telah terbentuk FKPI/TPID diseluruh kota

pembentuk inflasi (Bandung, Bekasi Depok, Bogor, Cirebon, Sukabumi dan Tasikmalaya) serta upaya aktif dari seluruh pemkab/kota yang ada di Jawa Barat; (3) terlaksananya program-program pengendalian inflasi yang telah dicanangkan oleh FKPI Jawa Barat (2011: 10 Langkah Strategis Pengendalian Inflasi, 2012: Paket Kebijakan Pengendalian Inflasi 5 Plus 1, 2013: Paket Kebijakan Pengendalian Inflasi 3 Plus 1) (Bank Indonesia, 2013c, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/, 17 Juni 2017).

Gambar 6.7. FKPI Jawa Barat Juara Dalam Pengendalian Inflasi di Tingkat Nasional Tahun 2013

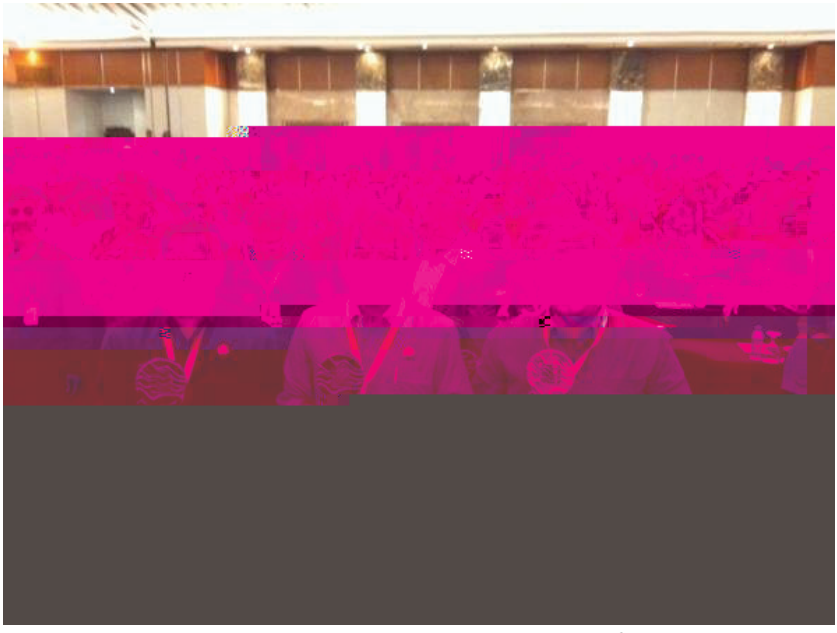

Sumber: Website BLINK internal BI: "FKPI Jabar Sabet Juara Pengendalian Inflasi", http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/

Dalam perkembangannya, FKPI Kota Bandung tahun 2016 mulai menjalankan pendekatan yang lebih fokus terhadap permasalahan inflasi melalui program PROPER KAHIJI UTAMA yaitu: 1) Peningkatan produksi

komoditas penyumbang inflasi; 2) Antisipasi lonjakan permintaan menjelang *peak season*; 3) Revitalisasi pasar; 4) Penyusunan kajian pendukung pengendalian inflasi dan peningkatan kompetensi sumber daya pendukung; 5) Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung (irigasi, perbaikan jalan, jembatan), serta penguatan logistik bahan pangan strategis. 6) Peningkatan jaringan konektivitas, koordinasi dan kerjasama. Dengan serangkaian langkah-langkah tersebut diharapkan pengendalian inflasi Kota Bandung akan selalu terjaga.

BAB 7
HERITAGE KANTOR EKS-DE JAVASCHE BANK BANDUNG

Kemapanan sebuah kota bisa dibuktikan dengan lestarinya ***heritage*** di kota tersebut. Gambaran Kota Bandung yang pada masa kolonial menjadi primadona bagi bangsa Barat, sampai sekarang masih bisa disaksikan kemolekannya dari jejak peninggalan bangunan-bangunan lama bergaya Eropa. Deretan bangunan yang telah menjadi saksi Bandung sebagai ***Paris van Java*** itu kebanyakan terpusat di sekitar Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika (dahulu ***Groote Postweg***/Jalan Raya Pos). Bangunan-bangunan apik tersebut pada masanya berfungsi untuk urusan perdagangan, perbankan dan pemerintahan. Maka perancangan serta arsiteknya pun jauh-jauh didatangkan dari negeri Belanda. Nama arsitek terkenal seperti Cuypers menjadi langganan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun gedung-gedung penting. Salah satu bangunan monumental garapan Cuypers di Kota Bandung adalah gedung De Javasche Bank (DJB) yang proses pembangunannya dimulai dari tahun 1914 hingga 1918.

Bab ini menjelaskan sejarah Bandung dari sudut arsitekturalnya. Gedung-gedung lawas dan megah yang berdiri di Kota Bandung juga bisa bercerita mengenai masa keemasan kota ini. Sub bab pertama membahas mengenai tata letak bangunan bergaya Eropa di Kota Bandung yang

umumnya berlokasi di sekitar Braga. Di jalan ini pula berdiri gedung DJB yang sekarang menjadi Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, sub bab kedua dan ketiga membahas proses pendirian gedung DJB serta gaya arsitektur bangunan tersebut. Satu hal menarik dari gedung ini adalah gayanya yang mengikuti aliran neoklasik dengan ornamen-ornamen berseni tinggi, sementara pada masa itu perkembangan dunia arsitektur sudah lebih banyak menggunakan gaya yang lebih sederhana. Sub bab terakhir menjelaskan upaya pelestarian gedung-gedung tersebut sebagai bagian dari cagar budaya. Hal itu penting dilakukan guna pembangunan Kota Bandung sebagai *Smart City* juga bisa menumbuhkan rasa memiliki dan mendidik masyarakatnya mengenai masa lalu kota ini.

Foto di bawah memperlihatkan letak gedung De Javasche Bank di ujung utara Jl. Braga. Tampak di bagian kiri bawah foto, terlihat taman Pieter Stijthoffpark (Pieterspark), sekarang Taman Merdeka, yang sebagian terhalang pepohonan dan menyatu dengan hijaunya taman. Hotel Homann tampak jelas di ujung selatan Jalan Braga, berlapis memanjang dari timur ke barat, di tepi jalan raya pos, sekarang jalan Asia-Afrika. Tampak jelas pula Gereja Protestan Bethel (1920an) di tengah-bawah, dan gereja Katolik Petrus/Saint Pieter (1922) di sebelah kiri-bawah, menaranya tampak putih muncul dari hijaunya pepohonan di Peterspark, kini Taman Dewi Sartika.

Gambar 7.1. Kota Bandung Masa Kolonial (Tampak Atas)

Foto udara tahun 1946 memberikan pandangan ke arah tenggara sebagian pusat Kota Bandung dan Bandung Selatan. Sebelah kanan di bagian depan adalah viaduk kereta api yang dibangun tak lama setelah perang, di atas sungai Cikapundung. Di belakang adalah bangunan bersejarah, alun-alun, dan kantor-kantor besar sepanjang Asia Afrika. Tepat di tengah-tengah di ujung Jalan Braga tampak Hotel Homann; di kiri bawah tampak di sebelah depan gereja protestan Bethel, Bank Indonesia, dan Gereja Katolik Petrus. Paling kiri atas dapat kita kenali Jalan Buah Batu meskipun agak sulit; jalan ini pada bulan Maret 1942 adalah lapangan udara pembantu "rahasia". Kanan atas terletak lapangan pacuan kuda Tegallega.

Sumber: Voskuil 1996: 202 Foto R.E van Wijngaarden, KITLV

De Javasche Bank yang berlokasi dekat dengan Kantor Balai Kota di ujung utara Jalan Braga menjadi bagian dari kawasan pemerintahan kota (*civic centre*), sementara di ujung selatan Jalan Braga merupakan pusat kegiatan ekonomi-perdagangan, pertokoan dan perkantoran. Sepanjang Jalan Braga pun terdapat aneka kegiatan sosial-ekonomi, seperti butik, restoran, kafe, bank, bioskop, pertokoan yang dikenal oleh warga negara-negara Eropa pada masa kolonial. Hendrik F. Wieland (1997:26) melaporkan dalam bukunya sejumlah tempat kegiatan, sebagai berikut:

> Hellerman Department Store, toko pertama di ***Bragaweg***, didirikan th. 1894.
>
> C.M. Luycks, importir mobil, 1898.

Escompto Bank, 1902.

Concurrent Jewellery, 1908.

Au Bon Marche, busana/butik/fesyen yang berorientasi ke Paris, 1913

- **De Javasche Bank,** 1918

  N.V. Fuchs en Rens, usaha perakitan mobiol Mercedes (sekarang Perusahaan Gas Negara), 1919.

  Insulinde, kantor Palm Oil Manufacture, 1920.

  Societeit Concordia, sekarang Gedung Merdeka, 1921

  Maison Bogerijen, 1923.

  Shop Houses Käller, Tukang Jahit/*tailor* berorientasi Amsterdam, 1923.

  Van Dorp, penerbit & toko buku, 1929.

  Societeit Ons Genoegen, 1931.

  De Eerste Nederlands-Indische Spaarbank (DENIS), 1936.

  Onderling Belang, pernah dipakai Dept. Store *SARINAH*, 1937.

Gambar 7.2. Perkembangan Jalan Braga Bandung tahun 1910 (kiri) dan 1920 (kanan)

Sumber: KITLV

Gambar 7.3. Gedung tahun 1920

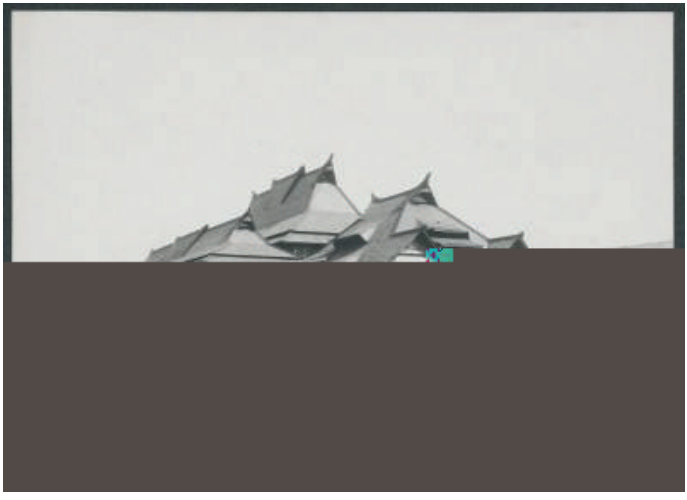

Sumber: KITLV

Gambar 7.4. Gedung Sate

Ex-De Javasche Bank

Seperti dibahas pada bab sebelumnya, keberadaan DJB Bandung menurut Dawam Rahardjo dalam bukunya *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa* (1995), cabang DJB Bandung didirikan sebagai bagian dari upaya penyelamatan aset kekayaannya dari kemungkinan penyerbuan Inggris sejak pecahnya Perang Boer di Afrika Selatan.

Oleh karena bukan dengan pertimbangan keuntungan, direksi DJB mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda agar bisa mendapatkan hibah sebidang tanah sebagai hak milik untuk lokasi pembangunan gedung bank. Tahun 1906 keluar surat Gubernur Jendral yang berisi penyerahan sebidang tanah dengan luas 10.460 m persegi di desa Kejaksan Girang tanpa penggantian biaya dengan syarat di tempat tersebut digunakan khusus untuk gedung kantor. Lokasi lahan ini berada di Residentie Preanger Regentschapen, Bestuur Afdeling en Hoofdplaats Bandoeng, Disctrict Oedjoeng Beroeng.

Gambar 7.5. Gedung lama De Javasche Bank Bandung yang berlokasi di Ujungberung sekitar tahun 1909

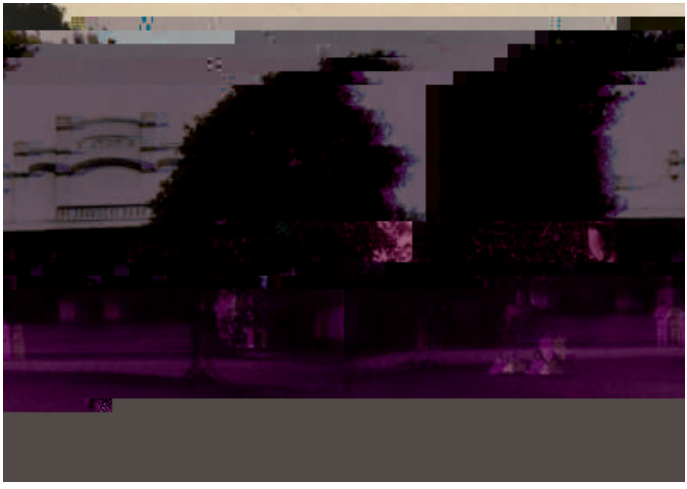

Sumber: KITLV

Rencana pendirian DJB cabang Bandung dilanjutkan oleh presiden ke-11, G. Vissering (1906-1912). Pada tanggal 30 Juni 1909 kantor cabang telah dibuka dengan pimpinan sementara dipegang oleh A.M. Meertens yang sebelumnya pemegang buku dan pemimpin cabang kantor Yogyakarta dan Solo. Dari laporan perjalanan Direktur DJB, E.A. Zeilinga Azn, dapat diketahui bahwa cabang Bandung ini menempati persil sewaan Firma van Arcken & Co. yang terletak di Bragaweg, suatu pusat kegiatan perdagangan. Gedung kantor permanen mulai dibangun pada tahun 1915 dan selesai pada tanggal 5 Mei 1918.

Gambar 7.6. Gedung De Javasche Bank Bandung baru di Jalan Braga yang diresmikan tahun 1918. Foto diambil sekitar tahun 1920

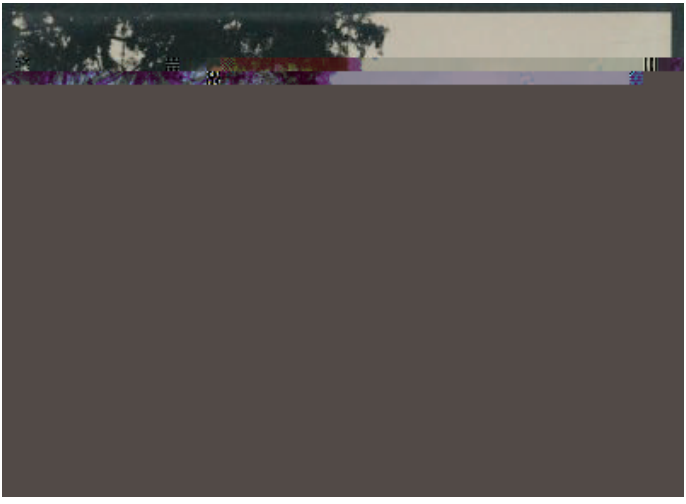

Sumber: KITLV

Pada masa presiden De Javasche Bank ke-14 (1929-1941) di bawah Dr. G.G. van Buttinga Wichers, dirancang sebuah khazanah di samping khazanah yang sudah ada dan disebut sebagai "khazanah perang".[4] Pembangunan khazanah ini berbarengan dengan renovasi rumah dinas pemimpin cabang dan seluruhnya dapat diselesaikan pada 5 Mei 1938. Sebuah prasasti peresmian masih menempel pada dinding khazanah, tertanggal 19 Maret 1939 dan menyebut nama putra Buttingha Wichers yang masih berusia 7 tahun, yaitu Gerard Gilles van Buttingha Wichers.

Pembukaan kantor cabang DJB Bandung di Jalan Braga dipandang tepat, karena berada di ujung utara jalan Braga yang merupakan sumbu penghubung antara pusat perdagangan dan perkantoran dengan ruang-ruang kota terbuka di bagian utara. Dengan berdirinya gedung DJB, maka pusat Kota Bandung pun terdefinisikan dengan sempurna. Dapat

4 Penjelasan mengenai 'khazanah perang' dapat dilihat di bab III.

terlihat bagaimana semaraknya Jalan Braga sebagai pusat kegiatan sosial dan perdagangan yang semakin lengkap dengan kehadiran DJB, yang merupakan pembatas aktivitas ekonomi sehingga tidak melampaui areal kegiatan komersial ke arah utara. Pusat kota selalu memiliki besaran optimum, yang kalau dilampaui akan justru melemahkannya. Dapat diamati pula bahwa sesudah berdirinya DJB, pembangunan di sekitar pusat kota tidak lagi berada pada seputaran areal komersial, tetapi mulai bertumbuh bangunan-bangunan non-komersial di sekitarnya. Ada gereja St Peter (1922) dan gereja Bethel (1925), rancangan C.P. Wolff Schumacher; gedung *Hoogere Burgerschool* (*HBS*), Santa Ursula (1922), rancangan Hulswit, Fermont, Cuypers, Dikstall (1922); gedung Sekolah Guru untuk Bumiputera, *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijs*; pemerintahan/Balai Kota (1935), rancangan E.H. de Roo. Kumpulan bangunan non-komersial itu telah menjadikan kawasan itu lebih sebagai kawasan pemerintahan (*civic center*).

Gambar 7.7. Jalan Grote Postweg. Nampak pula Societiet Concordia dan jalan Braga

Sumber: Mooi Bandoeng

Gambar 7.8. Denah Letak Gedung

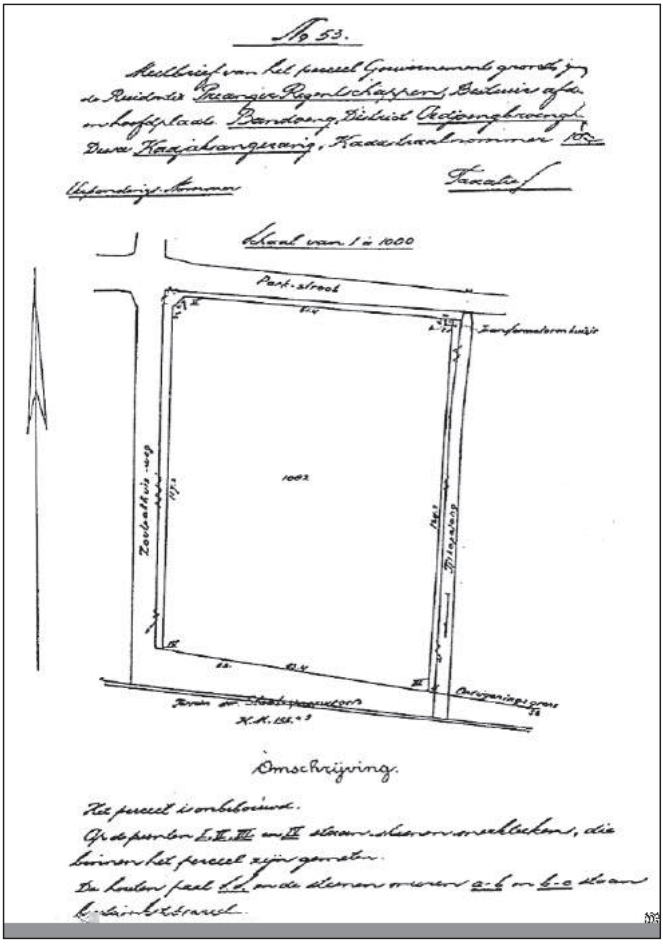

Sumber: *Preserving an Architectural Heritage*

Gambar 7.9. Denah Gedung Bandung

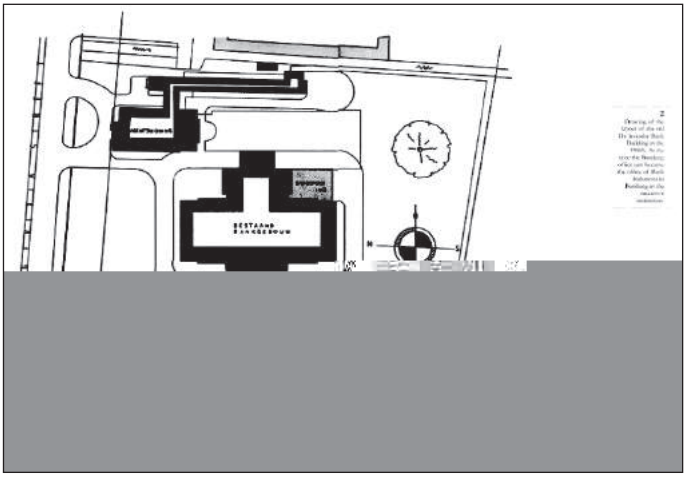

Sumber: *Preserving an Architectural Heritage*

Sosok bangunan DJB merupakan ungkapan bentuk ekspresi yang saat itu terjadi di Eropa. Namun, bangunannya tidak mencerminkan adanya gerakan pembaharuan yang menggebu-gebu di Eropa karena adanya tenggang waktu (*time lag*) perambatan budaya, antara jarak sumber (Eropa) dengan kondisi yang di Hindia Belanda. Terlepas dari hal tersebut, menarik untuk ditelaah lebih lanjut tentang gaya arsitektur gedung DJB Bandung yang berlokasi di Jalan Braga.

Percaturan gaya arsitektur pada penggantian milenium merupakan ajang diskusi dan perdebatan seru. Perkembangan liberalisme di Eropa telah membuka kesempatan bagi individu-individu kreatif mengungkapkan berbagai gagasan melalui berbagai bentuk kegiatan kesenian, dari sastra, suara/musik, hingga senirupa visual dan keruangan

bendawi, seperti seni pahat/*sculpture* dan arsitektur termasuk gabungan dari semuanya. Semenjak kurun romania/*romanesque* abad XI-XII di Eropa, arsitektur tak pernah lepas dari kegiatan kesenian lainnya, apalagi bidang kesenirupaan, yaitu kegiatan yang melibatkan segi-segi *visual* dan *material.* Perkembangannya hingga masa *baroque*, akhir abad XVI-awal XVII, keragaman tafsir dunia klasik (Greko-Roman) yang bercampur dengan budaya tradisi lokal, merambah ke seluruh kantong-kantong budaya di Eropa. Beberapa lebih dominan dari yang lain berkat kekuatan dan pengaruh politik suatu negara atas negara lainnya. Keragaman itu tercipta oleh keragaman lokal. Hasilnya adalah suatu bentuk *regionalisme-kritis* (sekalipun istilah/*suffix* 'kritis' sebenarnya merupakan tanggapan yang muncul pada masa globalisasi pasca modernisme, yang sering disebut juga sebagai *Modernisme II*, atau *Aufklärung II*).

Dari sudut lain, kaum modernis memandangnya sekadar sebagai ragam-hias/*ornamen* yang justru mengganggu kemurnian fungsi, struktur dan bentuk arsitektur. Seperti diketahui, kata kunci modernisme adalah efisiensi. Dalam peradaban yang mengandalkan mesin, tuntutan akan kemurnian/*purisme* ini pun tidak berdiri sendiri: dia muncul bersamaan dengan transformasi-kultural, *—teritorial*, dan *—teknikal*, yang fokus perhatiannya adalah industrialisasi. Perdebatan mengenai berbagai fenomena aliran atau mazhab arsitektur di Eropa juga merambah hingga ke Hindia Belanda. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari tokoh-tokoh arsitek yang berpraktik di Hindia Belanda dan menyesuaikan gayanya dengan kondisi setempat.

Handinoto (1996) mencatat bahwa adaptasi pertama pada arsitektur kolonial di Hindia Belanda adalah penyesuaian iklim. Seperti misalnya biro arsitek Fermont-Cuypers cabang Batavia yang telah menyikapi kondisi tersebut dengan jujur dan konsisten. Salah satu pertimbangannya, untuk bentang bangunan setebal lebih dari 15m di kawasan tropis, diperlukan sumber cahaya dan penghawaan tambahan, apalagi untuk gedung perkantoran yang banyak menampung kegiatan tulis-menulis, seperti halnya dengan bank. Itulah sebabnya maka dibuat menara/*cupola* di tengah-tengahnya, sekaligus menandai pertemuan dua garis sumbu bangunan simetri sebagaimana rumusan gubahan bentuk *arsitektur klasik* atau juga *neo-klasik*. Rumusan yang diturunkan dari penampilan Kuil

Parthenon di Yunani Klasik ini (karya Phidias, abad V BCE), yang menandai titik kedudukan terbaik (paling benar) wajah suatu bangunan adalah pada sumbu, titik tempat kemandirian *ego* ketika memperhatikan suatu karya, telah menjadi rumusan yang abadi.

Wawasan seorang arsitek, melalui perjumpaan dengan kliennya, akan merumuskan gaya yang akan diterapkan. Namun, di atas semuanya itu, tren pada suatu masa, jiwa zaman/*zeitgeist*, adakalanya merupakan kekuatan tersendiri. Apalagi jika jiwa zaman itu telah mempolakan bahasa simbol/*ikonik* yang kuat dan kokoh. Dalam keadaan semacam itu, wawasan arsitek menjadi satu-satunya modal untuk mengawali terciptanya 'bahasa arsitektur' yang baru. Para arsitek muda Belanda lulusan pendidikan Eropa, yang datang dan berkiprah di Hindia Belanda—seperti dapat disaksikan—telah memperkaya khasanah bentuk arsitektur kolonial di Bandung. Bandung sempat dikatakan orang (Helen Jessup, yang mengangkat MacLaine Pont sebagai tajuk penelitian magisternya) sebagai laboratorium *art deco* terkaya di dunia. Gaya bahasa arsitektur seorang Wolff Schoemacher berbeda dengan Albers, lain lagi halnya dengan McLaine Pont, atau seorang insinyur seperti Gerber. Kota Surabaya juga memiliki koleksi bangunan-bangunan kolonial yang istimewa. Dengan gaya arsitektur yang lebih radikal, menanggapi iklim tropis secara lebih berani dan imajinatif. Lihatlah karya-kayra C. Citroen, atau Lemei di Surabaya.[5]

Berbeda dengan perkembangan gaya yang sedang berkembang di masa itu, pembangunan gedung DJB Bandung dimaksudkan memiliki gaya arsitektur yang berbeda. Bisa dilihat dari pemilihan aliran neoklasik yang dibawa oleh Cuypers sebagai arsitek yang terpengaruh gaya tersebut. Sang arsitek, Cuypers dengan pengalamannya yang luas merupakan pengagum neogotik, pengikut mazhab Amsterdam yang taat. Selama 1910-1929 ia telah ditunjuk untuk merancang 14 gedung DJB, termasuk di Bandung. Semua bangunan-bangunannya, dengan setia mengikuti pola-pola klasik, peninggalan *rennaisance*, dengan berbagai tafsir lokalnya.

5 Untuk mengetahui lebih lanjut sepak terjang para arsitek muda Belanda di Hindia, lihat Sumalyo, 1995.

Seperti terlihat pada wajah depan bangunan yang menjulang, gaya imperium dengan pilar-pilar greko-roman yang memaksakan kehendak/ *imposing*, Cuypers masih konsisten berpegang teguh pada prinsip-prinsip *neoklasik.* Dilihat dari kacamata Nusantara, secara kontekstual, pilihan Cuypers bersifat ahistoris, seperti kritik para arsitek muda pembaharu di Hindia Belanda, seperti H.P. Berlage, McLaine Pont, bahkan juga Thomas Karsten.

Gambar 7.10. Rancangan tampak depan (menghadap ke Barat)

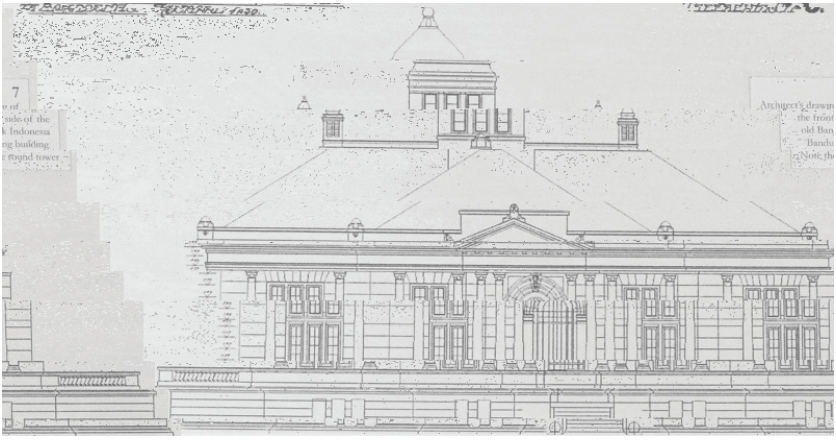

Sumber: Preserving an Architetuctural Heritage

Gambar 7.11. Denah Bandung tanggal 27 July 1943 (dirancang oleh biro Fermont-Cuypers di Jakarta)

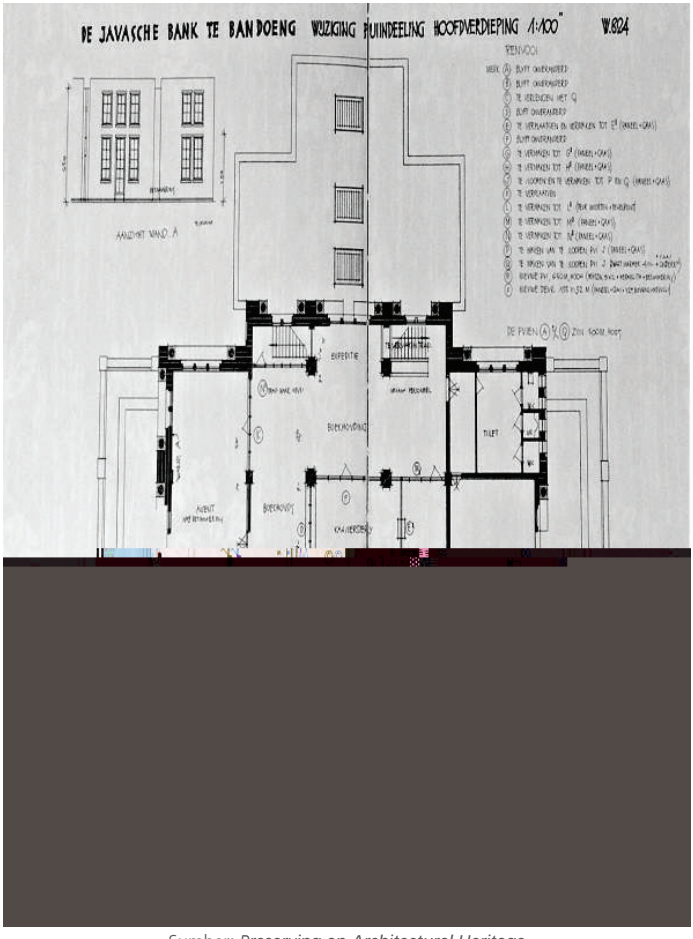

Sumber: *Preserving an Architectural Heritage*

Gambar 7.12. Kantor di Bandung tahun 1915

Sumber: KITLV

(Dapat dikatakan sebagai pembangunan tahap pertama; lantai dasar untuk pengembangan di sebelah kanan-kirinya di kelak kemudian hari telah disiapkan).

Gambar 7.13. Kantor di Bandung tahun 2017

Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2017

Gambar 7.14. Kantor di Bandung tahun 2017 (tampak depan)

Gambar 7.16. Gedung tahun 1930-an

Sumber: *Preserving an Architetuctural Heritage*

Gambar 7.17. Gedung tahun 1980-an

Sumber: *Preserving an Architetuctural Heritage*

Telah mengalami perluasan pada awal tahun 1950-an ke sebelah kiri dan kanannya hingga tampilan simetrisnya tetap dipertahankan.

Dunia perbankan adalah suatu lembaga/institusi yang dibangun atas dasar kepercayaan/***trust.*** Pilihan Cuypers pada bentuk simetris, merupakan pilihan yang dipandang mampu membangun kepercayaan

publik. Wujud formal turut membangun wibawa, perbawa keterandalan dan menampilkan sikap anggun. Sebagaimana deretan pilar/*colonnade* Parthenon, pilar pada bangunan-bangunan bergaya neoklasik pun mengharapkan kesan formalitas yang sama. Begitu pula gaya *imperial* seperti diperkenalkan Daendels di Istana Bogor, bahkan lebih dari sekadar tampilan kekuatan, yakni kekuasaan. Sesungguhnya, kolom *greko-roman* yang berdiri di kiri-kanan bukan jendela DJB itu tidak lagi murni sebagai kolom pendukung, melainkan lebih merupakan unsur pembentuk rima/irama visual, di samping sebagai penentu skala, melalui efek terang gelap yang sangat kuat di daerah tropis. Skala, tolok pembanding dengan tubuh manusia, dan proporsi, perbandingan di antara unsur-unsur bangunan, merupakan batu kunci arsitektur. Kolom menunjukkan tinggi ruangan, yang menjadi besaran penting di daerah tropis. Pola deretan kolom seperti ini, dengan berbagai ragam bentuk, dari gaya arsitektur Mughal di India (seperti yang kemudian muncul di Gedung Sate), hingga ke lorong-lorong candi di Angkor, semuanya mencerminkan penghayatan akan derap langkah irama ini.

Rajah pada dinding, berupa torehan garis-garis horisontal, mengesankan susunan batu-batu seperti dinding benteng yang kokoh. Pola semacam itu banyak dibuat di Eropa selepas *rennaisance*. Merosotnya feodalisme, menyusutnya kaum aristokrat, ditandai dengan bangunan baru yang meniru kebesaran istana atau vila-vila kaum bangsawan abad pertengahan. Gejolak sosial menuntut pengamanan bangunan. Pencurian dan penjarahan perlu dicegah dengan pola bangunan yang kokoh. Kelompok/*clan*, atau keluarga-keluarga kaya atau daerah tertentu, seringkali menghasilkan gaya tersendiri. Kepala kolom/*capital*, merupakan tempat untuk menampilkan ciri atau kebesaran tertentu. Gaya neo-klasik membuka kebebasan untuk mengabstraksikan pola-pola standard, seperti relung tanduk pada gaya ionik—yang sesungguhnya memiliki rumus matematis yang pelik dan canggih—misalnya, dibuat bersegi-segi, dan itulah yang terjadi pada kepala tiang greko-roman DJB Bandung, dengan tambahan rumbai-rumbai tanaman lokal.

Pola ragam hias/ornamen yang diterapkan dapat dikatakan sebagai wujud adaptasi kultural, di samping adaptasi terhadap iklim dan

ketersediaan bahan-bahan bangunan yang lebih bersifat fungsional dan objektif. Secara spesifik, meskipun semangat konseptualnya berbeda, pendekatan seperti ini merupakan awal dari apa yang kemudian – pada masa jauh sesudah era kolonial– disebut ***regionalisme-kritis***, yaitu tanggapan konseptual terhadap gejala globalisasi yang menelan habis ciri-ciri lokal. Penghargaan kepada unsur-unsur lokal, seperti diperlihatkan oleh Cuypers melalui pola-pola ragam hias, pengendalian batas-batas—area transisi—dari interior ke eksterior dengan teras-teras di sisi kiri-kanan perancangan awalnya, misalnya, merupakan cikal-bakal pendekatan *regionalisme-kritis* itu.

Hiasan pada ujung-ujung jurai atap perisainya, memperlihatkan keakrabannya dengan ragam hias Hindu. Penempatannya, dan sampai batas-batas tertentu juga sosok, pola, motif ragam hiasnya, padu dengan bangunan utamanya, bertindak sebagai pengikut, ***subordinate*** pada dalil dan kaidah neo-klasik. Begitu pula dengan pilihan motif kaca patri yang ada sekarang.[6] Apa dan bagaimanapun wujudnya, hal itu mencerminkan nafas gaya arsitekturnya.

Dalam perjalanan waktu, Gedung DJB telah mengalami perluasan, termasuk di ruang khasanahnya ("khasanah perang") yang berada 5-7 meter di bawah permukaan tanah. Perluasan terbesar berupa bangunan modern bertingkat 7 yang dibangun tahun 1990 di sebelah timur, atau di belakang gedung DJB. Halaman yang luas, dan lingkungan hijau Taman Dewi Sartika di sebelah utaranya, telah menjaga ketenangan suasana dan menjamin keanggunan penampilannya di tengah hiruk-pikuk lalu lintas kota Bandung. Sekarang, Gedung DJB Bandung awal, yang tampak tegar 'tak lekang di panas, tak lapuk di hujan' itu berdiri di lokasinya, dengan relung di atas jenjang anak-tangga pengantar ke pintu masuk utamanya yang berhiaskan abstraksi makara di puncaknya, seperti ***boma*** di gapura bangunan suci di Bali, senantiasa hadir dan siap menyambut para pengunjung ruang pamer koleksi antiknya.

Pertemuan antara balok/***horisontal*** dan kolom/***vertikal*** pada setiap titik pertemuannya terlihat konsisten. Tampilan detail ornamen pada

6 Menurut catatan di dalam buku Preserving and Architectural Heritage, terbitan Bank Indonesia Bandung, 2007, motif kaca patri yang asli tidak diketahui bentuk dan keberadaannya sekarang

pertemuan antara balok dan kolom membawa paduan Eropa dan Hindia, sekalipun Eropa nyaris dominan. Pendekatan Cuypers tidak akan sampai pada apa yang dihasilkan dengan pendekatan radikal, seperti dianut McLaine Pont. Namun, kesetiaannya akan pemenuhan fungsional nyata dalam rona pencahayaan yang dicapai, seperti pembuatan langit-langit bangunan yang menyerupai langit sesungguhnya. Sinar cahaya matahari menyebar ke seantero ruang tanpa suhu teriknya. Pengalamannya yang lengkap itulah yang mampu menetapkan ukuran tinggi ruang yang pas, bukan hanya dalam ukuran namun terlebih dalam suasana (*ambience*) yang dihasilkan.

Gambar 7.18. Interior Langit-Langit Gedung De Javasche Bank Bandung

Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2017

Gambar 7.19. Interior Langit-Langit Gedung De Javasche Bank Bandung

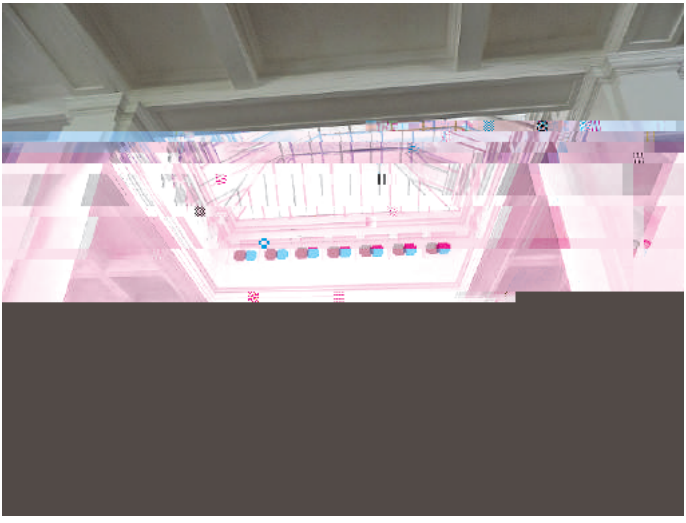

Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2017

Masalah kesadaran sejarah di era globalisasi ini merupakan isu utama dalam upaya pelestarian. Kata kunci yang menjadi kepala berita, 'melawan lupa', tidak dapat dipandang sepele. Telah dikatakan orang, bahwa kesadaran sejarah itu merupakan sikap mental. Sikap mental adalah sikap bentukan baru, bukan bawaan, dan berarti bagian dari pendidikan, bagian dari proses enkulturasi yang mulai bekerja begitu seseorang dilahirkan hingga mati. Sebagaimana proses terbentuknya suatu tradisi, terbentuknya kesadaran sejarah pun membutuhkan perangkat kelembagaan untuk menjamin pembentukan budaya dan kemudian mengawal keberadaannya. Pengetahuan dan penguasaan akan sejarah merupakan hal yang esensial. Pokok-pokok kaidah dan akidahnya bersifat sangat kontekstual. Dengan demikian, upaya penegakkannya merupakan kerja sepanjang hayat.

Di antara 100 Bangunan Cagar Budaya di Bandung, keberadaannya dijamin Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009. Ini adalah langkah pertama untuk menjamin kelestarian artefak budaya. Namun, sebagaimana halnya dengan tindakan pemeliharaan dan perawatan, melestarikan adalah satu hal, sementara memberi kesempatan untuk tetap eksis merupakan hal yang lain sama sekali.

Gambar 7.20. Plakat Cagar Budaya Nasional

Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2017

Gambar 7.21. Peresmian Gedung

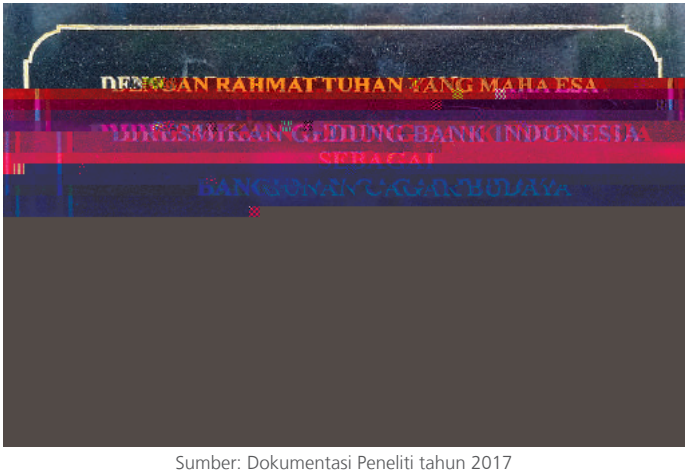

Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2017

Mengacu ke Pakat Burra (1979), *Burra Charter,* rumusan terpenting, di atas ketentuan dan ketetapan lainnya, adalah keputusan atau pilihan akan apa yang dikategorikan sebagai ***cultural significance.*** Penetapan kategori ini tidak lepas dari ***kesadaran sejarah.*** Tidak terlepas pula dari ***keterlibatan*** dan ***kepedulian*** para pakar dan seluruh pemangku kepentingannya. Menurut pengalaman, penanganannya tidak dapat mengandalkan semata-mata pada lembaga resmi/formal pemerintah saja. Berbagai laporan kasus pengalaman antar negara memperlihatkan bahwa kehadiran organisasi/lembaga swadaya masyarakat / LSM pun merupakan keharusan, kalau tidak mau mengalami kegagalan.

Langkah-langkah umum di bawah ini merupakan salah satu kemungkinan yang dapat dipakai sebagai titik tolak perumusan kebijakan pelestarian sebagai mana disarankan *Burra Charter:*

Gambar 7.22. Proses Piagam Burra

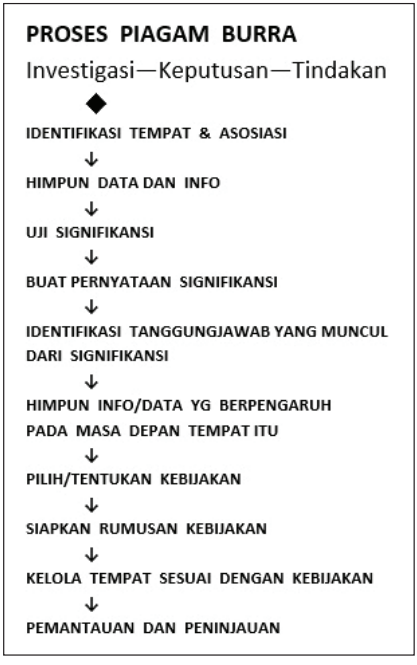

Sumber:Berdasarkan Naskah Terjemahan: *Piagam Burra Piagam Icomos Australia* Oleh Rika Susanto Hasti TarekatAkses Via *Google*Tgl. 19 Maret 2010

Sekadar sebagai gambaran, dapatlah kiranya diketengahkan organisasi yang menamakan dirinya dengan Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung, atau *Bandung Heritage Society*, merupakan organisasi kemasyarakatan yang memelopori kegiatan pelestarian budaya pada umumnya dan lingkungan binaan—terutama arsitektur—pada khususnya. Gagasan-gagasannya mulai menembus ke perumusan kebijakan pembangunan kota melalui keterlibatannya pada sidang-sidang proses perizinan pembangunan gedung. Melalui sidang-sidang itu, PPBB/ *BHS* secara terus menerus mengingatkan dan mengawal berbagai aset lingkungan binaan yang memang perlu dilindungi.

Kelengkapan peraturan dan perundangan merupakan satu hal—sejauh mungkin diupayakan kerapat-ketatannya agar tidak menyisakan peluang apa pun bagi pelanggarannya—sementara hal lainnya adalah kesigapan dalam pemutakhirannya, bukan hanya dalam bentuk pencegahan atau pelarangannya saja, melainkan juga berkenaan dengan berbagai bentuk sanksi dan hukumannya. Peraturan perundangan yang usang merupakan musuh program pelestarian.

BAB 8
EPILOG

Geliat Bandung sebagai kota kolonial modern pada awal abad ke-20 adalah satu bukti perencanaan yang baik dalam penataan sebuah kota. Bandung merupakan salah satu dari sedikit kota di Indonesia yang memiliki rancang bangun yang jelas, mulai dari *een klein berg dessa* atau desa kecil di pegunungan hingga mendapat julukan *Paris van Java*, dan sekarang ini sedang gencar menuju *Smart City*. Dalam karya Haryoto Kunto yang ditulis tatkala ia mengenang Bandung sebagai 'Kota Ideal di Alam Tropis', dimasukan sepenggal sajak berbahasa Belanda berbunyi: "*Bandoeng is een mooie kotta. Die U veel begeerlijks bidet Waar. U alles vindt behalve*. *Den malaria-muskiet. Bandoeng heft zijn fraaie huizen. En goedkoop amusment. Bandung is welhaast bij ieder. Door zijn koel klimaat bekend.*" – "Bandung, kota nan jelita. Sajikan kepuasan bagi anda. Anda akan peroleh apa saja. Kecuali nyamuk malaria. Bandung memiliki rumah-rumah indah memesona. Hiburan murah selalu tersedia. Bandung selalu jadi tutur kata. Mashyur karena sejuk nyaman hawanya".

Mengenang kota Bandung zaman '*baheula*' seakan tidak akan habis pesonanya. Kala menjadi *Paris van Java*, Bandung menjadi kota impian bagi penduduk Eropa yang datang dari jauh ke negeri tropis. Hawanya yang sejuk, infrastruktur kota yang memadai, pusat hiburan dan berbagai macam atraksi alam tersaji lengkap dan terjangkau bagi siapapun. Keunggulan ini tidak diragukan lagi. Bandung adalah kota *Meeting Insentive Convention Exibhition* (MICE)-nya masa kolonial. Dapat dilihat bahwa kegiatan berskala international pernah diadakan di kota ini, seperti pertemuan para *Suikerplanters* tahun 1887, 'Kongres Teh Sedunia' tahun 1924, *Fourth Pacific Science Congress* tahun 1929, dan yang paling mashyur adalah Konferensi Asia Afrika (KAA) yang membuat seluruh

mata dari penjuru dunia melihat ke Bandung. Dapat dikatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan menata kota ini adalah harmoni antara pemerintah dan penduduknya yang saling bahu membahu membangun kota ideal.

Jika sudah di Bandung, para pelancong berkebangsaan Eropa barangkali tidak perlu pergi keluar kota untuk menikmati liburannya. Berkeliling sepanjang Jalan Braga bisa jadi hiburan menikmati negeri tropis bernuansa Eropa. Oleh karena *landmark* Kota Bandung sebagai *de meest westerse stad* (kota paling bernuansa Barat) terkonsentrasi di jalan ini, ditandai dengan berdirinya gedung megah yang dibangun arsitek-arsitek terkemuka dari Eropa. Salah satunya adalah gedung De Javasche Bank yang selesai dibangun tahun 1918 oleh arsitek sekaligus kontraktor Belanda "Fermont & Cuypers". Bangunan bergaya neoklasik di ujung Jalan Braga ini menjadi salah satu *heritage* warga Kota Bandung saat ini. Tentunya, masih banyak lagi deretan gedung bergaya Eropa di Bandung serpeti De Vries, Hellerman Department Store, Escompto Bank, Societiet Concordia, Societeit Ons Genoegen dan lain sebagainya. Umumnya, pada masa lalu bangunan ini berfungsi sebagai kafe, butik, bioskop, kegiatan perbankan, dan perdagangan.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keelokan kota Bandung pada awal pendiriannya lebih banyak ditujukan kepada golongan Eropa. Politik pembagian golongan penduduk berdasar latar belakang rasial menempatkan pribumi berada pada tingkat paling bawah. Aturan ini berlaku di seluruh Hindia Belanda. Meski demikian, Bandung tetap menjadi rumah yang ramah bagi siapapun, termasuk pribumi. Bagi masyarakat golongan Bumiputera, disediakan *Feestterrein* (taman hiburan rakyat) atau biasa juga disebut "*pistre varia*". Di alun-alun kota juga sering mengadakan berbagai acara pada akhir pekan dan rekreasi kuliner pada setiap harinya. Jika masyarakat golongan Eropa memiliki Societeit Concordia sebagai tempat berkumpul, maka bagi masyarakat Bumiputera tertentu juga tersedia Societeit Mardi Harjo.

Dengan reputasi yang baik serta infrastruktur kota modern yang lengkap, Bandung sempat diusulkan sebagai ibukota Hindia Belanda. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah melihat

bahwa Bandung memiliki potensi untuk menyandang predikat sebagai ibukota negara. Lokasi yang strategis dan fasilitas infrastruktur yang mapan tidak diragukan lagi menjadi alasannya. Akan tetapi, meski sudah dibuat rencana dan beberapa bangunan infrastruktur telah didirikan, tetapi pada akhirnya pemindahan ibukota tersebut dibatalkan karena krisis *malaise* yang melanda ekonomi seluruh dunia dan berdampak pada kondisi ekonomi di Hindia Belanda.

Pembangunan benar-benar terhenti tatkala serangan dari utara datang ke bumi Nusantara. Perang Dunia II melebarkan apinya hingga Pasifik, yang didasari ambisi Jepang menguasai Asia Timur Raya. Tanpa waktu lama, wilayah-wilayah koloni Eropa mulai dari Indocina sampai Malaya jatuh ke tangan Jepang. Sampai Maret tahun 1942, nasib Hindia Belanda berada di Kota Bandung. Pada waktu itu ibukota Batavia sudah dikosongkan dan instansi pemerintahan mengungsi ke Bandung yang berada di pedalaman. Pemerintah Belanda menjadikan Bandung sebagai tembok pertahanan terakhir Hindia Belanda di detik-detik terakhir kejatuhannya. Tidak lama berselang, Jepang berhasil memasuki dan menguasai Bandung. Kejatuhan Bandung ke tangan Jepang, menandai kejatuhan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Pada masa itu, Bandung yang merupakan kota impian bagi penduduk Eropa, berubah menjadi kamp konsentrasi terbesar seantero Jawa. Banyak arsitek dan ahli-ahli Belanda yang meninggal dalam kamp tersebut. Tidak hanya orang Eropa yang menderita, rakyat pribumi juga ikut merasakan hal yang sama karena harus merasakan paceklik kebutuhan pokok ditambah kewajiban menyerahkan hasil bumi serta kerja paksa demi kepentingan perang Jepang.

Memasuki masa kemerdekaan, pembangunan di Kota Bandung mengalami kemandekan dikarenakan situasi yang belum stabil. Pembangunan kota terhenti karena seluruh perhatian ditujukan kepada upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir Belanda dari bumi Nusantara. Infrastruktur-infrastruktur kota yang telah mapan sejak masa sebelum perang harus hancur akibat peperangan. Ditambah lagi, terjadi pembakaran dan perusakan sebagian kota dengan tujuan agar Belanda tidak dapat menggunakan fasilitas kota yang hancur ketika menduduki Bandung.

Bandung tak berhenti berbenah. Tidak lama setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, kehancuran ekonomi akibat perang segera dilakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi. Pembangunan-pembangunan kota dilakukan oleh Pemerintah RI untuk mengembalikan wajah Bandung seperti sedia kala. Rekonstruksi dan pemulihan kondisi ekonomi kota Bandung semakin gencar ketika Bandung dipersiapkan menjadi kota penyelenggara perhelatan besar berkelas dunia. Bandung semakin bersolek untuk menyambut tamu kehormatan Konferensi Asia Afrika pada 1955. Gedung Societeit Concordia pun disulap menjadi tempat perhelatan akbar tersebut. Jalanan di sepanjang *grotepostweg* dan Braga dihias agar semakin apik dan membangkitkan kesan Bandung sebagai kota modern yang terkenal beberapa dekade silam.

Setelah menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika, kota Bandung seperti mengalami kelesuan dalam hal pembangunan. Kota Bandung tidak jauh bedanya dengan kota-kota besar dengan segala macam masalah yang ada, seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, pemukiman kumuh dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat disayangkan, karena Bandung memiliki serangkaian *masterplan* yang sama baiknya dengan masa kolonial. Padahal, sejak tahun 1971 hingga 1989, Bandung memiliki berbagai macam proyek untuk mengurai benang kusut permasalahan yang ada. Namun, lagi-lagi terkendala berbagai kepentingan yang membuat proyek-proyek pembagunan kota jadi terhambat. Terlepas dari stigma politik yang selalu jadi kambing hitam dalam pembangunan, permasalahan utama di Kota Bandung pada era kontemporer adalah pudarnya harmoni antara warga dan pemerintah Kota Bandung dalam menumbuhkan rasa memiliki terhadap kotanya. Jika belajar dari masa lampau, gelar Bandung *Paris van Java* tidak akan bisa disematkan di kota ini jika penduduk Pribumi, Timur Asing dan Eropa, tidak sama-sama menjaga kelestarian, kebersihan dan ketertiban kotanya.

Oleh karena itu, tugas utama warga dan pemerintah Kota Bandung adalah menumbuhkan kembali jatidiri dan rasa memiliki terhadap kota tempat mereka bermukim. Belum lama ini, Bandung juga semakin berbenah untuk menjadi kota berkelas dunia. Padahal sejarah mencatat, Bandung pernah menjadi kota yang disandingkan dengan kota-kota di Eropa seperti

Amsterdam, London, Barcelona, dan lain sebagainya. Belakangan, warga Bandung patut berbangga, Kota Bandung mendapatkan gelar sebagai Kota Kreatif dari sebuah lembaga internasional seperti British Council. Hal itu dikarenakan pesatnya industri kreatif yang dimotori berbagai komunitas dengan mengembangkan usaha sekaligus memadukannya dengan budaya lokal. Belum lagi rancangan Bandung sebagai *Smart City* yang digulirkan Walikota Ridwan Kamil. Nantinya, berbagai macam aplikasi dibuat untuk memudahkan warga kota dalam mengakses layanan publik, pengaduan, serta transparansi aparat pemerintah. Kolaborasi antara teknologi, sumber daya manusia dan kearifan lokal menjadikan Kota Bandung benar-benar sebagai kota modern, yang bukan hanya berada di masa lalu. Bukan suatu hal yang mustahil Bandung memiliki mimpi jadi seperti '*Silicon Valley*' di California, Amerika Serikat.

Di tengah gegap gempita geliat dalam pembangunan Kota Bandung, Bank Indonesia sebagai mitra kerja pemerintah daerah turut berperan dalam upaya tersebut. Bank Indonesia hadir dalam berbagai kesempatan untuk memberi makna terhadap tonggak-tonggak perubahan Kota Bandung. Sudah sejak masa kolonial, De Javasche Bank (DJB) memainkan peran dalam pengembangan Kota Bandung melalui fungsi dan tugasnya sebagai bank sirkulasi milik pemerintah kolonial. DJB bersama pemerintah *Gemeente* Bandung mengawal perkembangan Kota Bandung agar menjadi kota kolonial modern berkelas internasional yang sejajar dengan kota-kota kolonial modern lainnya di Asia, seperti Hongkong, Shanghai, Singapura, dan lain sebagainya.

Upaya-upaya mengawal pembangunan Kota Bandung berlanjut pada periode saat ini. Bank Indonesia terus berperan dalam perkembangan Kota Bandung melalui program-program yang dicanangkan Bank Indonesia. Program tersebut memiliki tujuan selain untuk mengembangkan kota, juga untuk meningkatkan ekonomi Kota Bandung agar menjadi kota unggulan di Indonesia. Melalui program-program pengembangan UMKM dan pemberian bantuan yang langsung menyentuh masyarakat, Bank Indonesia berupaya memperbaiki ekonomi pada tingkat akar rumput.

Bagaimanapun, masih banyak yang harus dilakukan. Bandung memiliki potensi yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang harus

lebih dikembangkan. Bank Indonesia menyadari bahwa jika dahulu potensi Bandung adalah alamnya yang subur, asri dan memikat hati, maka saat ini potensi utama Kota Bandung adalah sumber daya manusianya. Untuk itu, Bank Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Dalam konteks saat ini, semua harus ikut berperan dan bekerja sama menjadi suatu gerakan yang sinergis dan solid untuk bersama-sama membangun Kota Bandung. Perubahan Kota Bandung dari tradisional menuju modern, tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur kota, melainkan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya. Dengan demikian, tidak hanya wujud kotanya yang modern, tetapi juga manusianya.

DAFTAR SUMBER

1. Arsip

ANRI, Koleksi Arsip Priangan, *Algemeen Verslag 1838*, Bundel No. 3/3.

ANRI, Koleksi Arsip Priangan, *Staat aantoonende de bevolking in de Resiedentie Preanger Regentschappen beneevens de Uitgestrektheid der Rijstvelden en hoeveelheid der Paddie alsmeede het Beestiaal over het Jaar 1800 Negen Entwintig*, Bundel No. 2/3.).

ANRI, *Besluit* 11 Oktober 1856, No. 84.

ANRI, Koleksi Arsip Priangan, *Statistiek der Residentie Preanger Regentschappen 1864*, Bundel No. 30/6

ANRI, *Besluit* 7 Agustus 1864 No. 18. *Naamlijst der Europesche Inwoners en unne Afstammelingen van Het Mannelijk Geslacht*. 1871. Batavia.

Arsip Bank Indonesia, *Sekilas Pendirian Kantor Cabang Bank Indonesia*

Arsip Bank Indonesia, *Penyelamatan Persediaan Emas De Javasche Bank Masa Perang Dunia II*

Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 10 Juni 1912

Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 25 Agustus 1912

Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 18 Februari 1913

Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 31 Juli 1925

Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 10 Desember 1928

Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 13 April 1931

Arsip Bank Indonesia, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Bandoeng*, 15 April 1950).

Jaarstukken Bandoeng 1921 – 1930.

Jaarstukken Bandoeng 1922-1923.

Handelsvereniging te Bandoeng 1923.

Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1827 No.111

Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1906, No. 121

Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1916, No. 65

Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1926 No. 365

Staatsblad van Nederlandsch-Indie over het Jaar 1926 No. 369

Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng, 1919.

Verslag der Staatsspoor-en Tramwegen in Nederlandsch-Indie Jrg. 1925.

2. Koran dan Majalah

Mooi Bandung, 1940.

Kompas, 5 Febuari 1989

Kompas, 2 April 1993.

Kompas, 12 Januari 1995.

Kompas, 21 Agustus 2004.

Kompas, 30 Juli 2004b

Kompas. 3 September 2016.

Kompas, 13 Febuari 2016b.

Pikiran Rakjat, 23 September 1957.

Pikiran Rakjat, 9 Juli 1957.

Pikiran Rakjat, 10 Oktober 1957.

Pikiran Rakjat, 21 Oktober 1957.

Pikiran Rakjat, 1 November 1957.

Pikiran Rakjat, 11 Desember 1957.

Pikiran Rakyat, 31 Mei 1990.

Pikiran Rakyat, 28 Febuari 2003.

Pikiran Rakyat, 14 Januari 2003b.

Pikiran Rakyat, 25 September 2005.

Pikiran Rakyat, 7 November 2006.

Pikiran Rakyat, 27 Maret 2009

Pikiran Rakyat. 20 November 2014

Pikiran Rakyat. 26 November 2015.

*Pikiran Rakya*t. 26 Oktober 2015b.

Pikiran Rakyat. 25 Juni 2016.

Pikiran Rakyat. 23 Februari 2016b.

Tjahaja, Juli 1942.

3. Buku dan Jurnal

Arsip Nasional Republik Indonesia. 1976. *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat*). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Abdulgani, Roeslan. 1980. *The Bandung Connection: Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955.* Jakarta: Gunung Agung.

Albino, Vito, Umberto Berardi and Rosa Maria Dangelico. 2015. "Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives", *Journal of Urban Technology*, Vol. 22, No. 1, 3–21.

Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung. 2005. *Sejarah Kabupaten Bandung; Konsentrasi Kajian Kabupaten Bandung dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung.

Bank Indonesia Bandung. 1992. *Sekilas Sejarah Pendirian Kantor Cabang Bank Indonesia 30 Juni 1909*. Jakarta.

Booth, Anne. 1998. *The Indonesian Economy in the Nineteenth Centuries: A History of Missed Opportunities.* London: Palgrave Macmillan Press.

Bosma, Ulbe. 2007. The Cultivation System (1830-1870) and Its Private Entrepreneurs on Colonial Java. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 38, No. 2. Cambridge University Press on behalf of Department of History, NationalUniversity of Singapore.

Claver, Alexander. 2014. *Dutch Commerce and Chinese Merchants in Java Colonial Relationships in Trade and Finance 1800–1942.* Leiden: Brill.

Dana, Djefry W. 1990. *Ciri Perancangan Kota Bandung*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Day, Clive. 1975. *The Policy and Administration of The Dutch in Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Haan, F. de. 1910. *Priangan; De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. Eerste Deel. Batavia: G. Kolff & Co.

_____. 1911. *Priangan; De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. Tweede Deel. Batavia: G. Kolff & Co.

_____. 1912. *Priangan; De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. Deerde Deel. Batavia: G. Kolff & Co.

Dienaputra, Reiza D. 2004. *Cianjur: Antara Priangan dan Buitenzorg (Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangannya Hingga 1942)*. Bandung: Prolitera.

Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung. (2002). *Selayang Pandang Kota Bandung*. Bandung: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung.

Djiwandono, Soedradjad, dkk. 2006. *Sejarah Bank Indonesia Jilid 1 sampai 5*. Jakarta: Bank Indonesia.

Doorn, Jacques van. 1983. *The Emergence of a Dependent Economy: Consequences of the Opening of West Priangan, Java, to the Process of Modernization.* Rotterdam: Comparative Asian Studies Programme.

Ekadjati, Edi.S., dkk. 1978/1919. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat. Bandung: Depdikbud.

_____. (1991). *Historiografi Priangan*. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.

Furnivall, J.S. 2009. Hindia Belanda: Sejarah Tentang Ekonomi Majemuk. Jakarta: Freedom Institute.

Handinoto. 1996. *Perkembangan kota dan arsistektur colonial Belanda di Surabaya, 1870-1940*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Hardjasaputra, A. Sobana (ed.). 2000. *Sejarah Kota Bandung 1906-1945*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.

Hardjasaputra, A. Sobana. 2000. *"Bandung", dalam Lubis, Nina H., Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*. Jatinangor: Alqaprint.

Hardjasaputra, A. Sobana. 2002. *Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906, Disertasi*. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Hartono, Noek. 1976. *Bank Indonesia; Sejarah Lahir & Pertumbuhannya*. Jakarta: Bank Indonesia.

Holle, K.F. 1868. "Geschiedenis der Preanger-Regentschappen". TBG, XVIII

Iskandar, Johan, Budiawati S. Iskandar. (2011). *Agroekosistem Orang Sunda.* Bandung: PT Kiblat Buku Utama.

Katam, Sudarsono. 2014. *Kereta Api di Priangan Tempo Doeloe*. Bandung: PT Pustaka Jaya.

Kantor Sensus & Statistik Jawa Barat. 1972. *Statistik Jawa Barat Tahun 1971*. Bandung.

Kantor Sensus & Statistik Jawa Barat. 1979. *Statistik Jawa Barat Tahun 1977*. Bandung.

Kantor Sensus & Statistik Jawa Barat. 1980. *Statistik Jawa Barat Tahun 1979*. Bandung.

Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid 1*, Jakarta: Gramedia.

Katam, Sudarsono. 2005. *Album Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung: Nav Press Indonesia.

Katam, Sudarsono. 2006. *Bandung Kilas Peristiwa di Mata Filatelis: Sebuah Wisata Sejarah*. Bandung Kiblat.

Kosoh, Suwarno, Syafei. (1978). *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Bandung: Pemerintah Daerah Jawa Barat.

Kementerian Penerangan RI. 1953. *Propinsi Djawa Barat*. Djakarta: Kemneterian Penerangan RI.

Kern, R.A. 1898. Geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Kort Overzicht Bandung: De Vries & Fabricius.

Klein, Jacob Wouter de. 1931. Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn Nawerking. Proefschrift. Delbt: N.V. Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr.

Koloniaal Verslag, 1890-1905.

Kunto, Haryoto. (1996). *Balai Agung di Kota Bandung; Riwayat Gedong Sate dan Gedong Pakuan*. Bandung: Penerbit Granesia.

_____. (1989). *Savoy Homann; Panghegar Heritage Hotel Bandung*. Bandung: PT Panghegar Group.

_____. (1986). *Semerbak Bunga di Bandung Raya*. Bandung: PT Granesia Bandung.

_____. (1995). *Tempo Doeloe Cepat Berlalu; Nasib Bangunan Lama di Kota Bandung*. Bandung: PT Granesia Bandung.

_____. (1985). *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung: PT Granesia.

Kusuma, Erwin. 2014. *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia: Fragmen Sejarah Bank Sentral Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Lith, P.A. van der, Spaan, A.J., Fokkens, F. 1917. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.* 'sGravenhage: Martinus Nijhoff.

Lubis, Nina Herlina, dkk. (2000). *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: PT Alqaprint Jatinangor.

_____. (2016). *Sejarah Kota Bandung*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.

Mulyana, Agus. 2005. MELINTASI PEGUNUNGAN, PEDARATAN, HINGGA RAWA-RAWA: Pembangunan Jalan Kereta Api di Priangan 1878 – 1924. Disertasi, Universitas Indonesia.

Nas, P.J.M. 1979. Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.

Noorduyn, J. 1982. "Bujangga Manik's Journeys Through Java: Topographical Data From an Old Sundanese Source". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 138, 4de Afl.* pp. 413-442. Brill.

Nugraha, Awaludin. 2003. Industri Pariwisata di Keresidenan Priangan (1870- 1942). Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Onghokham. 2014. *Runtuhnya Hindia Belanda.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Panigoro, Yani, *et al*. (2006). *Bank Saudara 1906-2006*. Bandung: Yayasan Yusuf Panigoro.

Paulus, B.P. 1979. Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Bandung: Alumni.

Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia VI; Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (±1942-1998*). Jakarta: PT Balai Pustaka.

Pronk, L. 1880. De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden, Leiden: M. Dubbeldeman, 1929Rees, Otto van, Overzigt van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen. Batavia.

Purwesti, Nadia, dkk. 2012. Gedung Bank Indonesia: Jejak Arsitektur Dalam Menggapai Kemakmuran Negeri. Jakarta: Jayakarta Agung Offset.

Rees, Otto van. 1880. Overzigt van de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen. Batavia.

Regeerings Almanak van Nederlandsch-Indie. 1928. Batavia: Landsdrukkerij.

Reitsma, S.A. 1912. De Wegen in de Preanger. Bandoeng: G. Kolff & Co.

Reitsma, S.A. 1928. Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor en Tramwegen. Weltevreden: G. Kolff & Co.

Reitsma, S.A. en Hoogland, W.H. 1925. Gids van Bandoeng en Midden Priangan. Amterdam: Bijgewerkte Druk.

Reitsma, S. A. *Bandoeng The Mountain City of Netherlands India*. Batavia: G. Kolff & Co.

Santoso, R. Hardjo. 2007. "Penyelamatan Persediaan Emas De Javasche Bank Masa Perang Dunia II" (Naskah Tidak Diterbitkan). Jakarta.

Schoffer, Ivo. 1973. A Short History of the Netherlands. Amsterdam: Allert de Lange bv.

Siregar, Sandy Aminuddin. 1990. Bandung: The Architecture of a City in Development. Leuven: Department Architectuur Katholieke Universiteit Leuven.

Sitaresmi, Ratnayu, Aan Abdurachman, Ristadi Widodo Kinartojo, Ummy Latifah Widodo. 2013. *Saya Pilih Mengungsi; Pengorbanan Rakyat Bandung untuk Kedaulatan*. Bandung: Penerbit Bunaya.

Sjoberg, Gideon. 1965. *The Preindustrial City, Past and Present*. New York: The Free Press.

Subarkah, Ahmad Perkasa, dkk. (2008). *Sejarah Bank Tunggal 1965-1968.* Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia.

Tim PP-PPBI. 2013. *Sejarah Perkembangan Kantor Bank Indonesia Bandung*. Bandung: Sarana Media.

Tim Penulis Biro Kredit Bank Indonesia. (2001). *Sejarah Peranan Bank Indonesia dalam Perkembangan Usaha Kecil*. Jakarta: Bank Indonesia.

Tim Penulis LP3ES. (1995). *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.

Unit Khusus Museum Bank Indonesia. 1996. *Sejarah Singkat Bank Indonesia Bandung*. Jakarta: LP3ES.

Volkstelling 1930: Voorloopige Uitkomsten ie Gedeel te Java en Madura. 1931. Batavia Centrum: Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel.

Voskuil, Robert P.G.A. 1996. *Bandoeng, Beeld van een Stad*. Purmerend: Asia Maior.

Artikel Internet

Bank Indonesia, 2012, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/ diakes pada 17 Juni 2017

Bank Indonesia, 2013a, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/ diakses pada 17 Juni 2017

Bank Indonesia, 2013b, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita diakses pada 19 Juni 2017

Bank Indonesia, 2013c, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/ diakses pada 17 Juni 2017

Bank Indonesia, 2015, http://internal.corp.bi.go.id/satker/Bd/Berita/ diakses pada 14 Desember 2015

"Gambaran Umum Mengenai KBU", 2017, http://diskimrum.jabarprov.go.id/kbu/, diakses pada 31 Mei 2017.

Krisna Mukti, 2005, http://www.itb.ac.id/news/read/543/home/konflik-punclut-mempertimbangkan-lingkungan-dalam-bisnis-2, diakses pada 2 Juni 2017

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "Data Penduduk Bandung", www.jabarprov.go.id diakses 2 Juni 2017